

MASTERPLAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG 2021-2026





Kata Pengantar

Puji syukur kami panjarkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung tahun anggaran 2021 dapat selesai disusun dan disampaikan.

Penyusunan masterplan perekonomian ini dimaksudkan untuk merumuskan arah perencanaan sektor perekonomian dan dilengkapi dengan kebijakan kewilayahannya sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di sektor perekonomian.

Laporan masterplan ini memuat aspek kajian yang terdiri atas: pemetaan pengelompokan/*clustering* kewilayahannya berdasarkan potensinya dalam bentuk spasial; penyusunan analisis peluang dan permasalahan pengembangan sektor ekonomi unggulan; serta, perumusan arah dan kebijakan pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Bandung.

Masterplan ini berfokus pada 4 sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bandung yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. Masterplan ini disusun dalam untuk jangka waktu perencanaan 5 tahun, dengan harapan dapat mewujudkan Kabupaten Bandung yang yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) dengan pengembangan perekonomian yang inovatif dan berdayasaing.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai kita semua.

Kabupaten Bandung, Mei 2021
Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Investasi
Bappeda Kabupaten Bandung

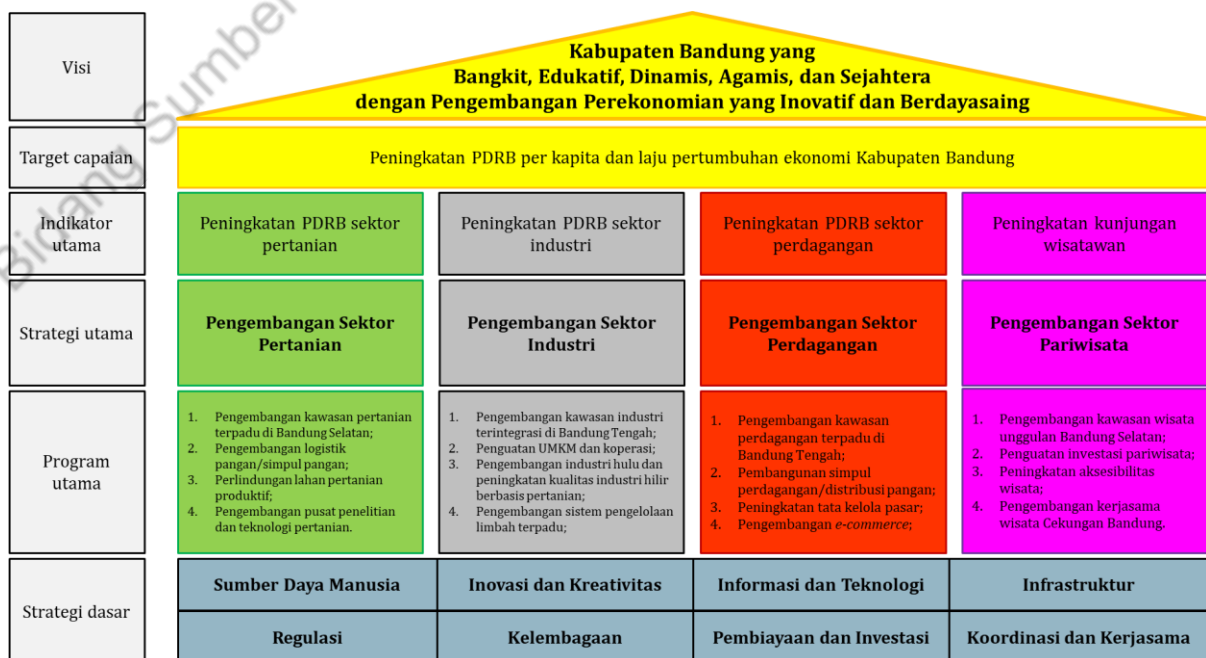
Ringkasan Eksekutif

Penyusunan masterplan perekonomian merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengoptimalkan pengembangan potensi perekonomian daerah dalam mewujudkan peningkatan daya saing wilayah Kabupaten Bandung. Masterplan perekonomian ini difokuskan pada empat sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bandung yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor pariwisata.

Konsep pengembangan masterplan ini adalah mengoptimalkan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang telah terbentuk di Kabupaten Bandung, serta mendorong kerjasama perekonomian desa dan kota melalui simpul-simpul inovasi. Simpul inovasi merupakan sarana untuk mengorkestrasikan sumber daya ekonomi, serta sebagai elemen penting pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah sebagai wadah penciptaan inovasi yang dapat mengintegrasikan aktivitas ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

Masterplan perekonomian direncanakan melalui tiga tahapan dalam kurun waktu lima/enam tahun. Tahap pertama adalah tahap pre-adopsi pada tahun pertama, yang dimaksudkan untuk persiapan dan kolaborasi. Tahap kedua adalah tahap adopsi, berlangsung selama tiga tahun, yang fokus pada mewujudkan rencana pengembangan sektor ekonomi. Tahap ketiga adalah tahap pasca-adopsi, berlangsung pada tahun terakhir, yang fokus dalam melakukan evaluasi dan perencanaan untuk masa depan.

Visi masterplan perekonomian Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 adalah **“Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera dengan Pengembangan Perekonomian yang Inovatif dan Berdayasaing”**. Visi tersebut memiliki target capaian peningkatan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung dengan empat indikator utama yaitu peningkatan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, PDRB sektor industri pengolahan, PDRB sektor perdagangan, serta kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung.



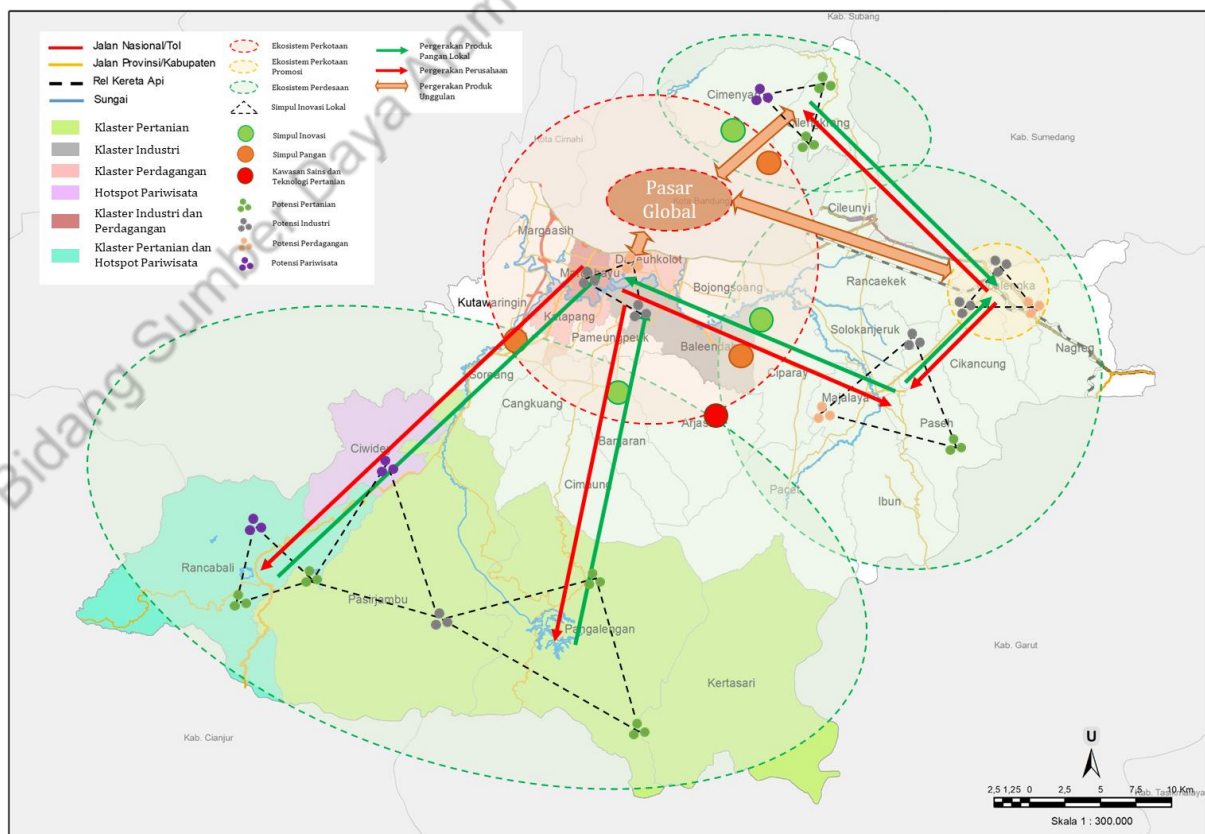
Hasil identifikasi potensi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa terdapat kluster pertanian di bagian Selatan, kluster industri dan perdagangan di bagian Tengah, serta *hotspots* pariwisata di bagian Selatan. Dari kluster tersebut kemudian dirumuskan dua ekosistem ekonomi yaitu ekosistem pedesaan dengan sektor unggulan pertanian dan pariwisata terdapat di bagian Selatan dan dua ekosistem penunjang di bagian Timur dan Utara, serta ekosistem perkotaan dengan sektor unggulan industri dan perdagangan yang terdapat di bagian Tengah, dengan ekosistem promosi di bagian Timur.

Dalam merangkai hubungan antara ekosistem pedesaan dan perkotaan, dikembangkan simpul kegiatan ekonomi. Simpul ini terdapat di tingkat lokal, yang menghubungkan potensi sektor ekonomi seperti pertanian dan pariwisata melalui agrowisata, pertanian dan industri makanan, serta industri dan perdagangan. Pada tingkat Kabupaten, dikembangkan simpul inovasi dan simpul pangan yang merupakan pusat

koleksi dan distribusi, serta pusat pengembangan produk ekonomi lokal Kabupaten Bandung. Simpul-simpul ini juga didukung oleh pengembangan kawasan sains dan teknologi pertanian Arjasari.

Secara konsep terdapat dua jenis pergerakan ekonomi yaitu pergerakan produk pangan lokal dari ekosistem desa ke kota, dan pergerakan perusahaan menengah besar dari ekosistem kota ke desa. Pergerakan ini perlu didukung dengan kualitas infrastruktur yang baik terutama jalan dan rel kereta api.

Strategi utama pelaksanaan masterplan ini meliputi; pengembangan kluster ekonomi unggulan di lokasi potensial, pengembangan simpul pangan dan inovasi, penguatan UMKM dan koperasi, serta penguatan investasi pariwisata. Diharapkan pada akhir tahun perencanaan masterplan dapat terwujud perekonomian Kabupaten Bandung yang inovatif dan berdayasaing, serta terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.



Daftar Isi

- ii Kata Pengantar
- iii Ringkasan Eksekutif
- v Daftar Isi
- viii Daftar Gambar
- ix Daftar Grafik
- x Daftar Tabel

1 Pendahuluan 1

- 2 Latar Belakang
- 2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
- 3 Ruang Lingkup
 - 3 Wilayah Perencanaan
 - 3 Substansi Masterplan
 - 4 Waktu Pelaksanaan
- 4 Alur Pikir
- 5 Metodologi Penyusunan Masterplan
 - 5 Tahapan Kegiatan
 - 6 Pengumpulan Data
 - 9 Analisis Data

11 Konsep Daya Saing dan Simpul Inovasi 2

- 12 Konsep Daya Saing Daerah
- 14 Konsep Pengembangan Ekosistem Simpul Inovasi

16 Tinjauan Rencana dan Kebijakan Perekonomian 3

- 17 **Tinjauan Kebijakan Nasional**
 - 17 RPJPN Tahun 2005-2025
 - 17 RPJMN Tahun 2020-2024
 - 18 RTRWN Tahun 2008-2028
 - 18 Rindekraf Tahun 2018-2025
 - 19 MEKSI Tahun 2019-2024
- 20 **Tinjauan Kebijakan Regional**
 - 20 RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
 - 21 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
 - 22 RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
 - 22 RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Tahun 2018-2037
 - 23 RENIP Metropolitan Bandung Raya Tahun 2015-2050
- 24 **Tinjauan Kebijakan Lokal**
 - 24 RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025
 - 27 Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
 - 28 RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036
 - 30 *Grand Design* Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung 2011-2015
- 32 **Tinjauan Kebijakan Sektoral**
 - 32 Pertanian dan Perkebunan
 - 34 Perdagangan
 - 37 Pariwisata

39 Gambaran Umum Ekonomi Wilayah

4

-
- 40 **Ekonomi Kabupaten Bandung dalam Konstelasi Regional**
 - 42 **Tipologi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat**
 - 43 **Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung**
 - 45 **Tinjauan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Bandung**
 - 45 Tipologi Klassen
 - 47 Analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic LQ* (DLQ)
 - 50 Analisis *Shift Share*
 - 52 **Simpulan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Bandung**
 - 54 **Tinjauan Analisis Koefisien Input-Output Tahun 2016**

59 Rumusan Potensi Sektor Ekonomi Unggulan

5

-
- 60 **Analisis Potensi Sektor Pertanian**
 - 60 Kinerja PDRB Sektor Pertanian
 - 61 Potensi Sektor Pertanian
 - 70 Keterkaitan Spasial Potensi Sektor Pertanian
 - 72 **Analisis Potensi Sektor Industri Pengolahan**
 - 72 Kinerja PDRB Sektor Industri
 - 74 Potensi Sektor Industri
 - 78 Keterkaitan Spasial Potensi Sektor Industri
 - 80 **Analisis Potensi Sektor Perdagangan**
 - 80 Kinerja PDRB Sektor Perdagangan
 - 82 Potensi Sektor Perdagangan
 - 84 Keterkaitan Spasial Potensi Sektor Perdagangan
 - 86 **Analisis Potensi Sektor Pariwisata**
 - 86 Kinerja Sektor Pariwisata
 - 88 Potensi Sektor Pariwisata
 - 91 Keterkaitan Spasial Sektor Pariwisata
 - 93 **Sintesis Klaster dan Hotspot dari Sektor Ekonomi Unggulan**

96 Rumusan Peluang dan Tantangan Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan

6

-
- 97 **Peluang dan Tantangan Sektor Pertanian**
 - 97 Peluang Pengembangan Sektor Pertanian
 - 99 Tantangan Pengembangan Sektor Pertanian
 - 99 **Peluang dan Tantangan Sektor Industri**
 - 99 Peluang Pengembangan Sektor Industri
 - 102 Tantangan Pengembangan Sektor Industri
 - 102 **Peluang dan Tantangan Sektor Perdagangan**
 - 102 Peluang Pengembangan Sektor Perdagangan
 - 103 Tantangan Pengembangan Sektor Perdagangan
 - 104 **Peluang dan Tantangan Sektor Pariwisata**
 - 104 Peluang Pengembangan Sektor Pariwisata
 - 105 Tantangan Pengembangan Sektor Pariwisata

106 Rumusan SWOT Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan 7

- 107 SWOT Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**
- 108 SWOT Sektor Industri Pengolahan**
- 110 SWOT Sektor Perdagangan**
- 112 SWOT Sektor Pariwisata**

116 Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung 8

- 117 Konsep Penyusunan Masterplan Perekonomian**
- 117 Visi Masterplan Perekonomian**
- 119 Milestones**
- 120 Konsep Ruang dan Pergerakan**
- 123 Strategi dan Program Utama**

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

Daftar Gambar

- 3 Peta administrasi wilayah studi Kabupaten Bandung
- 4 Alur pikir penyusunan masterplan
- 7 Proses wawancara dengan aktor kunci
- 10 Kerangka analisis penyusunan masterplan
- 13 Model piramida daya saing daerah
- 15 Ekosistem pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Bandung
- 20 Kerangka masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024
- 56 Struktur nilai tambah bruto (NTB) Indonesia 2016
- 61 Peta sebaran PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan per kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2016
- 69 Peta sebaran potensi sub-sektor pertanian
- 70 Peta pertampalan sebaran potensi sub-sektor pertanian dengan sebaran PDRB sektor A
- 71 Peta hasil analisis *local spatial autocorrelation* dari PDRB pertanian
- 72 Peta pertampalan hasil *Local Moran's I* PDRB A dengan sebaran potensi sub-sektor pertanian di Kabupaten Bandung
- 73 Peta sebaran kontribusi PDRB sektor industri pengolahan per kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2016
- 77 Peta sebaran potensi sub-sektor industri pengolahan
- 77 Peta pertampalan sebaran potensi sub-sektor industri dengan sebaran PDRB sektor C
- 79 Peta hasil analisis *Local Moran's I* PDRB sektor industri
- 80 Peta pertampalan hasil *Local Moran's I* PDRB C dengan sebaran potensi sub-sektor industri di Kabupaten Bandung
- 81 Peta sebaran kontribusi PDRB sektor perdagangan (G) per kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2016
- 83 Peta sebaran lokasi pasar milik pemerintah daerah di Kabupaten Bandung
- 84 Peta pertampalan sebaran lokasi pasar Pemda dengan sebaran PDRB sektor G
- 85 Peta hasil analisis *Local Moran's I* PDRB sektor perdagangan
- 86 Peta pertampalan hasil *Local Moran's I* PDRB G dengan sebaran lokasi pasar di Kabupaten Bandung
- 88 Peta sebaran kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung per kecamatan tahun 2020
- 90 Peta sebaran desa wisata dan daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Bandung
- 91 Peta pertampalan sebaran potensi daya tarik wisata unggulan dengan sebaran kunjungan wisatawan tahun 2020
- 92 Peta hasil analisis Getis-Ord G_i^* kunjungan wisatawan per kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2020
- 93 Peta pertampalan sebaran potensi daya tarik wisata unggulan dengan hasil analisis Getis-Ord G_i^* kunjungan wisatawan per kecamatan tahun 2020
- 95 Peta lokasi klaster dan hotspot dari sektor ekonomi unggulan dengan potensi unggulan dari masing-masing sektor
- 98 Konsep pengembangan kawasan agropolitan
- 101 Agroindustri dan sistem agribisnis
- 103 Rangkaian kerja faktor pendukung agribisnis
- 103 Permintaan dan penawaran dalam rumah tangga agrowisata
- 118 Konsep masterplan perekonomian Kabupaten Bandung 2021-2026
- 120 Milestones masterplan perekonomian Kabupaten Bandung
- 121 Konsep ruang dan pergerakan masterplan perekonomian Kabupaten Bandung

Daftar Grafik

- 40 PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020
- 41 PDRB ADHK per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020
- 42 Tipologi klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
- 44 Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bandung tahun 2020
- 45 Laju pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2011-2020
- 60 Kinerja PDRB sektor pertanian Kabupaten Bandung
- 70 Hasil pengolahan *spatial autorrelation global* dari PDRB pertanian per Kecamatan
- 73 Kinerja PDRB sektor industri Kabupaten Bandung
- 78 Hasil pengolahan *global spatial autorrelation* dari PDRB sektor industri per Kecamatan
- 81 Kinerja PDRB sektor perdagangan Kabupaten Bandung
- 85 Hasil pengolahan *global spatial autorrelation* dari PDRB sektor perdagangan per Kecamatan
- 92 Hasil pengolahan *global spatial autorrelation* dari jumlah kunjungan wisata per Kecamatan pada tahun 2020

Daftar Tabel

- 6 Jadwal pelaksanaan penyusunan masterplan perekonomian Kabupaten Bandung
- 7 Aktor kunci yang diwawancarai
- 14 Faktor kunci pembentuk daya saing daerah
- 26 Keterkaitan visi, misi, dan arah kebijakan pada rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bandung
- 27 Keterkaitan visi, misi, dan arah kebijakan pada rencana pembangunan jangka menengah di tingkat nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bandung
- 29 Keterkaitan arah pemanfaatan ruang pada rencana tata ruang wilayah di tingkat nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bandung
- 32 Arah kawasan, target/sentra, strategi utama, serta klasifikasi pengembangan pertanian di Kabupaten Bandung
- 37 Lokasi pengembangan destinasi wisata (DPD, KPPD dan KSPD) di Kab. Bandung
- 43 PDRB ADHK Kabupaten Bandung menurut sektor tahun 2010-2020 (miliar rupiah)
- 46 Perbandingan rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2020
- 46 Tipologi sektor ekonomi Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2020
- 47 Hasil analisis LQ sektor ekonomi Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2020
- 48 Peringkat sektor ekonomi Kabupaten Bandung berdasarkan hasil analisis LQ tahun 2010-2020
- 49 Hasil analisis DLQ sektor ekonomi Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2020
- 49 Peringkat sektor ekonomi Kabupaten Bandung berdasarkan hasil analisis DLQ tahun 2010-2020
- 50 Klasifikasi sektor berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ tahun 2010-2020
- 51 Hasil analisis shift share Kabupaten Bandung tahun 2010-2020
- 52 Peringkat sektor ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2010-2020 berdasarkan komponen pada analisis shift share
- 53 Sintesis gambaran ekonomi wilayah Kabupaten Bandung
- 55 Output Domestik 2016
- 57 Koefisien input domestik 2016
- 60 Kinerja PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bandung tahun 2010-2020
- 62 Variabel dalam identifikasi sub-sektor unggulan pertanian
- 63 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor tanaman pangan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung
- 64 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung
- 64 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor peternakan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung
- 65 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor biofarmaka menurut kecamatan di Kabupaten Bandung
- 66 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor perikanan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung
- 67 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor hortikultura menurut kecamatan di Kabupaten Bandung

- 67 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor buah-buahan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung
- 68 Sintesis sebaran sub-sektor pertanian unggulan di Kabupaten Bandung
- 72 Kinerja PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bandung
- 74 Variabel kelas industri dan asumsi nilai produksi
- 75 Total nilai produksi kelas industri berdasarkan kecamatan di Kab. Bandung tahun 2018
- 76 Sintesis sebaran sub-sektor industri unggulan di Kabupaten Bandung
- 80 Kinerja PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kab. Bandung
- 87 Kunjungan wisatawan, jumlah dan daya tarik wisata unggulan berdasarkan kecamatan di Kab. Bandung tahun 2020
- 89 Kunjungan wisata pada daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Bandung tahun 2020
- 94 Sintesis klaster dan hotspot dari sektor ekonomi unggulan
- 115 SWOT sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bandung
- 128 Strategi dan program utama masterplan

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

1. Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, diperlukan rumusan mengenai arah kebijakan untuk pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Bandung. Untuk mendapatkan arah kebijakan tersebut di atas diperlukan rencana induk yang menggambarkan kondisi eksisting dari wilayah yang dikaji baik dari potensi/keunggulan maupun permasalahan ataupun isu-isu yang dihadapi wilayah tersebut sehingga didapatkan gambaran arah kebijakan strategis yang perlu diambil sebagai pedoman perencanaan pembangunan.

Pada kajian yang telah disusun sebelumnya, mengenai sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung, dihasilkan beberapa kesimpulan dan data yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian di Kabupaten Bandung sebagai bahan penyusunan perencanaan perekonomian di masa depan. Berdasarkan PDRB per sektor di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 terdapat 3 sektor yang memiliki *share* nilai PDRB tertinggi, baik secara total maupun rata-rata *share* sektor dari masing-masing kecamatan, terdapat tiga sektor yang memiliki *share* diatas rata-rata, yaitu industri pengolahan (sektor C), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (sektor G), serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (sektor A).

Spesialisasi relatif pada sektor A menghasilkan 5 kecamatan yang juga termasuk di antara 7 kecamatan yang memiliki spesialisasi absolut. Kecamatan Ciparay, Kertasari, Ciwidey, Rancabali, dan Cimaung. Hanya dua kecamatan yang unggul dari segi produktivitas dan kontribusi lahan yaitu Kecamatan Cimaung yang unggul pada komoditas padi, jagung, ubi kayu, dan kacang kedelai dan Kecamatan Ciparay yang unggul di komoditas jagung. Sementara itu, komoditas lainnya didominasi kecamatan yang tidak memiliki keunggulan absolut dan relatif.

Pada spesialisasi relatif di sektor C, terdapat 11 kecamatan yang nilainya berada di atas rata-rata KI dan 5 kecamatan yang juga memiliki keunggulan absolut yaitu Kecamatan Dayeuhkolot, Pameungpeuk, Solokanjeruk, Margaasih, dan Majalaya. Hampir semua kecamatan yang memiliki dua keunggulan tersebut unggul secara jumlah unit usaha konveksi. Kecamatan lainnya juga didominasi oleh unit usaha jenis konveksi.

Di sektor G terdapat 12 kecamatan yang memiliki *market share* di atas rata-rata sebesar 3,23, yaitu Kecamatan Baleendah, Majalaya, Margaasih, Katapang, Margahayu, Soreang, Dayeuhkolot, Kutawaringin, Pangalengan, Rancaekek, Solokanjeruk, dan Pameungpeuk. Seluruh kecamatan baik yang memiliki dua keunggulan sekaligus (absolut dan relatif) maupun kecamatan lainnya didominasi oleh unit usaha jenis warung/klontongan dan bengkel.

Dari gambaran di atas maka pada kajian ini akan dianalisis keterkaitan antara sumber-sumber produksi dan distribusi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor terhadap aspek spasialnya sehingga terlihat hubungan dari masing-masing wilayah yang memiliki potensi dari masing-masing sektor. Arah dari masterplan ini diharapkan dapat menggambarkan pendekatan kebijakan yang sesuai pada sektor ekonomi terhadap potensi, permasalahan, kondisi geografis dan dukungan dari sarana dan prasarana/infrastruktur kewilayahannya.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud diselenggarakan Kegiatan Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung ini adalah menyusun arah perencanaan sektor perekonomian dan dilengkapi dengan kebijakan kewilayahannya sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di sektor perekonomian.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk menyusun Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung. Sedangkan sasaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah:

1. Terpetakannya pengelompokan/*clustering* kewilayahan berdasarkan potensinya dalam bentuk spasial;
2. Tersusunnya analisis peluang dan permasalahan pengembangan sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung; serta,
3. Terumuskannya arah dan kebijakan bagi sektor perekonomian di Kab. Bandung.

1.3 Ruang Lingkup

Penjelasan ruang lingkup terdiri atas ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi dan ruang lingkup waktu.

1. Wilayah Perencanaan

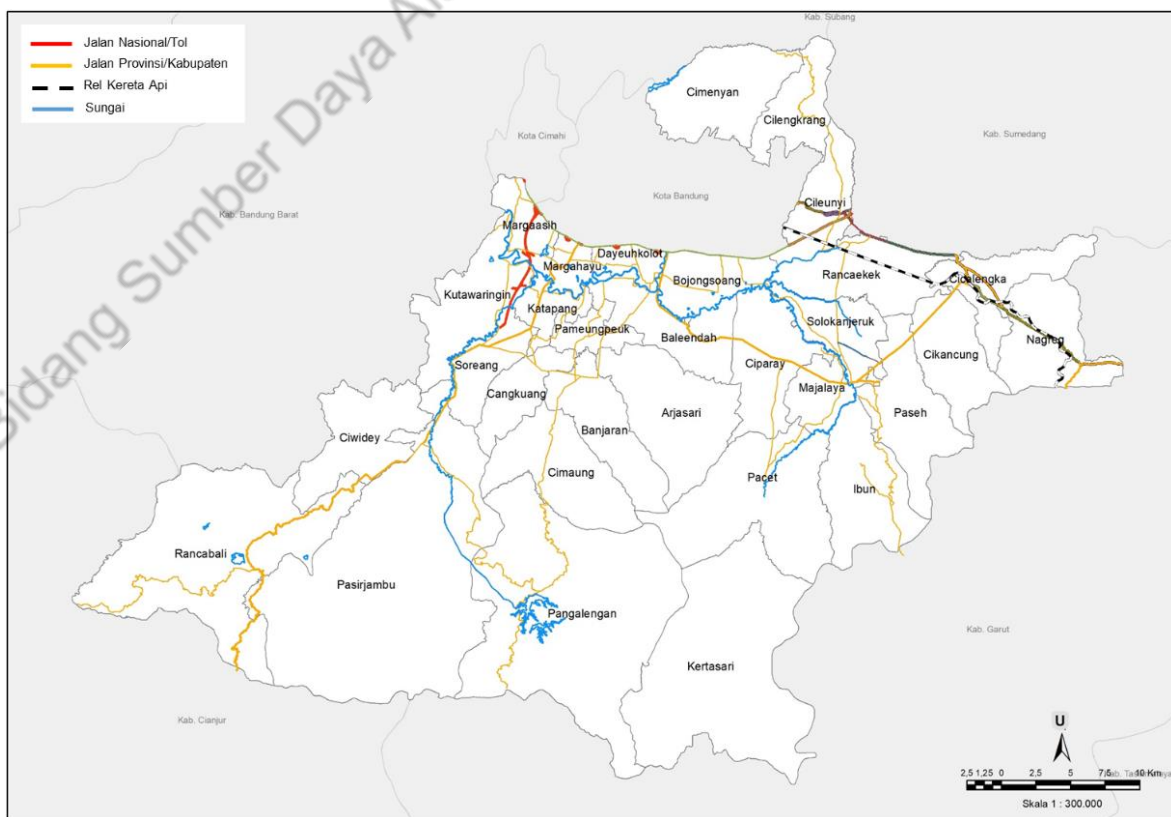
Wilayah studi dalam pekerjaan ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas 31 kecamatan.

2. Substansi Masterplan

Pekerjaan ini memiliki fokus pada kajian perekonomian, terutama berkaitan dengan kinerja wilayah secara makro yang ditunjukkan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atau sektor ekonomi, yang meliputi 14 sektor ekonomi). Secara khusus, kegiatan ini juga menentukan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bandung sebagai prioritas dalam kerangka perencanaan masterplan.

Dengan demikian, lingkup substansi pekerjaan ini meliputi survei lapangan dan instansi, analisis potensi dan permasalahan setiap sektor ekonomi unggulan, serta perumusan rencana dan arah kebijakan pengembangan, yang dibahas pada lingkup Kabupaten dengan fokus pada pengembangan sektor ekonomi unggulan (lihat subbab metodologi, untuk penjelasan mengenai lingkup kegiatan teknis dari pengumpulan data, analisis aspek kajian yang dilakukan, serta perumusan konsep perencanaan masterplan).

Gambar 1.1 Peta administrasi wilayah studi Kabupaten Bandung



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3. Waktu Pelaksanaan

Penyusunan masterplan perekonomian Kabupaten Bandung ini direncanakan dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak bulan Februari hingga April tahun 2021. Sedangkan perumusan konsep perencanaan masterplan dirumuskan pada kerangka waktu 5 (lima) tahun dengan pertimbangan situasi VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*) serta *major forces* seperti COVID-19 yang mengakibatkan perubahan dan kemajuan terjadi dengan sangat cepat dan masif. Selain itu, rentang waktu 5 (lima) tahun juga memiliki kesamaan dengan rentang waktu pelaksanaan RPJMD, yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga dirasa relevan untuk dapat menerjemahkan konsep, serta mempersiapkan untuk evaluasi dan tindak lanjut dari perencanaan (lihat bagian Metodologi, untuk penjelasan mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan yang meliputi tahap kegiatan, waktu, serta bentuk pelaporan pekerjaan.

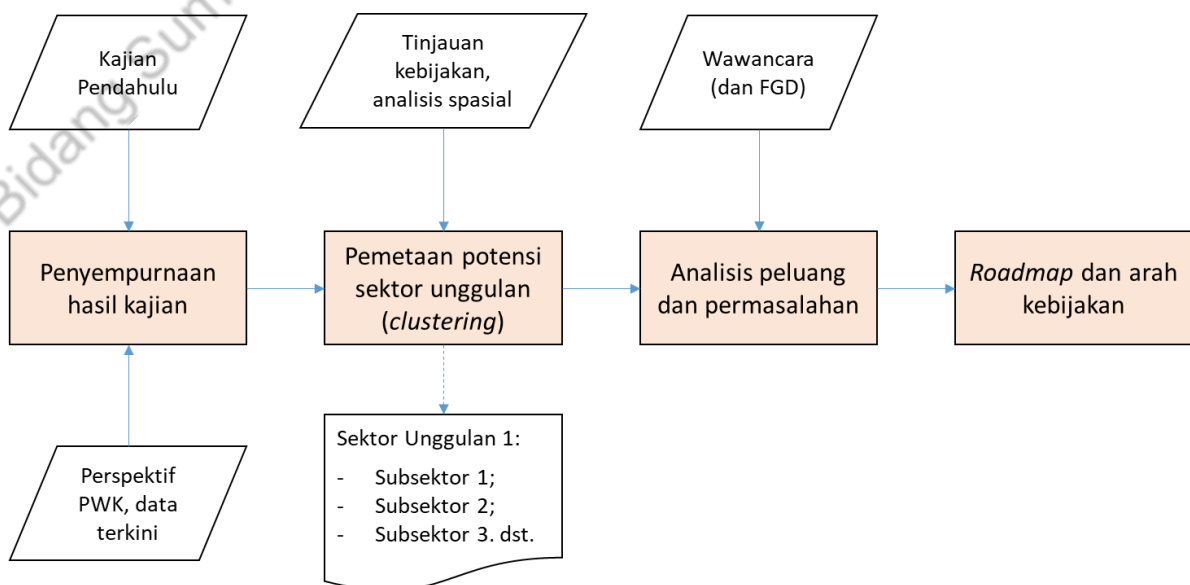
1.4 Alur Pikir

Alur pikir pekerjaan ini diawali dengan hasil kajian pendahulu yaitu mengenai gambaran kondisi perekonomian di Kabupaten

Bandung yang menghasilkan temuan mengenai sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung. Kajian pendahulu tersebut kemudian dipadukan dengan perspektif keilmuan perencanaan wilayah dan kota untuk memberikan gambaran secara spasial mengenai sektor ekonomi unggulan serta data terkini untuk memberikan kebaruan terhadap hasil kajian. Hasil yang diharapkan adalah pemetaan potensi sektor unggulan.

Analisis potensi yang dihasilkan pada tahap pertama kemudian dipadukan dengan tinjauan kebijakan dan analisis yang berkaitan dengan sektor ekonomi dari data sekunder untuk mendapatkan temuan awal mengenai peluang dan permasalahan pengembangan. Survey, khususnya pengumpulan data primer melalui wawancara, difokuskan pada Dinas atau instansi yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan, serta *focus group discussion* (FGD), yang dilaksanakan untuk mengonfirmasi dan menyempurnakan hasil analisis peluang dan permasalahan. Hasil analisis inilah yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam perumusan roadmap dan arah kebijakan perencanaan masterplan perekonomian.

Gambar 1.2 Alur pikir penyusunan masterplan



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

1.5 Metodologi Penyusunan Masterplan

Metodologi penyusunan masterplan terdiri atas tahapan kegiatan, metode pengumpulan data, dan analisis data.

1. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan penyusunan masterplan perekonomian Kabupaten Bandung ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu:

1) Tahap persiapan dan penyempurnaan temuan awal

Tahap pertama ini berlangsung pada bulan pertama pelaksanaan pekerjaan. Tahap ini bertujuan untuk menyempurnakan kajian pendahulu sebagai temuan awal dalam penyusunan masterplan. Data yang diperlukan pada tahap ini meliputi data sekunder terkait kebijakan perencanaan pembangunan, dokumen kajian yang berkaitan dengan sektor perekonomian, serta data Kabupaten Bandung dalam angka. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini diantaranya:

- Inisiasi: koordinasi dengan pelaksana pekerjaan, penyamaan persepsi mengenai maksud dan tujuan pekerjaan, serta optimalisasi rencana pelaksanaan pekerjaan;
- Penyempurnaan kajian pendahulu: menambahkan perspektif perencanaan wilayah dan kota, memperbarui data terutama data sekunder;
- Kajian kebijakan: tinjauan kebijakan perencanaan pembangunan, penataan ruang, serta hasil kajian lainnya baik pada tingkat nasional, regional, lokal, maupun sektoral.

2) Tahap identifikasi dan analisis

Tahap ini berlangsung pada bulan kedua pelaksanaan pekerjaan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sektor ekonomi sebagai kondisi awal, dan peluang pengembagnan sektor

ekonomi sebagai kondisi akhir, serta permasalahan yang dihadapi sektor ekonomi dalam kebutuhan pengembangan. Data yang diperlukan pada tahap ini adalah hasil temuan awal pada tahap sebelumnya, data primer yang bersumber dari wawancara dan FGD, serta data sekunder pelengkap lainnya, terutama untuk sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini diantaranya:

- Pemetaan potensi sektor ekonomi unggulan, dan analisis untuk mengetahui hubungan spasial dari sektor ekonomi;
- Identifikasi peluang pengembangan sektor ekonomi unggulan;
- Identifikasi permasalahan pengembangan sektor ekonomi unggulan;
- Analisis kebutuhan pengembangan sektor ekonomi unggulan;
- Wawancara dinas terkait untuk mengkonfirmasi dan memer kaya temuan mengenai hasil kajian awal potensi dan permasalahan sektor ekonomi unggulan;
- Pelaksanaan FGD.

3) Tahap perumusan konsep masterplan

Tahap ini berlangsung pada bulan ketiga, atau bulan terakhir dari pelaksanaan pekerjaan. Tahap ini bertujuan untuk merumuskan konsep pengembangan, roadmap, strategi pergerakan, dan arah kebijakan masterplan perekonomian. Data yang diperlukan adalah hasil analisis pada tahapan sebelumnya berupa pemetaan potensi, peluang dan permasalahan, serta kebutuhan pengembangan sektor ekonomi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Perumusan konsep roadmap pengembangan;
- Perumusan tujuan dan sasaran pengembangan sektor ekonomi;
- Perumusan strategi dan arah kebijakan.

Tabel 1.1 Jadwal pelaksanaan penyusunan masterplan perekonomian Kabupaten Bandung

| No. | Kegiatan | Bulan ke-1 | | | | Bulan ke-2 | | | | Bulan ke-3 | | | |
|-----|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Tahap persiapan dan penyempurnaan kajian pendahulu | x | x | x | x | | | | | | | | |
| | 1. Inisiasi: penyamaan persepsi | x | | | | | | | | | | | |
| | 2. Penyempurnaan kajian pendahulu | | x | x | | | | | | | | | |
| | 3. Kajian tinjauan kebijakan | | | x | x | | | | | | | | |
| II | Tahap identifikasi dan analisis | | | | | x | x | x | x | | | | |
| | 1. Pemetaan potensi sektor ekonomi unggulan dan keterkaitan spasial | | | | | x | x | | | | | | |
| | 2. Identifikasi peluang pengembangan sektor ekonomi unggulan | | | | | | x | x | | | | | |
| | 3. Identifikasi permasalahan pengembangan sektor ekonomi unggulan | | | | | | x | x | | | | | |
| | 4. Analisis kebutuhan pengembangan sektor ekonomi unggulan | | | | | | | | x | x | | | |
| | 5. Wawancara dinas terkait untuk konfirmasi dan pengayaan hasil kajian awal | | | | | x | x | x | x | | | | |
| | 6. Pelaksanaan FGD* | | | | | | | | x | x | | | |
| III | Tahap perumusan konsep dan masterplan | | | | | | | | | x | x | x | x |
| | 1. Perumusan konsep pengembangan | | | | | | | | | x | x | | |
| | 2. Perumusan tujuan dan sasaran | | | | | | | | | | x | x | |
| | 3. Perumusan strategi dan kebijakan | | | | | | | | | | | x | x |
| IV | Pelaporan pekerjaan | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Laporan Pendahuluan | | | | x | | | | | | | | |
| | 2. Laporan Bulanan | | | | x | | | | x | | | | x |
| | 3. Laporan Akhir | | | | | | | | | | | | x |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada pekerjaan ini terdiri atas pengumpulan data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengunjungi wilayah perencanaan secara langsung dan mengumpulkan data yang belum diperoleh sesuai dengan kebutuhan data, terutama yang belum terakomodasi oleh data sekunder. Pada pekerjaan ini, teknik pengumpulan data primer yang

dilakukan adalah wawancara dan *focus group discussion* (FGD). Sedangkan teknik yang lainnya tidak dilakukan karena keterbatasan akibat pandemi COVID-19.

Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yang memiliki kompetensi atau ahli untuk menjelaskan informasi yang ingin diperoleh, dalam hal ini yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian di Kabupaten Bandung. Wawancara dilakukan dengan mendalam (*in-depth interview*), dengan mengacu pada pedoman wawancara yang berisi

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan dapat berkembang sesuai dengan kepentingan yang diwaliki oleh narasumber atau aktor kunci, sehingga wawancara juga bersifat semi terstruktur. Pada pekerjaan ini wawancara difokuskan pada instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Bandung. Beberapa dinas yang menjadi tujuan wawancara diantaranya: Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada pekerjaan ini telah dilakukan wawancara pada beberapa aktor kunci. Tidak semua target aktor kunci dapat diwawancara, dikarenakan keterbatasan akses terhadap aktor kunci akibat pandemi COVID-19, beberapa jadwal wawancara terpaksa harus dibatalkan karena beberapa kantor harus melaksanakan *Work from Home* (WFH). Meski demikian, terdapat 5 aktor kunci yang berhasil diwawancara, dan dianggap cukup mewakili kepentingan dari masing-masing sektor ekonomi yang menjadi unit analisis.

Tabel 1.2 Aktor kunci yang diwawancara

| No. | Tanggal Wawancara | Instansi | Aktor Kunci |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 18 Maret 2021 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung | Kepala Dinas |
| 2 | 15 Maret 2021 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung | Kepala Seksi |
| 3 | 16 Maret 2021 | Dinas Pertanian Kabupaten Bandung | Kepala Bidang Sarana Prasarana |
| 4 | 17 Maret 2021 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung | Kepala Seksi Pasca Panen |
| 5 | 16 Maret 2021 | Paguyuban Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung | Ketua Paguyuban |

Sumber: Hasil survey, 2021

Gambar 1.3 Proses wawancara dengan aktor kunci



Gambar 1.3 Proses wawancara dengan aktor kunci



Sumber: Hasil survei, 2021

2) Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data melalui survei sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari berbagai lembaga. Pengumpulan data sekunder pada dasarnya dilakukan sepanjang pekerjaan berlangsung. Beberapa data sekunder yang diperlukan meliputi kajian literatur, data statistik publikasi resmi Badan Pusat Statistik, dokumen kebijakan dan dokumen rencana pembangunan, serta hasil kajian atau studi yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan, pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata di Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dari internet serta survei instansi:

a. Penelusuran internet, pertama dilakukan untuk kajian literatur atau telaah dokumen guna mendapatkan teori atau konsep-konsep yang relevan, peraturan perundangan serta rencana pembangunan yang terkait dengan pengembangan perekonomian.

Pengumpulan data dengan kajian literatur ini dapat bersumber dari buku, jurnal penelitian, artikel dan dokumen resmi pemerintah yang dapat diakses secara terbuka, dengan rincian sebagai berikut:

- Literatur terdiri dari jurnal penelitian, buku dan pengetahuan populer yang berkaitan dengan konsep pengembangan perekonomian;
 - Dokumen kebijakan terdiri dari rencana pembangunan, rencana tata ruang, serta kajian lainnya;
 - Data statistik terutama dokumen Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2010-2020.
- b. Survey instansi, bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak dipublikasikan di internet atau yang memiliki batasan dalam mengaksesnya, serta untuk menambah atau memperbaiki keakuratan data yang diperoleh dalam pengumpulan data awal. Instansi yang menjadi tujuan adalah instansi yang juga dilakukan survey primer. Data yang diperlukan pada

survey instansi meliputi data statistik, potensi, peluang dan permasalahan yang berkaitan dengan wewenang instansi yang bersangkutan.

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sekunder yang berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data primer diantaranya:

- Data produksi pertanian yang terdiri dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, buah-buahan tahun 2019-2020;
- Data produksi perikanan yang terdiri dari pembenihan dan pembesaran tahun 2019-2020;
- Data kunjungan wisata pada 168 daya tarik wisata yang tercatat, serta data hasil kajian penyusunan Desa Wisata.

3. Analisis Data

Secara umum terdapat 3 (tiga) unit analisis utama yang dilakukan, yaitu analisis potensi sektor ekonomi unggulan, analisis peluang dan permasalahan sektor ekonomi unggulan, serta analisis perumusan roadmap dan arah kebijakan.

1) Analisis potensi sektor ekonomi unggulan

Analisis ini diawali dengan penyempurnaan hasil kajian pendahulu dengan menambahkan perspektif ekonomi wilayah berdasarkan keilmuan perencanaan wilayah dan kota. Analisis yang dilakukan adalah analisis tipologi Klassen dengan melakukan perbandingan kinerja sektor ekonomi Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jawa Barat.

Setelah itu, analisis dilanjutkan dengan penentuan sektor dan subsektor ekonomi unggulan. Analisis yang dilakukan adalah *content analysis*

terhadap dokumen kebijakan, kemudian dilengkapi dengan analisis skoring atau analisis skalogram. Analisis terhadap hasil wawancara juga dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil analisis awal.

Tahap akhir dari analisis ini adalah pemetaan potensi dan keterkaitan antar sektor ekonomi. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif untuk menyusun indikasi lokasi atau sebaran potensi ekonomi, serta analisis spasial dengan menggunakan Moran's Index untuk menampilkan melalui peta dan melihat keterkaitan antar potensi sektor ekonomi unggulan.

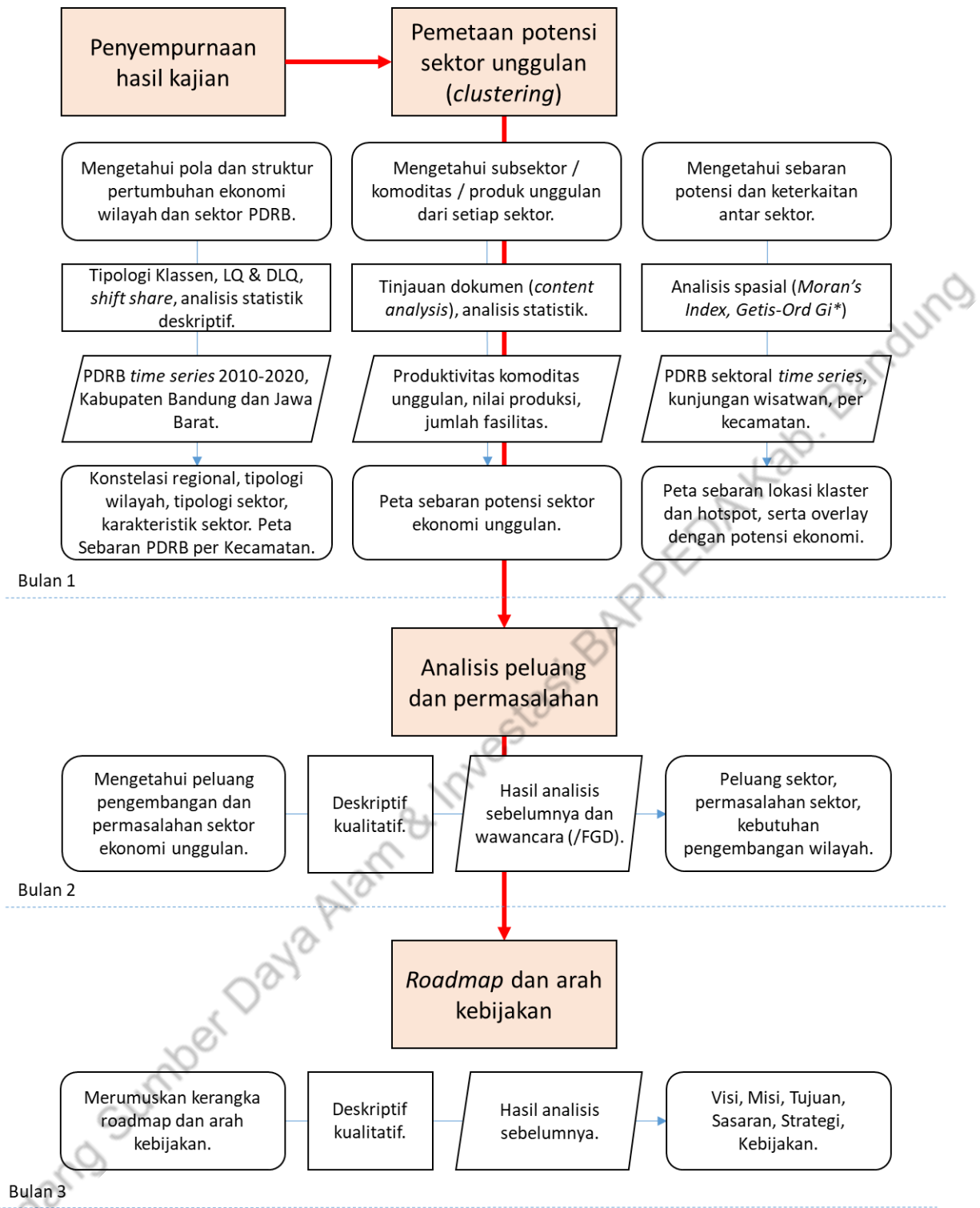
2) Analisis peluang dan permasalahan sektor ekonomi unggulan

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui peluang pengembangan sektor ekonomi unggulan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing sektor ekonomi unggulan. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskripsi kualitatif. Hasilnya kemudian dipetakan dalam kerangka SWOT untuk merumuskan kebutuhan pengembangan di masa depan dan tantangan yang dihadapi sebagai masukan dalam penyusunan roadmap dan arah kebijakan.

3) Analisis perumusan roadmap dan arah kebijakan

Analisis perumusan roadmap dan arah kebijakan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Roadmap disusun dalam kerangka 5 tahun dengan pendekatan 3 tahap (yaitu pre-adopsi selama 1 tahun, adopsi selama 3 tahun, dan pasca adopsi selama 1 tahun). Konsep pengembangan pada roadmap disusun dengan memertimbangkan sinkronisasi dasar hukum dan arah kebijakan dari dokumen sebelumnya. Muatan dari roadmap setidaknya terdiri dari tujuan dan sasaran pengembangan, yang diturunkan menjadi strategi dan arah kebijakan.

Gambar 1.4 Kerangka analisis penyusunan masterplan



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

A scenic view of a tea plantation in Bandung, Indonesia. The foreground shows a road and a small blue-roofed structure. The middle ground is dominated by terraced tea fields with neat rows of green bushes. The background features rolling hills and more tea fields under a clear sky. A large tree trunk is visible on the left side of the frame.

2. Konsep Daya Saing dan Simpul Inovasi

PEUDA Kab. Bandung

2.1 Konsep Daya Saing Daerah

Konsep daya saing mulai berkembang setelah Porter (1990) mengemukakan konsep daya saing nasional yaitu “luaran dari kemampuan suatu Negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau memertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan Negara lain dalam sejumlah sektor-sektor kuncinya”.

Secara eksplisit, Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang diterapkan pada level nasional adalah “produktivitas” yang didefinisikan sebagai nilai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bank Dunia yang menyebutkan bahwa “daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah per unit yang dicapai oleh perusahaan”. Meski demikian, konsep daya saing tidak secara sempit mencakup tingkat efisiensi suatu perusahaan, melainkan aspek yang lebih luas yang berada di luar perusahaan, mulai dari skala perusahaan, wilayah maupun nasional.

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan laporan “*Global Competitiveness Report*” mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Definisi lain oleh *Institute for Management Development* (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, *globality* dan *proximity*, serta model ekonomi dan sosial.

Kemudian *European Commission* (EC) mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi

dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (*regions*) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal.

Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep *comparative advantage*, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, alih-alih ke negara lain. Konotasi *advantage* di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin.

Misalnya dengan menyediakan lahan murah, upah buruh murah, dan suplai bahan mentah produksi yang terjamin kontinuitasnya dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya, kekuatan modal dan keunggulan teknologi menjadi kunci penentu peningkatan daya saing (penjualan produk) satu negara. Argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi (Martin dan Tyler, 2003):

- untuk **investasi**, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal publik;
- untuk **tenaga kerja**, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, entrepreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik;
- untuk **teknologi**, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

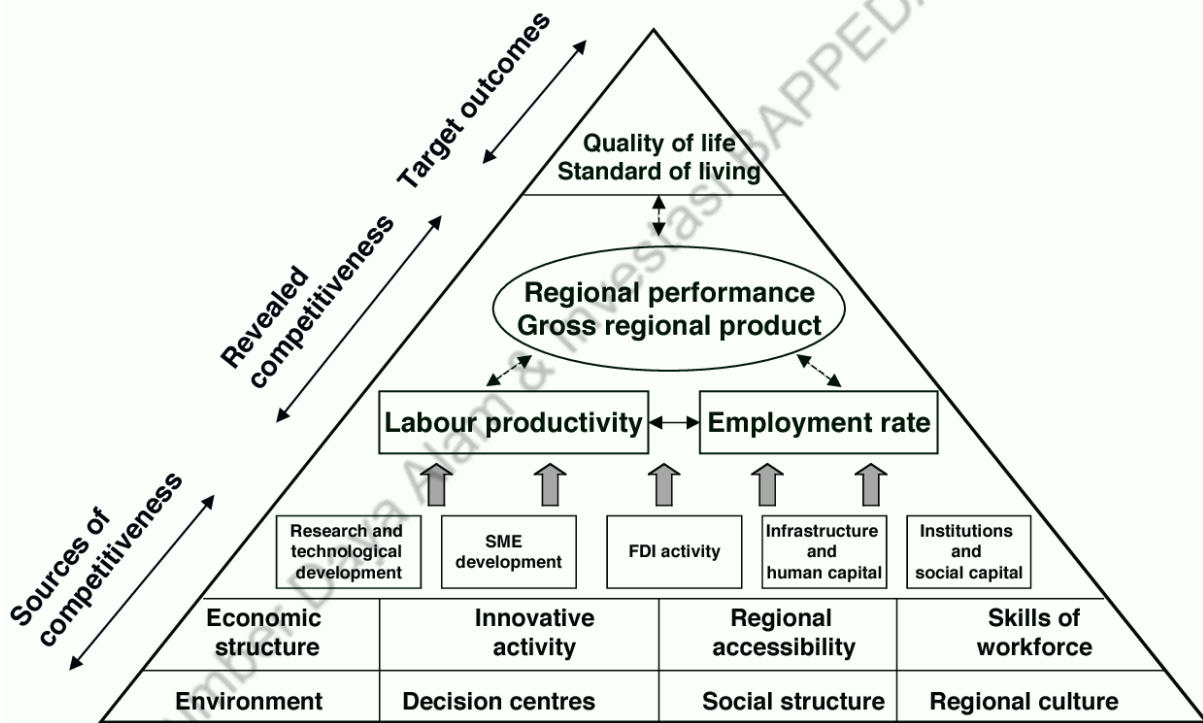
Lebih lanjut, Gardiner, Martin dan Tyler (2004) merumuskan konsep daya saing

daerah dalam sebuah model piramida yang menjelaskan bahwa puncak piramida adalah kualitas hidup atau standar kehidupan, sedangkan PDRB menjadi indikator munculnya daya saing wilayah.

Peningkatan daya saing wilayah juga dipengaruhi produktivitas tenaga kerja dan tingkat pengangguran, yang keduanya merupakan dampak dari pelbagai sumber seperti penelitian dan pengembangan teknologi, pengembangan UMKM, investasi, infrastruktur dan kualitas SDM, serta institusi dan modal sosial.

Pada dasar piramida diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sumber dari munculnya daya saing daerah diantaranya: struktur ekonomi, aktivitas inovasi, aksesibilitas regional, kemampuan tenaga kerja, lingkungan, pusat pengambilan keputusan, struktur sosial, dan budaya regional. Kerangka ini merupakan sebuah model yang dapat dijadikan tinjauan dalam merumuskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan serta arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi regional yang berdaya saing.

Gambar 2.1 Model piramida daya saing daerah



[Based on: Lengyel (2000, 2003), Begg (1999), EC (1999), Jensen-Butler (1996)]

Sumber: Gardiner, Martin dan Tyler (2004)

Beberapa sumber lain (Bank Indonesia dan Universitas Padjadjaran, 2008; *World Economic Forum*, 2012; *Institute of Management Development*, 2002; *European Commission*, 1999), menyebutkan bahwa faktor kunci pembentuk daya saing daerah adalah kondisi perekonomian di tingkat makro (BI & Unpad, WEF, IMD, EC dan mikro (BI & Unpad), kualitas institusi pemerintahan (BI & Unpad, WEF, IMD, EC), ketersediaan

infrastruktur (BI & Unpad, WEF, IMD, EC, kualitas sumber daya manusia dan pendidikan (BI & Unpad, EC), informasi dan teknologi (BI & Unpad, WEF, EC), sistem keuangan dan kemudahan berusaha (BI & Unpad, WEF, IMD, EC), serta inovasi (WEF, EC). Penekanan diberikan kepada inovasi karena di era modern ini, daerah berlomba-lomba untuk menawarkan kekhasan dari daerah masing-masing.

Tabel 2.1 Faktor kunci pembentuk daya saing daerah

| BI dan Unpad (2008) | WEF (2012) | IMD (2002) | EC (1999) |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---|
| 1) Perekonomian daerah; | 1) Institusi; | 1) Kinerja perekonomian; | 1) Institusi |
| 2) Keterbukaan; | 2) Infrastruktur; | 2) Efisiensi pemerintah; | 2) Stabilitas makroekonomi; |
| 3) Sistem keuangan; | 3) Kondisi makroekonomi; | 3) Efisiensi dunia usaha; | 3) Infrastruktur; |
| 4) Infrastruktur dan sumber daya alam; | 4) Pendidikan dasar dan kesehatan; | 4) Infrastruktur. | 4) Kesehatan; |
| 5) Ilmu pengetahuan dan teknologi; | 5) Pendidikan tinggi dan pelatihan; | | 5) Pendidikan dasar; |
| 6) Sumber daya manusia; | 6) Efisiensi pasar barang; | | 6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; |
| 7) Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah; | 7) Efisiensi pasar tenaga kerja; | | 7) Efisiensi pasar tenaga kerja; |
| 8) Manajemen ekonomi mikro. | 8) Pembangunan pasar keuangan; | | 8) Luas pasar; |
| | 9) Ketersediaan teknologi; | | 9) Ketersediaan teknologi; |
| | 10) Luas pasar; | | 10) Kemudahan usaha; |
| | 11) Kemudahan berusaha; | | 11) Inovasi. |
| | 12) Inovasi. | | |

Sumber: BI dan Unpad (2008); WEF (2012); IMD (2002); EC (1999)

2.2 Konsep Pengembangan Ekosistem Simpul Inovasi

Konsep pengembangan ekosistem simpul inovasi ini merupakan rancangan pengembangan wilayah berbasis ekonomi yang dikembangkan oleh Bappeda Kabupaten Bandung (Wardhana, 2021). Konsep ini dilatarbelakangi oleh tingginya potensi pelaku ekonomi di Kabupaten Bandung seperti petani, pelaku usaha mikro dan kecil, pelaku pariwisata, komunitas ekonomi, pelaku ekonomi kreatif, dan Badan Usaha Milik Desa, tetapi rantai pasok dari pelaku ekonomi tersebut masih terputus dan tersegmentasi sehingga ada pembatasan komunikasi antara berbagai pelaku usaha.

Beberapa permasalahan lain yang melatarbelakangi penyusunan konsep ini yaitu: rantai pasok dan rantai nilai produk sangat terikat (*forward-backward*), namun belum terbentuk koordinasi; Komunikasi tidak merata antara manajemen kelompok usaha dan anggota kelompok, cenderung didominasi oleh pengurus; Mayoritas pelaku

usaha memiliki kemampuan rendah dalam hal keberlanjutan produksi, pemasaran, manajemen usaha; Belum terbentuk integrasi antara sektor industri, pertanian, pariwisata dan sektor lainnya; Datasabe ketersediaan, distribusi, harga, kebutuhan konsumen belum tersedia, sehingga perlu diperkuat manajemen database; Penguatan asosiasi-asosiasi yang terkait dengan ekonomi sudah terbentuk, namun belum terkoordinasi dengan baik; Belum terbangunnya *customer relationships (branding)* produk-produk pelaku usaha mikro dan kecil dan kualitasnya belum stabil: *packing, packaging, inventory*; Kapasitas produksi pelaku usaha kecil dan mikro relatif masih rendah, sehingga sulit untuk berkelanjutan; Tukar informasi dan pengetahuan di antara para pelaku belum terbentuk, sehingga aliran informasi tidak merata; Pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil belum terbangun; Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian untuk peningkatan skala ekonomi pelaku mikro dan kecil.

Inovasi “Pengembangan Ekosistem Simpul Inovasi” merupakan salah satu strategi untuk menanggulangi permasalahan pembangunan ekonomi seperti yang dititikberatkan pada lemahnya *soft-ware* dan *brain-ware* bisnis pelaku usaha mikro dan kecil serta lemahnya komunikasi dan hubungan kerja/kerja sama bisnis antar Lembaga pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi/lembaga penelitian, Lembaga keuangan, dan komunitas ekonomi serta belum terbangunnya manajemen satu data pembangunan ekonomi yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku ekonomi.

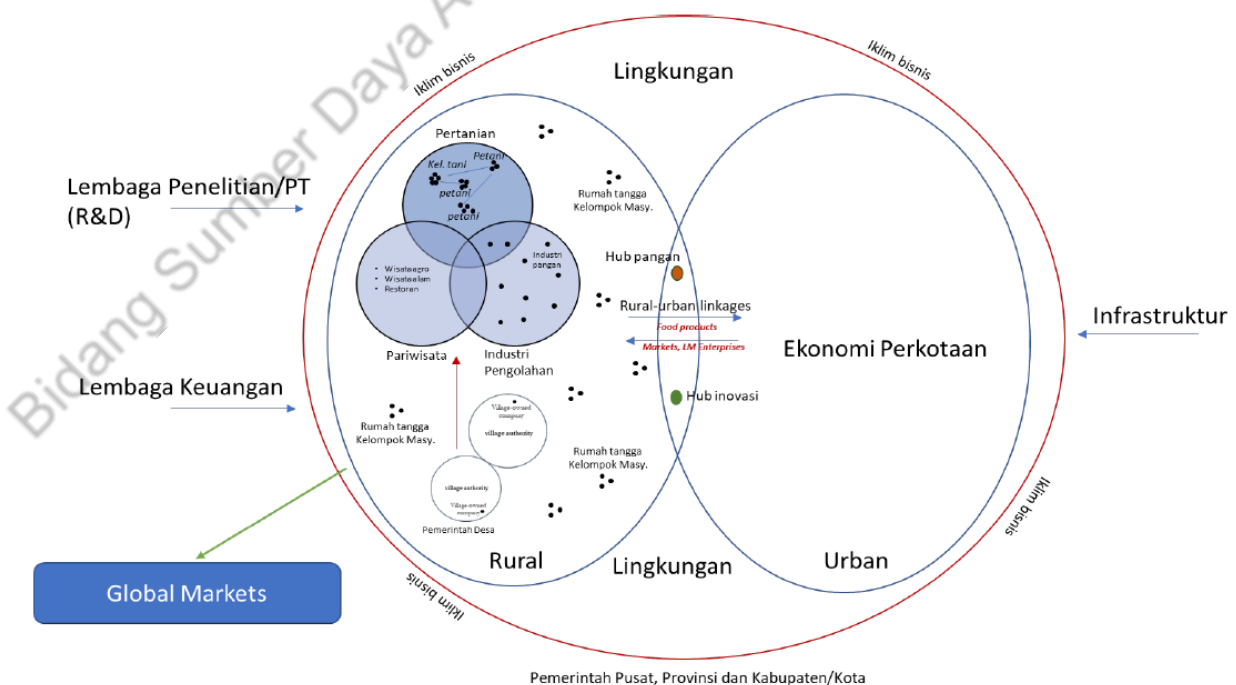
Simpul inovasi (*innovation hub*) merupakan sarana untuk mengorkestrasikan sumber daya ekonomi, serta sebagai elemen penting pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah karena sebagai wadah penciptaan inovasi yang dapat mengintegrasikan aktivitas ekonomi di pedesaan dan perkotaan, selain elemen simpul pangan. Kabupaten Bandung memiliki kekhasan karakteristik wilayah, selain

karena berbatasan dengan kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat, juga memiliki karakteristik ekonomi perkotaan dan perdesaan.

Dari sisi ekonomi wilayah, pengembangan simpul inovasi di Kabupaten Bandung merupakan pusat layanan inovasi kluster ekonomi dalam memperluas pelaku usaha dengan peluang dalam peningkatan kualitas dan produktivitas serta mendorong orientasi kewirausahaan pelaku usaha yang dikelola oleh komunitas pelaku ekonomi bersama-sama pemerintah, perguruan tinggi/lembaga penelitian, sektor usaha dan lembaga lainnya yang terlibat dan penunjang.

Tujuan pengembangan ekosistem simpul inovasi ini adalah (1) mengorkestrasikan seluruh sumber daya perekonomian yang dimiliki di Kabupaten Bandung; dan (2) meningkatkan partisipasi, kolaborasi, serta *knowledge sharing* antar para pelaku ekonomi dalam peningkatan skala ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 2.2 Ekosistem pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Bandung



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, Wardhana (2021)

3. Tinjauan Rencana dan Kebijakan Perekonomian



3.1 Tinjauan Kebijakan Nasional

Tinjauan kebijakan pada tingkat nasional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tahun 2008-2028, Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional Tahun 2018-2025, serta Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) Tahun 2019-2024.

1. RPJPN Tahun 2005-2025

RPJPN Tahun 2005-2025 tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN. Di dalam RPJPN, tercantum visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yaitu **“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan, yang mana arahan pembangunan perekonomian nasional dijelaskan sebagai salah satu bentuk perwujudan dari misi **“Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing”**.

Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, khususnya dalam perspektif sektor ekonomi ditunjukkan dengan: (1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkesinambungan; serta, (2) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Lebih lanjut, untuk memperkuat daya saing bangsa yang dimaksud tersebut, pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk **“Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global”**.

2. RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dan terakhir dalam kerangka pentahapan pembangunan RPJPN 2005-2025. Sesuai arahan RPJPN, sasaran

pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN Tahun 2020-2024 tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. Visi Presiden 2020-2024 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi tersebut di dalam RPJMN 2020-2024 diwujudkan dalam melalui misi **“Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Selain itu, Presiden juga menetapkan Arahan Presiden untuk pembangunan ekonomi yaitu dengan melakukan **transformasi ekonomi** dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terdapat 7 agenda utama dalam RPJMN 2020-2024, salah satunya yang berkaitan dengan sektor ekonomi yaitu: **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”**. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

RPJMN 2020-2024 juga memuat arah pembangunan wilayah untuk wilayah Jawa-Bali. Arah pengembangan yang fokus pada ekonomi yaitu pengembangan sektor unggulan, yang mana proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, di Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung antara lain:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Provinsi Jawa Barat yaitu: lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, emas, garam, dan perikanan tangkap dan budidaya;
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional; dan
- 3) Pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.

3. RTRWN Tahun 2008-2028

RTRWN 2008-2028 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Terhadap RTRWN 2008-2028. Kabupaten Bandung dalam arahan RTRWN 2008-2028 memiliki beberapa fungsi antara lain:

- 1) **Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya.** Kabupaten Bandung bersama dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

- 2) **Kawasan Andalan Cekungan Bandung.** Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, dalam hal ini yang terletak di ruang darat, yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya, dengan sektor unggulan diantaranya:

- a. **Industri:** Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan;
- b. **Pertanian:** Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian;
- c. **Pariwisata:** Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata;
- d. **Perkebunan:** Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan.

- 3) **Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung,** merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

4. Rindekraf Tahun 2018-2025

Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Tahun 2018-2025 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018, dengan Visi "**Ekonomi Kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional**" dan misi "**Mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan melalui pemberdayaan kreativitas sumber daya dan pengembangan usaha Ekonomi Kreatif yang berdaya saing**". Pada tahun 2021, Rindekraf berada pada tahap II (2020-2025) dengan arah kebijakan yaitu:

- 1) Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- 2) Pengembangan kota kreatif untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan meng-

- konservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal;
- 3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan hak kekayaan intelektual;
 - 4) Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung berkembangnya kreativitas;
 - 5) Pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas;
 - 6) Peningkatan pembiayaan bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 - 7) Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam, dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 - 8) Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - 9) Penyediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai dan kompetitif bagi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif;
 - 10) Pengembangan standarisasi dan praktik usaha yang baik (*best practice*) untuk usaha Ekonomi Kreatif dan karya kreatif;
 - 11) Peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - 12) Penguatan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif.

5. MEKSI Tahun 2019-2024

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) memiliki visi mewujudkan **“Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia”**. Terdapat empat target capaian utama, yaitu: (1) peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah; (2) peningkatan peringkat *Global Islamic Economy Index*; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; dan (4) peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku kepentingan ekonomi syariah. Strategi tersebut adalah: (1)

penguatan rantai nilai halal yang terdiri atas industri makanan dan minuman, pariwisata, fesyen Muslim, media, rekreasi, industri farmasi dan kosmetika, dan industri energi terbarukan; (2) penguatan keuangan syariah; (3) penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan (4) penguatan ekonomi digital.

Selain itu, ada enam strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama yaitu: (1) penguatan regulasi dan tata kelola, (2) pengembangan kapasitas riset dan pengembangan; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; dan (4) peningkatan kesadaran dan literasi publik.

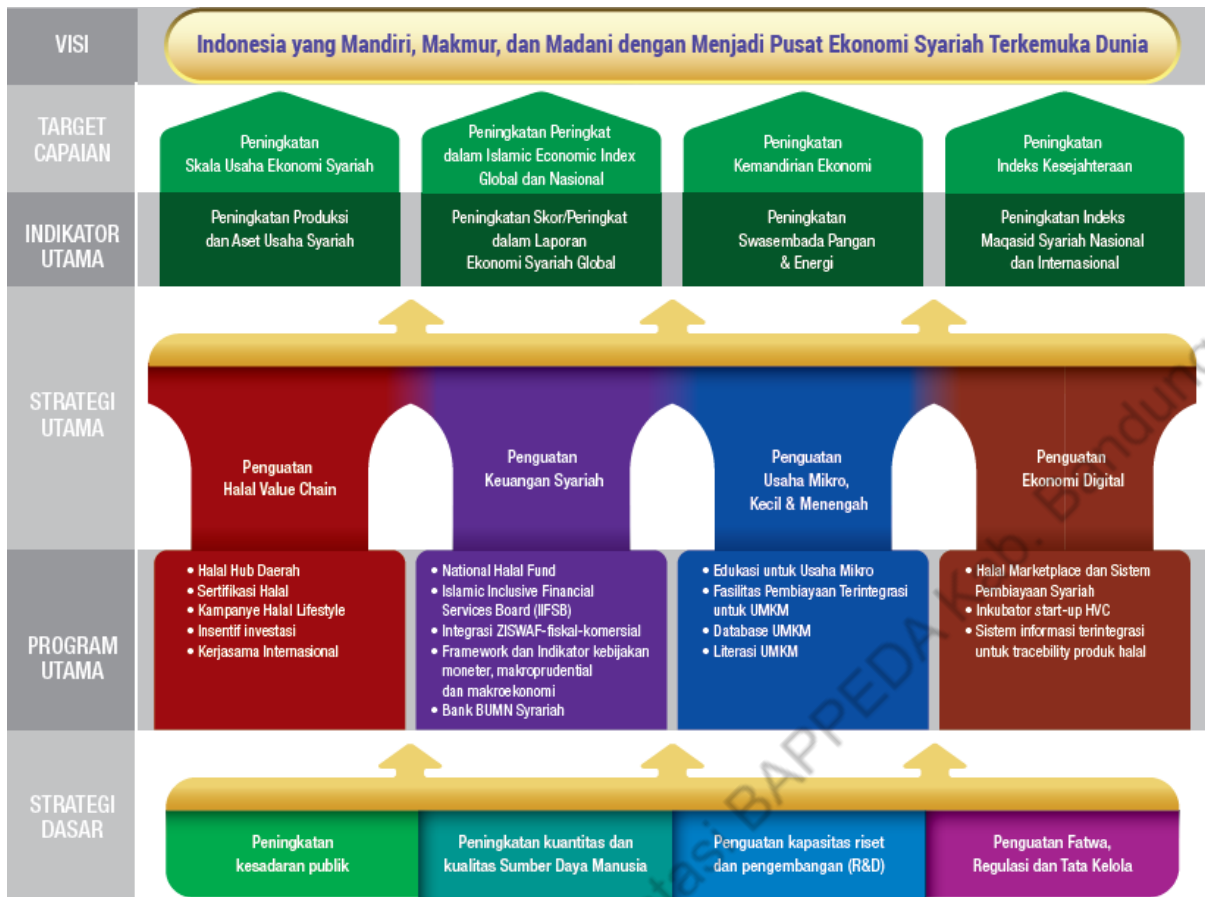
Dalam menjawab tantangan pengembangan ekonomi syariah, implementasi strategi dituangkan dalam *quick wins* yang dibagi menjadi tiga tahapan utama. Pada tahapan pertama, inisiatif diprioritaskan untuk meletakkan landasan penguatan aspek hukum dan koordinasi. Selain itu, kampanye nasional gaya hidup halal dibutuhkan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran mengonsumsi komoditas ramah Muslim.

Pada tahapan kedua, beberapa inisiatif harus dilakukan sebagai program utama, antara lain: pembentukan dana halal nasional. Fungsinya untuk memfasilitasi pembiayaan industri halal. Lainnya adalah pendirian badan halal di tingkat regional untuk penguatan industri halal dan aktivasi *Islamic Inclusive Financial Services Board* (IIFSB). Lembaga ini akan memposisikan Indonesia sebagai referensi internasional dalam pengembangan dan tata kelola dana sosial Islam.

Selanjutnya, dalam tahapan ketiga, harus ada kerja sama dengan luar negeri dalam bentuk pendirian pusat halal internasional untuk mempercepat investasi luar negeri dalam industri halal dan harmonisasi standar sertifikasi halal Indonesia di luar negeri.

Strategi dimaksudkan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia.

Gambar 3.1 Kerangka masterplan ekonomi syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024



Sumber: Bappenas, 2019

3.2 Tinjauan Kebijakan Regional

Tinjauan kebijakan pada tingkat regional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Tahun 2018-2037, serta Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Metropolitan Bandung Raya.

1. RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 diatur dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 dan perubahan pertama pada Perda Nomor 24 Tahun 2010, serta perubahan kedua pada Perda Nomor 7 Tahun 2019. Dalam RPJPD Jawa Barat 2005-2025, Visi Provinsi Jawa Barat adalah “Dengan

Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Fokus sektor ekonomi terdapat pada Misi Dua yaitu “Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah”.

Arah kebijakan misi dua adalah: Arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus berkelanjutan dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Jawa Barat secara adil dan proporsional dengan didukung oleh iklim usaha yang berdaya saing. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi wilayah melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat tahun 2005-2025 diarahkan pada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan

pertanian, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur wilayah dan keuangan daerah.

2. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan RPJM Daerah Keempat, dari lima tahap, dalam kerangka pentahapan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025. RPJM Daerah keempat ini ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu, pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional.

RPJMD Jawa Barat 2018-2023 diatur dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019. Visi Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Pengembangan sektor ekonomi diwujudkan dalam misi keempat yaitu: **“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan”. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru. Misi ini memiliki arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam;
- 2) Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia;

- 3) Pengembangan kawasan kluster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- 4) Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial;
- 5) Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif;
- 6) Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital;
- 7) Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi;
- 8) Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional;
- 9) Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing; serta,
- 10) Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (*Off Taker & Promosi*).

Adanya pandemi COVID-19, yang masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020, memberikan dampak yang luas terhadap kondisi masyarakat serta arah kebijakan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons dengan mengeluarkan Rancangan Perubahan RPJMD 2018-2023 pada tahun 2020.

Perubahan ini berkaitan dengan reformulasi target indikator pembangunan yang diantaranya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPP/PDRB) yang menurun; serta Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan gini ratio yang meningkat. Meski demikian, arahan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat, khususnya yang memiliki hubungan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bandung relatif tidak mengalami perubahan.

3. RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 diatur dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010. Meskipun pada beberapa tahun terakhir, telah terdapat pembahasan mengenai rancangan perubahan, tetapi belum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Arah kebijakan dengan pengembangan sektor ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Kabupaten Bandung terdapat pada arahan kebijakan kewilayahan, yang membagi wilayah provinsi Jawa Barat ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), Kabupaten Bandung termasuk ke dalam WP KK Cekungan Bandung. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP KK Cekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

Fokus pengembangan Kabupaten Bandung dalam kerangka WP KK Cekungan Bandung yaitu diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, agroindustri, wisata alam, tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan. Selain itu, dalam rencana kawasan budidaya, WP KK Cekungan Bandung juga diarahkan untuk mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika. Sedangkan untuk kegiatan pariwisata diarahkan untuk pengembangan eko wisata dan wisata agro.

4. RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung 2018-2037

RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi

yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Dengan Kawasan Perkotaan inti yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, serta pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional, yang berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Kabupaten Bandung memiliki 8 (delapan) kawasan yang termasuk Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, yang ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti, yang terdiri dari:

- 1) *Kawasan Perkotaan Cipatat*, dengan arahan pengembangan sebagai:
 - a. Pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. Pusat kegiatan industri;
 - c. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - d. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. Pusat kegiatan pertanian; dan,
 - f. Pusat kegiatan pariwisata;
- 2) *Kawasan Perkotaan Soreang-Kutawaringin-Katapang*, sebagai:
 - ii. Pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional;
 - iii. Pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
 - iv. Pusat pelayanan kesehatan regional;
 - v. Pusat kegiatan industri;
 - vi. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - vii. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

- viii. Pusat kegiatan pertanian; dan,
 - ix. Pusat kegiatan pariwisata.
- 3) *Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih*, sebagai:
 - a. Pusat perdagangan dan jasa;
 - b. Pusat kegiatan industri;
 - c. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan; dan,
 - d. Pusat kegiatan pariwisata.
 - 4) *Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek*, sebagai:
 - a. Pusat perdagangan dan jasa;
 - b. Pusat kegiatan industri;
 - c. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - d. Pusat kegiatan pertanian; dan,
 - e. Pusat kegiatan pariwisata.
 - 5) *Kawasan Perkotaan Cicalengka*, sebagai:
 - a. Pusat perdagangan dan jasa skala;
 - b. Pusat kegiatan industri;
 - c. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - d. Pusat kegiatan pertanian; dan,
 - e. Pusat kegiatan pariwisata;
 - 6) *Kawasan Perkotaan Majalaya-Ciparay*, sebagai:
 - a. Pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. Pusat pelayanan kesehatan regional;
 - c. Pusat kegiatan industri;
 - d. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - e. Pusat kegiatan pertanian; dan,
 - f. Pusat kegiatan pariwisata;
 - 7) *Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang*, sebagai:
 - ii. Kawasan pendidikan tinggi;
 - iii. Pusat perdagangan dan jasa;
 - iv. Pusat kegiatan industri;
 - v. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - vi. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

- vii. Pusat kegiatan pertanian; dan,
- viii. Pusat kegiatan pariwisata;

- 8) *Kawasan Perkotaan Banjaran*, sebagai
 - a. Pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. Pusat kegiatan industri;
 - c. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - d. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. Pusat kegiatan pertanian; dan,
 - f. Pusat kegiatan pariwisata;

5. RENIP Metropolitan Bandung Raya Tahun 2015-2050

Dokumen Rencana Indik Pengembangan (RENIP) Metropolitan Bandung Raya merupakan hasil kajian Bappeda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Di dalam kajian ini, dirumuskan visi pengembangan Kawasan Metropolitan Bandung Raya Tahun 2050 yaitu "**Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern berbasis wisata perkotaan, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS)**". Visi ini diwujudkan melalui 4 (empat) misi diantaranya:

- 1) *Mewujudkan Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern;*

Arah kebijakan sektor ekonomi pada misi ini adalah: pengembangan industri kreatif sebagai basis industri utama; pengembangan industri besar, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan; serta, penyusunan aturan pembatasan industri dengan tingkat polutan tinggi.

- 2) *Meningkatkan sektor unggulan wisata perkotaan;*

Arah kebijakan sektor ekonomi pada misi kedua ini adalah: pengembangan wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan, dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan; pengembangan jalur wisata tematik yang menghubungkan wisata perkotaan dengan wisata budaya dan

alam; serta, pengembangan riset pasar secara berkesinambungan pada kawasan-kawasan prioritas kabupaten/kota di wilayah MBR.

3) *Mewujudkan Metropolitan Bandung Raya sebagai industri kreatif;*

Arah kebijakan sektor ekonomi pada misi ketiga ini adalah: pemetaan menyeluruh dan berkala terhadap potensi usaha kreatif di wilayah MBR; peningkatan kapasitas daya saing produk kreatif; serta, penataan mata rantai industri kreatif berdasarkan simpul dan kluster.

4) *Mewujudkan Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan Seni (IPTEKS);*

Arah kebijakan sektor ekonomi pada misi keempat ini adalah: pengarahannya industri untuk menggunakan hasil riset; serta, penguatan jejaring penyedia dan pengguna teknologi.

3.3 Tinjauan Kebijakan Lokal

Tinjauan kebijakan pada tingkat lokal meliputi RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, serta RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2009-2029.

1. RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 diatur dalam Perda Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011, dan perubahannya pada Perda Nomor 14 Tahun 2019. Di dalam RPJPD, visi Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 adalah **“Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025”**. Visi ini diwujudkan dalam 6 (enam) misi, khusus sektor ekonomi, diwujudkan oleh misi 6: **“Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing”**.

Kabupaten Bandung memiliki potensi di bidang pertanian, pariwisata, maupun

industri dan bila seluruh potensi sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif (Koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional), pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan (OVOP), dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, makam akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi keenam ini merupakan penjabaran dari visi Kerta Raharja yang memfokuskan pada pengembangan agribisnis, industri manufaktur, pariwisata, jasa, perdagangan, investasi daerah, pengurangan pengangguran penduduk, pengurangan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Dari fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis potensi lokal.

Dalam kerangka pentahapan RPJPD, saat ini telah memasuki Tahap IV (2021-2025). Tahap ini ditekankan pada pemantapan perekonomian yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Kondisi yang diharapkan pada tahap ini:

- Struktur perekonomian semakin kokoh yang ditandai dengan terdiversifikasinya sektor dan kegiatan ekonomi yang berkembang yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang pembangunan.
- Diversifikasi ekonomi tidak hanya pada pengembangan berbagai produk unggulan dalam satu sektor namun juga tercipta keterpaduan antara sektor pertanian, industri, dan jasa. Diversifikasi ekonomi didasarkan pada capaian kondisi ekonomi yang telah berdaya saing pada tahapan sebelumnya sehingga meningkatkan kesempatan

bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak serta meningkatkan taraf hidup.

- Keahlian dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan sektor ekonomi sudah terspesialisasi dan semakin fleksibel dalam menciptakan inovasi.
- Produksi dan kualitas sektor pertanian sudah meningkat ditandai dengan adanya pengolahan limbah secara terpadu. Perkembangan pertanian diarahkan pada pengembangan agroindustri yang berbasis sumberdaya lokal dan dikelola oleh masyarakat lokal melalui korporasi pertanian untuk memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian.
- IKM dan UKM yang berkembang sudah mandiri dan berdaya saing serta mampu menstimulus pengembangan dan penciptaan IKM serta UKM baru sehingga tercipta ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
- Pangsa pasar produk – produk unggulan semakin berkembang yang ditandai dengan terciptanya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce*.
- Pengembangan sektor pariwisata semakin diperkuat dengan pengelolaan berbasis masyarakat dan berkembangnya wirausaha – wirausaha pendukung kepariwisataan berbasis masyarakat (*community based tourism enterprises*).
- Perwujudan struktur perekonomian yang kokoh juga ditandai dengan telah berkembangnya lembaga perekonomian masyarakat yang berkelanjutan dan memberikan manfaat serta nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian.
- Investasi semakin meningkat dan sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah yang dikembangkan.
- Ekonomi kreatif yang fokus pada seni pertunjukan dan aplikasi dan game telah dikembangkan ditandai dengan optimalnya kerjasama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas.

Arah kebijakan dalam misi Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing, pada Tahap IV, terdiri dari:

- 1) Berkaitan dengan isu ekonomi kemasyarakatan yang berdaya saing dan berkelanjutan, memiliki arah kebijakan:
 - Terdiversifikannya sektor dan kegiatan ekonomi yang berkembang sehingga tercipta inovasi dari keterpaduan antara sektor pertanian, industri, serta perdagangan dan jasa;
 - Berkembangnya lembaga perekonomian masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan; serta,
 - Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor pembangunan perekonomian.
- 2) Berkaitan dengan isu peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan, memiliki arah kebijakan meliputi:
 - Produksi dan kualitas sektor pertanian sudah meningkat ditandai dengan adanya pengolahan limbah secara terpadu;
 - Berkembangnya agroindustri yang berbasis sumberdaya lokal dan dikelola oleh masyarakat lokal melalui korporasi pertanian untuk memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian;
 - IKM (industri kecil menengah) dan UKM (usaha mikro dan koperasi) yang berkembang sudah mandiri dan berdaya saing serta mampu menstimulus pengembangan dan penciptaan IKM dan UKM baru sehingga tercipta ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan;
 - Berkembangnya ekonomi kreatif yang difokuskan pada pengembangan seni pertunjukan dan aplikasi dan *game* yang ditandai dengan optimalnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif;

- Berkembangnya pangsa pasar produk-produk unggulan yang ditandai dengan terciptanya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital dan *e-commerce*;
- Penguatan sektor pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dan berkembangnya wirausaha-wirausaha pendukung kepariwisataan berbasis masyarakat (*community based tourism enterprise*); serta,
- Meningkatnya investasi yang sesuai dengan karakteristik perekonomian daerah yang dikembangkan.

Berdasarkan tinjauan RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025 maka dapat dirumuskan keterkaitan antara visi, misi, dan arah kebijakan pengembangan ekonomi untuk arah pembangunan jangka panjang pada tingkat nasional, regional Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan visi, misi, dan arah kebijakan pada rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bandung

| | RPJPN (2005-2025) | RPJPD Jawa Barat (2005-2025) | RPJPD Kab. Bandung (2005-2025) |
|--------------------------|--|---|--|
| Visi | “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” | “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia” | “Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025” |
| Misi (Ekonomi) | “Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing” | “Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah” | “Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing” |
| Arah Kebijakan (Ekonomi) | Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global | Peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan pertanian, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur wilayah dan keuangan daerah | Pengembangan agribisnis, industri manufaktur, pariwisata, jasa, perdagangan, investasi daerah, pengurangan pengangguran penduduk, pengurangan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan sintesa tersebut dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan pengembangan ekonomi, pada tingkat nasional, regional dan lokal, adalah perwujudan ekonomi yang berdaya saing, dengan penekanan pengembangan produk-produk lokal.

Di provinsi Jawa Barat, pengembangan potensi domestik meliputi pertanian, bisnis

kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur wilayah dan keuangan daerah

Di Kabupaten Bandung, potensi domestik yang dimaksud meliputi agribisnis, industri manufaktur, pariwisata, jasa dan perdagangan. Sektor tersebut yang kemudian menjadi fokus pada masterplan.

2. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026

Sebagaimana disampaikan pada Bab I, masterplan ini disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, sehingga tinjauan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan pada dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Pada Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026, visi Kabupaten Bandung 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”**. Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) misi, dengan misi yang fokus pada pengembangan sektor ekonomi yaitu misi 1 **“Membangkitkan Daya Saing Daerah”**.

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Selain itu, daerah yang berdaya saing merupakan kunci pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Dalam mempersiapkan perekonomian daerah yang berdaya saing, maka

beberapa faktor perlu didorong dan ditingkatkan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah peningkatan daya saing sektor perdagangan, industri besar dan industri kecil menengah, peningkatan daya saing sektor pertanian serta pariwisata. Selain itu peningkatan investasi juga merupakan hal utama dalam mendukung perekonomian daerah yang berdaya saing.

Tujuan dan sasaran dari misi membangkitkan daya saing daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya daya saing sektor pertanian;
- Meningkatnya daya saing produk unggulan industri;
- Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern;
- Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- Meningkatnya daya saing pariwisata;
- Meningkatnya investasi.

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka dapat disandingkan arah kebijakan ekonomi dari RPJMN, RPJMD Jawa Barat, dan Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung, sebagai berikut

Tabel 3.2 Keterkaitan visi, misi, dan arah kebijakan pada rencana pembangunan jangka menengah di tingkat nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bandung

| | RPJMN (2020-2024) | RPJMD Jawa Barat (2018-2023) | Rancangan Awal RPJMD Kab. Bandung (2021-2026) |
|----------------|---|---|--|
| Visi | “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” | “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” | “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” |
| Misi (Ekonomi) | “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing” | “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan” | Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. |

| | RPJMN (2020-2024) | RPJMD Jawa Barat (2018-2023) | Rancangan Awal RPJMD Kab. Bandung (2021-2026) |
|--------------------------|---|---|---|
| Arah Kebijakan (Ekonomi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangan yang beragam; 2. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia; 3. Klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; 4. Hutan rakyat lestari dan perhutanan sosial; 5. Pariwisata dan ekonomi kreatif; 6. Promosi pariwisata berbasis digital; 7. Klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi; 8. Sistem dan jaringan distribusi barang; 9. Iklim usaha yang berdaya saing; serta, 10. Kualitas kelembagaan, dan dukungan pembiayaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya saing sektor perdagangan; 2. Meningkatnya daya saing produk unggulan industri; 3. Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern; 4. Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 5. Meningkatnya daya saing pariwisata di Kabupaten Bandung; 6. Meningkatnya investasi di Kabupaten Bandung. |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3. RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

RTRW Kabupaten Bandung tahun 2016-2036 diatur dalam Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016. Penataan Ruang wilayah Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2036 adalah: **“Mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.”**

Pengembangan perekonomian dijelaskan melalui makna sinergitas, kemandirian pembangunan dan kawasan yang berdaya saing tinggi. Hal ini berarti, memiliki kemampuan dalam pengembangan kawasan sentra produksi barang jadi khususnya tekstil dan komoditas unggulan yang memanfaatkan

bahan baku pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan-an, kehutanan dan perternakan menjadi *leading sector* untuk diolah dan dikembangkan dalam pasokannya bagi kebutuhan lokal, regional, nasional bahkan internasional. Hal tersebut layak dikembangkan sebagai satuan pengembangan agribisnis, dimana proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembinaan dan penyuluhan, pembibitan, penyiapan lahan, budidaya, panen, proses pengolahan sampai pemasaran, termasuk pusat penelitian, pemasaran dan agrowisata.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam

kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan pembagian 8 (delapan) WP sesuai fokus pengembangan Daerah untuk mewujudkan kemandirian dan pengelolaan pembangunan yang efektif dan merata.
- 2) Kebijakan Pemantapan dan Pengembangan Struktur Ruang yang sinergi sesuai fungsi pusat kegiatan, dan sistem sarana prasarana yang terpadu.
- 3) Kebijakan Pelestarian Kawasan Lindung dan Pengembangan Kawasan Budidaya dengan prinsip keberkelanjutan.
- 4) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis sebagai alokasi ruang untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan.

- 5) Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Strategi yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi, terdapat pada strategi 4 yaitu melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan, meliputi :

- a. Menata dan mengendalikan kawasan berfungsi lindung;
- b. Mengembangkan potensi ekonomi, memberdayakan potensi masyarakat lokal, yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, penerapan insentif dan disinsentif; dan
- c. Mengembangkan kawasan terpadu.

Tabel 3.3 Keterkaitan arah pemanfaatan ruang pada rencana tata ruang wilayah di tingkat nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bandung

| Dokumen | Arahan pemanfaatan ruang |
|-------------------------------|---|
| RTRWN (2008-2028) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya; Berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 2. Kawasan Andalan Cekungan Bandung; Pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata dan perkebunan; 3. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; Kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. |
| RTRW Jawa Barat (2009-2029) | WP KK Cekungan Bandung meliputi pengembangan sektor unggulan pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. |
| RTRW Kab. Bandung (2016-2036) | Pengembangan kawasan sentra produksi barang jadi khususnya tekstil dan komoditas unggulan yang memanfaatkan bahan baku pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan perternakan menjadi leading sector untuk diolah dan dikembangkan dalam pasokannya bagi kebutuhan lokal, regional, nasional bahkan internasional. |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

4. *Grand Design* Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung 2011-2015

Dokumen *Grand Design* Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung 2011- 2015 merupakan kajian yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Bandung pada tahun 2011 sebagai upaya untuk mengarahkan pengembangan ekonomi masyarakat agar memiliki arah yang jelas dalam merespon dinamika yang ada pada saat itu maupun isu-isu aktual yang dapat diklasifikasikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan pengembangan ekonomi masyarakat. *Grand design* ini memiliki tiga tahapan pengembangan: Tahapan awal jangka pendek pada tahun 2011-2015, jangka menengah 2015-2020, serta jangka panjang 2020-2025.

Arahan pengembangan jangka panjang tahun 2020-2025, merupakan tahap pemantapan yang mana diharapkan sudah terbangun industri yang tangguh dengan pendekatan klaster industri. Selain itu, sudah terbangunnya keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, pada tahapan ini sektor industri sudah melakukan ekspansi pasar dan lebih berorientasikan ekspor.

Dari hasil analisis sektoral, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Deregulasi kebijakan dan peraturan yang terkait dengan penanaman modal (asing maupun dalam negeri);
- 2) Peningkatan pola kemitraan antara industri kecil dan menengah dengan industri besar di sektor ekonomi yang lebih luas;
- 3) Pengembangan dan pemberdayaan UKM pada sektor-sektor dominan di Kabupaten Bandung;
- 4) Peningkatan kemampuan masyarakat yang bekerja pada sektor dominan di Kabupaten Bandung;
- 5) Pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk guna menekan tingginya *dependency ratio*;
- 6) Peningkatan kapasitas kemampuan penduduk produktif guna dapat

menopang lebih terhadap penduduk kurang produktif;

- 7) Peninjauan kembali pengalihan fungsi lahan sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Bandung;
- 8) Pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan adanya penanaman modal baru di Kabupaten Bandung (baik dari dalam negeri maupun asing);
- 9) Meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan calon tenaga kerja agar memiliki keahlian sesuai dengan yang dispesifikasi oleh sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bandung; serta,
- 10) Meningkatkan pemberdayaan sektor-sektor unggulan dengan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.

Dari analisis mengenai produk unggulan, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pengembangan produk unggulan pada skala UKM dengan pola pemanfaatan sumber daya alam secara optimal;
- 2) Pengembangan produk unggulan berdasar pada keunggulan sumber daya per area;
- 3) Pemasaran produk hortikultura dengan memanfaatkan potensi pasar di kawasan Kota Bandung sebagai pasar terdekat dari Kabupaten Bandung;
- 4) Pengembangan kawasan agropolitan dengan memberikan tawaran investasi kepada swasta untuk turut serta membangun kawasan unggulan per produk tertentu;
- 5) Peningkatan pemberdayaan penduduk lokal dalam mengembangkan kawasan unggulan per produk;
- 6) Peningkatan kemampuan masyarakat lokal terhadap produk unggulan di daerahnya;
- 7) Sosialisasi pemberian bantuan modal dari lembaga keuangan bank dan non-bank kepada petani maupun pengusaha lokal;
- 8) Pembinaan terhadap petani dan pengusaha lokal khususnya dalam pemasaran produk-produk unggulan setiap area;

- 9) Pemanfaatan produk-produk mentah hortikultura menjadi produk setengah jadi maupun jadi yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah produk;
 - 10) Peningkatan kemampuan penduduk lokal terhadap produk unggulan daerahnya guna mengurangi pola urbanisasi;
 - 11) Sinergitas industri besar dengan industri kecil dan menengah guna memberikan dampak positif dari dominasi industri besar dalam perekonomian daerah;
 - 12) Peningkatan kualitas hasil pertanian guna memenuhi standar kelayakan produk pertanian;
 - 13) Penindakan terhadap industri-industri yang memberikan pencemaran lingkungan yang cukup tinggi;
 - 14) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan produk unggulan daerahnya serta mengurangi permasalahan urbanisasi;
 - 15) Peningkatan kemampuan SDM lokal dalam upayanya untuk meningkatkan produktivitas;
 - 16) Sosialisasi bantuan permodalan serta pembinaan pemasaran produk-produk unggulan;
 - 17) Aksesibilitas dan informasi terhadap pasar masih rendah;
 - 18) Kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan;
 - 19) Produk olahan hortikultura belum banyak berkembang sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing; serta,
 - 20) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan khususnya dalam turut serta mengawasi pencemaran lingkungannya.
- Dari analisis mengenai kewilayahan, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:
- 1) Penawaran kerja sama pembangunan sarana dan prasarana bagi swasta di Kabupaten Bandung;
 - 2) Deregulasi kebijakan investasi di Kabupaten Bandung;
 - 3) Peningkatan penyaluran kredit produktif bagi industri kecil dan menengah;
 - 4) Peningkatan distribusi/penyebaran pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bandung;
 - 5) Peningkatan efisiennya pembangunan sarana dan prasarana;
 - 6) Penawaran kerjasama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung wilayah yang saat ini masih kurang memadai;
 - 7) Peningkatan tata kelola administrasi, sertifikasi dan pemetaan lahan;
 - 8) Peningkatan pembangunan wilayah pedesaan;
 - 9) Penertiban pembagunan pada lahan yang tidak sesuai peruntukan dan polanya;
 - 10) Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana tanah longsor dengan tetap mempertahankan kaidah pembangunan yang ramah lingkungan;
 - 11) Penertiban dan peninjauan kembali alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kaidah ramah lingkungan;
 - 12) Penertiban dan sosialisasi perijinan terkait dengan pembangunan baik pada skala kecil maupun besar;
 - 13) Penertiban terhadap industri yang melakukan pencemaran lingkungan;
 - 14) Penawaran kerjasama dengan pihak swasta terkait dengan penanganan sampah agar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penampungan akhir sampah;
 - 15) Pembangunan infrastruktur tidak saja memperhatikan distribusi penyebaran namun juga tetap memperhatikan kaidah ramah lingkungan;
 - 16) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung wilayah sesuai dengan fungsi lahannya;
 - 17) Peningkatan tata kelola administrasi, sertifikasi dan pemetaan terhadap lahan masih lemah; serta,
 - 18) Pemberian batas yang jelas antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

3.4 Tinjauan Kebijakan Sektoral

Tinjauan kebijakan sektoral meliputi pengembangan pertanian dan perkebunan, industri, pariwisata, serta perdagangan.

1. Pertanian dan Perkebunan

Konsep pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bandung dituangkan dalam Masterplan Pengembangan Kawasan Pertanian Kabupaten Bandung yang disusun Bappeda pada tahun 2017. Tujuan pengembangan kawasan Pertanian di kabupaten Bandung adalah membangun sektor pertanian termasuk sektor peternakan kabupaten Bandung sebagai sektor yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan dan keunggulan komparatif serta memiliki nilai strategis terhadap kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang berbasis Pertanian/Peternakan. Tujuan khusus pembangunan sektor pertanian/ peternakan Kabupaten Bandung adalah:

- 1) Meningkatkan kontribusi terhadap keamanan pangan khususnya kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Indonesia melalui peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian/peternakan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pertanian/peternakan melalui percepatan peluang untuk meningkatkan pendapatan yang berasal usaha pertanian/peternakan;
- 3) Meningkatkan Kuantitas dan kualitas produk ternak yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan baik untuk kebutuhan lokal ataupun kebutuhan ekspor;
- 4) Menciptakan pola pemanfaatan sumberdaya yang bersifat terintegrasi demi tercapainya keberlanjutan ekologis di dalam proses produksi pertanian/peternakan; serta,
- 5) Mempertahankan dan mengedepankan fungsi-fungsi sosial pertanian/peternakan.

Berdasarkan tujuan dari pembangunan kawasan pertanian Kabupaten Bandung, terdapat beberapa sasaran yang diharapkan akan tercapai dalam jangka panjang. Beberapa sasaran utama yang akan dicapai diantaranya:

- 1) Tercapainya kecukupan konsumsi dan ketahanan pangan sesuai dengan norma gizi masyarakat Jawa Barat pada tahun 2022.

Untuk jangka pendek, terciptanya peningkatan konsumsi pangan yang bersumber protein hewani dengan angka harapan minimal 4.28 % pertahun sampai tahun 2022.

- 2) Tercapainya tingkat kontribusi sektor pertanian/peternakan yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2022.

Untuk jangka pendek, PDRB Sektor pertanian Kabupaten Bandung akan tumbuh minimal sebesar 8,11% dan peternakan sebesar 6.84 persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (imbalan) bagi petani/peternak sebesar 4.96 % pertahun.

- 3) Tercapainya ketersediaan pangan dan ternak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan kabupaten Bandung tahun 2022 serta dapat menciptakan laju penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian dan peternakan sebesar 3.24 persen per tahun.

- 4) Terwujudnya agribisnis pertanian/peternakan sebagai salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki kabupaten Bandung.

- 5) Terbentuknya kawasan pertanian/peternakan kabupaten Bandung untuk pengembangan komoditas unggulan baik Tanaman/ternak.

Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis dari masing-masing komoditas yang ada di Kabupaten Bandung, maka telah ditetapkan 9 (sembilan)

komoditi yang terbagi kedalam 4 kawasan yaitu 1) komoditi tanaman pangan yang meliputi : Padi, Kedelai, Jagung dan Ubi Kayu. 2) komoditi Tanaman Hortikultura yang

meliputi Bawang merah, Cabai dan Kentang. 3) komoditi Tanaman Perkebunan Kopi dan Teh. 4) komoditi Peternakan yaitu sapi perah dan domba.

Tabel 3.4 Arahan kawasan, target/sentra, strategi utama, serta klasifikasi pengembangan pertanian di Kabupaten Bandung

| Kawasan | Target/Sentra | Strategi utama | Klasifikasi kawasan berdasarkan tahap pertumbuhannya |
|----------------------|---|---|---|
| Tanaman Pangan | Peningkatan produktivitas 2-3 % untuk meningkatkan produksi Jawa Barat terhadap Produksi Nasional | 1. Peningkatan produktivitas; 2. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi; 3. Peningkatan kehilangan hasil; 4. Peningkatan mutu hasil; 5. Pengembangan Industri Olahahan; 6. Diversifikasi produk tanaman pangan. | a. Penumbuhan b. Pengembangan c. Pemantapan |
| Tanaman Hortikultura | Bawang merah, Cabe, Tomat, Kentang, Kubis dan Stroberi | 1. Peningkatan produktivitas; 2. Peningkatan Nilai tambah dan daya saing produk. | a. Baru/Inisiasi b. Penumbuhan c. Pengembangan d. Pemantapan |
| Perkebunan | Kopi, teh, tembakau | 1. Peningkatan nilai konsumsi baik lokal ataupun dunia; 2. Peningkatan produktivitas. | a. Baru/Inisiasi b. Penumbuhan c. Pengembangan d. Pemantapan |
| Peternakan | Sapi perah dan domba | 1. Peningkatan produktivitas; 2. Peningkatan Nilai tambah dan daya saing produk. | a. Baru/Inisiasi b. Penumbuhan c. Pengembangan d. Pemantapan |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2017, dimodifikasi

Dokumen kajian lainnya adalah **Rantai Pasok dan Pemasaran Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2019** yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan stabilitas distribusi/pasokan pangan strategis dalam waktu mingguan di distributor dan pedagang yang berada di kawasan pasar pemerintah di Kabupaten Bandung.

Rekomendasi dari hasil kajian ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung mengatur kegiatan perdagangan pangan melalui kebijakan dan pengendalian yang diarahkan pada:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi
- b. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha
- c. Peningkatan akses pasar bagi produk lokal dan
- d. Perlindungan konsumen

Walaupun karakteristik wilayah Kabupaten Bandung adalah daerah pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan tidak bisa dipenuhi dari produksi lokal saja sehingga diperlukan jaminan pasokan pangan melalui fasilitasi temu bisnis antar pedagang bahan pangan atau menyusun MoU dengan daerah produsen. Melalui hasil

analisis ini dapat diketahui bahwa Kota Bandung khususnya Pasar Induk Caringin menjadi wilayah pemasok penting bagi berbagai komoditas pangan di Kabupaten Bandung antara lain bawang merah, bawang putih, cabe merah tanjung, cabe merah rawit, kedelai, daging sapi, daging ayam broiler, telur ayam ras, dan ikan mas. Selain dari Kota Bandung, komoditas ikan di Kabupaten Bandung banyak didatangkan dari Purwakarta, Cianjur, Subang dan Bandung Barat. Komoditas telur ayam ras banyak didatangkan dari Blitar. Adapun beras banyak didatangkan dari Cianjur, Banjar, Banyuwangi, Cicalap, Cilegon, Jember, Indramayu, Majalengka, Karawang, Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.

Untuk menjamin kelancaran dan stabilitas pasokan pangan, Pemerintah Kabupaten Bandung dapat menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok. Mekanisme dan tata cara penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan meliputi :

- a. Pendaftaran atau izin usaha
- b. Pelaporan fasilitas penyimpanan pangan pokok
- c. Pelaporan penetapan secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai jenis, asal, dan jumlah pangan pokok yang masuk dan keluar dari gudang, dan
- d. Pelaporan cakupan wilayah dan jumlah pendistribusian pangan pokok yang disimpan

Berdasarkan kinerja pengumpulan data rantai pasok dan pemasaran pangan Kabupaten Bandung pada tahun 2019, kegiatan pengumpulan data di masa yang akan datang harus diperbaiki dan

ditingkatkan kualitasnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam hal responden yang disurvei adalah distributor/agen serta sebaiknya melibatkan toko modern. Selain itu, waktu pengumpulan data rutin 1 kali dalam seminggu dan langsung diupdate ke dalam aplikasi sigapass dan pangan yang disurvei harus dipastikan mencakup seluruh komoditas yang telah ditentukan.

2. Perdagangan

Salah satu dokumen kajian yang berkaitan dengan sektor perdagangan adalah **Distribusi perdagangan komoditas bahan pokok dan bahan strategis** yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk; Memantau pola distribusi perdagangan barang pokok dan barang strategis di pasar dan Gudang (agen/pangkalan); Mengukur harga barang pokok dan barang strategis di pasar dan gudang untuk menghindari terjadinya gejolak harga dan disparitas harga yang tinggi antar daerah/wilayah di Kabupaten Bandung; serta, Menyusun strategi pengembangan pola distribusi perdagangan dan penyaluran barang pokok dan barang strategis masyarakat Kab. Bandung.

Hasil survei atas pola distribusi komoditas bahan pokok yang terdiri atas 10 komoditas, yaitu meliputi : (1) beras; (2) minyak goreng; (3) gula pasir; (4) telur; (5) daging ayam ras; (6) daging sapi; (7) bawang merah; (8) bawang putih; (9) cabe merah; dan (10) cabe rawit. Selain itu survei atas komoditas barang strategis meliputi 2 komoditas, yaitu : (1) Gas; dan (2) Pupuk.

Berdasarkan analisis data terkait pola distribusi bahan pokok di Kabupaten Bandung yang perlu mendapat perhatian:

- 1) MPP (Margin Perdagangan dan Pengangkutan) tertinggi di atas 100 persen adalah komoditas bahan pokok cabe rawit, cabe merah, bawang putih 50%, bawang merah 40%. Ketiga komoditas ini merupakan komoditas hasil pertanian dan merupakan

komoditas penting dan penyumbang inflasi yang besar di Indonesia (secara umum). Komoditas ini sangat tergantung dari pasokan dan sangat tergantung dari hasil pertanian yang kadang mengalami kegagalan. Selain itu, terdapat pola petani langsung menjual ke pasar induk. Di sini juga terdapat calo yang membuat harga komoditas tersebut mengalami kenaikan. Beberapa petani juga menjual ke pedagang pengepul, selanjutnya barang tersebut dikirim ke luar Kabupaten Bandung, yaitu ke Pasar Induk Caringin, Cikopo, Cibitung, Tanah Tinggi, dan Kramat Jati. Pola penjualan petani Kabupaten Bandung kebanyakan menjual ke Pasar Caringin, kemudian para distributor dan agen mengambil barang tersebut dari Pasar Caringin.

Berdasarkan analisis tersebut maka saran untuk komoditas hasil pertanian di Kabupaten Bandung agar efisien, maka dibutuhkan pusat perdagangan hasil pertanian terpusat di Kabupaten Bandung, sehingga para distributor, agen dapat mengambil barang komoditas tersebut di sentra-sentra komoditas yang sengaja dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menata ulang pola distribusi yang secara alamiah sudah terbentuk ini, yang ternyata tidak efisien, maka perlu dibuat sistem terintegrasi untuk membenahi tata kelola distribusi perdagangan komoditas penting di Kabupaten Bandung.

- 2) Pola distribusi yang perlu dibenahi adalah pola distribusi daging ayam ras, karena MPP adalah sebesar 84,44%, hal ini diduga adanya sistem kartel di tingkat pengecer ke konsumen akhir, sehingga harga daging ayam ras di tingkat konsumen akhir tidak pernah mengalami penurunan, walau harga daging ayam ras di tingkat peternak mengalami penurunan drastis.

Beberapa rekomendasi yang dapat disarankan kepada Pemerintah kabupaten Bandung untuk peningkatan kualitas

distribusi Perdagangan komoditas bahan pokok dan barang strategis, adalah:

- Perlu sistem tata kelola baru untuk membenahi pola distribusi komoditas bahan pokok agar efisien, efisiensi tata kelola ini akan sangat membantu dalam menekan angka inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Sistem tata kelola yang baru selain untuk melindungi konsumen akhir, yang perlu diperhatikan adalah melindungi petani atau produsen, berdasarkan hasil survei kenaikan harga di pasar yang tinggi atas komoditas hasil pertanian (bawang merah, bawang putih, cabe merah dan cabe rawit) tersebut tidak dirasakan oleh petani. Pada pola distribusi khusus untuk hasil pertanian banyak dinikmati oleh distributor, agen dan pengecer, walau kadang mereka harus menerima risiko (barang cepat busuk dan rusak dalam proses).
- Membangun pusat distribusi komoditas bahan pokok dan strategis dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Digitalisasi sistem distribusi yang terintegrasi dengan para pelaku distribusi dari hulu ke hilir, sehingga dapat memangkas sistem lebih efisien.

Selain itu, terdapat juga dokumen **Road map e-commerce Kabupaten Bandung** yang disusun oleh Bappeda Kab. Bandung tahun 2020. Road map ini memuat arahan kebijakan pengembangan e-commerce yang disusun kedalam 8 (delapan) aspek yaitu:

- 1) Pendanaan, dengan arahan kebijakan:
 - Peningkatan akses pelaku usaha Kabupaten Bandung terhadap kredit usaha;
 - Pemberian pemahaman yang tepat terkait penggunaan kredit usaha bagi pelaku usaha.
- 2) Perpajakan, dengan arahan kebijakan:
 - Peningkatan akses pelaku usaha Kabupaten Bandung terhadap pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan;

- Peningkatan akses pelaku usaha Kabupaten Bandung terhadap tata cara pendaftaran diri dalam perpajakan; dan,
 - Melakukan kerjasama dengan Dirjen Pajak mengenai peningkatan akses perpajakan.
- 3) **Perlindungan Konsumen**, dengan arahan kebijakan:
- Perluasan jangkauan dan intensitas informasi pengajuan izin usaha;
 - Perluasan jangkauan dan intensitas informasi sertifikasi;
 - Memperbaiki sistem sertifikasi sehingga waktu yang diperlukan menjadi lebih cepat, khususnya untuk sektor-sektor tertentu
 - Pemberian subsidi/insentif/hibah bagi pelaku usaha yang belum memiliki kelengkapan izin usaha dan/atau sertifikasi;
 - Mendorong kepemilikan izin usaha dan sertifikasi bagi pelaku UMKM;
 - Mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk yang telah tersertifikasi.
- 4) **Pendidikan dan SDM**, dengan arahan kebijakan:
- Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan tata cara berjualan online bagi pemerintah daerah khususnya dinas-dinas yang langsung berhubungan dengan pelaku UMKM;
 - Peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*);
 - Pengembangan fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*) bagi pelaku usaha;
 - kebutuhan UMKM berdasarkan jenis usaha dan lama pengalaman UMKM dalam berjualan *online*;
 - Memfokuskan pelatihan berdasarkan kelompok usaha;
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemasaran produk secara online dan menjaga serta mengembangkan akun atau toko *e-commerce* yang dimiliki;
 - Memfokuskan pelatihan berdasarkan pengalaman pelaku UMKM dalam berjualan *online*;
 - Memberikan dukungan kepada pelaku UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dalam penggunaan *e-commerce*; serta,
 - Tersedianya alat ukur dari pelatihan mengenai perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*).
- 5) **Infrastruktur Komunikasi**, dengan arahan kebijakan:
- Peningkatan infrastruktur komunikasi (kecepatan internet dan jaringan).
- 6) **Logistik**, dengan arahan kebijakan:
- Peningkatan kapasitas penyediaan jasa logistik lokal/nasional untuk memenuhi kebutuhan pengiriman di seluruh Indonesia;
 - Peningkatan pengetahuan pelaku UMKM di sektor pengolahan khususnya pengolahan perikanan dan barang tidak tahan lama terkait penggunaan jasa logistik.
- 7) **Keamanan Siber**, dengan arahan kebijakan:
- Peningkatan kesadaran keamanan siber dan penerapan sistem manajemen pengamanan informasi;
 - Peningkatan kesadaran konsumen agar mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan dunia maya (*cyber crime*); serta,
 - Terbentuknya sistem dan badan pengaduan terkait keamanan siber.
- 8) **Lainnya**, dengan arahan kebijakan:
- Pendataan dan pemuatan database asosiasi/ komunitas/ paguyuban pelaku UMKM;
 - Memanfaatkan atau mengembangkan keberadaan internet marketers untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM.

3. Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bandung nomor 4 tahun 2019. Di dalam Ripparda, dirumuskan strategi pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten yang terdiri atas 4 (empat) strategi yaitu; destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

Strategi pengembangan destinasi pariwisata dijelaskan melalui penetapan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten (DPD) yang meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten (KPPD), dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten (KSPD). DPD mempunyai fungsi sebagai pintu masuk utama, pusat pelayanan pariwisata, pusat informasi terpadu dan penyebar pergerakan wisatawan ke KPPD dan KSPD.

Tabel 3.5 Lokasi pengembangan destinasi wisata (DPD, KPPD dan KSPD) di Kab. Bandung

| Kategori | Destinasi |
|----------|--|
| DPD | a. DPD Soreang dan sekitarnya dengan pusat DPD Kecamatan Soreang; b. DPD Pacira dengan pusat DPD Kecamatan Ciwidey; a. DPD Pangalengan dengan pusat DPD Kecamatan Pangalengan; b. DPD Majalaya dan sekitarnya dengan pusat DPD Kecamatan Majalaya; c. DPD Cicalengka dan sekitarnya dengan pusat DPD Kecamatan Cicalengka; d. DPD Cimenyan-Cilengkrang-Cileunyi dengan pusat DPD Kecamatan Cileunyi; e. DPD Dayeuhkolot-Baleendah-Margacinta dengan pusat DPD Kecamatan Dayeuhkolot. |
| KPPD | i. KPPD Wisata Petualangan Alam Lamajang; i. KPPD Agrowisata Rekreatif Malabar; i. KPPD Ekowisata Hulu Sungai Citarum; v. KPPD Wisata Perkotaan Terpadu Majalaya; v. KPPD Wisata Alam dan Sejarah Paseh; i. KPPD Wisata Kriya Rancaekek; ii. KPPD Wisata Budaya Cileunyi; i. KPPD Wisata Budaya dan Sejarah Dayeuhkolot dan Baleendah |
| KSPD | a. KSPD Wisata Perkotaan Terpadu Soreang; b. KSPD Agrowisata dan Desa Wisata Ciwidey; c. KSPD Wisata Alam Tirta Situ Patenggang; d. KSPD Agrowisata Rancabali; e. KSPD Seni dan Budaya Tradisional Sunda Jelekong; f. KSPD Perairan Danau Situ Cileunca; g. KSPD Geowisata Panas Bumi Kamojang; h. KSPD wisata alam, dan Sejarah Kerajaan Kendan Cicalengka-Nagreg; i. KSPD Geowisata Cimenyan-Cilengkrang-Cileunyi; dan j. KSPD Wisata Alam, Budaya dan Sejarah Dayeuhkolot dan Baleendah. |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2018, dimodifikasi

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan;
- b. penguatan jejaring Industri Pariwisata regional, nasional, dan internasional untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan

bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan

- c. pengembangan kemitraan industri besar di bidang Pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Kabupaten dengan Industri Pariwisata dengan Industri Pariwisata berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan TDUP dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten, Usaha Pariwisata, dan masyarakat; dan
- b. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten dengan tata kelola dan tata

laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing nasional;

- b. peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata berkompentensi nasional dan internasional; dan
- d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan SDM Pariwisata yang berkompentensi nasional dan internasional.

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung

The image is a composite. The top portion shows a bright blue sky with scattered white clouds. The middle portion is a semi-transparent white box containing the title. The bottom portion shows a wooden suspension bridge with a white rope railing, crossing a river with clear, light-green water. The background features a steep, forested hillside with some trees showing autumnal colors. A watermark 'DA Kab. Bandung' is visible diagonally across the middle section.

4. Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Bandung



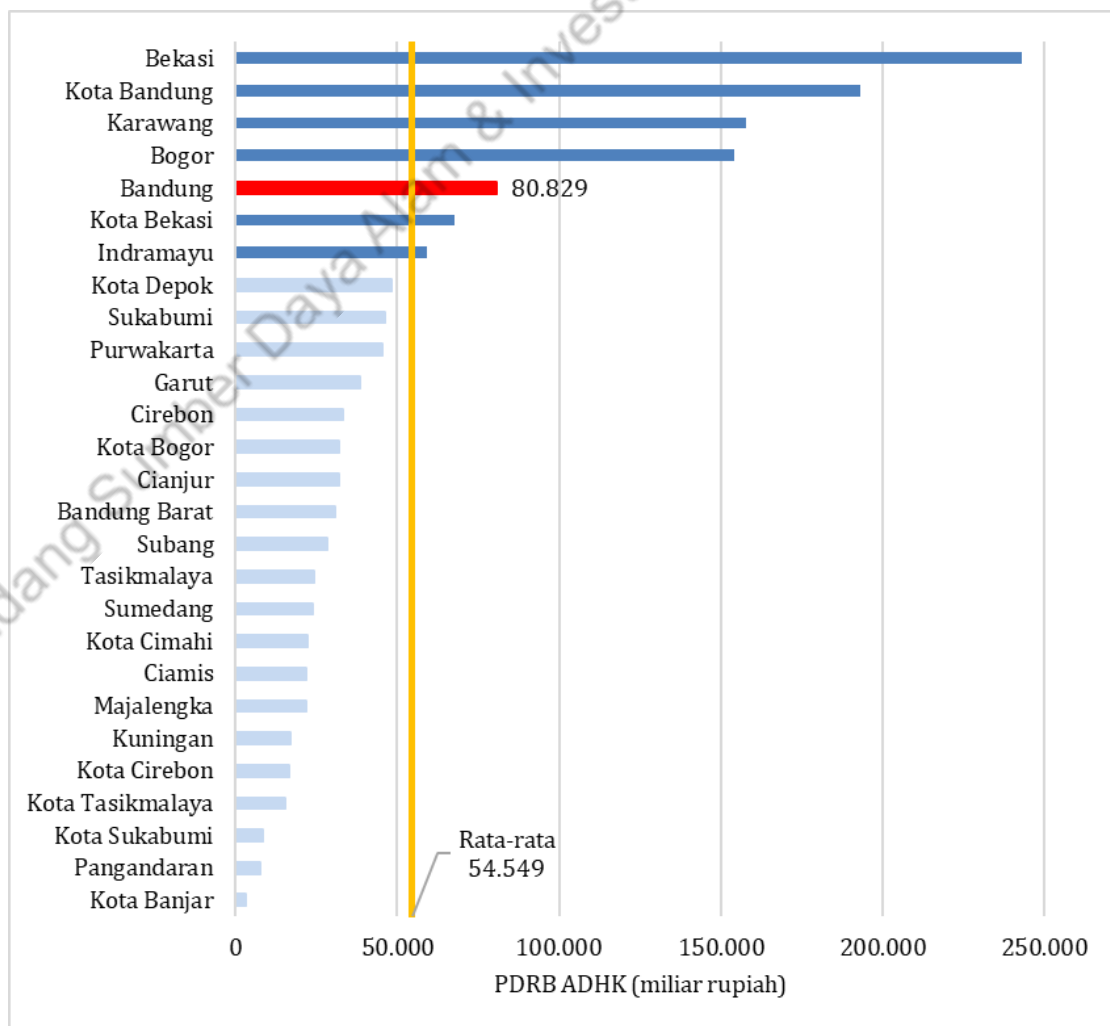
4.1 Ekonomi Kab. Bandung dalam Konstelasi Regional

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, Kabupaten Bandung memiliki nilai PDRB ADHK sebesar 80.829 miliar rupiah, atau berada pada peringkat ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan kontribusi sebesar 5,49%. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bandung tersebut juga berada di atas nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 55.549 miliar rupiah. Selain itu, dari total 27 Kabupaten/Kota, hanya terdapat 7 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB ADHK di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2020, perekonomian regional, termasuk juga Kabupaten Bandung,

mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Tercatat hanya 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan positif yaitu Kota Banjar (1,04%), Kab. Majalengka (0,86%) dan Kab. Kuningan (0,09%). Sisanya, 24 Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan negatif, dengan rata-rata total di Jawa Barat mencapai 1,35%. Dari 24 Kabupaten/Kota tersebut, terdapat 13 Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan negatif di atas rata-rata Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung merupakan salah satu diantaranya dengan pertumbuhan negatif sebesar 1,87%. Meski demikian, pandemi COVID-19 ini melanda seluruh wilayah Indonesia, bahkan dunia, dan diperkirakan baru akan pulih pada 2-3 tahun mendatang, sehingga indikator-indikator perekonomian regional juga diprediksi akan mengalami penurunan.

Grafik 4.1 PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020



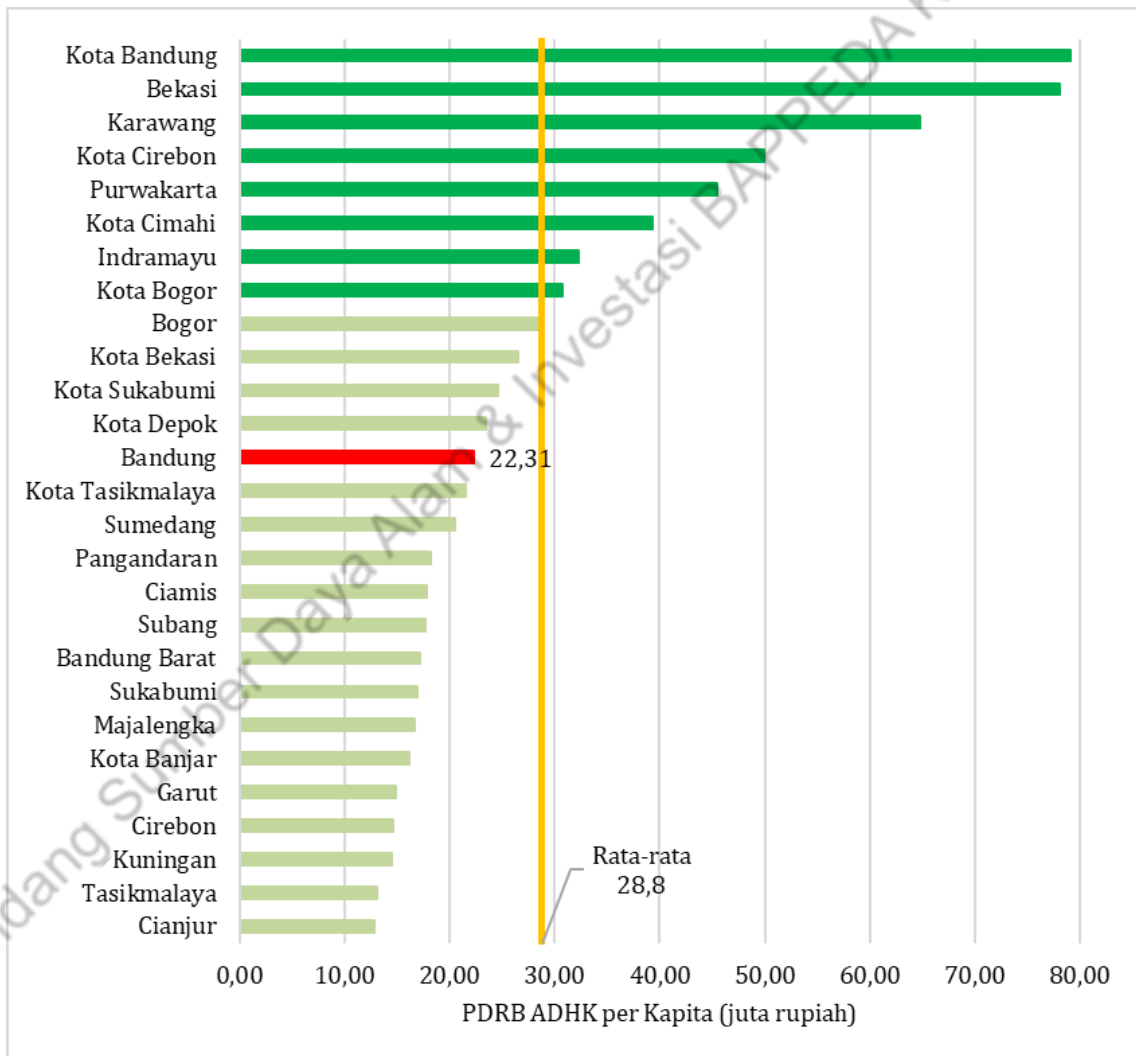
Sumber: BPS, 2021, dimodifikasi

Meskipun gambaran ekonomi agregat Kabupaten Bandung dapat dikatakan cukup baik, relatif terhadap Provinsi Jawa Barat dan kondisi pandemi COVID-19, terdapat indikator lain yang juga perlu diperhatikan yaitu PDRB ADHK per kapita, yang membagi angka PDRB terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung. Pada tinjauan ini, PDRB yang digunakan adalah PDRB ADHK tahun 2020 dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung hasil sensus penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 3,62 juta jiwa, yang juga merupakan Kabupaten/Kota dengan

penduduk paling banyak kedua di Provinsi Jawa Barat, di bawah Kabupaten Bogor.

Hasilnya, angka PDRB ADHK per kapita Kabupaten Bandung tahun 2020 adalah 22,31 juta rupiah. Angka ini berada pada peringkat ke-13 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat. Angka tersebut juga berada di bawah nilai rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Artinya, kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung secara keseluruhan masih relatif rendah.

Grafik 4.2 PDRB ADHK per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021, dimodifikasi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi Kabupaten Bandung dalam konstelasi regional Jawa Barat pada tahun 2020 telah memiliki pencapaian yang cukup baik (di atas rata-rata dengan

peringkat ke-5 di Jawa Barat), tetapi masih perlu ditingkatkan karena nilai PDRB per kapita-nya masih relatif rendah (di bawah rata-rata dengan peringkat ke-13 di Jawa Barat).

4.2 Tipologi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

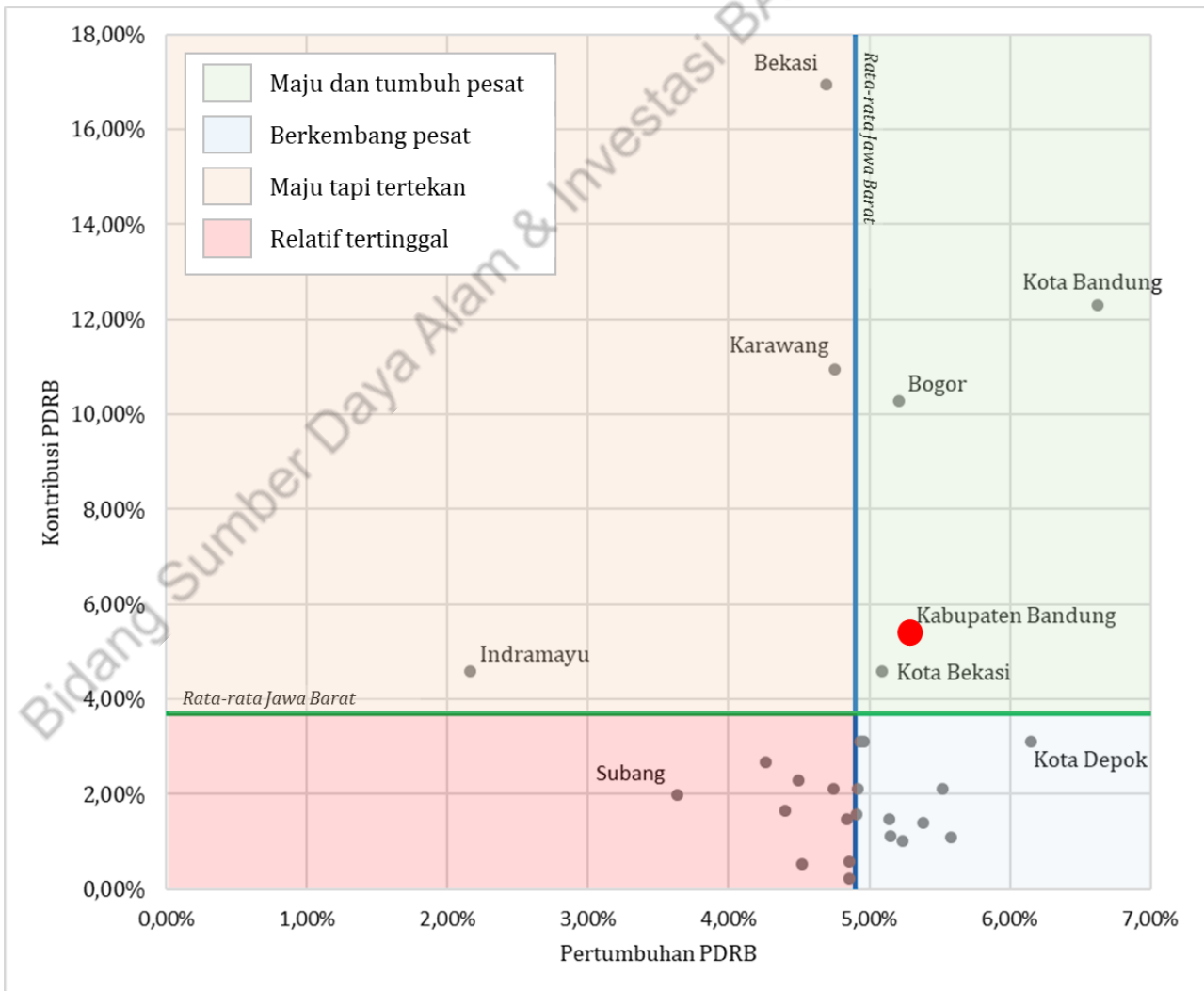
Untuk menentukan tipologi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dilakukan metode analisis Tipologi Klassen, dengan menggunakan data nilai rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2010-2020, relatif terhadap nilai rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Metode ini mengelompokkan Kabupaten/Kota ke dalam 4 (empat) kategori wilayah yaitu: wilayah yang maju dan tumbuh pesat, wilayah yang berkembang pesat, wilayah yang maju tapi tertekan, serta wilayah yang relatif tertinggal.

Wilayah yang maju dan tumbuh pesat didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB di atas nilai rata-rata seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kemudian, wilayah yang berkembang pesat ialah wilayah yang memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi tetapi memiliki kontribusi lebih rendah.

Sedangkan wilayah yang maju tapi tertekan ialah wilayah yang memiliki laju pertumbuhan lebih rendah tetapi memiliki kontribusi lebih tinggi. Adapun wilayah yang relatif tertinggal ialah wilayah yang memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi yang lebih rendah dari rata-rata seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Grafik 4.3 Tipologi kelasmen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori wilayah yang maju dan tumbuh pesat, karena memiliki nilai di atas rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kabupaten Bandung memiliki nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,28% dan rata-rata kontribusi PDRB sebesar 5,37%, relatif terhadap rata-rata seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai pertumbuhan sebesar 4,9% dan rata-rata kontribusi PDRB sebesar 3,69%.

Selain itu, terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota lainnya yang termasuk ke dalam kelompok wilayah yang maju dan tumbuh pesat yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Sedangkan kelompok lainnya terdiri dari; 11 (sebelas) Kabupaten/Kota termasuk wilayah yang berkembang pesat; 3 (tiga) Kabupaten/Kota termasuk wilayah yang maju tapi tertekan; serta, 9 (sembilan) Kabupaten/Kota termasuk wilayah yang relatif tertinggal.

4.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung

Berdasarkan data PDRB ADHK Kabupaten Bandung tahun 2010-2020, nilai total PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2020 ialah sebesar 80,8 triliun rupiah, angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 32,4 triliun dari tahun 2010 (48,4 triliun rupiah), atau mengalami total pertumbuhan sebesar 66,9%, dengan rata-rata 5,3% per tahun.

Jika dilihat perkembangan nilainya selama kurun 10 tahun terakhir, maka secara umum, nilai PDRB ADHK Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020. Pencapaian PDRB ADHK paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 82,4 triliun, sebelum akhirnya terdampak COVID-19, dan turun sebesar 1,5 triliun rupiah pada tahun 2020. Sedangkan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang tumbuh hampir 4,1 triliun rupiah atau mencapai 6,34%.

Tabel 4.1 PDRB ADHK Kab. Bandung menurut sektor ekonomi tahun 2010-2020 (miliar rupiah)

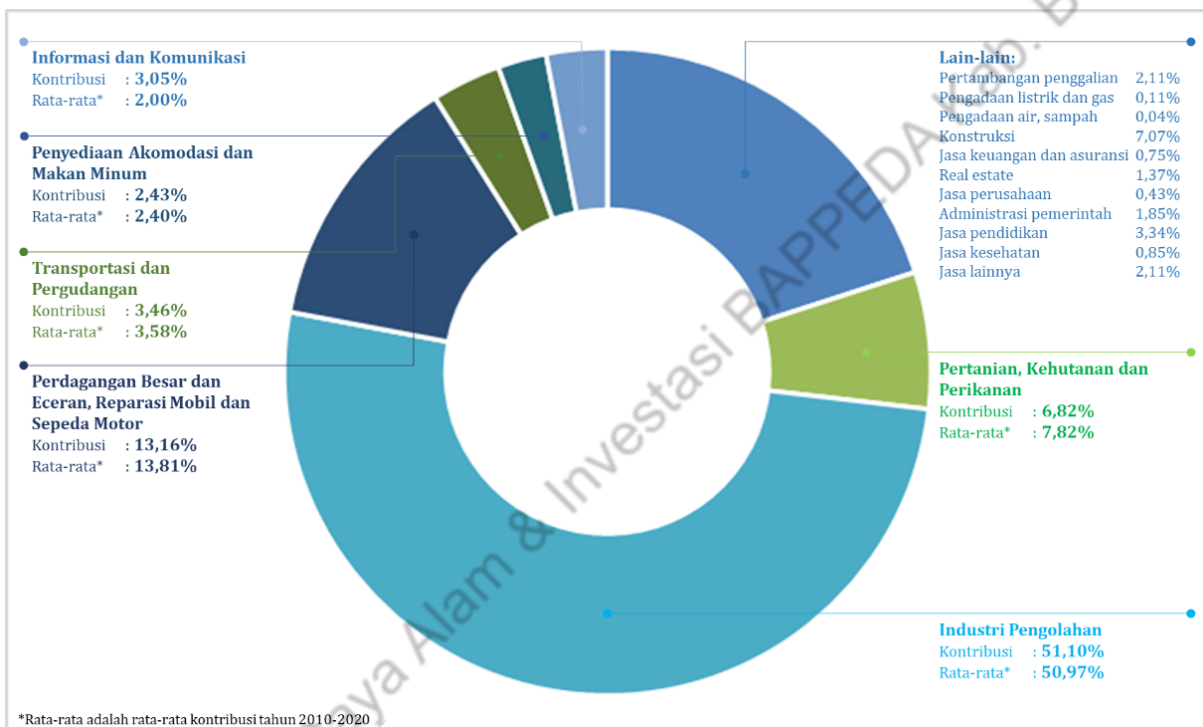
| Sektor ekonomi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pertanian, kehutanan dan perikanan | 4.606 | 4.603 | 4.692 | 4.845 | 4.728 | 4.863 | 5.072 | 5.357 | 5.431 | 5.486 | 5.515 |
| Pertambangan dan penggalan | 1.574 | 1.603 | 1.547 | 1.478 | 1.452 | 1.513 | 1.650 | 1.638 | 1.730 | 1.668 | 1.709 |
| Industri pengolahan | 24.669 | 26.046 | 27.583 | 29.233 | 31.194 | 32.993 | 34.953 | 36.963 | 39.596 | 42.614 | 41.306 |
| Pengadaan listrik dan gas | 66 | 71 | 81 | 87 | 87 | 89 | 94 | 96 | 94 | 95 | 90 |
| Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 |
| Konstruksi | 2.767 | 2.991 | 3.242 | 3.524 | 3.847 | 4.129 | 4.440 | 4.913 | 5.344 | 5.697 | 5.717 |
| Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 6.490 | 7.054 | 7.609 | 8.216 | 8.681 | 9.138 | 9.677 | 10.222 | 10.694 | 11.124 | 10.590 |
| Transportasi dan pergudangan | 1.629 | 1.756 | 1.934 | 2.033 | 2.243 | 2.405 | 2.567 | 2.705 | 2.820 | 2.890 | 2.799 |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum | 1.097 | 1.183 | 1.318 | 1.391 | 1.456 | 1.560 | 1.661 | 1.768 | 1.894 | 2.029 | 1.966 |
| Informasi dan komunikasi | 690 | 755 | 826 | 931 | 1.094 | 1.273 | 1.455 | 1.644 | 1.803 | 1.994 | 2.465 |
| Jasa keuangan dan asuransi | 316 | 345 | 376 | 412 | 428 | 461 | 511 | 531 | 558 | 574 | 607 |
| Real estate | 568 | 607 | 658 | 673 | 712 | 767 | 834 | 918 | 1.015 | 1.113 | 1.109 |
| Jasa perusahaan | 219 | 223 | 239 | 255 | 268 | 292 | 317 | 343 | 373 | 405 | 348 |
| Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 1.212 | 1.238 | 1.288 | 1.334 | 1.382 | 1.459 | 1.502 | 1.516 | 1.544 | 1.593 | 1.491 |
| Jasa pendidikan | 1.267 | 1.395 | 1.567 | 1.679 | 1.830 | 1.981 | 2.122 | 2.290 | 2.433 | 2.587 | 2.698 |
| Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial | 300 | 325 | 357 | 402 | 433 | 479 | 538 | 600 | 649 | 708 | 684 |
| Jasa lainnya | 953 | 1.037 | 1.133 | 1.176 | 1.244 | 1.277 | 1.391 | 1.510 | 1.605 | 1.731 | 1.704 |
| PDRB ADHK 2010 | 48.432 | 51.250 | 54.468 | 57.691 | 61.100 | 64.702 | 68.805 | 73.040 | 77.609 | 82.337 | 80.829 |

Sumber: BPS, 2021, dimodifikasi

Kemudian jika dilihat kontribusi masing-masing sektor, sektor PDRB dengan rata-rata kontribusi paling besar dari tahun 2010-2020 ialah sektor industri pengolahan (50,97%); sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,81%); serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (7,82%). Kondisi tersebut juga tercermin PDRB ADHK Kabupaten Bandung tahun 2020, yang menunjukkan

bahwa sektor ekonomi dengan kontribusi paling besar, dengan angka di atas rata-rata kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten Bandung (5,88%), ialah sektor industri pengolahan yang mencapai 51,1%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,1%; sektor konstruksi sebesar 7%; serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 6,8%.

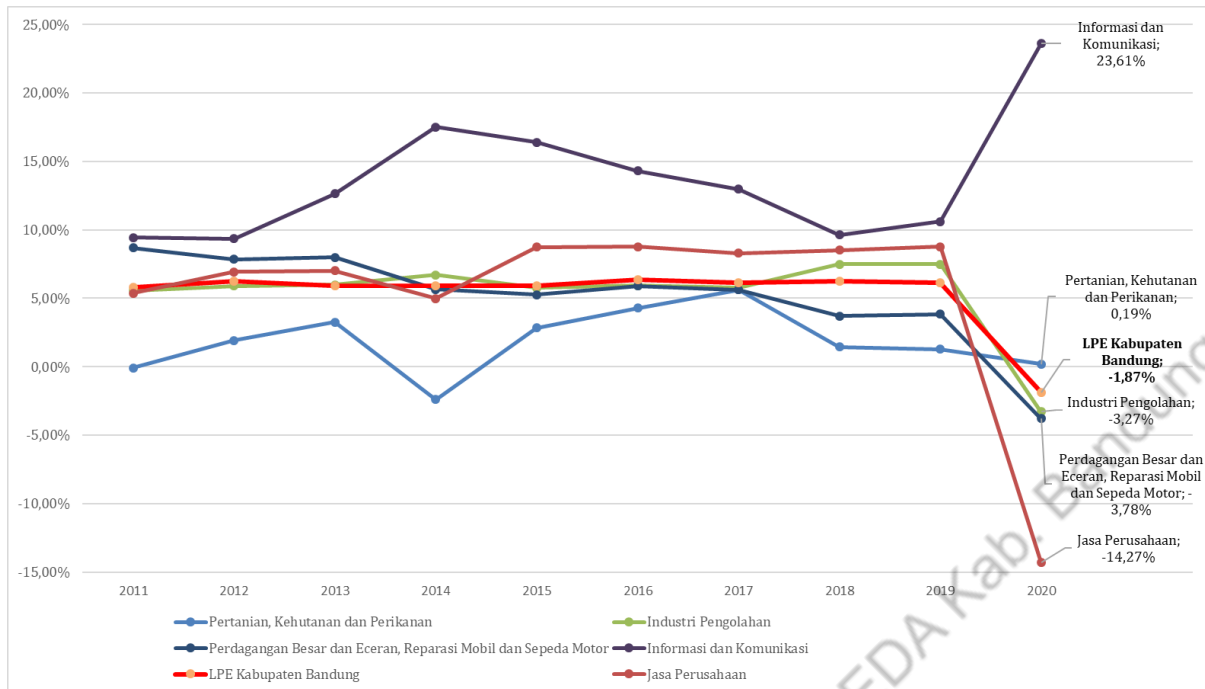
Grafik 4.4 Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB ADHK Kab. Bandung tahun 2020



Sumber: BPS, 2021, diolah

Jika dilihat dari laju pertumbuhan setiap sektor, sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan peningkatan nominal paling tinggi selama tahun 2011-2020, yaitu sebanyak 16,6 triliun rupiah, tetapi hanya mengalami pertumbuhan total sebesar 67,4%, atau rata-rata 5,3% per tahun. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan paling tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi yang memiliki total pertumbuhan mencapai 257,1%, atau rata-rata 13,7% per tahun, yang juga merupakan satu-satunya sektor yang mencapai angka pertumbuhan rata-rata di atas 10%.

Untuk laju pertumbuhan pada tahun 2020, yang mana kondisi ekonomi dipengaruhi oleh pandemi, terdapat 7 sektor yang memiliki pertumbuhan positif, dan hanya 4 sektor yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu: sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 23,61% pada tahun 2020 dari sebelumnya 10,61% pada tahun 2019; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang tumbuh 10,22% dari sebelumnya 4,07%; sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 5,72% dari sebelumnya 2,91%; serta sektor pertambangan dan penggalan yang tumbuh 0,43% dari sebelumnya -1,63%.

Grafik 4.5 Laju pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2011-2020

Sumber: BPS, 2021, diolah

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki kontribusi tinggi terhadap PDRB Kabupaten Bandung, cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020, seperti: sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar -3,27% dari sebelumnya 7,49%; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar -3,78% dari sebelumnya 3,83%; sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 0,19%, meskipun mengalami penurunan dari sebelumnya 1,28%. Jika dilihat angka pertumbuhan pada tahun 2019, sektor pertanian memiliki tren menurun, sedangkan sektor industri pengolahan dan perdagangan memiliki tren meningkat.

4.4 Tinjauan Sektor Ekonomi Unggulan Kab. Bandung

Tinjauan dilakukan dengan membandingkan kinerja sektor ekonomi Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan 3 (tiga) jenis analisis yaitu tipologi klassen, analisis *location quotient* (LQ) dan *dynamic LQ*, serta shift share.

1. Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen juga dilakukan untuk melihat tipologi sektor ekonomi Kabupaten Bandung, relatif terhadap sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan ialah nilai rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata kontribusi sektor ekonomi PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2010-2020. Hasilnya akan terdapat 4 (empat) kategori sektor ekonomi yaitu; sektor yang maju dan tumbuh pesat (prima), sektor yang potensial atau masih dapat berkembang pesat; sektor yang maju tapi tertekan; serta, sektor yang relatif tertinggal.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.2, terdapat 8 (delapan) sektor ekonomi di Kabupaten Bandung yang memiliki nilai rata-rata kontribusi di atas nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat, serta 6 (enam) sektor ekonomi yang memiliki nilai rata-rata laju pertumbuhan di atas nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat. Selain itu, hanya terdapat 2 (dua) sektor ekonomi yang memiliki baik nilai rata-rata kontribusi dan rata-rata laju pertumbuhan di atas nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.2 Perbandingan rata-rata laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten Bandung terhadap Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2020

| Lapangan Usaha | Rata-rata kontribusi sektor ekonomi tahun 2010-2020 | | Rata-rata laju pertumbuhan sektor ekonomi 2010-2020 | |
|---|---|----------------|---|--------------|
| | Bandung | Jawa Barat | Bandung | Jawa Barat |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 7,82% | 8,04% | 1,84% | 1,82% |
| Pertambangan dan Penggalian | 2,50% | 2,30% | 0,91% | -2,12% |
| Industri Pengolahan | 50,97% | 43,42% | 5,33% | 5,29% |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,13% | 0,48% | 3,23% | 0,29% |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,03% | 0,08% | 6,84% | 5,83% |
| Konstruksi | 6,39% | 8,00% | 7,56% | 8,09% |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 13,81% | 15,65% | 5,07% | 5,88% |
| Transportasi dan Pergudangan | 3,58% | 4,57% | 5,64% | 7,44% |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,40% | 2,52% | 6,07% | 7,33% |
| Informasi dan Komunikasi | 2,00% | 3,55% | 13,65% | 13,36% |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,71% | 2,42% | 6,78% | 6,83% |
| Real Estate | 1,23% | 1,19% | 6,98% | 7,80% |
| Jasa Perusahaan | 0,45% | 0,40% | 5,31% | 8,79% |
| Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,19% | 2,12% | 2,14% | 2,24% |
| Jasa Pendidikan | 3,00% | 2,57% | 7,87% | 10,00% |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,75% | 0,71% | 8,69% | 9,93% |
| Jasa Lainnya | 2,04% | 1,99% | 6,04% | 9,08% |
| PDRB ADHK | 100,00% | 100,00% | 5,28% | 5,69% |

Keterangan:

- Rata-rata kontribusi sektor ekonomi Kab. Bandung lebih tinggi dari Jawa Barat
- Rata-rata laju pertumbuhan sektor ekonomi Kab. Bandung lebih tinggi dari Jawa Barat

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 4.3 Tipologi sektor ekonomi Kab. Bandung terhadap Jawa Barat tahun 2010-2020

| | | Rata-rata laju pertumbuhan sektoral tahun 2010-2020 | |
|---|----------------|---|---|
| | | $g_i < g_p$ | $g_i \geq g_p$ |
| Rata-rata kontribusi sektoral tahun 2010-2020 | $s_i \geq s_p$ | Sektor maju tapi tertekan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Real estate; 2. Jasa perusahaan; 3. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 4. Jasa pendidikan; 5. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 6. Jasa lainnya. | Sektor maju dan tumbuh pesat (prima): <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan penggalian; 2. Industri pengolahan; |
| | $s_i < s_p$ | Sektor relatif tertinggal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi; 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 3. Transportasi dan pergudangan; 4. Penyediaan akomodasi dan makan minum; 5. Jasa keuangan dan asuransi. | Sektor potensial, atau masih dapat berkembang pesat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan; 2. Pengadaan listrik dan gas; 3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; 4. Informasi dan komunikasi. |

Keterangan:

- g_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektoral Kabupaten Bandung
- g_p = Rata-rata laju pertumbuhan sektoral Provinsi Jawa Barat
- s_i = Rata-rata kontribusi sektoral Kabupaten Bandung
- s_p = Rata-rata kontribusi sektoral Provinsi Jawa Barat

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada kurun waktu 2010-2020 relatif terhadap Jawa Barat, Kabupaten Bandung memiliki keunggulan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam atau sektor primer seperti pertambangan penggalan, industri pengolahan, serta pertanian kehutanan dan perikanan. Kabupaten Bandung juga unggul di sebagai sektor sebagian sekunder dan tersier, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.

2. Analisis Location Quotient (LQ) dan Dynamic LQ (DLQ)

Analisis LQ dilakukan untuk mengetahui tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi, serta memberikan gambaran terkait sektor

basis atau *leading sector* dalam pembangunan ekonomi. Sektor basis adalah sektor yang dapat memenuhi kebutuhan lokal sehingga mampu melakukan kegiatan ekspor.

Analisis LQ dilakukan dengan membagi nilai perbandingan antara jumlah PDRB per sektor di Kabupaten Bandung terhadap total PDRB Kabupaten Bandung dengan nilai perbandingan antara jumlah PDRB per sektor provinsi Jawa Barat terhadap total PDRB provinsi Jawa Barat. Hasilnya adalah sebuah nilai LQ yang mana jika nilai LQ sektor >1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis, sedangkan bila LQ = 1, maka produk domestik bruto habis dikonsumsi di daerah tersebut, sedangkan bila LQ sektor < 1, maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis.

Tabel 4.4 Hasil analisis LQ sektor ekonomi Kab. Bandung terhadap Jawa Barat 2010-2020

| Sektor ekonomi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-rata |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Pertanian, kehutanan dan perikanan | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,97 |
| Pertambangan dan penggalan | 0,98 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 1,03 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,29 | 1,09 |
| Industri pengolahan | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,21 | 1,21 | 1,17 |
| Pengadaan listrik dan gas | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,28 |
| Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,44 |
| Konstruksi | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0,79 |
| Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,86 | 0,89 | 0,88 |
| Transportasi dan pergudangan | 0,82 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,78 |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum | 0,95 | 0,96 | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,95 |
| Informasi dan komunikasi | 0,62 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,52 | 0,57 |
| Jasa keuangan dan asuransi | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,29 |
| Real estate | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,04 |
| Jasa perusahaan | 1,23 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,12 | 1,12 |
| Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,04 |
| Jasa pendidikan | 1,32 | 1,28 | 1,25 | 1,24 | 1,17 | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,08 | 1,18 |
| Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,13 | 1,05 | 1,01 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,05 |
| Jasa lainnya | 1,18 | 1,12 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 1,04 |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Secara sederhana, jika melihat Tabel 4.3 pada halaman sebelumnya, hasil analisis LQ, dengan nilai $LQ > 1$, merupakan baris pertama pada tabel, atau sektor basis merupakan sektor yang berada pada kategori sektor maju dan tumbuh pesat (prima) serta sektor maju tapi tertekan. Analisis LQ dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai nilai LQ dan peringkat dari sektor basis serta non-basis. Data yang digunakan pada analisis ini adalah PDRB ADHK tahun 2010-2020, sehingga nilai LQ yang diperoleh merupakan nilai rata-rata dari tahun 2010-2020.

Berdasarkan hasil analisis LQ yang dilakukan, dapat dilihat bahwa, dari 8 (delapan) sektor basis, terdapat 7 (tujuh) sektor yang hampir secara konsisten dari tahun 2010 sampai tahun 2020 memiliki nilai $LQ > 1$, terdapat satu yang sektor yang memiliki kecenderungan penurunan yaitu sektor jasa lainnya, serta 2 (dua) sektor yang sempat menjadi sektor basis yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan satu kali pada tahun 2012, serta sektor penyediaan akomodasi makan dan minum dua kali pada tahun 2012-2013.

Tabel 4.5 Peringkat sektor ekonomi Kab. Bandung hasil analisis LQ tahun 2010-2020

| Peringkat | Sektor Ekonomi | Nilai LQ 2010-2020 | Ket. |
|-----------|---|--------------------|------------------------------|
| 1 | Jasa Pendidikan | 1,18 | |
| 2 | Industri Pengolahan | 1,17 | |
| 3 | Jasa Perusahaan | 1,12 | |
| 4 | Pertambangan dan Penggalian | 1,09 | Sektor basis $LQ \geq 1$ |
| 5 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,05 | |
| 6 | Jasa Lainnya | 1,04 | |
| 7 | Real Estate | 1,04 | |
| 8 | Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,04 | |
| 9 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,97 | |
| 10 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,95 | |
| 11 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,88 | Sektor non-basis $LQ < 1$ |
| 12 | Konstruksi | 0,79 | |
| 13 | Transportasi dan Pergudangan | 0,78 | |
| 14 | Informasi dan Komunikasi | 0,57 | |
| 15 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,44 | |
| 16 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,29 | |
| 17 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,28 | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Sebagai penyempurnaan hasil LQ, dilakukan juga analisis *Dynamic LQ* (DLQ) dengan menggunakan data yang sama. Pada analisis DLQ, jika diperoleh nilai $DLQ > 1$ maka dapat diindikasikan jika potensi pengembangan sektor yang bersangkutan relatif lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Barat. Atau dengan kata lain sektor dengan nilai $DLQ > 1$ dapat dikatakan sebagai sektor strategis pengembangan ekonomi.

Berdasarkan hasil perhitungan DLQ, pada kurun waktu 2011-2020, setiap sektor sempat menjadi sektor strategis, tetapi secara rata-rata hanya terdapat 5 (lima) sektor strategis. Dari kelima sektor tersebut, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta pengadaan listrik dan gas yang relatif konsisten menjadi sektor strategis. Berikut adalah hasil pemeringkatan sektor strategis di Kabupaten Bandung berdasarkan hasil perhitungan DLQ.

Tabel 4.6 Hasil analisis DLQ sektor ekonomi Kab. Bandung terhadap Jawa Barat 2010-2020

| Sektor ekonomi | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-rata |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Pertanian, kehutanan dan perikanan | 1,014 | 1,021 | 0,992 | 0,966 | 1,019 | 0,980 | 1,031 | 0,988 | 0,975 | 0,974 | 0,999 |
| Pertambangan dan penggalian | 1,061 | 1,034 | 0,972 | 0,960 | 1,029 | 1,094 | 1,006 | 1,095 | 1,001 | 1,041 | 1,028 |
| Industri pengolahan | 1,006 | 1,015 | 0,993 | 1,007 | 1,005 | 1,005 | 0,996 | 1,003 | 1,023 | 1,004 | 1,006 |
| Pengadaan listrik dan gas | 1,116 | 1,052 | 1,005 | 0,933 | 1,094 | 1,006 | 1,146 | 0,977 | 1,011 | 1,021 | 1,038 |
| Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 1,077 | 1,044 | 0,994 | 0,963 | 0,972 | 0,977 | 0,985 | 1,010 | 1,000 | 0,989 | 1,003 |
| Konstruksi | 0,957 | 0,959 | 1,009 | 1,027 | 1,000 | 1,017 | 1,024 | 0,999 | 0,998 | 1,065 | 0,999 |
| Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | 1,011 | 0,967 | 1,030 | 1,015 | 1,007 | 1,008 | 1,003 | 0,989 | 0,956 | 1,039 | 0,998 |
| Transportasi dan pergudangan | 0,972 | 1,006 | 1,006 | 1,018 | 0,974 | 0,974 | 0,997 | 0,984 | 0,976 | 0,995 | 0,990 |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum | 1,014 | 1,044 | 1,011 | 0,980 | 0,983 | 0,968 | 0,974 | 0,985 | 0,990 | 1,019 | 0,994 |
| Informasi dan komunikasi | 0,902 | 0,990 | 1,037 | 0,993 | 0,993 | 0,994 | 1,002 | 0,999 | 1,002 | 0,913 | 0,990 |
| Jasa keuangan dan asuransi | 1,032 | 1,005 | 0,979 | 0,988 | 0,994 | 0,985 | 0,996 | 0,999 | 0,997 | 1,039 | 0,997 |
| Real estate | 0,965 | 1,002 | 0,975 | 1,005 | 1,013 | 1,014 | 1,000 | 1,002 | 0,992 | 0,972 | 0,996 |
| Jasa perusahaan | 0,928 | 0,995 | 0,997 | 0,974 | 0,997 | 0,999 | 0,991 | 0,993 | 0,987 | 1,044 | 0,985 |
| Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib | 1,058 | 1,000 | 1,055 | 1,023 | 0,993 | 0,993 | 0,957 | 0,997 | 0,974 | 1,000 | 1,005 |
| Jasa pendidikan | 0,966 | 0,982 | 0,988 | 0,945 | 0,975 | 0,989 | 0,985 | 1,000 | 1,001 | 0,972 | 0,981 |
| Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,004 | 1,009 | 1,062 | 0,922 | 0,961 | 1,019 | 1,022 | 0,997 | 0,987 | 1,015 | 0,998 |
| Jasa lainnya | 0,947 | 1,013 | 0,966 | 0,965 | 0,935 | 0,995 | 0,982 | 0,991 | 0,996 | 1,006 | 0,977 |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 4.7 Peringkat sektor ekonomi Kab. Bandung hasil analisis DLQ tahun 2010-2020

| Peringkat | Sektor Ekonomi | Nilai DLQ 2010-2020 | Ket. |
|-----------|---|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Pengadaan Listrik dan Gas | 1,038 | |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1,028 | Sektor strategis DLQ ≥ 1 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1,006 | |
| 4 | Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,005 | |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,003 | |
| 6 | Konstruksi | 0,999 | |
| 7 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,999 | |
| 8 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,998 | |
| 9 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,998 | |
| 10 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,997 | Sektor non-strategis DLQ < 1 |
| 11 | Real Estate | 0,996 | |
| 12 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,994 | |
| 13 | Informasi dan Komunikasi | 0,990 | |
| 14 | Transportasi dan Pergudangan | 0,990 | |
| 15 | Jasa Perusahaan | 0,985 | |
| 16 | Jasa Pendidikan | 0,981 | |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,977 | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dengan menyandingkan hasil analisis LQ dan DLQ maka dapat disusun klasifikasi sektor ekonomi Kabupaten Bandung relatif terhadap Provinsi Jawa Barat. Klasifikasi ini membagi sektor ekonomi ke dalam 4 (empat) kriteria yaitu sektor unggulan (merupakan sektor dengan nilai LQ dan DLQ > 1), sektor prospektif (LQ>1; DLQ<1), sektor andalan (LQ<1; DLQ>1), dan sektor relatif tertinggal (LQ dan DLQ <1).

Jika melihat hasil perhitungan dengan analisis LQ dan DLQ, terdapat beberapa kesamaan dengan hasil tipologi kelas, yaitu: sektor pertambangan dan penggalian,

serta sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kriteria di atas Provinsi Jawa Barat, dalam ini merupakan sektor unggulan; sektor andalan dan sektor prospektif juga didominasi oleh sektor sekunder dan tersier, terutama sektor jasa yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sedangkan perbedaannya, pada analisis ini, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, justru termasuk ke dalam sektor yang relatif tertinggal. Meski demikian, nilai DLQ yang diperoleh sektor tersebut hampir mendekati angka 1 (satu), dengan demikian masih berpotensi mengalami peningkatan.

Tabel 4.8 Klasifikasi sektor berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ tahun 2010-2020

| Kriteria | LQ<1 | LQ>1 |
|----------|--|---|
| DLQ>1 | <p>Sektor andalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Real estate; 2. Jasa perusahaan; 3. Jasa pendidikan; 4. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; 5. Jasa lainnya. | <p>Sektor unggulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan penggalian; 2. Industri pengolahan; 3. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. |
| DLQ<1 | <p>Sektor relatif tertinggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan; 2. Konstruksi; 3. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 4. Transportasi dan pergudangan; 5. Penyediaan akomodasi dan makan minum; 6. Informasi dan komunikasi; 7. Jasa keuangan dan asuransi. | <p>Sektor prospektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan listrik dan gas; 2. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3. Analisis Shift Share

Analisis *shift share* dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian lokal dan regional, serta dapat digunakan untuk menetapkan sektor unggulan dan analisis dampak ekonominya bagi perekonomian daerah. Komponen yang dipertimbangkan meliputi komponen Pertumbuhan Regional (PR), Pertumbuhan Proporsional (PP), dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW), dan nilai pergeseran bersih (D). Data yang

digunakan pada analisis ini adalah PDRB ADHK tahun 2010-2020. Berikut adalah hasil perhitungan analisis shift share Kabupaten Bandung tahun 2010-2020.

Berdasarkan hasil perhitungan, pada komponen pertumbuhan regional, seluruh sektor memiliki nilai positif. Hal ini menggambarkan pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, kebijakan umum secara regional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

sektor pembangunan di Kabupaten Bandung terutama bagi sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor pertanian, kehutanan, dan pangan; serta sektor konstruksi.

Selanjutnya, pada komponen pertumbuhan proporsional menunjukkan bahwa terdapat 11 sektor dengan nilai positif, dan 6 dengan nilai negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung relatif lebih cepat (untuk 11 sektor) dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (11 sektor terkait), terutama sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa pendidikan. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan daerah secara umum mampu memberikan pengaruh percepatan yang signifikan terhadap pertumbuhan 11 sektor terkait di Kab. Bandung.

Komponen selanjutnya adalah pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) atau

keunggulan kompetitif, yang menunjukkan bahwa terdapat 10 sektor ekonomi Kabupaten Bandung yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Barat. Sektor ekonomi dengan nilai keunggulan kompetitif paling tinggi adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hasil ini tidak lepas dari potensi industri dan perdagangan Kabupaten Bandung yang tinggi berkaitan dengan posisi Kabupaten Bandung dalam konstelasi Bandung Raya.

Sedangkan secara umum, nilai pergeseran bersih memiliki nilai positif untuk seluruh sektor ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa keseluruhan sektor tergolong progresif, terutama sektor industri pengolahan dengan nilai yang unggul jauh dari sektor lainnya. Peringkat sektor ekonomi hasil analisis *shift share* ditampilkan pada tabel di halaman berikutnya.

Tabel 4.9 Hasil analisis *shift share* Kabupaten Bandung tahun 2010-2020

| Sektor Ekonomi | Komponen (miliar rupiah) | | | |
|---|--------------------------|--------|-------|--------|
| | PR | PP | PPW | D |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2.787 | -1.861 | -16 | 909 |
| Pertambangan dan Penggalian | 952 | -1.284 | 467 | 135 |
| Industri Pengolahan | 14.925 | -2.044 | 3.756 | 16.637 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 40 | -45 | 28 | 24 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 10 | 4 | 1 | 15 |
| Konstruksi | 1.674 | 781 | 495 | 2.950 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.927 | -456 | 630 | 4.100 |
| Transportasi dan Pergudangan | 985 | 356 | -172 | 1.170 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 664 | 195 | 10 | 869 |
| Informasi dan Komunikasi | 418 | 1.747 | -390 | 1.775 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 191 | 69 | 31 | 291 |
| Real Estate | 343 | 224 | -26 | 541 |
| Jasa Perusahaan | 128 | 29 | -21 | 136 |
| Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 733 | -574 | 119 | 279 |
| Jasa Pendidikan | 767 | 1.139 | -476 | 1.430 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 182 | 182 | 21 | 384 |
| Jasa Lainnya | 576 | 494 | -319 | 752 |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 4.10 Peringkat sektor ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2010-2020 berdasarkan komponen pada analisis *shift share*

| PR | PP |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan; 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 4. Konstruksi; 5. Transportasi dan Pergudangan; 6. Pertambangan dan Penggalian; 7. Jasa Pendidikan; 8. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Jasa Lainnya; 11. Informasi dan Komunikasi; 12. Real Estate; 13. Jasa Keuangan dan Asuransi; 14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 15. Jasa Perusahaan; 16. Pengadaan Listrik dan Gas; 17. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan Komunikasi; 2. Jasa Pendidikan; 3. Konstruksi; 4. Jasa Lainnya; 5. Transportasi dan Pergudangan; 6. Real Estate; 7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 9. Jasa Keuangan dan Asuransi; 10. Jasa Perusahaan; 11. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 12. Pengadaan Listrik dan Gas; 13. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Pertambangan dan Penggalian; 16. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 17. Industri Pengolahan. |
| PPW | Y |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan; 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3. Konstruksi; 4. Pertambangan dan Penggalian; 5. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 6. Jasa Keuangan dan Asuransi; 7. Pengadaan Listrik dan Gas; 8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 11. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 12. Jasa Perusahaan; 13. Real Estate; 14. Transportasi dan Pergudangan; 15. Jasa Lainnya; 16. Informasi dan Komunikasi; 17. Jasa Pendidikan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan; 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3. Konstruksi; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Jasa Pendidikan; 6. Transportasi dan Pergudangan; 7. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 9. Jasa Lainnya; 10. Real Estate; 11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 12. Jasa Keuangan dan Asuransi; 13. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 14. Jasa Perusahaan; 15. Pertambangan dan Penggalian; 16. Pengadaan Listrik dan Gas; 17. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

4. Simpulan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Bandung

Pembahasan mengenai gambaran ekonomi wilayah Kabupaten Bandung yang diuraikan

dalam sub-bab sebelumnya. menghasilkan beberapa poin temuan penting, meliputi 5 pembahasan dengan temuan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.11 Sintesis gambaran ekonomi wilayah Kabupaten Bandung

| No. | Pembahasan | Temuan |
|-----|--|--|
| 1 | Struktur dan pola PDRB | <ul style="list-style-type: none"> Kab. Bandung menempati peringkat PDRB ADHK ke-5 di Jabar; Kabupaten Bandung menempati Peringkat PDRB ADHK per kapita ke-13 di Jawa Barat; Kabupaten Bandung termasuk ke dalam tipologi kabupaten maju dan berkembang pesat di Jawa Barat. |
| 2 | Struktur dan pola sektor ekonomi Kabupaten Bandung (2010-2020) | Tiga sektor dengan kontribusi tinggi: <ol style="list-style-type: none"> Industri pengolahan (50,97%); Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,81%); Pertanian, kehutanan dan perikanan (7,82%). |
| | | Tiga sektor dengan pertumbuhan tinggi: <ol style="list-style-type: none"> Informasi dan komunikasi (13,65%); Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8,69%); Jasa pendidikan (7,87%) |
| 3 | Analisis tipologi kelas (2010-2020) | Sektor maju dan tumbuh pesat (2010-2020): <ol style="list-style-type: none"> Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; |
| | | Sektor potensial, atau masih dapat berkembang pesat: <ol style="list-style-type: none"> Pertanian, kehutanan dan perikanan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; Informasi dan komunikasi. |
| | | Sektor maju tapi tertekan: <ol style="list-style-type: none"> Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; |
| 4 | Analisis LQ dan DLQ (2010-2020) | Sektor basis: <ol style="list-style-type: none"> Jasa pendidikan; Industri pengolahan; Jasa perusahaan; Pertambangan dan penggalian; Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; Jasa lainnya; Real estate; Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib |
| | | Sektor strategis: <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan listrik dan gas; Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; |
| | | Sektor unggulan: <ol style="list-style-type: none"> Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; |
| | | Sektor prospektif: <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; |
| | | Sektor andalan: <ol style="list-style-type: none"> Real estate; Jasa perusahaan; Jasa pendidikan; Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; Jasa lainnya; |

| No. | Pembahasan | Temuan |
|-----|-----------------------------|--|
| 5 | Analisis <i>shift-share</i> | Tiga sektor dengan pertumbuhan regional tinggi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan; 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; |
| | | Tiga sektor dengan pertumbuhan proporsional tinggi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan Komunikasi; 2. Jasa Pendidikan; 3. Konstruksi; |
| | | Tiga sektor dengan pertumbuhan pangsa wilayah tinggi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan; 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3. Konstruksi; |
| | | Nilai pergeseran bersih (D). <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan; 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3. Konstruksi; |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Temuan mengenai gambaran ekonomi wilayah Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa sektor-sektor yang menjadi unggulan pada kajian pendahulu yaitu sektor industri pengolahan (sektor C), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (sektor G), dan pertanian, kehutanan, dan perikanan (sektor A), juga merupakan sektor-sektor yang sering muncul dalam tinjauan potensi ekonomi unggulan yang pada sub-bab sebelumnya dilakukan. Selain itu, ketiga sektor tersebut juga merupakan sektor yang mana, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memiliki wewenang yang luas dalam pengelolaan, serta pengembangannya melibatkan masyarakat luas. Dengan demikian, dinilai relevan jika ketiga sektor tersebut menjadi fokus dalam penyusunan masterplan perekonomian Kabupaten Bandung. Di sisi lain, untuk mewadahi sektor ekonomi lain yang juga menjadi unggulan di luar ketiga sektor tersebut, maka ditambahkan fokus sektor ekonomi keempat yaitu sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi yang kini sedang berkembang pesat di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, pembahasan mengenai potensi, peluang dan permasalahan perekonomian di Kabupaten Bandung pada bab selanjutnya difokuskan

pada 4 (empat) sektor yaitu pertanian kehutanan dan perikanan; industri pengolahan, perdagangan; serta pariwisata.

4.5 Tinjauan Analisis Koefisien Input-Output Tahun 2016

Pembangunan sektor-sektor ekonomi tidak hanya bertumpu pada informasi kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian tetapi juga melihat keterkaitan suatu sektor dengan sektor lainnya. Keterkaitan ini ditunjukkan dengan tingkat kemampuan suatu sektor untuk menggerakkan roda perekonomian. Dengan kata lain, bagaimana suatu sektor mampu memberikan efek terhadap aktivitas sektor-sektor ekonomi lainnya. Kontribusi suatu sektor terhadap ekonomi beserta keterkaitan antar sektor akan menggambarkan integrasi perekonomian suatu wilayah. Integrasi ekonomi yang kuat, menyeluruh, dan berkelanjutan antar sektor menjadi kunci pembangunan perekonomian.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antar sektor ekonomi adalah Tabel Input-Output (Tabel I-O). Tabel I-O merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang

menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu.

Penyusunan Tabel I-O dimaksudkan untuk menyediakan data statistik yang secara komprehensif mampu menggambarkan hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar unit ekonomi serta analisis dampak perubahan konsumsi akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan (konsumsi, investasi, dan ekspor) terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Selain itu, melalui Tabel I-O dapat dilakukan permodelan statistik untuk analisis dan proyeksi sektor-sektor ekonomi. Hasil analisis dan proyeksi ekonomi yang didapatkan melalui pemodelan Tabel I-O merupakan informasi penting dalam perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah beberapa kali merilis Tabel I-O Indonesia. Tabel yang telah dirilis adalah Tabel I-O Indonesia seri tahun 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, dan 2010. Tabel I-O Indonesia disusun setiap lima tahun sekali didasarkan atas asumsi bahwa perubahan struktur ekonomi dan penggunaan teknologi oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi direkam berkala dalam tenggat waktu tersebut. Untuk Tabel I-O Indonesia 2016 disusun berdasarkan *Supply and Use Table (SUT) 2016*.

Pada Tahun 2016, Total *output* yang tercipta di Indonesia mencapai Rp 22.961 triliun. Tiga kelompok produk dengan kontribusi terbesar adalah; kelompok Industri Pengolahan (29,70%); Konstruksi (12,68%); serta Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,50%). Indonesia meng-impor barang dan jasa sebesar Rp 2.314 triliun.

Tabel 4.12 Output Domestik 2016

| No. | Deskripsi | Jumlah (Juta Rp.) | Persentase (%) |
|-------|---|----------------------|-------------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | 1.898.139.612 | 8,27 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1.169.081.105 | 5,09 |
| 3 | Industri Pengolahan | 6.819.115.227 | 29,70 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 393.606.340 | 1,71 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 56.452.876 | 0,25 |
| 6 | Konstruksi | 2.910.393.550 | 12,68 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2.411.401.412 | 10,50 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1.485.471.379 | 6,47 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 907.236.816 | 3,95 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 737.458.392 | 3,21 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 711.086.559 | 3,10 |
| 12 | Real Estate | 766.597.383 | 3,34 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 628.337.211 | 2,74 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 763.798.490 | 3,33 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 615.598.340 | 2,68 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 287.553.598 | 1,25 |
| 17 | Jasa Lainnya | 399.361.791 | 1,74 |
| Total | | 22.960.690.081 | 100 |

Sumber: BPS, diakses April 2021

Total Impor tersebut terdiri dari 86,71% untuk kelompok barang dan 13,29% untuk produk dari kelompok jasa. Produk barang dan jasa dari kelompok Industri Pengolahan paling banyak diimpor untuk memenuhi permintaan dari Industri Pengolahan (76,96%). Total Permintaan antara Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 10.789 triliun. Dari total tersebut, produk pada kelompok Industri Pengolahan mempunyai kontribusi terbesar yaitu 47,88% dimana produk dari kelompok tersebut banyak digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi, disusul produk dari kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,07% serta kelompok Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,38%.

Menurut total permintaan akhir berdasarkan Tabel I-O Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 7.120 triliun. Dari total konsumsi tersebut, 44,18% barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga

merupakan produk-produk dari kelompok Industri Pengolahan. Untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) Indonesia pada tahun 2016 senilai Rp 4139 triliun, dengan komposisi 5,82% dari kelompok pengolahan; serta 2,54% dari kelompok produk lainnya.

Berdasarkan total nilai kompensasi tenaga kerja 2016, tiga kelompok produk yang paling besar memberikan kontribusi terhadap penciptaan kompensasi tenaga kerja yaitu pada kelompok Industri Pengolahan (19,19%); Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,12%); serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,59%). Produk yang paling besar menghasilkan usaha bruto juga didominasi oleh tiga sektor tersebut, yaitu produk pada kelompok Industri Pengolahan (22,61%); Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,21%); serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,18%).

Gambar 4.1 Struktur Nilai Tambah Bruto (NTB) Indonesia 2016



Sumber: BPS, diakses April 2021

Tabel 4.13 Koefisien Input Domestik 2016

| Kode | Deskripsi | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Kategori Kontribusi Input | Industri Pengolahan | Kategori Kontribusi Input | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Kategori Kontribusi Input |
|-----------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan perikanan | 0,04915 | Tinggi | 0,12810 | Tinggi | 0,00037 | |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,00000 | | 0,05436 | Tinggi | 0,00000 | |
| 3 | Industri Pengolahan | 0,08756 | Tinggi | 0,18007 | Tinggi | 0,06545 | Tinggi |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,00082 | | 0,01061 | | 0,00792 | |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,00005 | | 0,00068 | | 0,00055 | |
| 6 | Konstruksi | 0,00546 | | 0,00096 | | 0,00739 | |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0,02392 | Tinggi | 0,05338 | Tinggi | 0,02551 | Tinggi |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0,00597 | | 0,02001 | Tinggi | 0,03617 | Tinggi |
| 9 | Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 0,00027 | | 0,00175 | | 0,00730 | |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,00033 | | 0,00952 | | 0,02042 | Tinggi |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,01879 | Tinggi | 0,01310 | Tinggi | 0,04215 | Tinggi |
| 12 | Real Estate | 0,00000 | | 0,00221 | | 0,02718 | Tinggi |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,00182 | | 0,00837 | | 0,01991 | Tinggi |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 0,00067 | | 0,00129 | | 0,00103 | |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0,00000 | | 0,00037 | | 0,00053 | |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,00003 | | 0,00038 | | 0,00109 | |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,00055 | | 0,00093 | | 0,00138 | |
| Total | | 0,19539 | | 0,48610 | | 0,26435 | |
| Rata-Rata | | 0,01149 | | 0,02859 | | 0,01555 | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Sektor Industri Pengolahan sangat sentral bagi perekonomian nasional, merupakan sektor dengan kontribusi terbesar, selain itu merupakan sektor dengan permintaan impor tertinggi, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Tiga sektor yang menjadi penghasil usaha bruto didominasi oleh tiga sektor, yaitu Industri Pengolahan, menyusul Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan terakhir sektor

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Tiga sektor ini juga merupakan sektor terpilih yang menjadi unggulan berdasarkan kajian ini.

Berdasarkan tabel koefisien input domestik, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendapatkan nilai input tertinggi dari sektor industri pengolahan, sebesar 0,04915, artinya, untuk menghasilkan Rp 1

nilai output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dibutuhkan bahan baku (input antara) senilai Rp 0.04915 dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu sendiri. Sektor Industri pengolahan juga mendukung Rp 0.0875 terhadap Rp 1 unit output, sektor industri merupakan sektor pendukung tertinggi untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Terdapat 4 sektor yang termasuk kategori tinggi (di atas rata-rata) untuk nilai input terhadap output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu sendiri, industri pengolahan, perdagangan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan jasa keuangan dan asuransi. Kategorisasi kontribusi tinggi dilihat dari koefisien yang lebih tinggi dari rata-rata.

Sementara itu, sektor industri didukung tertinggi oleh sektor pengolahan itu sendiri dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Rp 1 unit output berasal dari Rp 0.12810 dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan Rp 0.18007 oleh sektor industri pengolahan itu sendiri. Beberapa sektor yang memiliki kontribusi input tinggi

untuk sektor industri pengolahan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, dan jasa keuangan dan asuransi.

Sama halnya dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, koefisien input sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mendapatkan nilai input tertinggi dari sektor industri pengolahan, sebesar 0,06545, artinya, untuk menghasilkan Rp 1 nilai output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dibutuhkan bahan baku (input antara) senilai Rp 0.06545. Terdapat 7 sektor yang termasuk kategori tinggi (di atas rata-rata) untuk nilai input terhadap output sektor ini, diantaranya industri pengolahan, perdagangan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sendiri, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyedia informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor real estate. Perhitungan ini bisa memperlihatkan keterkaitan antar sektor, terutama antara 3 sektor.



5. Rumusan Potensi Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Bandung

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi

EDA Kab. Bandung

5.1 Analisis Potensi Sektor Pertanian

Analisis ini menjelaskan kinerja PDRB, potensi, serta analisis keterkaitan spasial dari potensi sektor pertanian.

1. Kinerja PDRB Sektor Pertanian

Berdasarkan data PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2020, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (sektor A) Nilai PDRB sektor A mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2011 dan 2014,

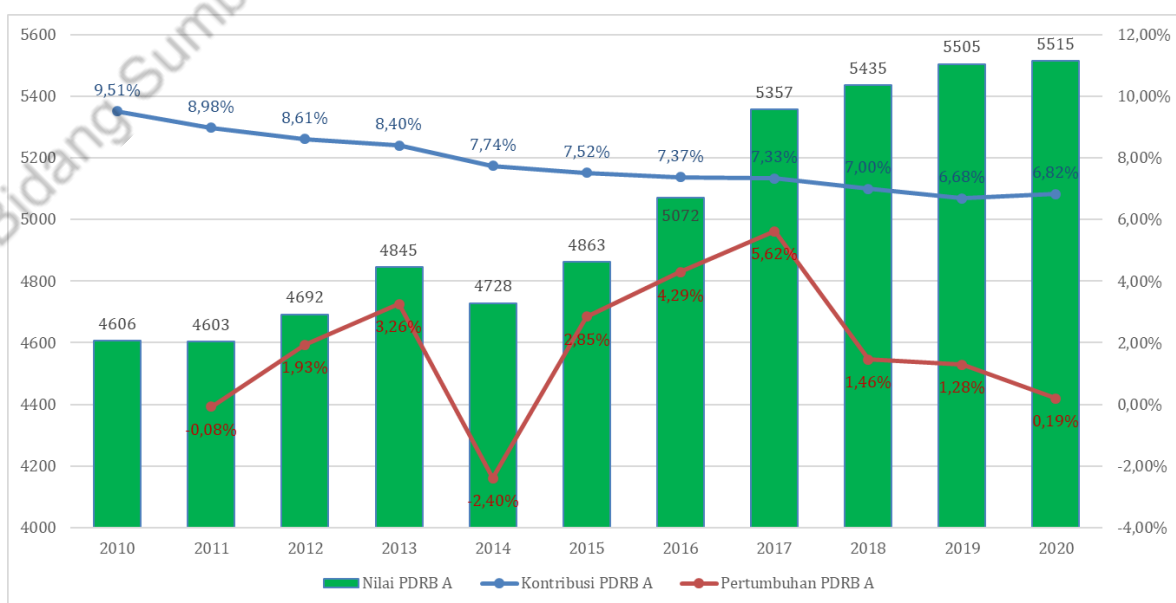
dengan nilai rata-rata 5,02 triliun rupiah. Tetapi di sisi lain, kontribusi sektor A terhadap PDRB Kabupaten Bandung, justru cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, dan mencapai nilai terendah 6,68% pada tahun 2019 dengan rata-rata kontribusi 7,82%. Sedangkan laju pertumbuhan sektor A cenderung naik turun dengan angka pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2017 yaitu 5,62%, dan terendah pada tahun 2014 yaitu -2,40%, serta rata-rata pertumbuhan 1,84%:

Tabel 5.1 Kinerja PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bandung tahun 2010-2020

| Tahun | PDRB Sektor A (miliar rupiah) | Kontribusi Terhadap PDRB Kab. Bandung | Pertumbuhan Sektor A |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 2010 | 4.606,25 | 9,51% | - |
| 2011 | 4.602,69 | 8,98% | -0,08% |
| 2012 | 4.691,67 | 8,61% | 1,93% |
| 2013 | 4.844,58 | 8,40% | 3,26% |
| 2014 | 4.728,39 | 7,74% | -2,40% |
| 2015 | 4.863,23 | 7,52% | 2,85% |
| 2016 | 5.071,86 | 7,37% | 4,29% |
| 2017 | 5.356,85 | 7,33% | 5,62% |
| 2018 | 5.435,18 | 7,00% | 1,46% |
| 2019 | 5.505,00 | 6,68% | 1,28% |
| 2020* | 5.515,49 | 6,82% | 0,19% |
| Rata-rata | 5.020.11 | 7,82% | 1,84% |

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021, diolah

Grafik 5.1 Kinerja PDRB sektor pertanian Kabupaten Bandung

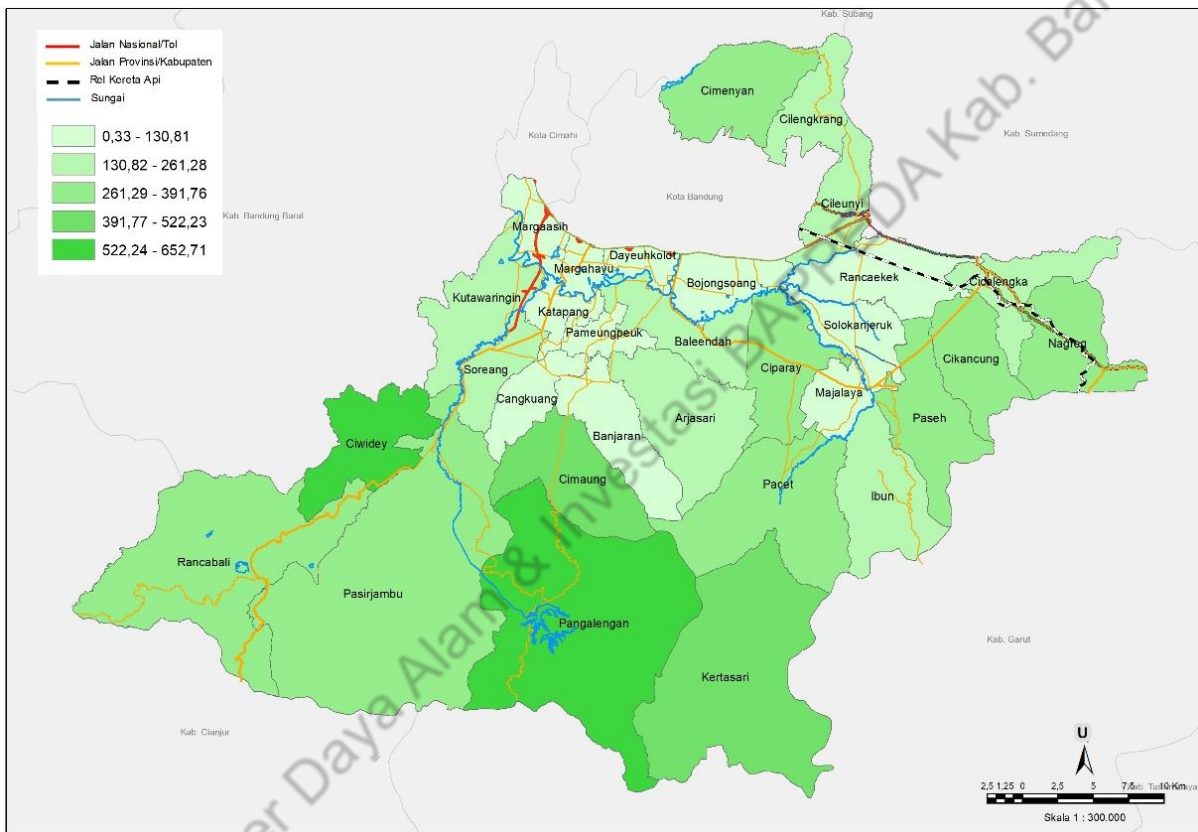


Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021, diolah

Aspek lain yang dapat ditinjau adalah kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tingkat Kecamatan. Data terkini yang diperoleh adalah PDRB ADHB berdasarkan sektor ekonomi per kecamatan tahun 2016. Sebaran kontribusi PDRB sektor A menunjukkan bahwa PDRB paling tinggi terdapat di Kecamatan Pangalengan (9,10%),

Kecamatan Ciwidey (8,98%), dan Kecamatan Kertasari (6,08%). Selain itu, jika dijumlahkan maka setengah dari total PDRB sektor A dapat dipenuhi oleh 8 kecamatan dengan peringkat tertinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi sektor pertanian memiliki kecenderungan berkelompok pada beberapa kecamatan.

Gambar 5.1 Peta sebaran PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan per kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2016



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dapat dilihat bahwa secara spasial, sebaran PDRB sektor pertanian yang relatif tinggi berada pada bagian Selatan Kabupaten Bandung. Hal tersebut disebabkan wilayah Selatan Kabupaten Bandung merupakan wilayah dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan seperti Gunung Patuha, Gunung Wayang Windu, dan Gunung Kendang. Sedangkan kebalikannya, wilayah bagian tengah, terutama yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi, memiliki nilai PDRB sektor pertanian yang relatif rendah.

2. Potensi Sektor Pertanian

Identifikasi potensi sektor pertanian dilakukan dengan dua metode; pertama, melalui perhitungan nilai produksi hasil pertanian yaitu mengonversi hasil produksi pertanian menjadi nilai rupiah; serta kedua, melalui wawancara terhadap aktor kunci yang memiliki pengetahuan terhadap sebaran potensi pertanian di Kabupaten Bandung.

Potensi sektor pertanian diuraikan ke dalam 7 (tujuh) sub sektor pertanian

meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, biofarmaka, buah-buahan, serta perikanan. Setiap sub-sektor diwakili oleh beberapa komoditas yang dipilih dengan pertimbangan: merupakan komoditas unggulan yang ditetapkan pada dokumen kebijakan sebelumnya seperti rencana tata ruang dan masterplan pertanian; produksi yang relatif besar; serta secara konsisten muncul di dalam data statistik yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bandung pada publikasi data dalam angka.

Data yang digunakan adalah data produksi komoditas per kecamatan tahun 2020, kecuali sub-sektor perkebunan (2018), dan peternakan (2017). Untuk asumsi harga komoditas, harga yang digunakan adalah harga di tingkat petani pada kondisi normal, ini dilakukan untuk meminimasi harga dari pengaruh sektor lain, seperti transportasi dan perdagangan, serta inflasi. Asumsi harga diperoleh dari pelbagai sumber seperti publikasi oleh BPS atau instansi terkait, berita yang diperoleh dari sumber populer seperti berita di internet, serta wawancara.

Tabel 5.2 Variabel dalam identifikasi sub-sektor unggulan pertanian

| No. | Sub-sektor Pertanian | Komoditas | Asumsi Harga (rupiah/(kg/liter/ekor)) |
|-----|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | Tanaman pangan | Padi | 8.000 |
| | | Jagung | 7.000 |
| | | Ubi kayu | 4.000 |
| 2 | Hortikultura | Bawang merah | 8.000 |
| | | Cabai Besar | 20.000 |
| | | Cabai Rawit | 20.000 |
| | | Kentang | 8.000 |
| | | Kubis | 3.000 |
| | | Tomat | 5.000 |
| 3 | Perkebunan | Kopi | 20.000 |
| | | Teh | 20.000 |
| | | Tembakau | 25.000 |
| 4 | Peternakan | Sapi perah (susu) | 5.000 |
| | | Domba | 2.500.000 |
| 5 | Biofarmaka | Jahe | 10.000 |
| | | Lengkuas | 6.000 |
| | | Kunyit | 4.000 |
| 6 | Buah-buahan | Mangga | 6.000 |
| | | Durian | 8.000 |
| | | Jeruk siam | 5.000 |
| | | Pisang | 3.000 |
| | | Pepaya | 2.500 |
| | | Alpukat | 7.000 |
| 7 | Perikanan | Jambu biji | 5.000 |
| | | Benih ikan lele | 150 |
| | | Benih ikan nila | 200 |
| | | Benih ikan mas | 150 |

Sumber: BPS, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung, 2021, diolah.

Setelah diperoleh nilai produksi hasil pertanian per kecamatan untuk setiap sub-sektor, kemudian dilakukan proses penentuan sub-sektor unggulan. Kecamatan yang memiliki nilai produksi sub-sektor

tertentu berada di atas rata-rata Kabupaten, digolongkan sebagai kecamatan dengan sub-sektor unggulan tersebut pada tingkat Kabupaten. Hasilnya menunjukkan jika suatu kecamatan dapat memiliki lebih dari satu

sampai tujuh, atau sama sekali tidak memiliki, sub-sektor unggulan pertanian.

Tabel 5.3 pada halaman berikutnya, hingga Tabel 5.9, menjelaskan mengenai hasil perhitungan nilai produksi masing-masing sub-sektor pertanian mulai dari tanaman pangan (5.3), perkebunan (5.4), peternakan (5.5), biofarmaka (5.6), perikanan (5.7), hortikultura (5.8) dan buah-buahan (5.9).

Pada setiap tabel dijelaskan nilai produksi per komoditas, nilai produksi per kecamatan, serta kecamatan yang menjadi lokasi dari sub-sektor unggulan yang dimaksud. Tabel 5.10, merangkum sub-sektor unggulan pertanian yang dimiliki oleh setiap kecamatan, serta jumlah keseluruhan sub-sektor unggulan pertanian yang ada dan tersebar pada setiap kecamatan di Kabupaten Bandung.

Tabel 5.3 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor tanaman pangan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | | Unggulan |
|-----------|--------------|------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| | | Padi | Jagung | Ubi Kayu | Total | |
| 1 | Ciwidey | 172.630 | 2.184 | 672 | 175.486 | |
| 2 | Rancabali | 99.068 | 3.724 | 8.413 | 111.205 | |
| 3 | Pasirjambu | 191.691 | 3.534 | 2.362 | 197.586 | |
| 4 | Cimaung | 311.309 | 19.102 | 10.852 | 341.264 | ✓ |
| 5 | Pangalengan | 113.055 | 46.738 | 16.424 | 176.218 | |
| 6 | Kertasari | 7.095 | 14.660 | 2.695 | 24.450 | |
| 7 | Pacet | 343.086 | 41.369 | 37.831 | 422.286 | ✓ |
| 8 | Ibun | 188.198 | 10.153 | 3.201 | 201.551 | |
| 9 | Paseh | 259.466 | 43.160 | 11.167 | 313.793 | ✓ |
| 10 | Cikancung | 100.027 | 34.845 | 27.457 | 162.328 | |
| 11 | Cicalengka | 163.027 | 70.487 | 10.933 | 244.447 | ✓ |
| 12 | Nagreg | 47.731 | 187.802 | 27.433 | 262.966 | ✓ |
| 13 | Rancaekek | 406.702 | 0 | 0 | 406.702 | ✓ |
| 14 | Majalaya | 208.792 | 136 | 252 | 209.180 | ✓ |
| 15 | Solokanjeruk | 272.556 | 0 | 0 | 272.556 | ✓ |
| 16 | Ciparay | 460.731 | 6.426 | 15.428 | 482.585 | ✓ |
| 17 | Baleendah | 154.279 | 593 | 1.595 | 156.467 | |
| 18 | Arjasari | 240.580 | 30.626 | 3.297 | 274.503 | ✓ |
| 19 | Banjaran | 234.033 | 7.513 | 1.950 | 243.496 | ✓ |
| 20 | Cangkuang | 158.276 | 7.527 | 4.723 | 170.526 | |
| 21 | Pameungpeuk | 123.567 | 0 | 84 | 123.651 | |
| 22 | Katapang | 117.002 | 0 | 502 | 117.504 | |
| 23 | Soreang | 148.538 | 11.822 | 252 | 160.612 | |
| 24 | Kutawaringin | 249.905 | 27.467 | 2.457 | 279.829 | ✓ |
| 25 | Margaasih | 84.631 | 0 | 840 | 85.471 | |
| 26 | Margahayu | 6.599 | 0 | 0 | 6.599 | |
| 27 | Dayeuhkolot | 21.320 | 0 | 168 | 21.488 | |
| 28 | Bojongsoang | 274.678 | 0 | 0 | 274.678 | ✓ |
| 29 | Cileunyi | 138.877 | 32.281 | 29.456 | 200.615 | |
| 30 | Cilengkrang | 28.557 | 2.060 | 1.181 | 31.798 | |
| 31 | Ciminyan | 37.519 | 88.559 | 33.701 | 159.778 | |
| Total | | 5.363.526 | 692.768 | 255.325 | 6.311.618 | 13 |
| Rata-Rata | | 173.017 | 22.347 | 8.236 | 203.601 | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 5.4 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | | Unggulan |
|-----------|--------------|------------------------------|---------|-----------|---------|----------|
| | | Kopi* | Teh* | Tembakau* | Total | |
| 1 | Ciwidey | 27.468 | 20.594 | 4.050 | 52.112 | ✓ |
| 2 | Rancabali | 35.342 | 3.451 | 3.375 | 42.168 | ✓ |
| 3 | Pasirjambu | 27.470 | 39.338 | 3.038 | 69.846 | ✓ |
| 4 | Cimaung | 20.928 | 0 | 2.138 | 23.066 | |
| 5 | Pangalengan | 130.464 | 73.873 | 0 | 204.337 | ✓ |
| 6 | Kertasari | 58.550 | 4.494 | 0 | 63.045 | ✓ |
| 7 | Pacet | 24.560 | 0 | 24.975 | 49.535 | ✓ |
| 8 | Ibun | 71.616 | 0 | 18.480 | 90.096 | ✓ |
| 9 | Paseh | 71.200 | 0 | 37.913 | 109.113 | ✓ |
| 10 | Cikancung | 23.893 | 0 | 19.803 | 43.695 | ✓ |
| 11 | Cicalengka | 6.586 | 300 | 16.313 | 23.198 | |
| 12 | Nagreg | 1.568 | 0 | 9.900 | 11.468 | |
| 13 | Rancaekek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Majalaya | 55 | 0 | 0 | 55 | |
| 15 | Solokanjeruk | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 16 | Ciparay | 15.520 | 0 | 2.588 | 18.108 | |
| 17 | Baleendah | 221 | 0 | 2.200 | 2.421 | |
| 18 | Arjasari | 10.927 | 0 | 8.789 | 19.716 | |
| 19 | Banjaran | 5.236 | 0 | 0 | 5.236 | |
| 20 | Cangkuang | 1.374 | 0 | 0 | 1.374 | |
| 21 | Pameungpeuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Katapang | 138 | 0 | 0 | 138 | |
| 23 | Soreang | 132 | 0 | 3.410 | 3.542 | |
| 24 | Kutawaringin | 4.875 | 0 | 2.090 | 6.965 | |
| 25 | Margaasih | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Margahayu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Dayeuhkolot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Bojongsoang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Cileunyi | 9.016 | 0 | 1.870 | 10.886 | |
| 30 | Cilengkrang | 0 | 0 | 9.338 | 9.338 | |
| 31 | Cimencyan | 5.312 | 0 | 0 | 5.312 | |
| TOTAL | | 552.502 | 142.049 | 170.266 | 864.818 | 9 |
| Rata-Rata | | 17.823 | 4.582 | 5.492 | 27.897 | |

*Data tahun 2018

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 5.5 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor peternakan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | Unggulan |
|-----|-------------|------------------------------|--------|---------|----------|
| | | Sapi Perah* (Susu) | Domba* | Total | |
| 1 | Ciwidey | 12.023 | 16.030 | 28.053 | ✓ |
| 2 | Rancabali | 15.527 | 3.735 | 19.262 | |
| 3 | Pasirjambu | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cimaung | 44 | 14.080 | 14.124 | |
| 5 | Pangalengan | 330.143 | 4.515 | 334.658 | ✓ |
| 6 | Kertasari | 39.968 | 9.250 | 49.218 | ✓ |
| 7 | Pacet | 0 | 22.848 | 22.848 | |
| 8 | Ibun | 0 | 96.250 | 96.250 | ✓ |
| 9 | Paseh | 88 | 4.000 | 4.088 | |

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | Unggulan |
|-----------|--------------|------------------------------|---------|---------|----------|
| | | Sapi Perah* (Susu) | Domba* | Total | |
| 10 | Cikancung | 175 | 7.738 | 7.913 | |
| 11 | Cicalengka | 0 | 2.218 | 2.218 | |
| 12 | Nagreg | 0 | 2.520 | 2.520 | |
| 13 | Rancaekek | 0 | 25.538 | 25.538 | |
| 14 | Majalaya | 0 | 11.700 | 11.700 | |
| 15 | Solokanjeruk | 0 | 6.625 | 6.625 | |
| 16 | Ciparay | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Baleendah | 591 | 5.050 | 5.641 | |
| 18 | Arjasari | 17.192 | 18.113 | 35.304 | ✓ |
| 19 | Banjaran | 307 | 9.570 | 9.877 | |
| 20 | Cangkuang | 3.986 | 6.835 | 10.821 | |
| 21 | Pameungpeuk | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Katapang | 745 | 2.288 | 3.032 | |
| 23 | Soreang | 0 | 25 | 25 | |
| 24 | Kutawaringin | 0 | 9.685 | 9.685 | |
| 25 | Margaasih | 0 | 3.125 | 3.125 | |
| 26 | Margahayu | 0 | 508 | 508 | |
| 27 | Dayeuhkolot | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Bojongsoang | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Cileunyi | 9.220 | 9.465 | 18.685 | |
| 30 | Cilengkrang | 70.146 | 8.433 | 78.578 | ✓ |
| 31 | Cimendan | 12.023 | 0 | 12.023 | |
| Total | | 500.152 | 300.140 | 800.292 | 6 |
| Rata-Rata | | 16.522 | 9.682 | 26.204 | |

*Data tahun 2017

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 5.6 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor biofarmaka menurut kecamatan di Kabupaten Bandung

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | | Unggulan |
|-----|--------------|------------------------------|----------|--------|-------|----------|
| | | Jahe | Lengkuas | Kunyit | Total | |
| 1 | Ciwidey | 194 | 0 | 11 | 205 | |
| 2 | Rancabali | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Pasirjambu | 25 | 3 | 2 | 30 | |
| 4 | Cimaung | 0 | 0 | 48 | 48 | |
| 5 | Pangalengan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kertasari | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Pacet | 215 | 96 | 600 | 911 | ✓ |
| 8 | Ibun | 500 | 0 | 222 | 722 | ✓ |
| 9 | Paseh | 526 | 90 | 174 | 790 | ✓ |
| 10 | Cikancung | 675 | 0 | 92 | 767 | ✓ |
| 11 | Cicalengka | 13 | 5 | 8 | 25 | |
| 12 | Nagreg | 440 | 0 | 20 | 460 | ✓ |
| 13 | Rancaekek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Majalaya | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Solokanjeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ciparay | 1.100 | 378 | 1.044 | 2.522 | ✓ |
| 17 | Baleendah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Arjasari | 30 | 18 | 29 | 77 | |
| 19 | Banjaran | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | Cangkuang | 559 | 0 | 0 | 559 | ✓ |
| 21 | Pameungpeuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Katapang | 30 | 0 | 0 | 30 | |

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | | Unggulan |
|-----------|--------------|------------------------------|----------|--------|-------|----------|
| | | Jahe | Lengkuas | Kunyit | Total | |
| 23 | Soreang | 19 | 30 | 22 | 71 | |
| 24 | Kutawaringin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Margaasih | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Margahayu | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Dayeuhkolot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Bojongsoang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Cileunyi | 1.000 | 0 | 500 | 1.500 | ✓ |
| 30 | Cilengkrang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Cimencyan | 325 | 90 | 7 | 422 | ✓ |
| Total | | 5.664 | 711 | 2.780 | 9.155 | 9 |
| Rata-Rata | | 183 | 23 | 90 | 295 | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 5.7 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor perikanan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | | Unggulan |
|-----------|--------------|------------------------------|------------|-----------|---------|----------|
| | | Benih Lele | Benih Nila | Benih Mas | Total | |
| 1 | Ciwidey | 2.807 | 2.681 | 3.008 | 8.496 | |
| 2 | Rancabali | 2.367 | 2.234 | 2.507 | 7.108 | |
| 3 | Pasirjambu | 2.994 | 2.859 | 3.209 | 9.063 | |
| 4 | Cimaung | 3.836 | 3.664 | 4.112 | 11.612 | ✓ |
| 5 | Pangalengan | 2.732 | 2.591 | 2.908 | 8.231 | |
| 6 | Kertasari | 3.300 | 3.128 | 3.510 | 9.938 | ✓ |
| 7 | Pacet | 8.702 | 8.310 | 9.326 | 26.339 | ✓ |
| 8 | Ibun | 4.211 | 4.021 | 4.513 | 12.745 | ✓ |
| 9 | Paseh | 4.679 | 4.468 | 5.014 | 14.161 | ✓ |
| 10 | Cikancung | 2.277 | 2.145 | 2.407 | 6.828 | |
| 11 | Cicalengka | 2.165 | 2.055 | 2.307 | 6.526 | |
| 12 | Nagreg | 3.200 | 3.038 | 3.410 | 9.648 | ✓ |
| 13 | Rancaekek | 6.123 | 5.808 | 6.518 | 18.449 | ✓ |
| 14 | Majalaya | 14.202 | 11.170 | 12.535 | 37.907 | ✓ |
| 15 | Solokanjeruk | 1.326 | 1.251 | 1.404 | 3.981 | |
| 16 | Ciparay | 13.238 | 10.902 | 12.235 | 36.374 | ✓ |
| 17 | Baleendah | 1.272 | 1.072 | 1.203 | 3.547 | |
| 18 | Arjasari | 713 | 626 | 702 | 2.040 | |
| 19 | Banjaran | 2.714 | 2.591 | 2.908 | 8.213 | |
| 20 | Cangkuang | 1.871 | 1.787 | 2.006 | 5.664 | |
| 21 | Pameungpeuk | 1.029 | 983 | 1.103 | 3.115 | |
| 22 | Katapang | 749 | 715 | 802 | 2.266 | |
| 23 | Soreang | 2.901 | 2.770 | 3.109 | 8.780 | |
| 24 | Kutawaringin | 2.059 | 1.966 | 2.206 | 6.231 | |
| 25 | Margaasih | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Margahayu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Dayeuhkolot | 1.332 | 1.162 | 1.304 | 3.797 | |
| 28 | Bojongsoang | 2.339 | 2.234 | 2.507 | 7.080 | |
| 29 | Cileunyi | 3.275 | 3.128 | 3.510 | 9.912 | ✓ |
| 30 | Cilengkrang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Cimencyan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | | 98.411 | 89.358 | 100.283 | 288.052 | 10 |
| Rata-rata | | 3.175 | 2.883 | 3.235 | 9.292 | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 5.8 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor hortikultura menurut kecamatan di Kabupaten Bandung

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | | | | | Unggulan |
|-----------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| | | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Total | |
| 1 | Ciwidey | 624 | 22.354 | 17.986 | 0 | 5.903 | 14.110 | 60.977 | |
| 2 | Rancabali | 3.785 | 19.590 | 14.892 | 4.358 | 3.652 | 6.675 | 52.951 | |
| 3 | Pasirjambu | 2.942 | 26.272 | 14.850 | 7.279 | 5.603 | 14.172 | 71.118 | |
| 4 | Cimaung | 74.576 | 123.914 | 30.852 | 163 | 1.930 | 11.961 | 243.396 | ✓ |
| 5 | Pangalengan | 56.434 | 344.656 | 162.846 | 412.999 | 188.414 | 378.722 | 1.544.071 | ✓ |
| 6 | Kertasari | 442 | 22.480 | 8.732 | 45.774 | 15.812 | 5.678 | 98.918 | |
| 7 | Pacet | 68.076 | 48.330 | 27.816 | 1.615 | 827 | 12.537 | 159.201 | ✓ |
| 8 | Ibun | 67.250 | 161.320 | 4.774 | 1.614 | 2.816 | 6.746 | 244.519 | ✓ |
| 9 | Paseh | 13.169 | 172.796 | 32.726 | 17.504 | 5.472 | 18.097 | 259.764 | ✓ |
| 10 | Cikancung | 3.336 | 36.320 | 18.348 | 1.195 | 3.230 | 15.044 | 77.473 | |
| 11 | Cicalengka | 858 | 9.472 | 7.996 | 3.714 | 1.871 | 8.447 | 32.359 | |
| 12 | Nagreg | 846 | 3.056 | 8.676 | 0 | 216 | 1.189 | 13.983 | |
| 13 | Rancaekek | 0 | 2.420 | 0 | 0 | 0 | 319 | 2.739 | |
| 14 | Majalaya | 0 | 2.136 | 2.162 | 0 | 571 | 1.285 | 6.154 | |
| 15 | Solokanjeruk | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 304 | |
| 16 | Ciparay | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | |
| 17 | Baleendah | 0 | 192 | 1.986 | 0 | 0 | 436 | 2.614 | |
| 18 | Arjasari | 39.854 | 58.528 | 8.782 | 0 | 1.456 | 26.565 | 135.184 | ✓ |
| 19 | Banjaran | 2.625 | 0 | 596 | 0 | 0 | 437 | 3.657 | |
| 20 | Cangkuang | 1.699 | 9.276 | 6.846 | 0 | 0 | 3.046 | 20.867 | |
| 21 | Pameungpeuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Katapang | 0 | 384 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | |
| 23 | Soreang | 6.418 | 13.254 | 3.670 | 937 | 277 | 2.392 | 26.948 | |
| 24 | Kutawaringin | 0 | 16.876 | 13.364 | 0 | 0 | 329 | 30.569 | |
| 25 | Margaasih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Margahayu | 167 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | |
| 27 | Dayeuhkolot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 1.584 | |
| 28 | Bojongsoang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Cileunyi | 379 | 3.264 | 1.524 | 0 | 487 | 2.374 | 8.028 | |
| 30 | Cilengkrang | 1.632 | 9.814 | 10.784 | 7.001 | 1.603 | 3.538 | 34.372 | |
| 31 | Cimencyan | 140.711 | 20.914 | 22.700 | 17.567 | 6.952 | 10.146 | 218.990 | ✓ |
| Total | | 487.489 | 868.522 | 425.166 | 521.722 | 247.094 | 546.038 | 3.096.030 | 7 |
| Rata-Rata | | 15.725 | 36.375 | 13.715 | 16.830 | 7.971 | 17.614 | 108.230 | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 5.9 Hasil perhitungan nilai produksi sub-sektor buah-buahan menurut kecamatan di Kabupaten Bandung

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | | | | | Unggulan | |
|-----|-------------|------------------------------|--------|------------|--------|--------|---------|------------|----------|-------|
| | | Mangga | Durian | Jeruk Siam | Pisang | Pepaya | Alpukat | Jambu Biji | | Total |
| 1 | Ciwidey | 2.400 | 0 | 74.080 | 26.736 | 0 | 26.922 | 8.715 | 138.853 | ✓ |
| 2 | Rancabali | 1.170 | 0 | 23.215 | 19.686 | 208 | 15.596 | 2.450 | 62.325 | ✓ |
| 3 | Pasirjambu | 534 | 0 | 13.845 | 35.391 | 0 | 29.729 | 3.220 | 82.719 | ✓ |
| 4 | Cimaung | 924 | 1.448 | 11.755 | 48.384 | 180 | 19.488 | 9.660 | 91.839 | ✓ |
| 5 | Pangalengan | 4.170 | 480 | 29.765 | 19.293 | 0 | 87.934 | 13.525 | 155.167 | ✓ |
| 6 | Kertasari | 678 | 0 | 1.495 | 3.120 | 0 | 67.935 | 1.655 | 74.883 | ✓ |
| 7 | Pacet | 18.426 | 1.640 | 3.600 | 18.930 | 1.283 | 137.900 | 10.160 | 191.939 | ✓ |
| 8 | Ibun | 16.884 | 16.168 | 18.350 | 9.342 | 1.138 | 23.975 | 19.050 | 104.907 | ✓ |
| 9 | Paseh | 51.360 | 3.280 | 23.250 | 2.940 | 1.308 | 22.470 | 6.010 | 110.618 | ✓ |
| 10 | Cikancung | 40.176 | 2.432 | 24.850 | 6.534 | 6.445 | 37.660 | 14.450 | 132.547 | ✓ |
| 11 | Cicalengka | 780 | 928 | 215 | 5.721 | 330 | 3.675 | 1.055 | 12.704 | |
| 12 | Nagreg | 2.292 | 0 | 0 | 729 | 423 | 518 | 2.380 | 6.342 | |
| 13 | Rancaekek | 42 | 0 | 50 | 27 | 10 | 0 | 190 | 319 | |
| 14 | Majalaya | 15.198 | 3.688 | 125 | 99 | 633 | 1.246 | 10.400 | 31.389 | |

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi (juta rupiah) | | | | | | | | Unggulan |
|-----------|--------------|------------------------------|---------|------------|---------|--------|---------|------------|-----------|----------|
| | | Mangga | Durian | Jeruk Siam | Pisang | Pepaya | Alpukat | Jambu Biji | Total | |
| 15 | Solokanjeruk | 288 | 0 | 0 | 567 | 73 | 56 | 185 | 1.169 | |
| 16 | Ciparay | 54 | 88 | 0 | 819 | 28 | 4.067 | 30 | 5.086 | |
| 17 | Baleendah | 6.222 | 28.032 | 0 | 9.774 | 1.040 | 7.595 | 3.780 | 56.443 | |
| 18 | Arjasari | 6.780 | 320 | 935 | 210 | 1.028 | 6.440 | 175 | 15.888 | |
| 19 | Banjaran | 0 | 168 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 201 | |
| 20 | Cangkuang | 6.984 | 8.624 | 1.210 | 0 | 575 | 2.149 | 1.860 | 21.402 | |
| 21 | Pameungpeuk | 1.776 | 0 | 0 | 426 | 458 | 322 | 1.640 | 4.622 | |
| 22 | Katapang | 2.550 | 0 | 0 | 1.299 | 608 | 1.421 | 1.960 | 7.838 | |
| 23 | Soreang | 20.700 | 36.800 | 18.625 | 750 | 7.575 | 59.500 | 1.000 | 144.950 | ✓ |
| 24 | Kutawaringin | 22.440 | 15.512 | 4.950 | 1.890 | 185 | 14.868 | 1.235 | 61.080 | ✓ |
| 25 | Margaasih | 312 | 0 | 0 | 51 | 8 | 147 | 180 | 698 | |
| 26 | Margahayu | 0 | 0 | 400 | 108 | 5 | 21 | 40 | 574 | |
| 27 | Dayeuhkolot | 120 | 424 | 0 | 132 | 65 | 28 | 155 | 924 | |
| 28 | Bojongsoang | 1.422 | 0 | 0 | 315 | 288 | 987 | 380 | 3.392 | |
| 29 | Cileunyi | 6.486 | 8.312 | 2.110 | 19.530 | 1.823 | 2.989 | 3.010 | 44.260 | |
| 30 | Cilengkrang | 150 | 4.736 | 70 | 48 | 48 | 68.502 | 1.750 | 75.304 | ✓ |
| 31 | Cimencyan | 1.404 | 5.016 | 4.385 | 134.343 | 0 | 8.715 | 535 | 154.398 | ✓ |
| Total | | 232.722 | 138.096 | 257.280 | 367.194 | 25.780 | 652.855 | 120.845 | 1.794.772 | 14 |
| Rata-Rata | | 7.507 | 4.455 | 8.299 | 11.845 | 832 | 21.060 | 3.898 | 57.896 | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 5.10 Sintesis sebaran sub-sektor pertanian unggulan di Kabupaten Bandung

| No. | Kecamatan | Sub-sektor Pertanian Unggulan | | | | | | | Total Sub-sektor Unggulan |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| | | Tanaman Pangan | Horti-kultura | Per-kebunan | Pe-ternakan | Bio-farmaka | Buah-buahan | Per-ikanan | |
| 1 | Ciwidey | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 3 |
| 2 | Rancabali | | | ✓ | | | ✓ | | 2 |
| 3 | Pasirjambu | | | ✓ | | | ✓ | | 2 |
| 4 | Cimaung | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | 4 |
| 5 | Pangalengan | | ✓* | ✓* | ✓* | | ✓ | | 4 |
| 6 | Kertasari | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 4 |
| 7 | Pacet | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓* | ✓ | 6 |
| 8 | Ibun | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |
| 9 | Paseh | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |
| 10 | Cikancung | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | 3 |
| 11 | Cicalengka | ✓ | | | | | | | 1 |
| 12 | Nagreg | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | 3 |
| 13 | Rancaekek | ✓ | | | | | | ✓ | 2 |
| 14 | Majalaya | ✓ | | | | | | ✓* | 2 |
| 15 | Solokanjeruk | ✓ | | | | | | | 1 |
| 16 | Ciparay | ✓* | | | | ✓* | | ✓ | 3 |
| 17 | Baleendah | | | | | | | | 0 |
| 18 | Arjasari | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | 3 |
| 19 | Banjaran | ✓ | | | | | | | 1 |
| 20 | Cangkuang | | | | | ✓ | | | 1 |
| 21 | Pameungpeuk | | | | | | | | 0 |
| 22 | Katapang | | | | | | | | 0 |
| 23 | Soreang | | | | | | ✓ | | 1 |
| 24 | Kutawaringin | ✓ | | | | | ✓ | | 2 |
| 25 | Margaasih | | | | | | | | 0 |
| 26 | Margahayu | | | | | | | | 0 |
| 27 | Dayeuhkolot | | | | | | | | 0 |
| 28 | Bojongsoang | ✓ | | | | | | | 1 |
| 29 | Cileunyi | | | | | ✓ | | ✓ | 2 |
| 30 | Cilengkrang | | | | ✓ | | ✓ | | 2 |
| 31 | Cimencyan | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | 3 |
| Total Kecamatan Unggulan | | 13 | 7 | 9 | 6 | 9 | 14 | 10 | 68 |

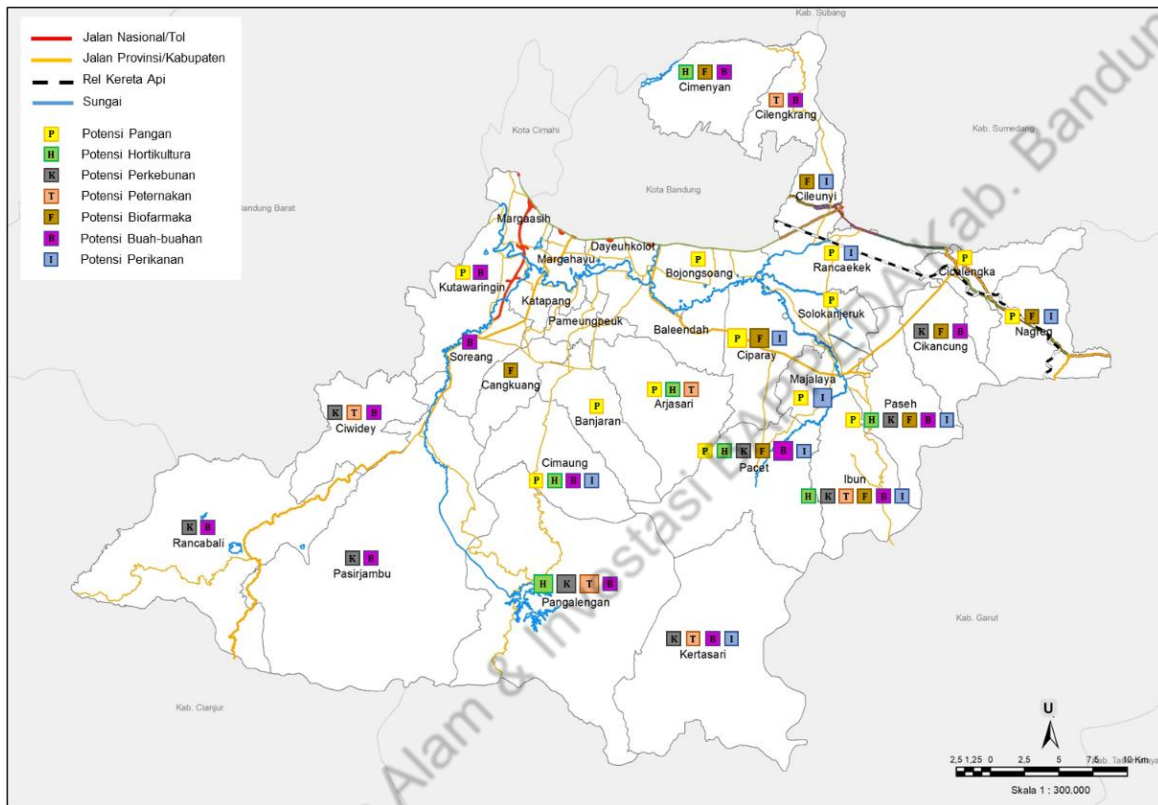
*Nilai produksi paling tinggi di Kabupaten Bandung

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Hasil dari perhitungan nilai produksi menunjukkan bahwa terdapat 13 kecamatan dengan sub-sektor unggulan tanaman pangan, 7 kecamatan dengan sub-sektor unggulan hortikultura, 9 kecamatan dengan sub-sektor unggulan perkebunan, 9 kecamatan dengan sub-sektor unggulan peternakan, 6 kecamatan dengan sub-sektor unggulan

peternakan, 9 kecamatan dengan sub-sektor unggulan biofarmaka, 14 kecamatan dengan sub-sektor unggulan buah-buahan, serta 10 kecamatan dengan sub-sektor unggulan perikanan. Gambar berikut memperlihatkan sebaran potensi sub-sektor pertanian di Kabupaten Bandung.

Gambar 5.2 Peta sebaran potensi sub-sektor pertanian



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

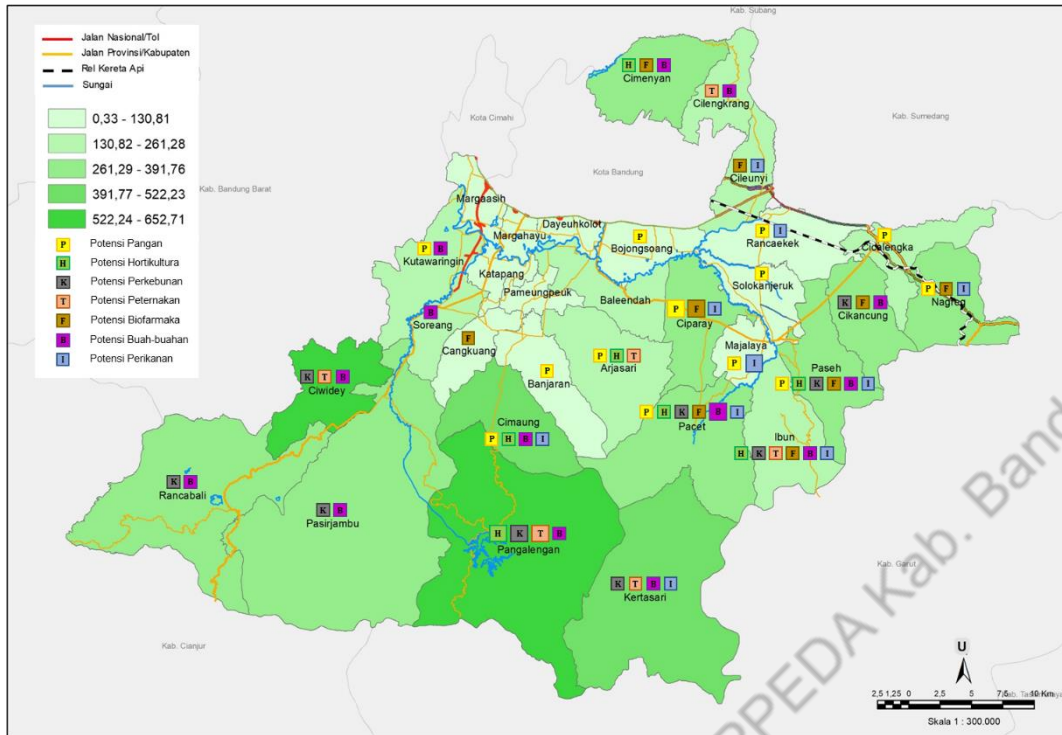
Persebaran potensi sub-sektor pertanian di Kabupaten Bandung cenderung lebih banyak terdapat di bagian Tenggara dan Selatan. Hal ini disebabkan wilayah tersebut merupakan wilayah dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Patuha, Gunung Wayang dan Gunung Kendang.

Sedangkan wilayah di bagian utara Kabupaten, terutama yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi di bagian Selatan memiliki potensi sub-sektor pertanian yang relatif sedikit bahkan tidak ada. Hal tersebut disebabkan wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi, terutama di bagian Selatan, sebagian besar digunakan untuk kegiatan yang bersifat

non-pertanian, seperti kawasan perumahan dan perdagangan.

Dengan menggabungkan peta sebaran potensi dengan peta sebaran PDRB sektor A, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan sub-sektor unggulan yang banyak serta kecamatan dengan nilai PDRB yang tinggi berada pada bagian Selatan wilayah Kabupaten Bandung. Kecamatan Pangalengan yang merupakan wilayah dengan nilai PDRB A paling tinggi memiliki 4 sub-sektor unggulan, dan 3 diantaranya memiliki nilai produksi paling tinggi di Kabupaten Bandung. Sedangkan Kecamatan Ciparay, meskipun memiliki 2 sub-sektor dengan nilai produksi tinggi, tetapi belum terefleksikan ke dalam nilai PDRB.

Gambar 5.3 Peta pertampalan sebaran potensi sub-sektor pertanian dengan PDRB sektor A



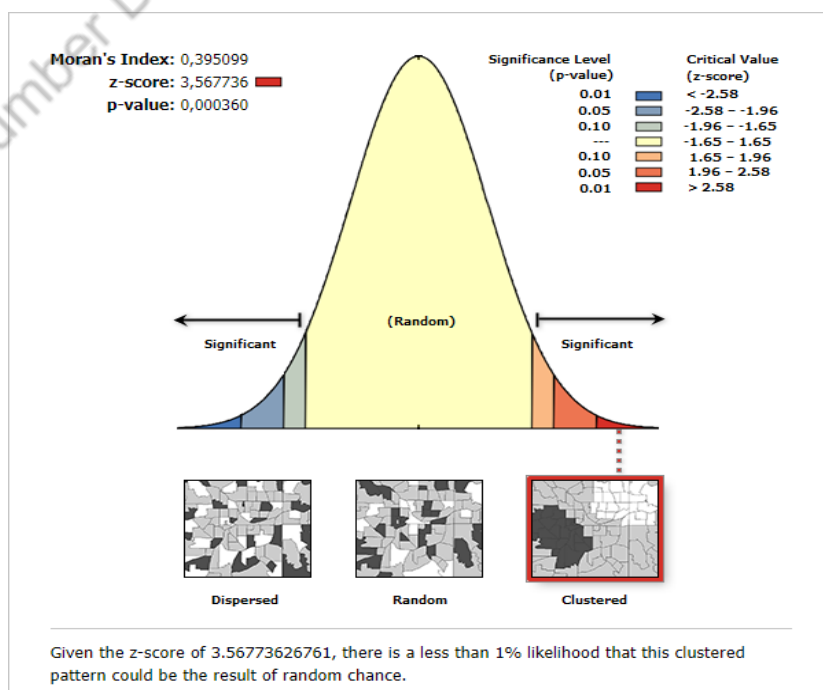
Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3. Keterkaitan Spasial Potensi Sektor Pertanian

Identifikasi keterkaitan spasial potensi sektor pertanian dilakukan melalui analisis Global Moran's *I* dengan bantuan GIS. Data

yang digunakan adalah data PDRB sektor A per Kecamatan pada tahun 2016 yang diproduksi BPS Kabupaten Bandung. Hasil perhitungan terhadap Global Moran's *I* ialah sebagai berikut:

Grafik 5.2 Hasil pengolahan *spatial autorrelation global* dari PDRB pertanian per Kecamatan

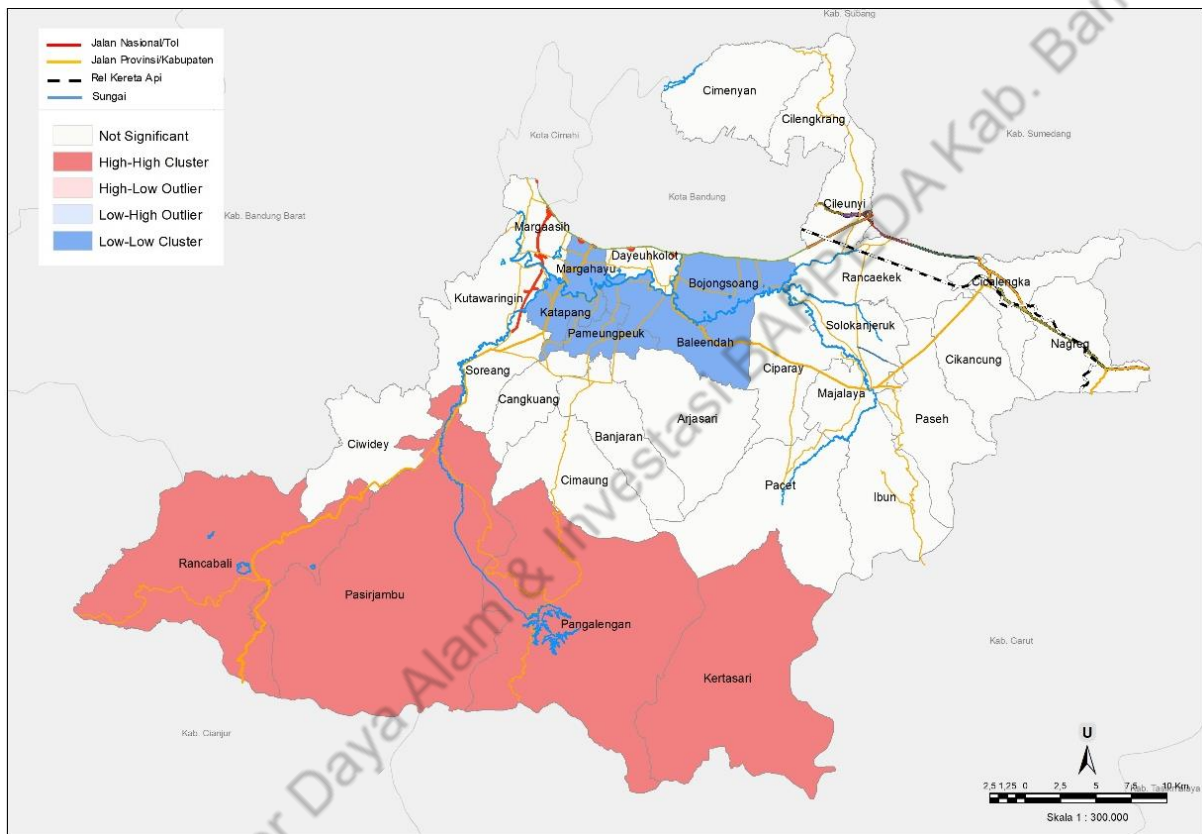


Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Keterkaitan spasial dari PDRB Pertanian diantara 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, seperti yang ditampilkan pada gambar di atas, bernilai lebih dari 1 (positif) berdasarkan perhitungan Global Moran's I. Nilai Indeks Moran ialah 0,395099 dan nilai z-score 3,567736 ($p=0,00036$), hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB pertanian (PDRB sektor A), secara positif dan

spasial memiliki keterkaitan antar kecamatan. Selanjutnya untuk mengidentifikasi kluster dari keterkaitan spasial PDRB sektor A, maka dilakukan analisis *Anselin Local Moran's I* dengan menggunakan GIS. Gambar 5.4 menunjukkan hasil perhitungan *Anselin Local Moran's I* untuk PDRB sektor pertanian pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Gambar 5.4 Peta hasil analisis *local spatial autocorrelation* dari PDRB pertanian

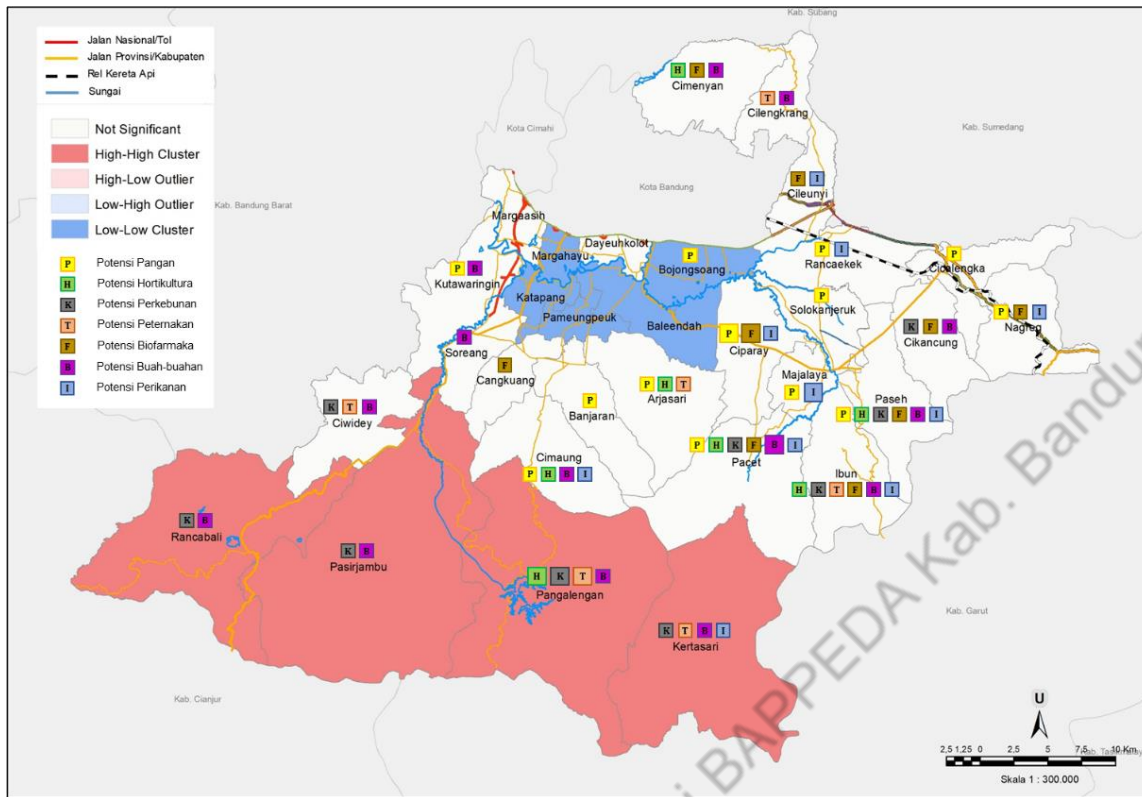


Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dengan menggabungkan peta hasil analisis Local Moran's I dengan sebaran potensi pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa pada lokasi yang tergolong ke dalam kluster tinggi-tinggi (HH cluster), memiliki karakteristik sub-sektor unggulan yaitu: keempat lokasi memiliki kesamaan sub-sektor unggulan yaitu perkebunan dan buah-buahan; selain dua sub-sektor tersebut, terdapat juga sub-sektor unggulan peternakan di Pangalengan dan Kertasari, hortikultura di Pangalengan, serta perikanan di Kertasari; kecamatan Pangalengan memiliki nilai produksi paling

tinggi untuk sub-sektor hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan jika melihat potensi pada lokasi yang tergolong ke dalam kluster rendah-rendah (LL Cluster), menunjukkan bahwa hanya terdapat satu sub-sektor unggulan pertanian yaitu sub-sektor tanaman pangan di Kecamatan Bojongsoang, 4 kecamatan lainnya tidak memiliki sub-sektor unggulan pertanian. Peta hasil pertampalan sebaran hasil *Local Moran's I* PDRB A dengan sebaran potensi sub-sektor pertanian di Kabupaten Bandung terdapat pada gambar 5.5 pada halaman selanjutnya.

Gambar 5.5 Peta pertampalan hasil *Local Moran's I* PDRB A dengan sebaran potensi sub-sektor pertanian di Kabupaten Bandung



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

5.2 Analisis Potensi Sektor Industri Pengolahan

Analisis potensi sektor industri pengolahan meliputi penjelasan mengenai kinerja PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bandung, serta kinerja sektor industri pengolahan pada skala kecamatan.

1. Kinerja PDRB Sektor Industri

Kinerja sektor industri pengolahan (C) berdasarkan data PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2020, memiliki rata-rata 34.280 miliar rupiah, dengan rata-rata kontribusi 50,97%, dan rata-rata pertumbuhan 5,33%.

Tabel 5.11 Kinerja PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bandung

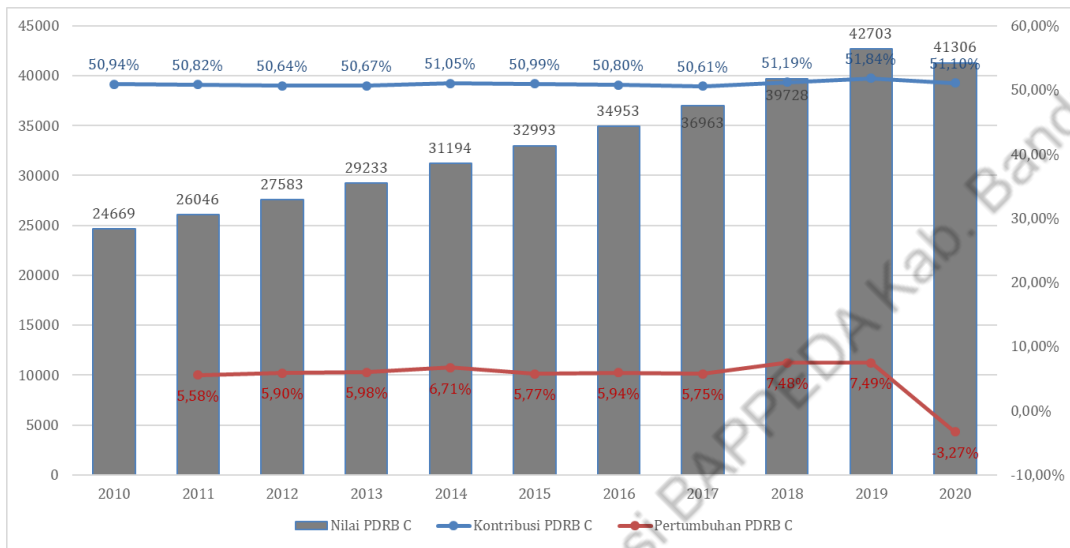
| Tahun | PDRB Sektor C (miliar rupiah) | Kontribusi Terhadap PDRB Kab. Bandung | Pertumbuhan Sektor C |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 2010 | 24.668,88 | 50,94% | - |
| 2011 | 26.046,30 | 50,82% | 5,58% |
| 2012 | 27.583,08 | 50,64% | 5,90% |
| 2013 | 29.232,56 | 50,67% | 5,98% |
| 2014 | 31.194,17 | 51,05% | 6,71% |
| 2015 | 32.992,84 | 50,99% | 5,77% |
| 2016 | 34.952,83 | 50,80% | 5,94% |
| 2017 | 36.963,26 | 50,61% | 5,75% |
| 2018 | 39.727,65 | 51,19% | 7,48% |
| 2019 | 42.703,11 | 51,84% | 7,49% |
| 2020* | 41.305,86 | 51,10% | -3,27% |
| Rata-rata | 34.270,17 | 50,97% | 5,33% |

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021, diolah

Dapat dilihat bahwa nilai PDRB sektor C mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor C berkontribusi hampir setengah dari PDRB Kabupaten Bandung, dan pada tahun 2019 memiliki kontribusi paling besar mencapai 51,8%, dan terendah pada tahun

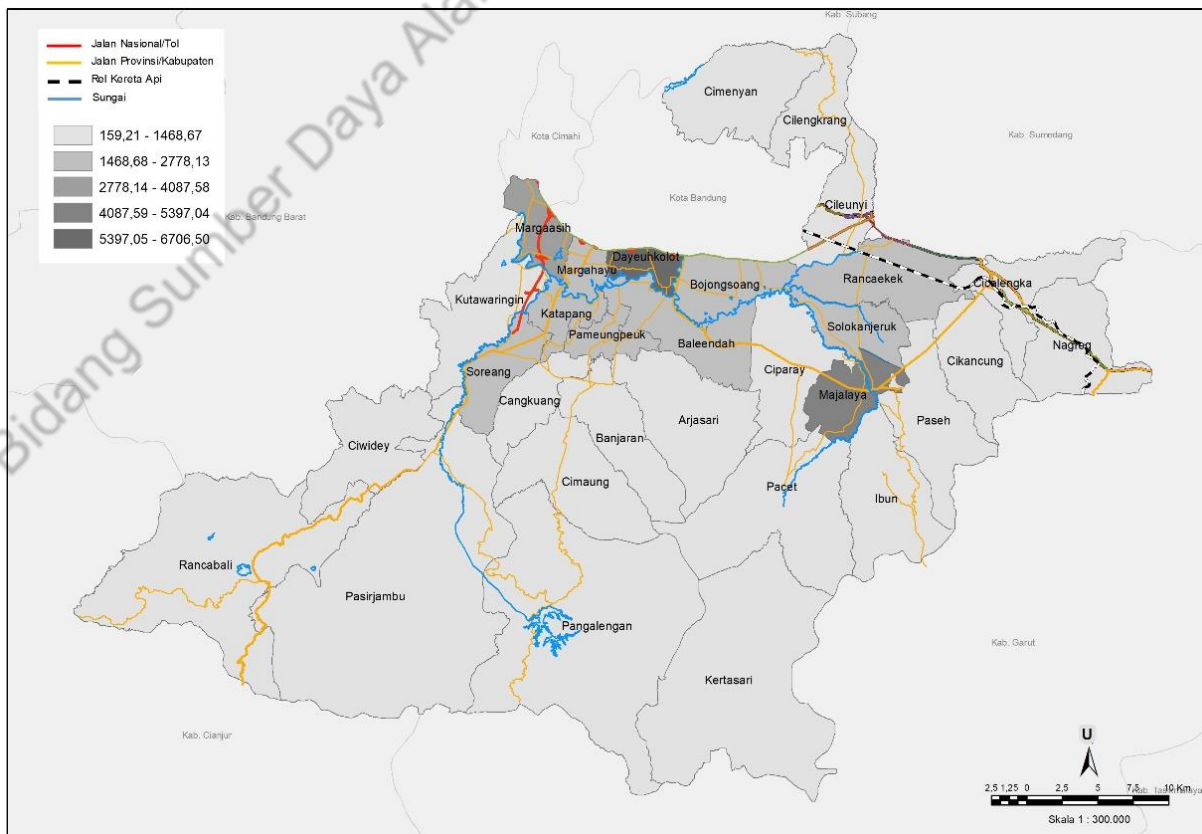
2012 (50,64%). Pertumbuhan sektor C, memiliki nilai rata-rata 5,33%, dengan angka paling tinggi dicapai pada 2019 dengan 7,49%. Pada 2020, kinerja sektor industri dipengaruhi oleh pandemi dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,27%.

Grafik 5.3 Kinerja PDRB sektor industri Kabupaten Bandung



Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021, diolah

Gambar 5.6 Peta sebaran kontribusi PDRB sektor industri pengolahan per kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2016



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Kemudian jika dilihat sebaran PDRB sektor C berdasarkan Kecamatan, kontribusi PDRB sektor C paling tinggi terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot (13,6%), Majalaya (9,6%), dan Margaasih (7,6%). Kecamatan dengan nilai tinggi cenderung berada pada wilayah Kabupaten Bandung bagian Utara, yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi di bagian Selatan. Selain itu, aksesibilitas juga menjadi faktor penting, karena lokasi yang tinggi juga sebagian besar dilalui oleh Jalan Nasional/Tol, dan jalan Provinsi/Kabupaten yang menjadi persimpangan seperti di Kecamatan Majalaya.

2. Potensi Sektor Industri

Berdasarkan dokumen Kabupaten Bandung Dalam Angka 2019, pada tahun 2018 di Kabupaten Bandung jumlah perusahaan di Kabupaten Bandung mencapai 2.293 perusahaan yang terdiri dari perusahaan industri besar sebanyak 462 perusahaan sedangkan industri sedang sebanyak 1.851 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 317.558 jiwa, dengan nilai produksi mencapai 61,050,182,144 rupiah.

Potensi sektor industri di Kabupaten Bandung dirumuskan dengan pendekatan sebagai berikut:

- Kelas industri yang tergolong unggulan merupakan kelas dengan nilai produksi tinggi (di atas 1 miliar rupiah);
- Kecamatan yang memiliki kelas industri unggulan adalah kecamatan dengan nilai produksi kelas industri yang dimaksud berada di atas nilai rata-rata Kabupaten;
- Nilai produksi dari kelas industri di kecamatan dihitung dengan mengalikan asumsi nilai produksi per satuan kelas industri yang dimaksud dengan jumlah industri yang di kecamatan;
- Asumsi nilai produksi per satuan kelas industri diperoleh dari total nilai produksi dibagi jumlah perusahaan dari kelas industri yang dimaksud;
- Data total nilai produksi dan jumlah perusahaan per kelas industri yang digunakan adalah data tahun 2018 yang diperoleh dari dokumen Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2019 terbitan BPS.

Tabel 5.12 Variabel kelas industri dan asumsi nilai produksi

| No. | Kelas Industri | Total Nilai Produksi | Jumlah Industri | Asumsi Nilai Produksi per Satuan Industri |
|-----|--|----------------------|-----------------|---|
| 1 | Industri Tekstil | 33.069.889.500 | 911 | 36.300.647,09 |
| 2 | Industri Pakaian Jadi | 8.476.501.350 | 577 | 14.690.643,59 |
| 3 | Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 4.359.016.880 | 76 | 57.355.485,26 |
| 4 | Industri Makanan | 2.862.126.428 | 193 | 14.829.670,61 |
| 5 | Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 2.653.104.927 | 30 | 88.436.830,90 |
| 6 | Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 2.496.385.878 | 135 | 18.491.747,24 |
| 7 | Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya | 2.494.924.598 | 4 | 623.731.149,50 |
| 8 | Industri Peralatan Listrik | 1.526.573.984 | 6 | 254.428.997,33 |

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021, diolah

Berdasarkan data industri tahun 2018 tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa industri yang ada di Kabupaten Bandung didominasi oleh jenis industri

tekstil, serta pakaian dan sepatu. Selain itu, industri makanan dan minuman juga berkontribusi cukup tinggi dalam nilai produksi industri Kabupaten Bandung. Meski

demikian, jika dilihat hasil perhitungan nilai produksi per satuan industri, angka paling tinggi terdapat pada Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya, serta Industri Peralatan Listrik. Keduanya memiliki jumlah industri yang relatif sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kedua industri tersebut tergolong industri padat karya.

Hasil perhitungan nilai produksi per kecamatan disampaikan pada Tabel 5.13 dan

sintesis sebaran sub-sektor industri unggulan per kecamatan pada Tabel 5.14 di halaman selanjutnya. Pada Tabel 5.13 dapat dilihat nilai produksi dari masing-masing kelas industri di setiap kecamatan, serta total nilai produksi industri unggulan di setiap kecamatan. Pada Tabel 5.14 merangkum lokasi kelas industri unggulan berdasarkan kecamatan, serta jumlah industri unggulan di masing-masing kecamatan.

Tabel 5.13 Total nilai produksi kelas industri berdasarkan kecamatan di Kab. Bandung (2018)

| No. | Kecamatan | Nilai Produksi Industri Unggulan (miliar rupiah) | | | | | | | | Total Nilai Produksi |
|----------------------|--------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | Ciwidey | - | 73,5 | - | 74,2 | - | - | - | - | 147,6 |
| 2 | Rancabali | - | - | - | 89,0 | - | - | - | - | 89,0 |
| 3 | Pasirjambu | 36,3 | 73,5 | 57,4 | 118,6 | - | 18,5 | - | - | 304,2 |
| 4 | Cimaung | 108,9 | 117,5 | 57,4 | 103,8 | - | 74,0 | - | - | 461,6 |
| 5 | Pangalengan | - | 14,7 | - | 252,1 | - | - | - | - | 266,8 |
| 6 | Kertasari | - | - | - | 59,3 | - | - | - | - | 59,3 |
| 7 | Pacet | 471,9 | 14,7 | - | 44,5 | - | - | - | - | 531,1 |
| 8 | Ibun | 3.267,1 | 1.131,2 | 57,4 | 29,7 | - | 37,0 | - | - | 4.522,2 |
| 9 | Paseh | 2.976,7 | 161,6 | 172,1 | 118,6 | 176,9 | 55,5 | 623,7 | - | 4.285,0 |
| 10 | Cikancung | 834,9 | 176,3 | 172,1 | 14,8 | 88,4 | 74,0 | 623,7 | - | 1.984,2 |
| 11 | Cicalengka | 544,5 | 426,1 | 344,1 | 44,5 | - | 37,0 | - | - | 1.396,1 |
| 12 | Nagreg | 36,3 | 29,4 | - | 14,8 | 88,4 | 18,5 | - | - | 187,4 |
| 13 | Rancaekek | 1.452,0 | 146,9 | 57,4 | 103,8 | 88,4 | 18,5 | - | 254,4 | 2.121,5 |
| 14 | Majalaya | 8.929,9 | 367,3 | 401,5 | 74,2 | 88,4 | 18,5 | - | 254,4 | 10.134,2 |
| 15 | Solokanjeruk | 5.844,4 | 249,7 | 172,1 | 103,8 | 88,4 | - | - | - | 6.458,5 |
| 16 | Ciparay | 145,2 | 146,9 | - | 326,3 | - | 37,0 | - | - | 655,3 |
| 17 | Baleendah | 435,6 | 572,9 | - | 163,1 | - | 203,4 | - | - | 1.375,0 |
| 18 | Arjasari | 72,6 | 73,5 | 57,4 | - | - | 37,0 | - | - | 240,4 |
| 19 | Banjaran | 435,6 | 161,6 | 114,7 | 148,3 | 265,3 | 18,5 | - | - | 1.144,0 |
| 20 | Cangkuang | 36,3 | 146,9 | - | 74,2 | 176,9 | - | - | - | 434,2 |
| 21 | Pameungpeuk | 871,2 | 161,6 | - | 44,5 | 88,4 | 37,0 | - | - | 1.202,7 |
| 22 | Katapang | 1.270,5 | 646,4 | 917,7 | 89,0 | 707,5 | 277,4 | - | - | 3.908,5 |
| 23 | Soreang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kutawaringin | 290,4 | 308,5 | - | - | - | - | - | - | 598,9 |
| 25 | Margaasih | 1.161,6 | 1.263,4 | 516,2 | 178,0 | 176,9 | 203,4 | - | 508,8 | 4.008,3 |
| 26 | Margahayu | 762,3 | 881,4 | 344,1 | 44,5 | 88,4 | 480,8 | 1.247,5 | 254,4 | 4.103,5 |
| 27 | Dayeuhkolot | 2.649,9 | 661,1 | 344,1 | 118,6 | 442,2 | 776,7 | - | - | 4.992,6 |
| 28 | Bojongsoang | 290,4 | 176,3 | 229,4 | 222,4 | 88,4 | 37,0 | - | 54,4 | 1.298,4 |
| 29 | Cileunyi | 108,9 | 220,4 | 344,1 | 133,5 | - | - | - | - | 806,9 |
| 30 | Cilengkrang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Cimencyan | 36,3 | 73,5 | - | 74,2 | - | 37,0 | - | - | 220,9 |
| Total Nilai Produksi | | 33.069,9 | 8.476,5 | 4.359,0 | 2.862,1 | 2.653,1 | 2.496,4 | 2.494,9 | 1.526,6 | 57.938,5 |
| Rata-rata | | 1.066,8 | 273,4 | 140,6 | 92,3 | 85,6 | 80,5 | 80,5 | 49,2 | 1.868,0 |

Ket:

A : Industri Tekstil

B : Industri Pakaian Jadi

C : Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

D : Industri Makanan

E : Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

F : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

G : Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya

H : Industri Peralatan Listrik

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021, diolah

Tabel 5.14 Sintesis sebaran sub-sektor industri unggulan di Kab. Bandung

| No. | Kecamatan | Sub-Sektor Industri Unggulan | | | | | | | | Total Sub-Sektor Unggulan |
|---------------------|--------------|------------------------------|---|----|----|----|---|---|---|---------------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | Ciwidey | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Rancabali | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Pasirjambu | | | | ✓ | | | | | 1 |
| 4 | Cimaung | | | | ✓ | | | | | 1 |
| 5 | Pangalengan | | | | ✓ | | | | | 1 |
| 6 | Kertasari | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Pacet | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Ibun | ✓ | ✓ | | | | | | | 2 |
| 9 | Paseh | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 5 |
| 10 | Cikancung | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | 3 |
| 11 | Cicalengka | | ✓ | ✓ | | | | | | 2 |
| 12 | Nagreg | | | | | ✓ | | | | 1 |
| 13 | Rancaekek | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | 4 |
| 14 | Majalaya | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | 5 |
| 15 | Solokanjeruk | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 4 |
| 16 | Ciparay | | | | ✓ | | | | | 1 |
| 17 | Baleendah | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | 3 |
| 18 | Arjasari | | | | | | | | | 0 |
| 19 | Banjaran | | | | ✓ | ✓ | | | | 2 |
| 20 | Cangkuang | | | | | ✓ | | | | 1 |
| 21 | Pameungpeuk | | | | | ✓ | | | | 1 |
| 22 | Katapang | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | 5 |
| 23 | Soreang | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Kutawaringin | | ✓ | | | | | | | 1 |
| 25 | Margaasih | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | 7 |
| 26 | Margahayu | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |
| 27 | Dayeuhkolot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 6 |
| 28 | Bojongsoang | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | 4 |
| 29 | Cileunyi | | | ✓ | ✓ | | | | | 2 |
| 30 | Cilengkrang | | | | | | | | | 0 |
| 31 | Cimencyan | | | | | | | | | 0 |
| Total Kec. Unggulan | | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 5 | 3 | 5 | |

Ket:

A : Industri Tekstil

B : Industri Pakaian Jadi

C : Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

D : Industri Makanan

E : Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia

F : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

G : Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya

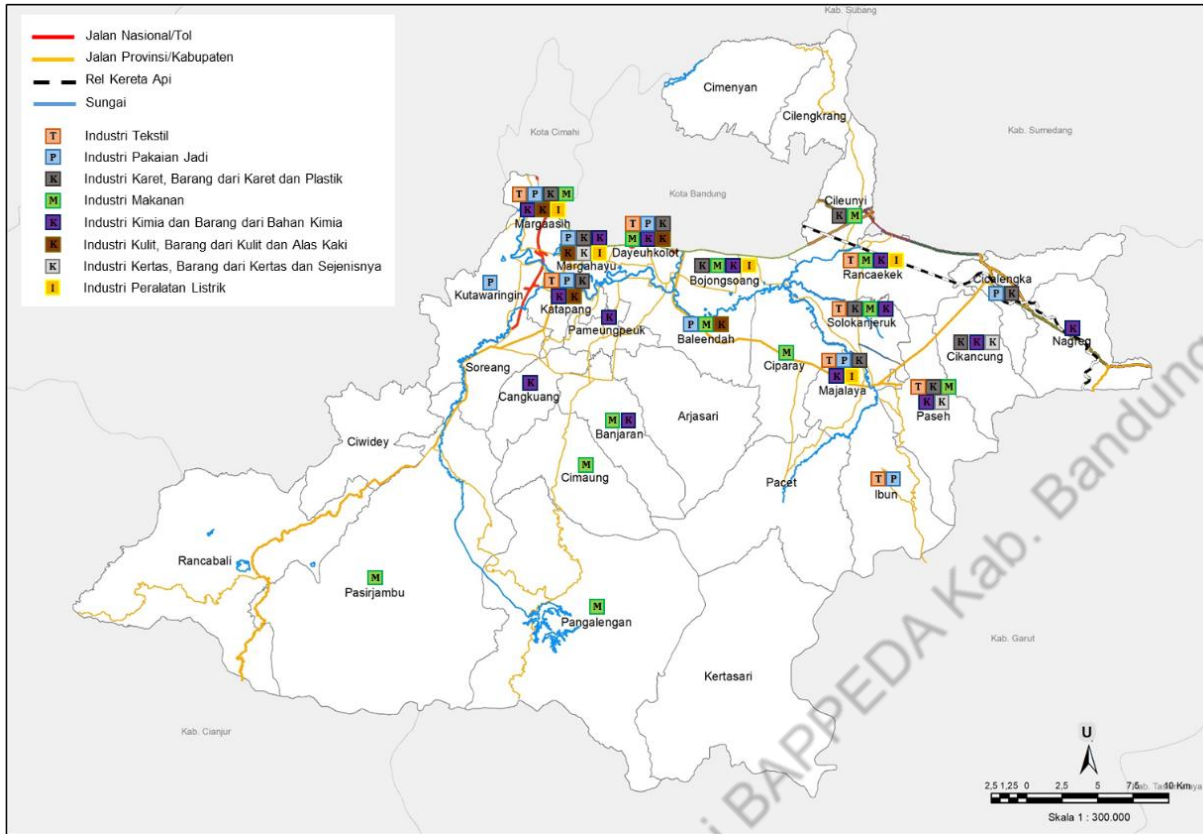
H : Industri Peralatan Listrik

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 68 sub-sektor industri unggulan yang tersebar di 31 kecamatan. Peta sebaran sub-sektor industri pengolahan memperlihatkan bahwa sub-sektor unggulan industri pengolahan cenderung banyak terdapat di

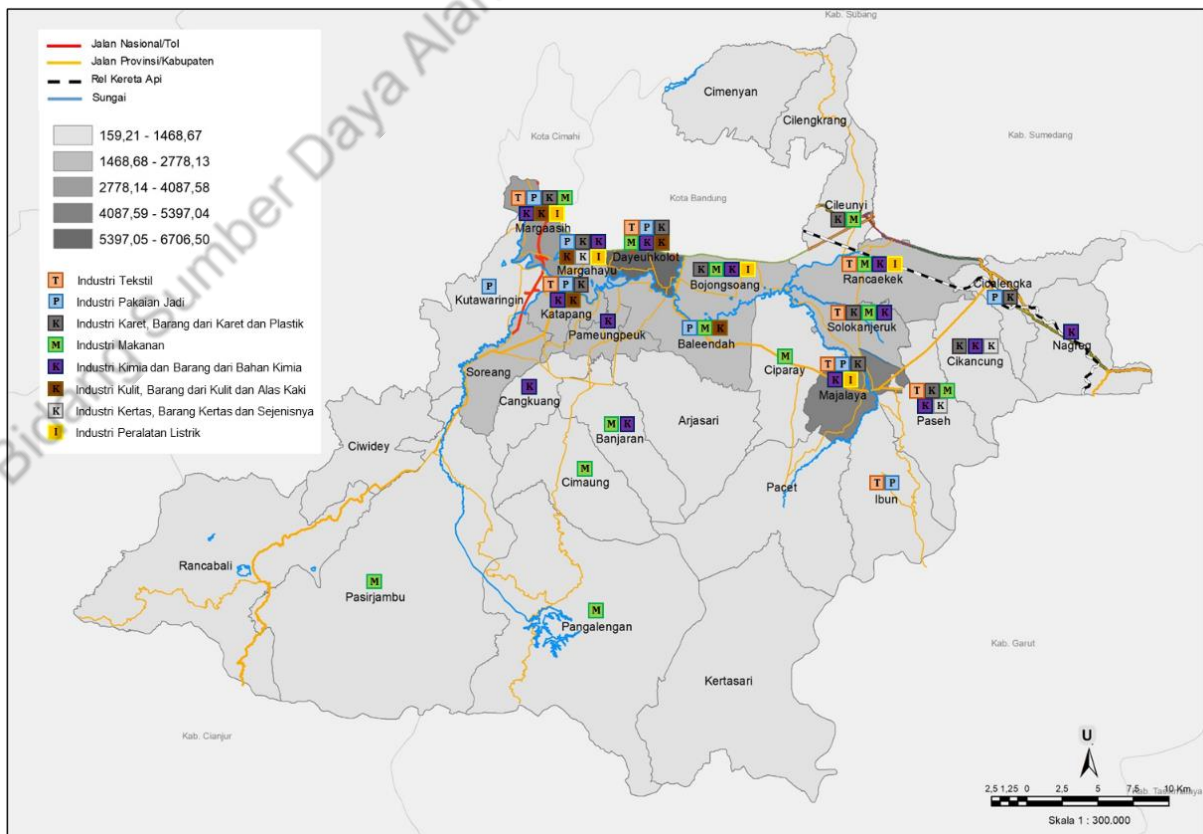
Kabupaten Bandung bagian Utara yang berbatasan dengan Kota Bandung bagian Selatan. Sedangkan di bagian Selatan, potensi industri relatif lebih sedikit. Industri yang ada di bagian Selatan berupa industri makanan dan industri kimia.

Gambar 5.7 Peta sebaran potensi sub-sektor industri pengolahan



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Gambar 5.8 Peta pertampalan sebaran potensi sub-sektor industri dengan sebaran PDRB sektor C



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Dengan menggabungkan peta sebaran potensi industri unggulan dengan peta sebaran PDRB sektor C (lihat Gambar VI.8 pada halaman selanjutnya), dapat dilihat bahwa kecamatan dengan potensi sub-sektor industri unggulan yang banyak, memiliki nilai PDRB sektor C yang relatif tinggi, seperti Kecamatan Majalaya dan Dayeuhkolot, tetapi tidak berlaku di Kecamatan Paseh. Kecamatan-kecamatan tersebut terletak di bagian Utara Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kota Bandung bagian Selatan.

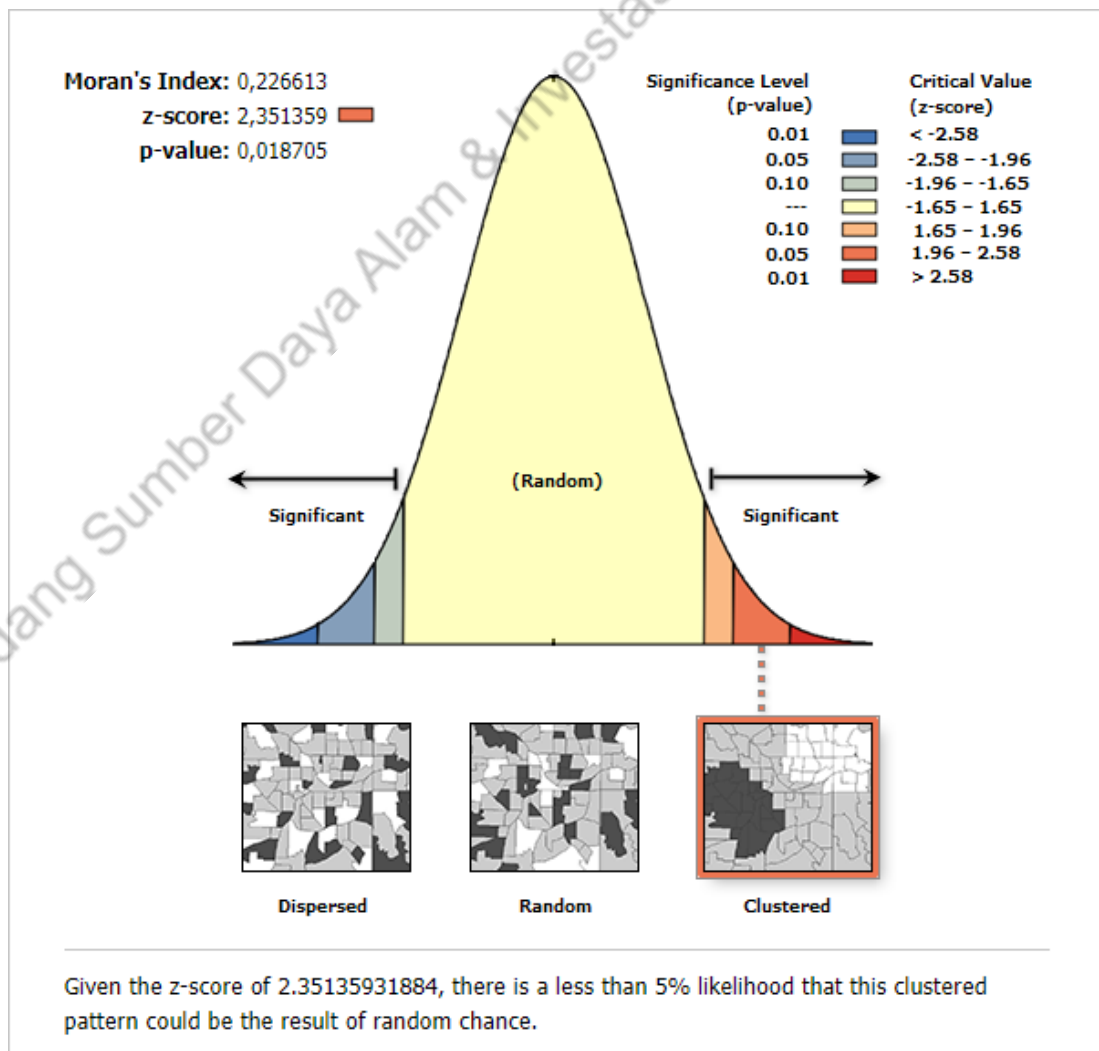
Meski demikian, kecamatan dengan PDRB sektor C dan hasil perhitungan nilai produksi kelas industri paling tinggi, yaitu Kecamatan Majalaya, justru terletak di bagian Tenggara Kabupaten Bandung serta tidak

berbatasan langsung dengan Kota Bandung, tetapi Kecamatan Majalaya merupakan simpul transportasi di bagian Timur dan Tenggara Kabupaten Bandung. Dengan demikian, selain faktor lokasi, faktor aksesibilitas terutama jalan juga merupakan faktor kunci dalam pengembangan kinerja sektor industri.

3. Keterkaitan Spasial Potensi Sektor Industri

Identifikasi keterkaitan spasial potensi sektor industri dilakukan melalui Global Moran's *I* dengan bantuan GIS. Data yang digunakan adalah data PDRB sektor C per Kecamatan pada tahun 2016. Hasil perhitungan terhadap Global Moran's *I* ialah sebagai berikut:

Grafik 5.4 Hasil pengolahan *global spatial autorrelation* dari PDRB sektor industri per Kecamatan

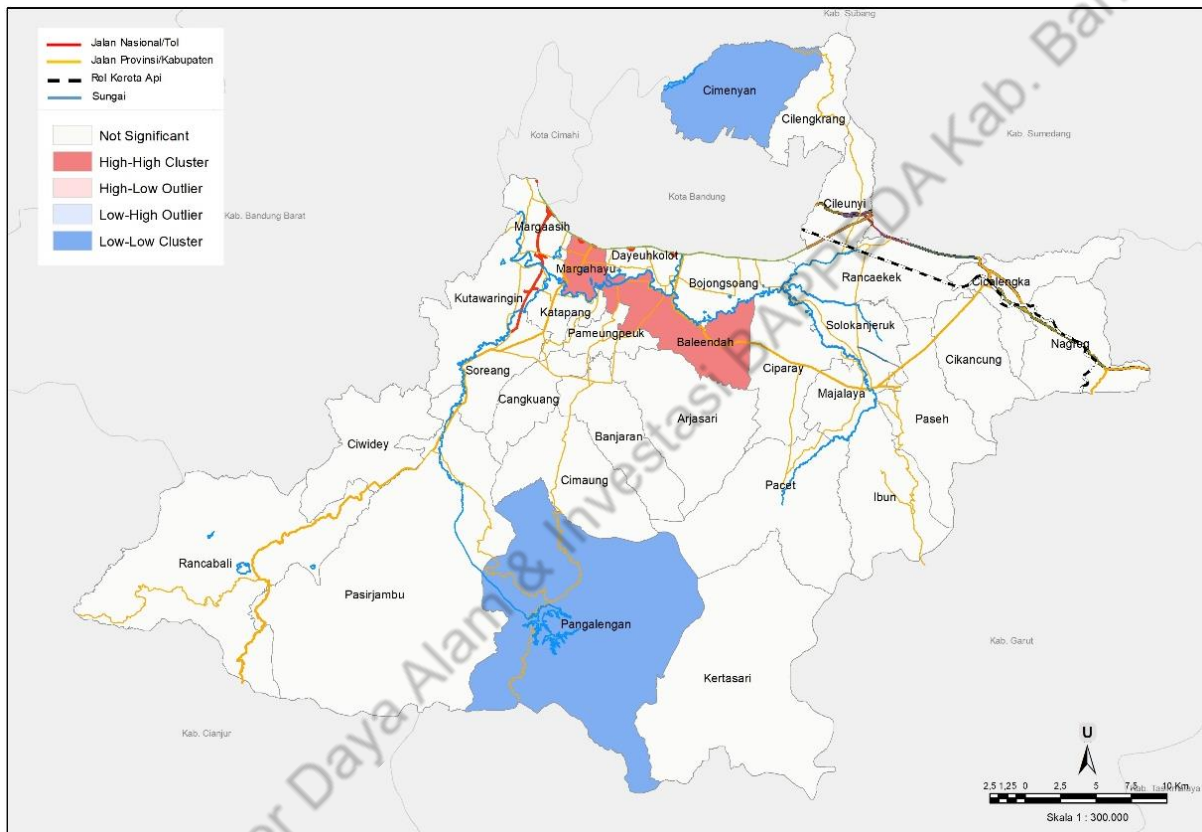


Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Keterkaitan spasial dari PDRB sektor industri pengolahan diantara 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, seperti yang ditampilkan pada gambar di atas, bernilai lebih dari 1 (positif) berdasarkan perhitungan Global Moran's I. Nilai Indeks Moran ialah 0,226613 dan nilai z-score 2,351359 ($p=0,018705$), hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB industri (PDRB

sektor C), secara positif dan spasial memiliki keterkaitan antar kecamatan. Selanjutnya untuk mengidentifikasi kluster dari keterkaitan spasial PDRB sektor C, maka dilakukan analisis *Anselin Local Moran's I* dengan menggunakan GIS. Gambar 5.9 menunjukkan hasil perhitungan *Anselin Local Moran's I* untuk PDRB sektor industri pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Gambar 5.9 Peta hasil analisis *Local Moran's I* PDRB sektor industri

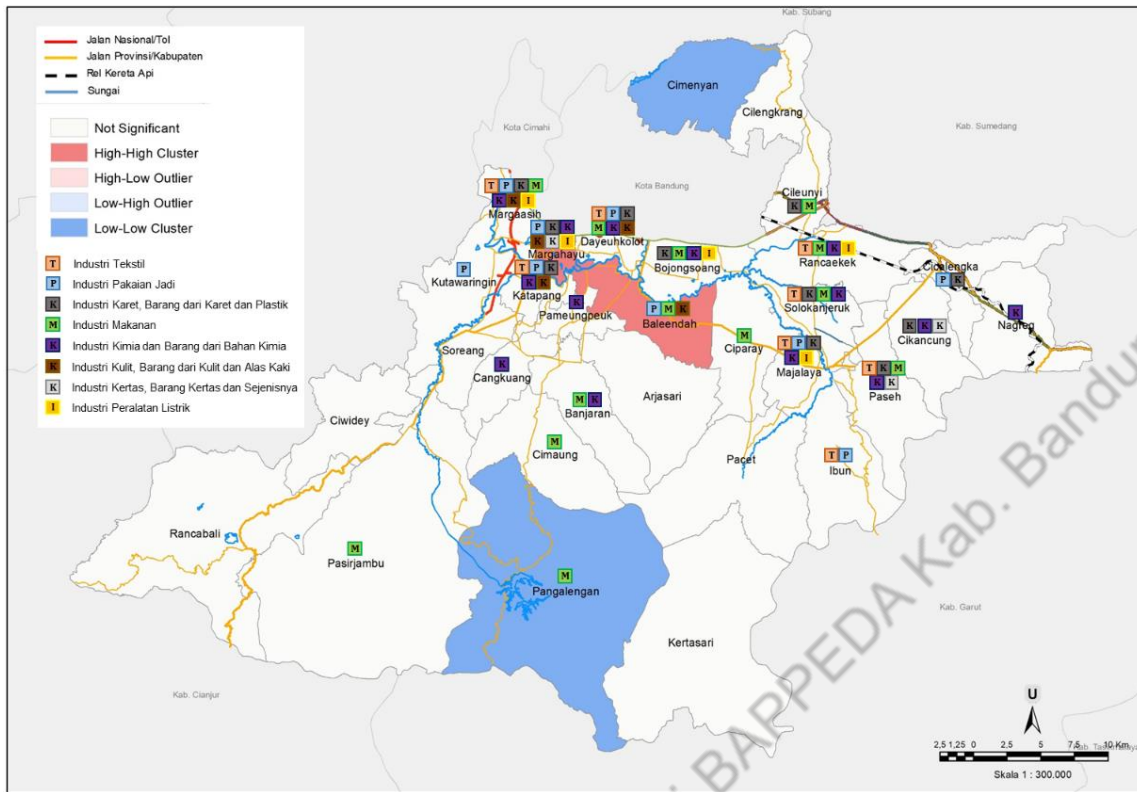


Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Hasil perhitungan analisis *Local Moran's I* menunjukkan bahwa terdapat 2 kecamatan yang memiliki nilai yang termasuk ke dalam kluster tinggi-tinggi (*HH Cluster*) yaitu Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Margahayu, keduanya berada di bagian Utara berbatasan dengan Kota Bandung bagian Selatan wilayah Kabupaten Bandung. Selain itu, terdapat juga kategori kluster rendah-rendah (*LL Cluster*) pada 2 kecamatan yaitu: Kecamatan Pangalengan di bagian Selatan dan Kecamatan Cimenyan di bagian Utara Kabupaten Bandung.

Dengan menggabungkan peta hasil analisis *Local Moran's I* dengan sebaran potensi industri, maka dapat disimpulkan bahwa pada lokasi yang tergolong ke dalam kluster tinggi-tinggi (*HH cluster*), di bagian Utara, memiliki sub-sektor unggulan industri yang relatif banyak, lebih dari 3-7 sub-sektor unggulan. Sedangkan pada kluster rendah-rendah (*LL cluster*) di Pangalengan, juga pada bagian Selatan pada umumnya, memiliki sub-sektor unggulan industri yang terbatas, dan memiliki kesamaan jenis sub-sektor industri yaitu sub-sektor industri makanan.

Gambar 5. 10 Peta pertampalan hasil *Local Moran's I* PDRB C dengan sebaran potensi sub-sektor industri di Kabupaten Bandung



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

5.3 Analisis Potensi Sektor Perdagangan

Analisis potensi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (G) meliputi penjelasan mengenai kinerja, potensi, keterkaitan spasial PDRB sektor G.

1. Kinerja PDRB Sektor Perdagangan

Kinerja sektor G berdasarkan data PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2010-2020 memiliki rata-rata sebesar 9.025 miliar rupiah, kontribusi 13,81%, dan pertumbuhan 5,07%:

Tabel 5.15 Kinerja PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Bandung

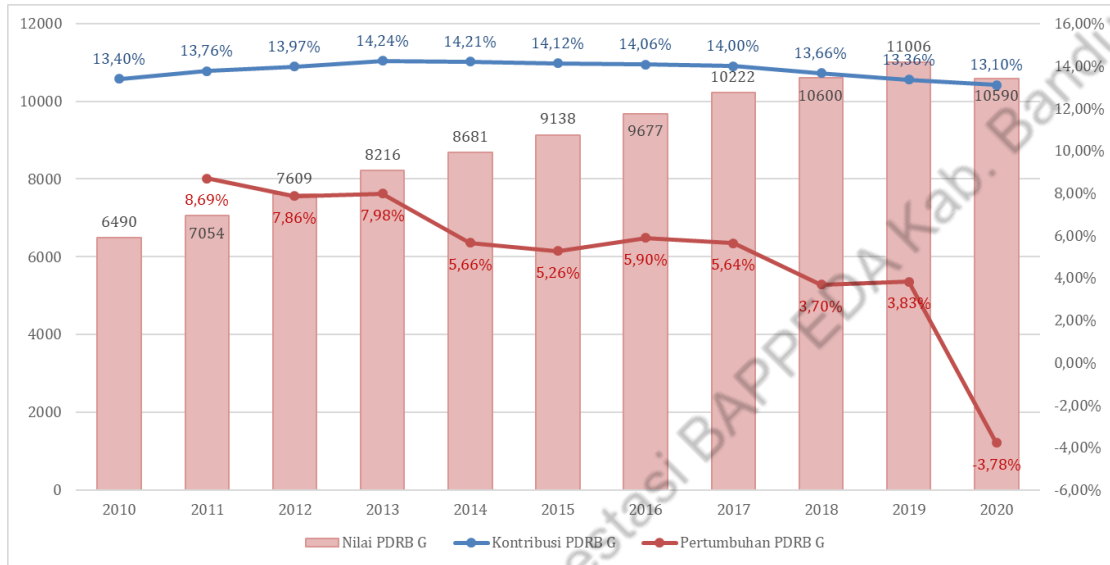
| Tahun | PDRB Sektor G (miliar rupiah) | Kontribusi Terhadap PDRB Kab. Bandung | Pertumbuhan Sektor G |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 2010 | 6.490,14 | 13,40% | - |
| 2011 | 7.054,28 | 13,76% | 8,69% |
| 2012 | 7.608,56 | 13,97% | 7,86% |
| 2013 | 8.215,86 | 14,24% | 7,98% |
| 2014 | 8.681,13 | 14,21% | 5,66% |
| 2015 | 9.138,15 | 14,12% | 5,26% |
| 2016 | 9.676,96 | 14,06% | 5,90% |
| 2017 | 10.222,30 | 14,00% | 5,64% |
| 2018 | 10.600,07 | 13,66% | 3,70% |
| 2019 | 11.006,20 | 13,36% | 3,83% |
| 2020* | 10.590,27 | 13,10% | -3,78% |
| Rata-rata | 9.025,81 | 13,81% | 5,07% |

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2021, diolah

Dapat dilihat bahwa nilai PDRB sektor G mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 karena terdampak pandemi COVID-19. Di sisi lain, sektor G berkontribusi rata-rata sebesar 13,81% terhadap total PDRB Kabupaten Bandung, dan pada tahun 2013 memiliki kontribusi

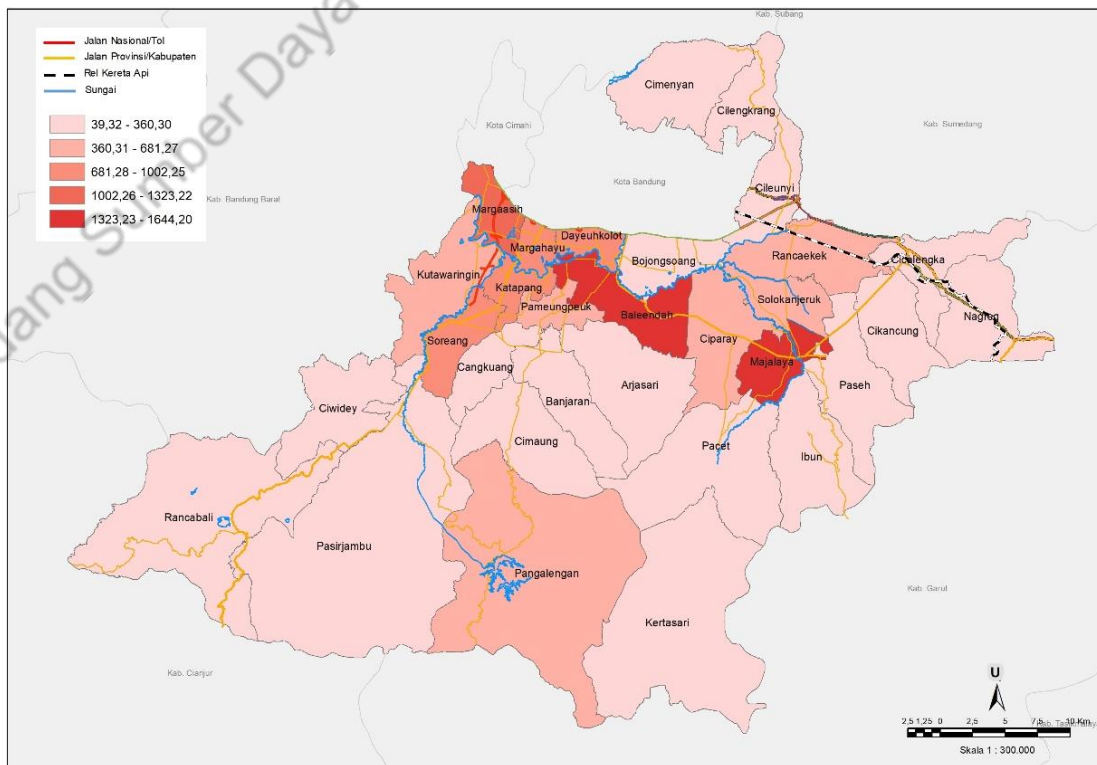
paling besar hingga mencapai 14,24%, dan kontribusi terendah terdapat pada tahun 2020 imbas pandemi COVID-19. Pertumbuhan sektor G, memiliki nilai rata-rata 5,07%, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 (8,69%) dan terendah pada tahun 2020 (-3,78%).

Grafik 5.5 Kinerja PDRB sektor perdagangan Kabupaten Bandung



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Gambar 5.11 Peta sebaran kontribusi PDRB sektor perdagangan (G) per kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2016



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Kemudian jika dilihat kontribusi PDRB sektor C per kecamatan, nilai paling tinggi terdapat di Kecamatan Baleendah (12,7%), Kecamatan Majalaya (11,2%), dan Kecamatan Margaasih (7,8%). Sebaran kecamatan dengan nilai PDRB sektor G tinggi cenderung berada di bagian Utara Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kota Bandung di bagian Selatan, kecuali Kecamatan Pangalengan yang memiliki nilai yang cukup tinggi tetapi berada di bagian Selatan Kabupaten Bandung.

2. Potensi Sektor Perdagangan

Berdasarkan kajian distribusi perdagangan dan komoditas bahan pokok dan barang strategis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung pada tahun 2020, Kabupaten Bandung memiliki 9 lokasi pasar Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu Pasar Sehat Sabilulungan, antara lain sebagai berikut:

1) Pasar Margahayu

Pasar margahayu Kabupaten Bandung berdiri sejak tahun 1984 jumlah pedagang saat ini: Kios 90 unit; Lapak 21 unit; Kaki lima 40 unit; Total pedagang 151 unit. Luas bangunannya 3.000 m². Lahan milik pemda. Cakupan pelayanan terdiri dari 2 kecamatan; Margahayu, Marga asih. Jumlah penduduk layanan +289.840. Omset perhari rata-rata Rp 2 juta s.d. 10 juta.

2) Pasar Ciwidey

Pasar Ciwidey Kabupaten Bandung berdiri sejak tahun 1997/1998 dan memiliki jumlah pedagang aktif saat ini mencapai: Kios 903 unit; Lapak 362 unit; Kaki lima 65 unit. Total pedagang aktif: 1.330 unit. Luas bangunan 8.292 m² yang merupakan lahan milik pemda. Cakupan pelayanan terdiri dari beberapa kecamatan: Kecamatan Ciwidey, Pasir Jambu, Rancabali, serta beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur. Total memiliki jumlah penduduk layanan +227.704 jiwa dengan Omset harian rata-rata Rp 1.000.000,- per pedagang.

3) Pasar Raharja Plaza Dayeuh Kolot

Pasar Raharja Plaza Dayeuhkolot Kabupaten Bandung berdiri sejak tahun 2007 dan memiliki jumlah pedagang aktif saat ini: Kios 180-200 unit. Luas bangunan 4.000 m². Lahan milik pemda. Cakupan pelayanan terdiri dari 4 kecamatan: Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Ciparay. Jumlah penduduk layanan +702.013. Omset harian rata-rata Rp 1.000.000,- per pedagang.

4) Pasar Baru Majalaya

Pasar Baru Majalaya Kabupaten Bandung berdiri sejak tahun 1818 dan memiliki jumlah pedagang aktif saat ini: Kios 367 unit; Los 114 unit; Lapak 200 unit. Total pedagang aktif: 681 unit. Luas bangunan 13.265 m². Lahan milik pemda. Cakupan pelayanan terdiri dari 4 kecamatan: Majalaya, Paseh, Ibum, Solokan Jeruk. Jumlah penduduk layanan +472.802. Omset harian rata-rata Rp 1.500.000,- per pedagang.

5) Pasar Sehat Cileunyi

Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten Bandung memiliki jumlah pedagang aktif saat ini: Kios 141 unit; Los 121 unit; Kaki lima 91 unit. Total pedagang aktif: 353 unit. Luas tanah 4.497 m². Tanah milik pemda. Cakupan pelayanan terdiri dari 4 kecamatan: Cileunyi, Rancaekek, Cibiru, Jatinangor Sumedang. Jumlah penduduk layanan +356.791. Omset harian rata-rata Rp 1.500.000,- per pedagang.

6) Pasar Cicalengka

Pasar Cicalengka Kabupaten Bandung berdiri sejak tahun 1986 dan memiliki jumlah pedagang aktif saat ini: Kios 864 unit; Los 1.011 unit; Lapak 151 unit. Total pedagang aktif: 2.026 unit. Luas bangunan 5.460 m². Lahan milik pemda. Cakupan pelayanan terdiri dari beberapa kecamatan: Cicalengka, Nagreg, Beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Jumlah penduduk layanan +250.000. Omset harian rata-rata Rp 1.000.000,- per pedagang.

7) Pasar Baleendah

Pasar Baleendah Kab. Bandung memiliki jumlah pedagang aktif saat ini: Kios 309 unit, Lapak 182 unit, Kaki lima 511 unit. Total pedagang aktif: 1.002 unit. Luas bangunan 14.354 m². Lahan milik pemda. Cakupan pelayanan terdiri dari 4 kecamatan: Baleendah, Bojongsoang, Ciparay, Pameungpeuk. Jumlah penduduk layanan +659.708. Omset harian rata-rata Rp 1.500.000,- per pedagang.

8) Pasar Banjaran

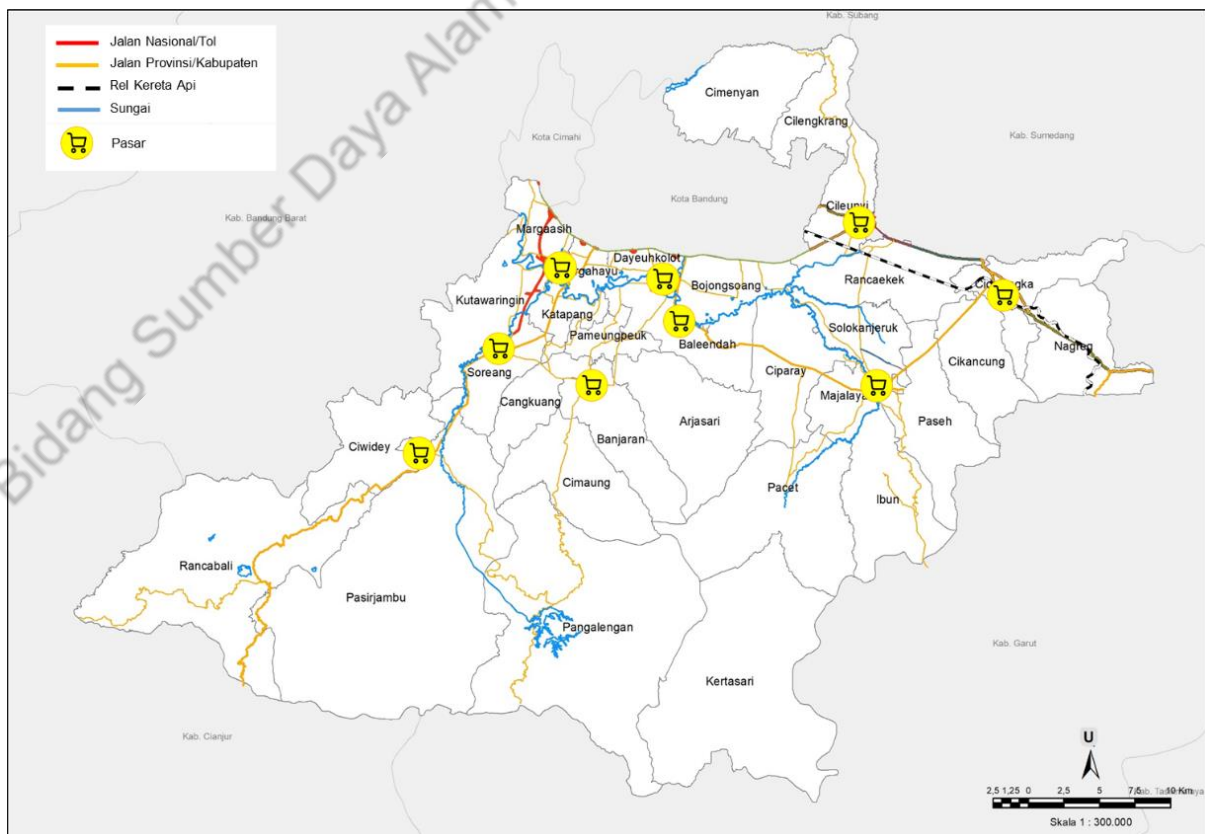
Pasar Banjaran Kabupaten Bandung berdiri sejak tahun 1818 dan memiliki jumlah pedagang aktif saat ini: Kios 600 unit, Lapak 200 unit, Kaki lima 150 unit. Total pedagang aktif: 950 unit. Luas bangunan 12.618 m². Lahan milik pemda. Cakupan pelayanan terdiri dari 4 kecamatan: Banjaran, Cangkuang, Cimaung, Arjasari. Jumlah penduduk layanan +394.656. Omset harian rata-rata Rp. 2.000.000,- per pedagang.

9) Pasar Soreang

Pasar Soreang Kabupaten Bandung berdiri sejak tahun 1986. Jumlah pedagang aktif saat ini: Kios 514 unit, Lapak 241 unit, Kaki lima 150 unit. Total pedagang aktif: 905 unit. Luas bangunan 5.688 m². Lahan milik pemda. Cakupan pelayanan terdiri dari 4 kecamatan: Soreang, Cangkuang, Katapang, Kutawaringin. Jumlah penduduk layanan +418.510. Omset harian rata-rata Rp 1.000.000,- per pedagang

Gambar 5.12 berikut adalah ilustrasi peta sebaran lokasi pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Dapat dilihat bahwa, dari total 9 pasar, lokasi pasar cenderung lebih banyak terdapat di bagian Tengah dan Utara Kabupaten Bandung. Terdapat 5 pasar dengan lokasi yang relatif berdekatan satu dengan lainnya yaitu Pasar Margahayu, Pasar Raharja Plaza Dayeuh Kolot, Pasar Baleendah, Pasar Banjaran dan Pasar Soreang.

Gambar 5.12 Peta sebaran lokasi pasar milik pemerintah daerah di Kabupaten Bandung

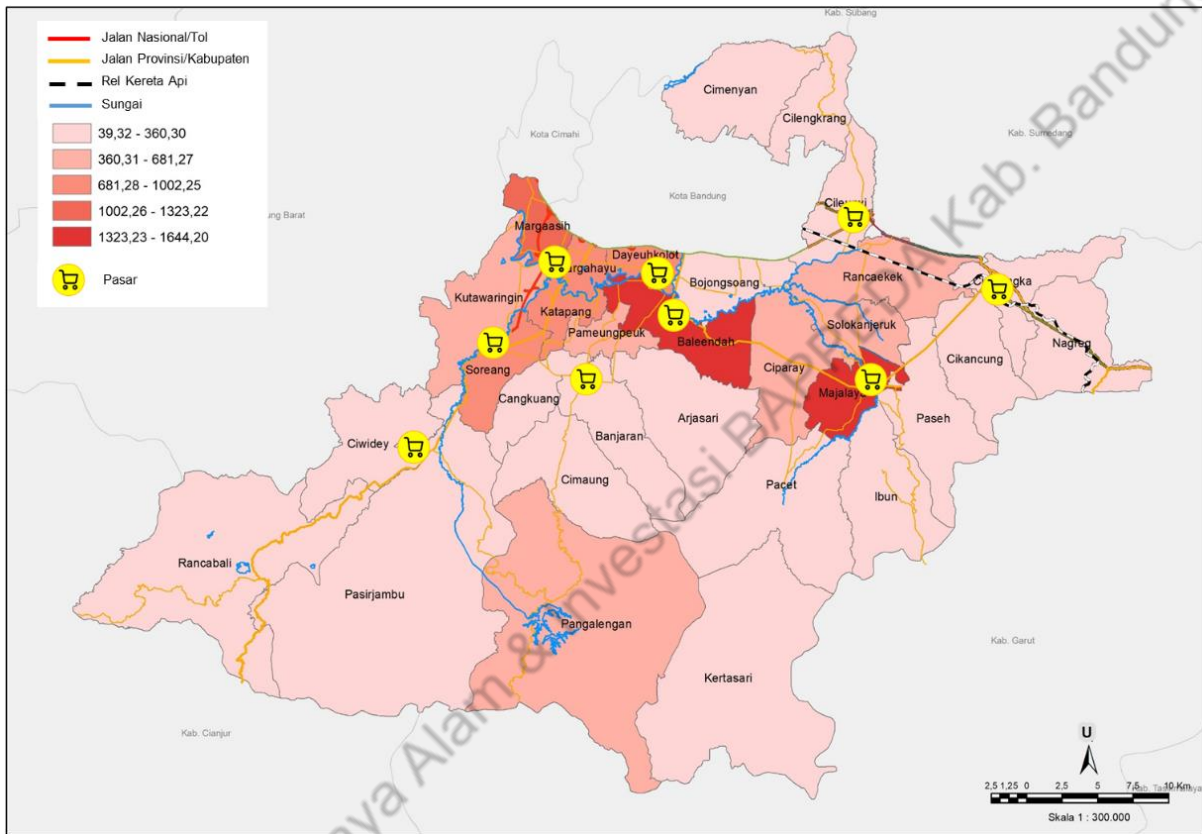


Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Sedangkan jika dilakukan pertampalan antara peta sebaran lokasi pasar dengan sebaran PDRB sektor G, dapat dilihat pada Gambar 5.13 bahwa sebagian besar pasar terletak di kecamatan yang memiliki nilai PDRB sektor G yang juga tinggi; seperti Kecamatan Majalaya dan Baleendah. Selain

itu, lima pasar yang lokasinya relatif berdekatan, juga terletak di wilayah dengan nilai PDRB sektor G yang juga tinggi. Meski demikian, terdapat juga pasar yang terletak di lokasi dengan nilai PDRB sektor G yang relatif rendah seperti di Kecamatan Banjaran, Ciwidey, Cileunyi, dan Cicalengka,

Gambar 5.13 Peta pertampalan sebaran lokasi pasar Pemda dengan sebaran PDRB sektor G



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3. Keterkaitan Spasial Potensi Sektor Perdagangan

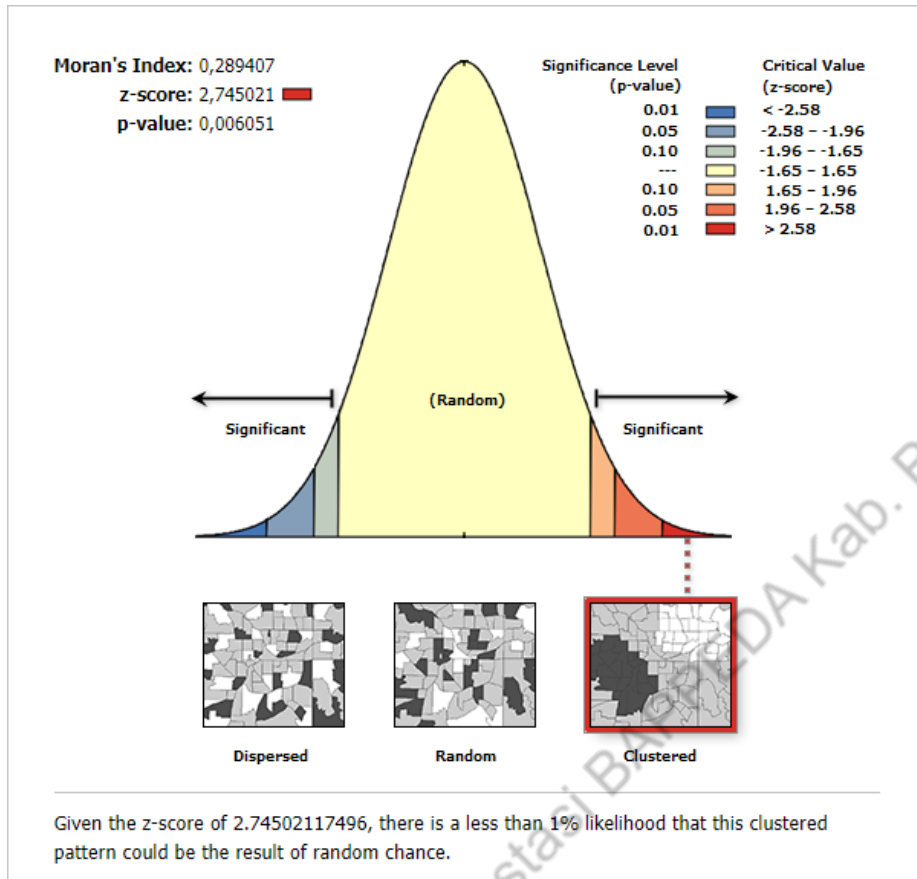
Identifikasi keterkaitan spasial potensi sektor perdagangan dilakukan melalui Global Moran's *I* dengan bantuan GIS. Data yang digunakan adalah data PDRB sektor G per Kecamatan pada tahun 2016.

Hasil perhitungan terhadap Global Moran's *I* menunjukkan bahwa Keterkaitan spasial dari PDRB perdagangan diantara 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, bernilai lebih dari 1 (positif) berdasarkan perhitungan Global Moran's *I*. Nilai Indeks Moran ialah 0,289407 dan nilai *z-score*

2,745021 ($p=0,006051$), hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB perdagangan (PDRB sektor G), secara positif dan spasial memiliki keterkaitan antar kecamatan (lihat Grafik 5.6).

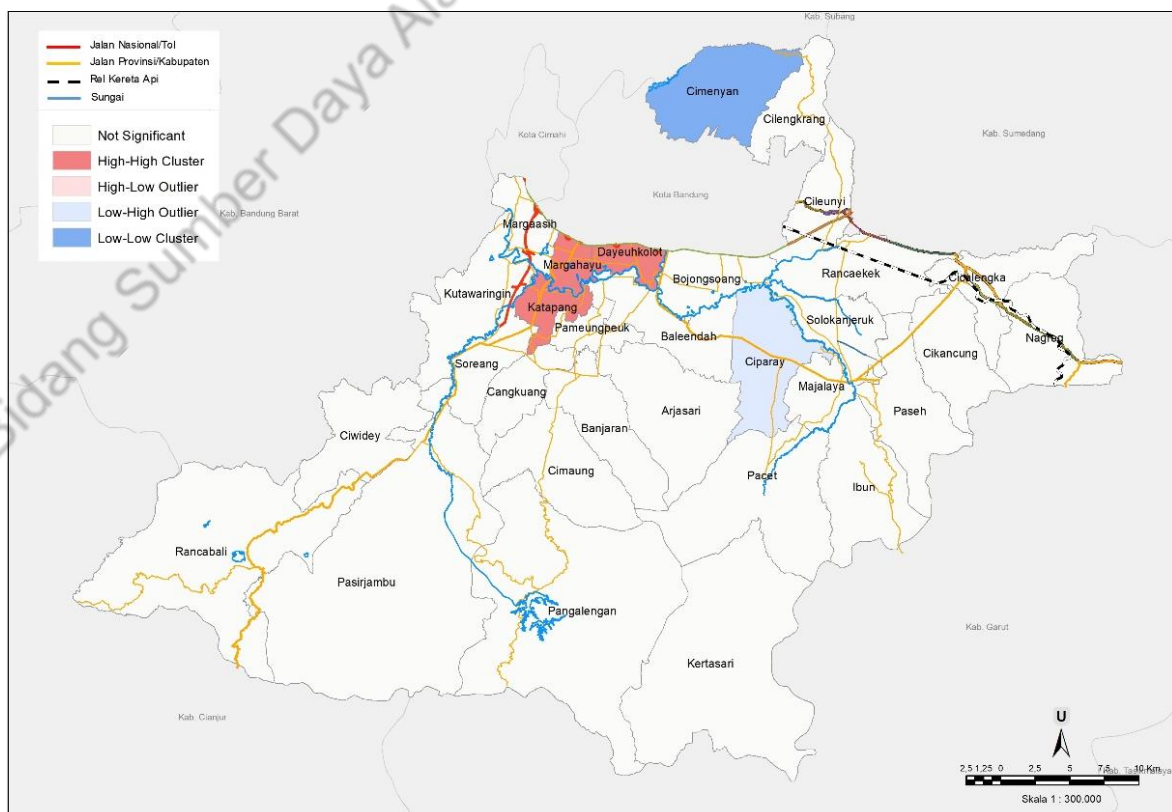
Selanjutnya untuk mengidentifikasi lokasi kluster dari keterkaitan spasial PDRB sektor G, maka dilakukan analisis *Anselin Local Moran's I* dengan menggunakan GIS. Untuk PDRB sektor industri pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung. Hasilnya terdapat satu lokasi kluster tinggi-tinggi di wilayah Bandung bagian tengah yang meliputi 3 kecamatan (lihat Gambar 5.14).

Grafik 5.6 Hasil pengolahan global spatial autorrelation dari PDRB sektor perdagangan per Kecamatan



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Gambar 5.14 Peta hasil analisis *Local Moran's I* PDRB sektor perdagangan

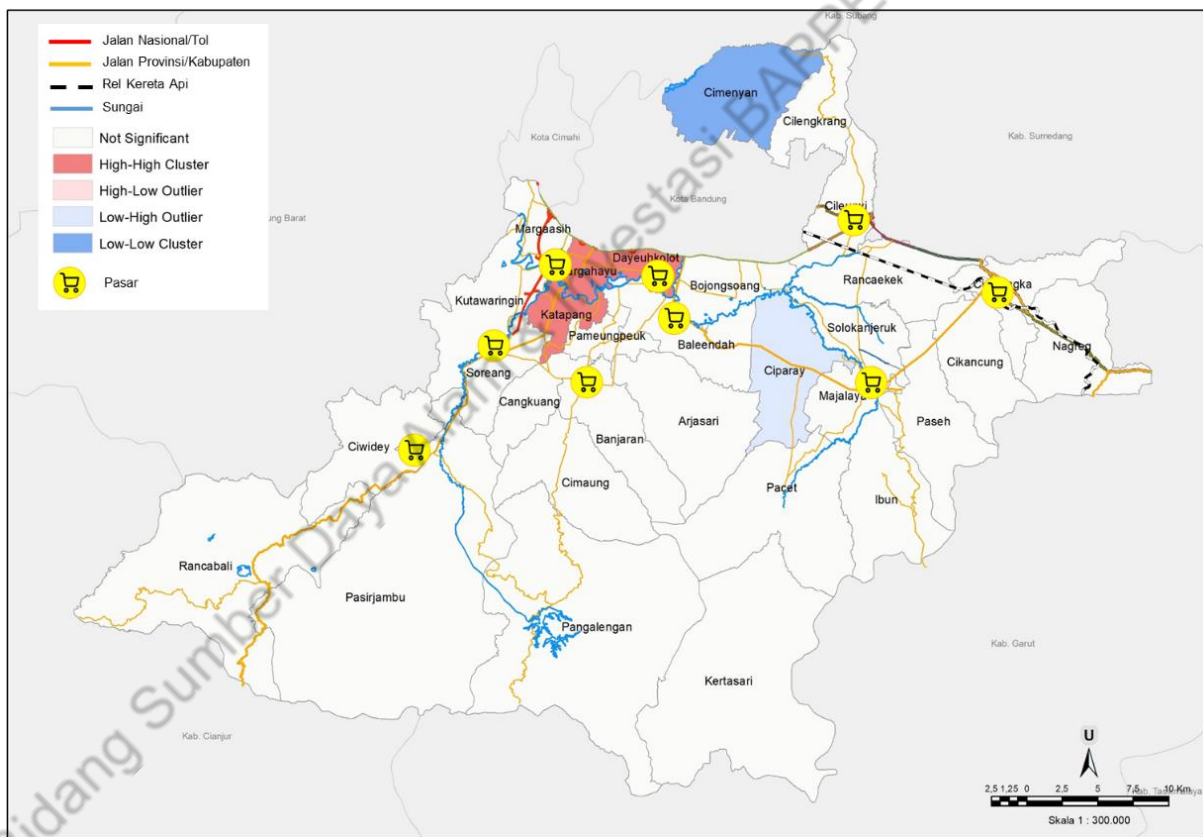


Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Hasil perhitungan analisis Local Moran's Index menunjukkan bahwa terdapat 3 kecamatan yang termasuk ke dalam kluster tinggi-tinggi (HH Cluster) yaitu Kecamatan Dayeuhkolot, Margahayu dan Katapang, keduanya berada di bagian Utara Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kota Bandung bagian Selatan. Terdapat juga kategori kluster rendah-rendah (LL Cluster) di Kecamatan Cimenyan, sebelah Utara Kabupaten Bandung, serta kategori outlier rendah-tinggi (LH Outlier) di kecamatan Ciparay, yang terletak di bagian tengah Kabupaten Bandung.

Sedangkan jika dilakukan *overlay* peta hasil analisis local moran's index PDRB sektor G, dengan sebaran potensi pasar (lihat Gambar 5.15), dapat dilihat bahwa terdapat dua pasar yang terletak di dalam lokasi kluster tinggi-tinggi yaitu Pasar Margahayu dan Pasar Raharja Plaza Dayeuhkolot. Selain itu, lokasi pusat kluster juga relatif berdekatan dengan tiga pasar lainnya yaitu Pasar Baleendah, Pasar Banjaran dan Pasar Soreang. Dengan demikian, terdapat kesamaan lokasi antara kluster tinggi-tinggi PDRB sektor G dengan lokasi pasar Pemda di Kabupaten Bandung.

Gambar 5.15 Peta pertampalan hasil Local Moran's I PDRB G dengan sebaran lokasi pasar di Kabupaten Bandung



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

5.4 Analisis Potensi Sektor Pariwisata

Analisis potensi sektor pariwisata meliputi penjelasan mengenai kinerja sektor pariwisata, potensi / daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bandung, serta keterkaitan spasial potensi sektor pariwisata.

1. Kinerja Sektor Pariwisata

Berdasarkan data kunjungan wisatawan menuju 168 daya tarik wisata di Kabupaten Bandung tahun 2020 yang diterbitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, terdapat total 1.341.317 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung.

Angka ini dapat dikatakan cukup baik mengingat pandemi COVID-19 dan kebijakan PSBB serta protokol kesehatan yang membuat kegiatan pariwisata terbatas. Tabel

5.17 merangkum kunjungan wisatawan, jumlah dan daya tarik wisata unggulan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2020.

Tabel 5.16 Kunjungan wisatawan, jumlah dan daya tarik wisata unggulan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2020

| No. | Kecamatan | DTW Unggulan Tercatat | Jumlah DTW Tercatat | Jumlah Kunjungan Tercatat |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------------|
| 1 | Ciwidey | Situs Gunung Padang | 6 | 275 |
| 2 | Rancabali | Kawah Putih, Ranca Upas, Glamping Lake Side, Walini | 11 | 777.722 |
| 3 | Pasirjambu | Makam Sang Adipati Kertamanah | 2 | 525 |
| 4 | Cimaung | Gunung Puntang | 7 | 41.846 |
| 5 | Pangalengan | Cibolang, Situ Cileunca | 8 | 64.308 |
| 6 | Kertasari | Hulu Sungai Citarum, Situ Cisanti | 8 | 36.061 |
| 7 | Pacet | Makam Keramat Eyang Surya Kencana | 3 | * |
| 8 | Ibun | Batu Candi Tangulun (Lingga Yoni) | 18 | 450 |
| 9 | Paseh | Karang Gantungan | 16 | 115 |
| 10 | Cikancung | Makam Eyang Jangkung | 5 | 1.472 |
| 11 | Cicalengka | Curug Cinulang | 7 | 32.091 |
| 12 | Nagreg | Situs Batu Kendan | 1 | 279 |
| 13 | Rancaekek | Makam Mama Jakaria | 2 | 420 |
| 14 | Majalaya | Masjid Agung Majalaya | 2 | 17.430 |
| 15 | Solokanjeruk | Situs Sumur Bandung | 4 | 131 |
| 16 | Ciparay | Water Vang | 21 | 5.934 |
| 17 | Baleendah | Situ Sipatuhan | 3 | 2.480 |
| 18 | Arjasari | Situs Gunung Anday | 3 | 693 |
| 19 | Banjaran | Pancuran Tujuh | 7 | 1.345 |
| 20 | Cangkuang | Situs Makam Syekh Abdul Qorim | 1 | 565 |
| 21 | Pameungpeuk | Situs Gunung Batu Anjing | 1 | 215 |
| 22 | Katapang | * | * | * |
| 23 | Soreang | Situs Makam Gunung Sadu | 2 | 887 |
| 24 | Kutawaringin | Makam Eyang Dalem Sontoan Qobul | 4 | 1.514 |
| 25 | Margaasih | Situs Makam Mahmud | 2 | 3.984 |
| 26 | Margahayu | * | * | * |
| 27 | Dayeuhkolot | Situs Makam Bupati Bandung | 2 | 975 |
| 28 | Bojongsoang | Situs Tegal Sakotak | 1 | 550 |
| 29 | Cileunyi | Batu Kuda | 8 | 75.641 |
| 30 | Cilengkrang | Curug Cilengkrang | 2 | 5.399 |
| 31 | Cimendan | Tahura, Batu Kuda, Tebing Keraton, Puncak Bintang | 11 | 268.010 |
| Total | | | 168 | 1.341.317 |

*Tidak ada data

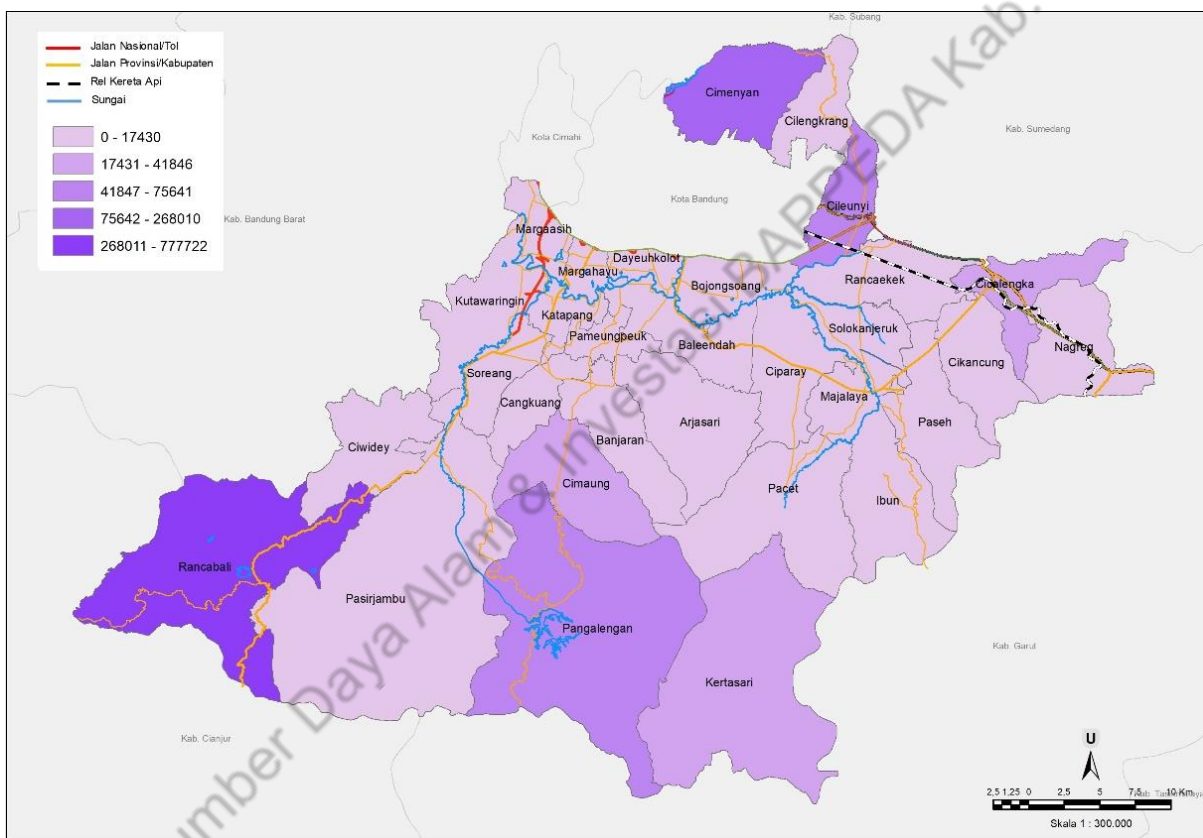
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2021, diolah

Berdasarkan Tabel 5.16, dapat dilihat bahwa sebaran kunjungan wisatawan paling tinggi terdapat di Kecamatan Rancabali dengan total kunjungan 777.722 wisatawan atau 58% dari total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung. Sedangkan di peringkat kedua adalah Kecamatan Cimencyan dengan total kunjungan mencapai 268.010 wisatawan (20%).

Sedangkan jika melihat peta sebaran kunjungan wisatawan, dapat dilihat bahwa

pada tahun 2020, kecamatan dengan kunjungan wisatawan yang tinggi berada pada bagian luar wilayah Kabupaten Bandung, seperti Kecamatan Rancabali, Pangalengan, Kertasari, Cicalengka, Cileunyi dan Cimencyan. Hal tersebut disebabkan daya tarik wisata unggulan yang menjadi tujuan wisata pengunjung ke Kabupaten Bandung sebagian besar merupakan jenis wisata alam dan budaya, yang mana letaknya berada di bagian luar wilayah Kabupaten Bandung.

Gambar 5.16 Peta sebaran kunjungan wisatawan ke Kab. Bandung per kecamatan tahun 2020



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

2. Potensi Sektor Pariwisata

Berdasarkan dokumen Naskah Akademik Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pengembangan Desa Wisata yang disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung tahun 2019, terdapat 10 (sepuluh) Desa Wisata di Kabupaten Bandung, dan rencananya akan ditambah 54 Desa Wisata Baru, 10 Desa Wisata tersebut yaitu:

- 1) Desa Alamendah Kecamatan Rancabali dengan keunggulan berupa potensi aneka makanan olahan, kerajinan tangan, hasil pertanian dan hasil perkebunan.
- 2) Desa Mekarsari/Gambung Kecamatan Pasirjambu dengan keunggulan berupa aneka makanan olahan stroberi, kerajinan tangan, hasil peternakan, hasil perikanan, pertanian dan seni budaya.

- 3) Desa Panundaan Kec. Ciwidey dengan peternakan kelinci, pertanian, perikanan dan kerajinan tangan.
- 4) Desa Lebakmuncang Kec. Ciwidey dengan kerajinan tangan dan wisata agro edukasi.
- 5) Desa Lamajang Kec. Pangalengan dengan seni budaya, arung jeram, homestay, kuliner, pertanian, peternakan
- 6) Kelurahan Jelekong Kec. Baleendah dengan seni budaya, seni lukis, dan kuliner tradisional.
- 7) Desa Ciburial Kec. Cimencyan dengan seni budaya dan peternakan
- 8) Desa Cinunuk Kec. Cileunyi dengan kampung seni, kuliner tradisional
- 9) Desa Laksana Kec. Ibum dengan kawah kamojang, seni budaya, kuliner tradisional, peternakan, pertanian dan perkebunan
- 10) Desa Rawabogo Kec. Ciwidey dengan seni budaya, kuliner tradisional, pertanian dan perkebunan.

Selain sepuluh desa wisata tersebut, Kabupaten Bandung juga memiliki beberapa daya tarik wisata unggulan lain. Berdasarkan data kunjungan wisatawan tahun 2020, dari 168 daya tarik wisata yang tercatat, terdapat 18 daya tarik wisata di Kabupaten Bandung yang dapat menarik lebih dari 10.000 kunjungan wisatawan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.17 Kunjungan wisata pada daya tarik wisata unggulan di Kab. Bandung tahun 2020

| No. | Nama Objek Wisata | Lokasi | Jenis Wisata | Jumlah Kunjungan |
|-----|---|-------------|---------------|------------------|
| 1 | WW. Kawah Putih | Rancabali | Wisata Alam | 326.463 |
| 2 | WW. Ranca Upas | Rancabali | Wisata Alam | 206.339 |
| 3 | <i>Glamping Lake Side</i> | Rancabali | Wisata Alam | 104.751 |
| 4 | Perum Perhutani KPH Bandung Utara (Tahura) | Cimencyan | Wisata Alam | 100.130 |
| 5 | Walini | Rancabali | Wisata Alam | 100.094 |
| 6 | Batu Kuda | Cileunyi | Wisata Budaya | 74.699 |
| 7 | Perum Perhutani KPH Bandung Utara (Batu Kuda) | Cimencyan | Wisata Alam | 66.649 |
| 8 | Tebing Keraton | Cimencyan | Wisata Budaya | 52.789 |
| 9 | Puncak Bintang | Cimencyan | Wisata Alam | 45.327 |
| 10 | Gunung Puntang | Cimaung | Wisata Alam | 39.701 |
| 11 | Curug Cinulang | Cicalengka | Wisata Budaya | 31.083 |
| 12 | Cibolang | Pangalengan | Wisata Alam | 30.450 |
| 13 | Situ Cileunca | Pangalengan | Wisata Alam | 28.738 |
| 14 | Hulu Sungai Citarum | Kertasari | Wisata Alam | 20.000 |
| 15 | Masjid Agung Majalaya | Majalaya | Wisata Budaya | 17.280 |
| 16 | <i>Patenggang Lake Side</i> | Rancabali | Wisata Alam | 12.136 |
| 17 | Situ Cisanti | Kertasari | Wisata Alam | 10.726 |
| 18 | TWA Cimanggu | Rancabali | Wisata Alam | 10.641 |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Bandung didominasi oleh jenis wisata alam. Sedangkan jika dilihat Kecamatan yang banyak

dikunjungi oleh wisatawan, maka Kecamatan Rancabali menjadi lokasi tujuan wisata unggulan yang paling banyak dikunjungi dengan menyumbang hampir setengah dari total kunjungan wisatawan ke Kabupaten

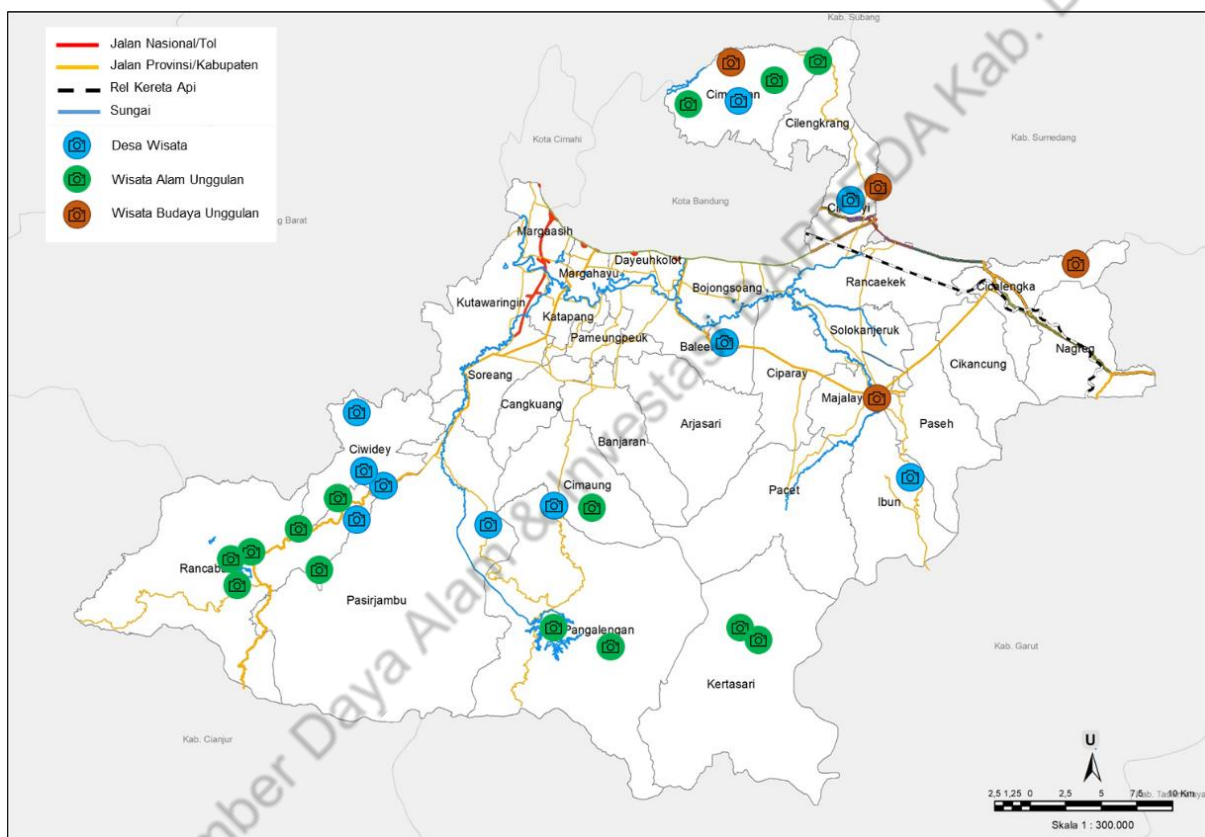
Bandung pada tahun 2020, disusul oleh Kecamatan Ciményan pada peringkat kedua.

Kemudian dengan menggabungkan potensi daya tarik wisata unggulan dengan 10 lokasi desa wisata di Kabupaten Bandung, maka dapat dilihat bagaimana sebarannya pada Gambar 5.17 di halaman berikutnya. Lokasi potensi daya tarik wisata unggulan dan desa wisata memiliki kecenderungan

terletak di bagian Selatan, terutama di Kecamatan Rancabali dan Ciwidey, serta di bagian Utara, terutama di Kecamatan Ciményan.

Adanya kedekatan antara daya tarik wisata unggulan dengan desa wisata tentunya memberikan keuntungan dalam pengembangan, yang mana arah kebijakan dapat dirumuskan secara terfokus.

Gambar 5.17 Peta sebaran lokasi desa wisata dan daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Bandung



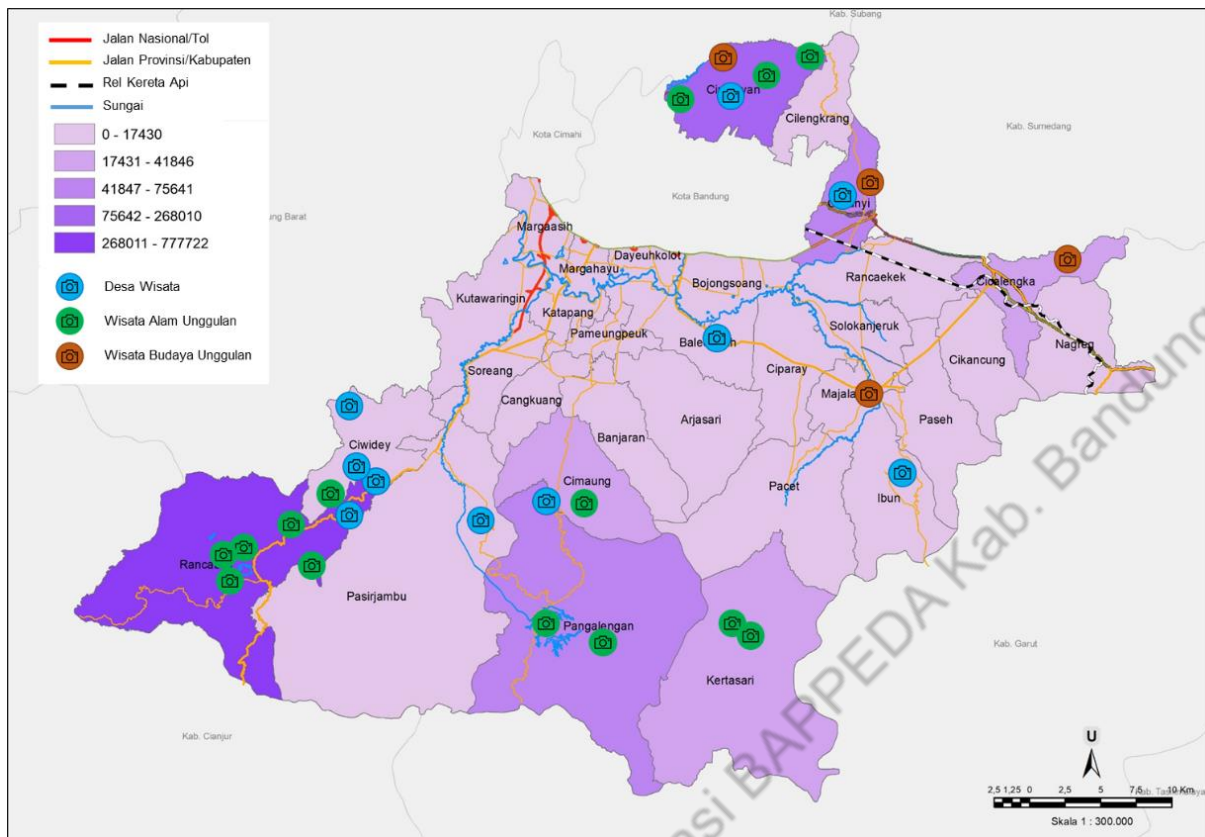
Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Sedangkan jika menggabungkan peta sebaran potensi daya tarik wisata unggulan dan desa wisata, dengan sebaran kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung (lihat Gambar 5.18 pada halaman berikutnya), maka dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan jika lokasi daya tarik wisata unggulan dan desa wisata merupakan lokasi yang memiliki tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi. Seperti banyaknya potensi daya tarik wisata di Kecamatan Rancabali dan

Ciményan juga berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kecamatan tersebut yang masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa program wisata yang dilaksanakan, baik pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, serta kegiatan promosi wisata terutama di lokasi memiliki daya tarik wisata unggulan telah berjalan cukup baik.

Gambar 5.18 Peta pertampalan sebaran potensi daya tarik wisata unggulan dengan sebaran kunjungan wisatawan tahun 2020



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

3. Keterkaitan Spasial Sektor Pariwisata

Untuk mengetahui keterkaitan spasial pada sektor pariwisata, dilakukan metode yang sama dengan analisis terhadap tiga sektor unggulan sebelumnya, tetapi data yang digunakan berbeda, karena sektor pariwisata tidak diwakili oleh sektor tunggal pada kerangka PDRB, lebih merupakan gabungan dari beberapa sektor PDRB. Dengan demikian pada penelitian ini, identifikasi keterkaitan spasial sektor pariwisata dilakukan dengan menggunakan data sebaran kunjungan wisatawan di lokasi daya tarik wisata unggulan pada tahun 2020.

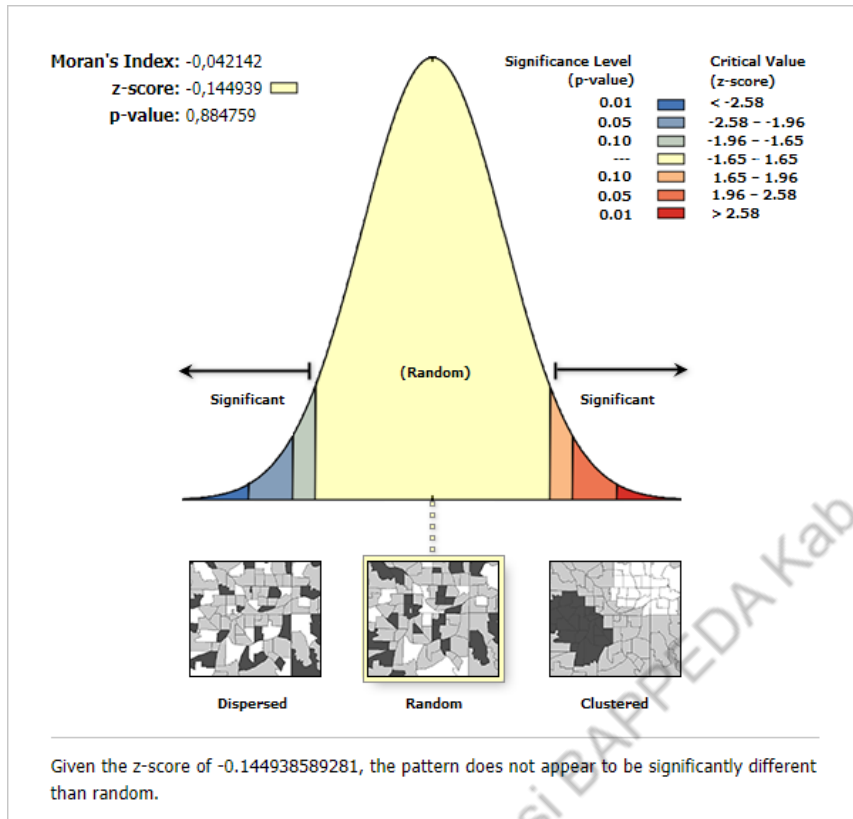
Meskipun berbeda, tetapi keduanya pada dasarnya memberikan gambaran mengenai nilai ekonomi di suatu wilayah. Identifikasi keterkaitan spasial dilakukan

dengan menghitung nilai Global Moran's I dengan menggunakan GIS (lihat Grafik 5.7).

Hasil yang berbeda dengan tiga sektor sebelumnya, ditunjukkan pada sektor pariwisata yang mana keterkaitan spasial dari kunjungan wisatawan diantara 31 kecamatan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020, memiliki pola yang tidak menunjukkan secara signifikan berbeda dengan acak, atau secara statistik tidak membentuk kluster (z -score $-0,144939$).

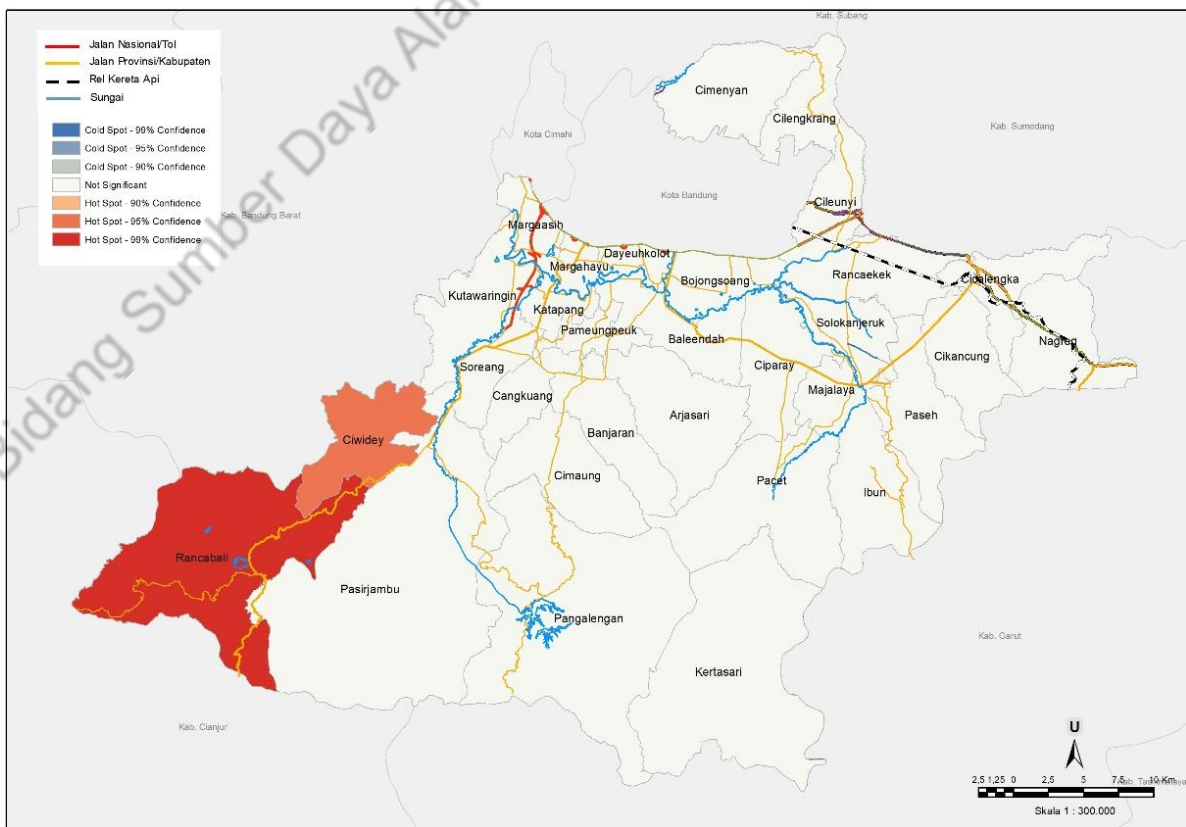
Dengan hasil tersebut, analisis tidak dilanjutkan dengan Anselin Local Moran's I, melainkan dilanjutkan dengan analisis Getis-Ord G_i^* . Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi *hotspot* yang muncul dari kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung berdasarkan kecamatan pada tahun 2021.

Grafik 5.7 Hasil pengolahan *global spatial autorrelation* dari jumlah kunjungan wisata per Kecamatan pada tahun 2020



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Gambar 5.19 Peta hasil analisis Getis-Ord Gi* kunjungan wisatawan per kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2020



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

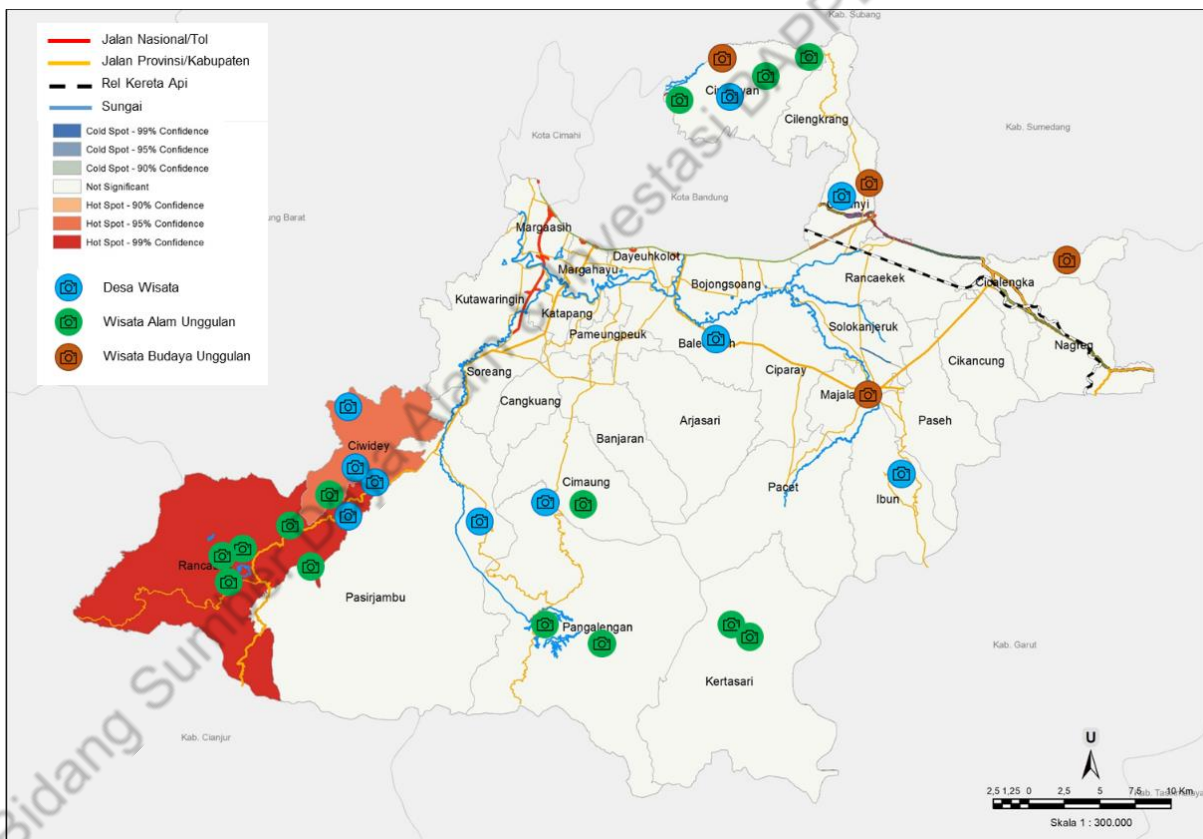
Hasil perhitungan analisis Getis-Ord G_i^* menunjukkan bahwa terdapat 2 kecamatan yang tergolong ke dalam *hotspot* yaitu Kecamatan Rancabali (tingkat kepercayaan 99%), dan Kecamatan Ciwidey (tingkat kepercayaan 95%). Keduanya berada di bagian Barat Daya–Selatan Kab. Bandung.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, maka dilakukan pertampalan antara peta sebaran potensi daya tarik wisata unggulan dengan peta sebaran *hotspot* (lihat Gambar 5.20). Hasilnya mengindikasikan bahwa lokasi dengan kunjungan wisatawan yang tinggi seperti Kecamatan Rancabali

yang menyumbang 58% dari total kunjungan, dan juga merupakan *hotspot* kunjungan wisata di Kabupaten Bandung, memiliki jumlah daya tarik wisata unggulan yang juga banyak.

Kondisi tersebut tidak berlaku untuk Kecamatan Cimenyan dan Kecamatan Pangalengan, tetapi *hotspot* lainnya terdapat di Kecamatan Ciwidey yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan tercatat yang relatif lebih sedikit. Hal ini disebabkan tingginya kunjungan wisata dan potensi di Kecamatan Rancabali, sehingga memberikan dampak kepada kecamatan Ciwidey.

Gambar 5.20 Peta pertampalan sebaran potensi daya tarik wisata unggulan dengan hasil analisis Getis-Ord G_i^* kunjungan wisatawan per kecamatan tahun 2020



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

5.5 Sintesis Kluster dan Hotspot dari Sektor Ekonomi Unggulan

Subbab ini merangkum mengenai hasil identifikasi kluster dan hotspot terhadap

sektor ekonomi unggulan, yang menjelaskan potensi unggulan masing-masing sektor yang berada di lokasi kluster dan *hotspot*. Rangkuman mengenai hasil identifikasi tersebut yaitu:

Tabel 5.18 Sintesis klaster dan hotspot dari sektor ekonomi unggulan

| No. | Sektor Ekonomi Unggulan | Lokasi Klaster/Hotspot | Potensi Unggulan |
|-----|-------------------------|------------------------|--|
| 1 | Pertanian | Pasirjambu | Perkebunan, buah-buahan. |
| | | Kertasari | Perkebunan, peternakan, buah-buahan, perikanan. |
| | | Rancabali | Perkebunan, buah-buahan. |
| | | Pangalengan | Hortikultura, perkebunan, peternakan, buah-buahan. |
| 2 | Industri | Margahayu | Industri Pakaian Jadi; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya; Industri Peralatan Listrik. |
| | | Baleendah | Industri Pakaian Jadi; Industri Makanan; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. |
| 3 | Perdagangan | Margahayu | Pasar Margahayu (Pemda) |
| | | Katapang | - |
| | | Dayeuhkolot | Pasar Raharja Plaza Dayeuh Kolot (Pemda) |
| 4 | Pariwisata | Rancabali | WW. Kawah Putih, WW. Ranca Upas, <i>Glamping Lake Side</i> , Walini, <i>Patenggang Lake Side</i> , TWA Cimanggu, serta Desa Wisata Alamendah. |
| | | Ciwidey | Desa Panundaan, Desa Lebakmuncang, dan Desa Rawabogo. |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Peta mengenai sintesis klaster dan hotspot dari sektor ekonomi unggulan yang dilengkapi dengan sebaran potensi unggulan dari masing-masing lokasi dapat dilihat pada Gambar 5.21. Ilustrasi ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hasil identifikasi potensi secara keseluruhan, termasuk pada lokasi-lokasi yang bukan merupakan klaster atau hotspot.

Tampilan hasil analisis dapat disesuaikan dengan kebutuhan, atau pertanyaan yang ingin dijawab: sebagai contoh: jika ingin mengetahui sebaran potensi pertanian dengan industri pengolahan makanan, maka akan menghasilkan sintesis dan ilustrasi peta yang berbeda. Ilustrasi ini dilakukan untuk memudahkan dalam merumuskan kebijakan prioritas pengembangan ekonomi secara menyeluruh pada tingkat Kabupaten Bandung.

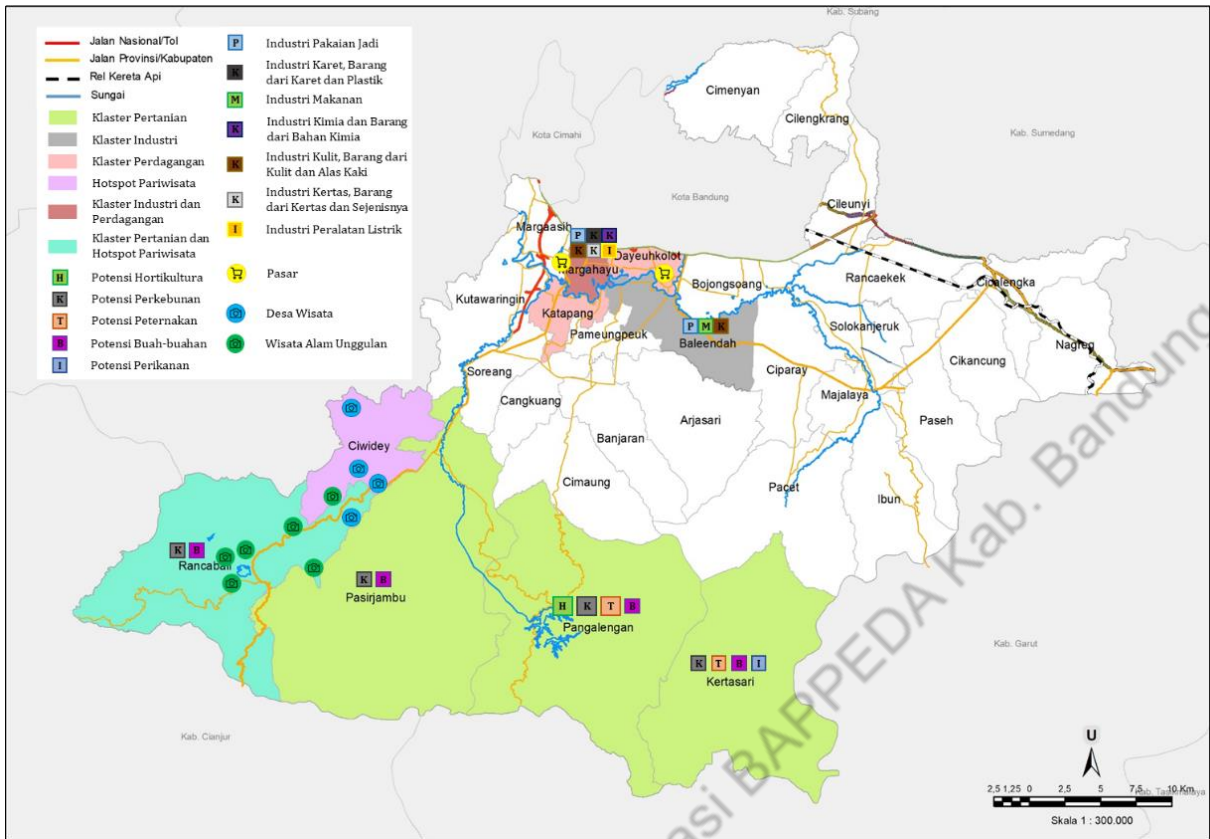
Berdasarkan hasil ilustrasi, dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) sektor ekonomi unggulan, terdapat 2 (dua) wilayah utama

yang membentuk klaster, yaitu klaster industri dan perdagangan di Kabupaten Bandung bagian Utara, serta klaster pertanian dan pariwisata di Kabupaten Bandung bagian Selatan.

Di antara kedua klaster tersebut, terdapat wilayah yang tidak termasuk ke dalam klaster 4 sektor ekonomi unggulan, terlihat pada peta wilayah yang memiliki warna area putih, meskipun memiliki potensi dalam pengembangan keempat sektor ekonomi unggulan. Berdasarkan konsep ekosistem simpul ekonomi, wilayah-wilayah ini diindikasikan dapat diarahkan untuk menjadi penghubung antara klaster Utara dan Selatan.

Selain itu, jika dilihat persebaran klaster sektor ekonomi unggulan, relatif berkumpul di bagian Barat Kabupaten Bandung. Dengan demikian, untuk membagi beban aktivitas di kawasan Tengah, maka disarankan untuk mendorong pengembangan pusat kegiatan ekonomi di wilayah bagian Timur Kabupaten Bandung.

Gambar 5.21 Peta lokasi klaster dan hotspot dari sektor ekonomi unggulan dengan potensi unggulan dari masing-masing sektor



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

6. Rumusan Peluang dan Tantangan Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan



6.1 Peluang dan Tantangan Sektor Pertanian

Sub-bab ini menjelaskan peluang pengembangan potensi pertanian seperti peluang pengembangan produk pertanian dan pemasaran, serta tantangan yang ditemukan pada pelaksanaannya.

1. Peluang Pengembangan Sektor Pertanian

Salah satu konsep pengembangan sektor pertanian yang berkaitan dengan pengembangan sektor industri, perdagangan dan pariwisata pada wilayah Kabupaten/Kota adalah konsep pengembangan agropolitan. Berdasarkan sintesis Suroyo dan Handayani (2014), agropolitan merupakan konsep yang ditawarkan Friedmann dan Douglass (1975) sebagai solusi atas pembangunan yang tidak berimbang antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Konsep agropolitan juga erat kaitannya dengan konsep agribisnis, yang mana menurut Rustiadi (2006), menjelaskan bahwa agribisnis merupakan bisnis yang berbasis usaha pertanian yang mengedepankan kekuatan pasar (market driven) yang terdiri atas sub sistem hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem hilir dan sub sistem penunjang.

Kunci keberhasilan pembangunan agropolitan adalah memberlakukan setiap distrik agropolitan sebagai suatu unit tunggal otonom mandiri tetapi terintegrasi secara sinergik dengan keseluruhan sistem pengembangan wilayahnya. Secara spasial penerapan konsep agropolitan sebagai pilihan alternatif dari terjadinya kegagalan pembangunan industri masa lalu, dihadapkan kepada beberapa persyaratan (Harun, 2004), yaitu:

- Dilibatkannya ratusan hingga jutaan petani perdesaan bersama-sama pengembangan kota-kota pusat pertanian;
- Tidak ada pilihan lain selain berjalannya secara simultan keterlibatan setiap instansi sektoral di perdesaan untuk

mengembangkan pola agribisnis dan agroindustri;

- Tercapainya keserasian, kesesuaian dan keseimbangan antara pengembangan komoditas unggulan dengan struktur dan skala ruang yang dibutuhkan;
- Adanya kesinambungan pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana wilayah (irigasi, transportasi) antara daerah produksi pertanian dan simpul-simpul jasa perdagangan dalam program perencanaan jangka panjang;
- Realisasi dari pengembangan otonomi daerah untuk mengelola kawasan pertanian secara mandiri termasuk kewenangan untuk mempertahankan keuntungan komparatif bagi penjaminan pengembangan kawasan pertanian;
- Dalam kondisi “infant-agroindustry” diperlukan adanya kemudahan-kemudahan dan proteksi terhadap jenis komoditas yang dihasilkan baik di pasar nasional maupun luar negeri;

Adapun konsep pengembangan kawasan agropolitan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian agribisnis;
- Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasilhasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan;
- Hubungan antara kota dan daerah-daerah hinterland atau daerah-daerah sekitarnya di kawasan agropolitan bersifat interpendensi/timbal balik yang harmonis dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian mengembangkan usaha (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha

budidaya agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan penampungan (pemasaran) hasil produksi pertanian;

- Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota karena keadaan sarana yang ada di kawasan agropolitan tidak jauh berbeda dengan yang di kota.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Kawasan agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan, yaitu satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Pendekatan pembangunan kawasan agropolitan menggunakan pendekatan pembangunan sistem agribisnis, yang mencakup 5 sub sistem (Sutawi, 2002), yaitu:

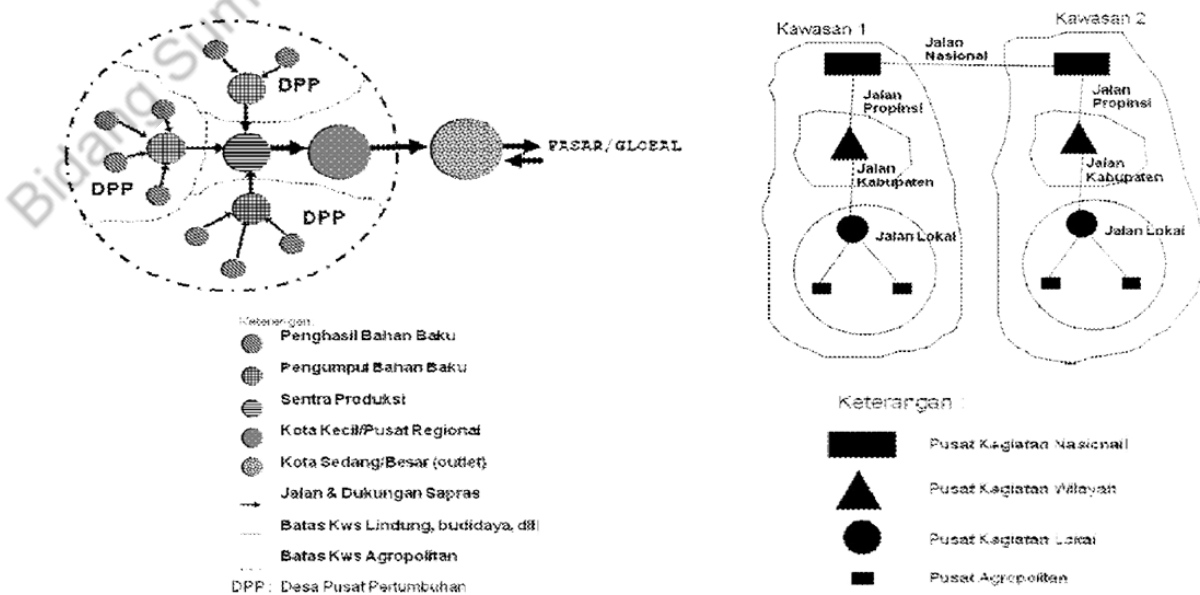
- 1) Sub sistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*), yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian;
- 2) Sub sistem usaha tani (*on farm agribusiness*), yaitu kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan

sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas primer;

- 3) Sub sistem pengolahan (down stream agrobusiness), yaitu industri yang mengolah komoditas primer menjadi produk olahan baik produk antara maupun produk akhir;
- 4) Sub sistem pemasaran, yaitu kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan luar negeri;
- 5) Sub sistem jasa yang menyediakan jasa bagi sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani dan sub sistem agribisnis hilir.

Soenarno (2003), mendefinisikan daerah agropolitan sebagai sistem fungsional pada desa-desa, yang ditujukan dengan keberadaan hirarki ruang di perdesaan, pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya yang membentuk daerah agropolitan. Sebaiknya daerah agropolitan dihubungkan dengan keberadaan rencana tata ruang tingkat nasional, rencana tata ruang tingkat provinsi, serta tingkat kabupaten. Hubungan daerah agropolitan dengan pusat aktivitas secara regional pada tingkat provinsi dan nasional, memiliki keterkaitan ruang, berikut ilustrasinya:

Gambar 6.1 Konsep pengembangan kawasan agropolitan



Sumber: Soenarno, 2003

Peluang pengembangan konsep agropolitan di Kabupaten Bandung didukung dengan adanya klaster potensi pertanian di wilayah Selatan, meliputi 4 Kecamatan dengan sub-sektor unggulan utama yaitu perkebunan dan buah-buahan, serta hortikultura dan peternakan. Lokasi potensial lain terdapat di bagian Utara dan Timur yang memiliki potensi pertanian pangan padi dan jagung. Wilayah-wilayah penghasil potensi pertanian tersebut diikat oleh bagian tengah yang dapat diarahkan menjadi sentra produksi atau kota kecil.

2. Tantangan Pengembangan Sektor Pertanian

Tantangan pengembangan sektor pertanian diuraikan secara umum untuk seluruh sub-sektor unggulan pertanian. Data yang digunakan adalah laporan kinerja, dokumen kajian, serta hasil wawancara dengan aktor kunci. Beberapa tantangan sektor pertanian antara lain sebagai berikut:

- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung yang relatif kecil, dibandingkan dengan sektor unggulan lainnya (rata-rata 7,82%). Kontribusi sektor pertanian juga cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya (dari 2010-2019), meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan (0,14%).
- Pertumbuhan sektor pertanian relatif kecil (rata-rata 1,84% dari tahun 2011-2020), serta memiliki tren penurunan pada 3 tahun terakhir. Meski demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki pertumbuhan positif (0,19%) pada tahun 2020, akibat Covid-19.
- Lokasi potensi pertanian Kabupaten Bandung unggulan, sebagian besar terdapat di bagian Selatan, yang relatif jauh dari simpul-simpul perdagangan dan industri utama di Kabupaten Bandung, yang banyak terdapat di bagian Utara, sehingga petani kesulitan untuk memasarkan produknya secara kompetitif;

- Belum dioptimalkannya alternatif pemasaran digital (*marketplace*), akibat terbatasnya informasi dan akses teknologi yang dimiliki petani. Adapun petani yang memiliki akses terhadap pasar internasional masih relatif sedikit dan belum terorganisasi;
- Semakin berkurangnya lahan pertanian produktif yang disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan kawasan komersial terutama di Kabupaten Bandung bagian Utara yang berbatasan dengan Kota Bandung di bagian Selatan;
- Belum dioptimalkannya pengembangan produk-produk turunan dari hasil pertanian unggulan di Kabupaten Bandung, serta nilai jual produk di tingkat petani relatif rendah.

6.2 Peluang dan Tantangan Sektor Industri

Sub-bab ini menjelaskan peluang pengembangan potensi industri baik pada tingkat produksi dan pemasaran, serta tantangan yang ditemukan pada pelaksanaannya.

1. Peluang Pengembangan Sektor Industri

Agroindustri, berdasarkan simpulan dari Pratiwi (2017) didefinisikan sebagai bagian dari manufaktur, yaitu sektor yang memproses bahan baku dan produk antara yang berasal dari pertanian, perikanan dan kehutanan. Agroindustri merupakan bagian dari konsep yang lebih luas dari agribisnis karena mencakup pemasok input ke pertanian, perikanan dan sektor kehutanan dan distributor makanan dan non-makanan output dari agroindustri (Silva et al.2009)

Berdasarkan pemikiran tersebut dan menelaah kondisi yang terjadi di Indonesia, Saragih dan Krishnamurti (1992) menyimpulkan beberapa poin berkaitan dengan pengembangan agroindustri di Indonesia yaitu:

- 1) Agroindustri memiliki keterkaitan (linkages) yang besar baik hulu maupun hilir. Agroindustri pengolahan yang menggunakan bahan baku hasil pertanian berarti memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan budidaya pertanian maupun dengan konsumen akhir atau dengan kegiatan industri lain. Sedangkan bagi agroindustri penyedia sarana produksi (pupuk, pestisida, alat-alat pertanian) akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kegiatan budidaya dan industri atau kegiatan lain yang menyediakan input. Keterkaitan yang erat ini merupakan hal yang logis dan sebagai konsekuensinya juga akan menciptakan pengaruh multiplier yang besar terhadap kegiatan tersebut;
- 2) Produk-produk agroindustri, terutama agroindustri pengolahan umumnya memiliki nilai elastisitas permintaan akan pendapatan yang relatif tinggi (elastis) jika dibandingkan dengan produk pertanian dalam bentuk segar atau bahan mentah. Sehingga dengan makin besarnya pendapatan masyarakat, akan makin terbuka pula pasar baik bagi produk agroindustri. Hal ini akan memberikan prospek yang baik bagi kegiatan itu sendiri, dengan demikian akan memberikan pengaruh pula kepada seluruh kegiatan yang dipengaruhinya.
- 3) Kegiatan agroindustri umumnya bersifat *resource based industry*, sehingga dengan dukungan potensi sumberdaya alam Indonesia, akan semakin besar kemungkinan untuk memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam pasar dunia, di samping dapat memiliki pasar domestik yang cukup terjamin.
- 4) Kegiatan agroindustri umumnya menggunakan input yang *renewable*, sehingga keberlangsungan kegiatan ini dapat lebih terjamin, di samping kemungkinan untuk timbulnya masalah pengurusan sumberdaya alam yang lebih kecil.

Menurut Austin (1992) agroindustri hasil pertanian mampu memberikan sumbangan yang nyata bagi pembangunan di kebanyakan negara berkembang karena:

- 1) Agroindustri pertanian adalah pintu untuk sektor pertanian. Agroindustri melakukan transformasi bahan mentah dari pertanian termasuk transformasi produk subsisten menjadi produk akhir untuk konsumen. Ini berarti bahwa suatu negara tidak dapat sepenuhnya menggunakan sumber daya agronomis tanpa pengembangan agroindustri. Di satu sisi, permintaan terhadap jasa pengolahan meningkat sejalan dengan peningkatan produksi pertanian. Di sisi lain agroindustri tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga menimbulkan permintaan ke belakang yaitu peningkatan permintaan jumlah dan ragam produksi pertanian. Akibat dari hal ini adalah petani terdorong untuk mengadopsi teknologi baru agar produktivitas meningkat, sehingga pendapatan petani dapat meningkat.
- 2) Agroindustri hasil pertanian sebagai dasar sektor manufaktur. Transformasi penting lainnya dalam agroindustri terjadi karena permintaan terhadap makanan olahan semakin beragam seiring dengan pendapatan masyarakat dan urbanisasi yang meningkat.
- 3) Agroindustri pengolahan hasil pertanian menghasilkan komoditas ekspor penting. Produk agroindustri termasuk produk dari proses sederhana mendominasi ekspor negara berkembang, sehingga akan menambah devisa negara.
- 4) Agroindustri pangan merupakan sumber penting nutrisi. Agroindustri dapat menghemat biaya dengan mengurangi kehilangan produksi pasca panen dan menjadikan mata rantai pemasaran bahan makanan dapat memberikan keuntungan nutrisi dan kesehatan dari makanan yang dipasok jika pengolahannya dilakukan dengan baik.

Agroindustri Hulu dan Hilir, Menurut Sutardi (2007), agroindustri adalah salah satu sub sistem yang bersama-sama dengan sub sistem lain membentuk sistem agribisnis. Sistem agribisnis yang dimaksud terdiri atas empat cakupan sub sistem :

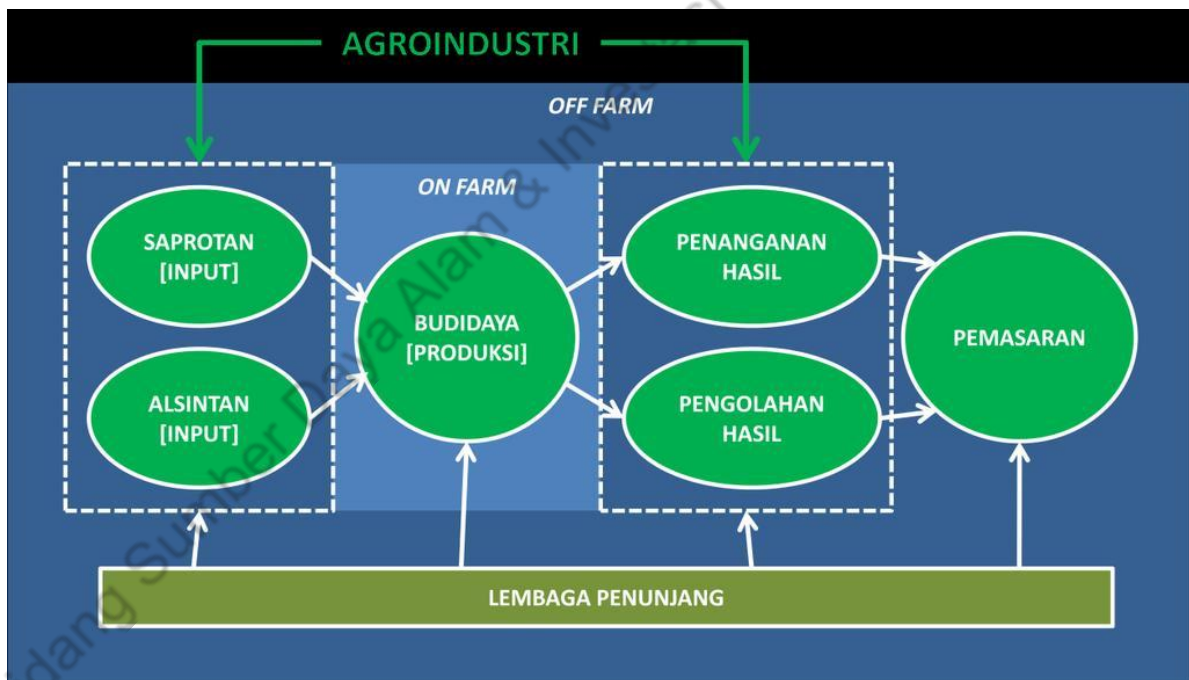
1. Sub sistem agribisnis hulu di luar areal produksi (agroindustri hulu off-farm) yang meliputi industri sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida); industri mesin dan peralatan pertanian; pengadaan dan distribusi sarana produksi pertanian dan mesin.
2. Sub sistem agribisnis di dalam areal produksi pertanian (on farm) yang meliputi budidaya tanaman, ternak, dan ikan; pemanenan; pengumpulan dan penanganan pasca panen; penjualan

dan pemasaran produk pertanian primer.

3. Sub sistem agribisnis hilir di luar areal produksi (agroindustri hilir off-farm) yang meliputi : pengadaan bahan baku dan produk pertanian primer, pengolahan menjadi barang setengah jadi dan barang jadi serta penjualannya.
4. Sub-sistem pendukung dan kebijakan yang meliputi : fasilitas kredit; penyuluhan pertanian dan informasi; transportasi dan komunikasi; infrastruktur lokal dan nasional; penelitian dan pengembangan; serta lingkungan usaha.

Lakitan (2012) menggambarkan keterkaitan kegiatan off-farm hulu dan hilir sebagai berikut :

Gambar 6.2 Agroindustri dan sistem agribisnis



Sumber: Lakitan, 2012

Dari Gambar terlihat bahwa agroindustri merupakan bagian dari subsistem agribisnis, yaitu subsistem *off-farm*, baik *off-farm* hulu maupun *off-farm* hilir. *Off-farm* hulu terdiri atas industri-industri input (sarana produksi pertanian serta alat dan mesin pertanian), sedangkan *off-farm* hilir terdiri atas industri penanganan dan pengolahan hasil. Menurut

Udayana (2011) secara garis besar agroindustri dapat digolongkan menjadi empat jenis; yaitu agroindustri pengolahan hasil pertanian, agroindustri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, agroindustri input pertanian (pupuk, pestisida, herbisida) serta agroindustri jasa sektor pertanian (*supporting services*).

2. Tantangan Pengembangan Sektor Industri

Tantangan pada pengembangan sektor industri di Kabupaten Bandung, antara lain sebagai berikut:

- Meskipun kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bandung merupakan yang paling tinggi, dari sektor lainnya, tetapi sektor industri juga merupakan sektor yang paling terpuuk akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 3,27%;
- Industri menengah-besar yang telah ada di Kabupaten Bandung, memiliki kesulitan untuk mengakses bahan baku (tekstil, garmen), terutama di masa pandemi Covid-19, karena bergantung pada pasokan dari tempat lain (seperti negara China, yang terdampak *lockdown*); Dengan demikian, untuk industri menengah-besar masih memiliki ketergantungan bahan baku dari negara lain, padahal dapat menjadi peluang jika diproduksi sendiri;
- Harga produk yang dihasilkan oleh industri di Kabupaten Bandung, sulit untuk dapat bersaing dengan produksi wilayah lain yang memiliki biaya bahan baku rendah;
- Belum terdapat hubungan antara industri pengolahan, terutama makanan dan minuman skala menengah dan besar, dengan produk unggulan pertanian di Kabupaten Bandung, meskipun telah ada pengembangan produk susu, tetapi masih belum terbentuk pada produk lain, dan masih dilakukan pada skala industri kecil dan rumah tangga;
- Biaya pengelolaan limbah menjadi beban berat bagi perusahaan. Pengolahan limbah untuk industri, lebih baik jika ada di dalam kawasan industri; Hal ini akan meringankan beban perusahaan dalam segi manajemen karena pengelolaan limbah akan dilakukan oleh pengelola kawasan industri.

6.3 Peluang dan Tantangan Sektor Perdagangan

Sub-bab ini menjelaskan peluang dan tantangan pengembangan potensi perdagangan, serta kaitannya dengan pengembangan sektor pertanian dan industri.

1. Peluang Pengembangan Sektor Perdagangan

Peluang pengembangan sektor perdagangan, terutama kaitannya dengan pengembangan sektor pertanian dan industri. Peluang pengembangan sektor perdagangan salah satunya pada kerangka agribisnis. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep agribisnis erat kaitannya dengan konsep agroindustri. Berdasarkan simpulan Fagi (2012), Agribisnis berawal dan berakhir dalam bentuk agroindustri yaitu agroindustri pra panen dan pasca panen.

Simatupang (1989) menyebut keterkaitan dengan agroindustri pra panen sebagai backward linkages, dan yang dengan agroindustri pasca panen sebagai forward linkages. Baik backward maupun forward linkages masih sangat lemah. Sebagai contoh industri olahan kedelai harus mengimpor kedelai, karena produksi kedelai domestik tidak mencukupi. Sementara, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai terhambat oleh ketersediaan benih kedelai yang dihasilkan oleh industri benih kedelai. Pertanaman jagung hibrida domestik terbatas luasnya, karena benih jagung hibrida domestik tidak tersedia di sentra-sentra produksi jagung.

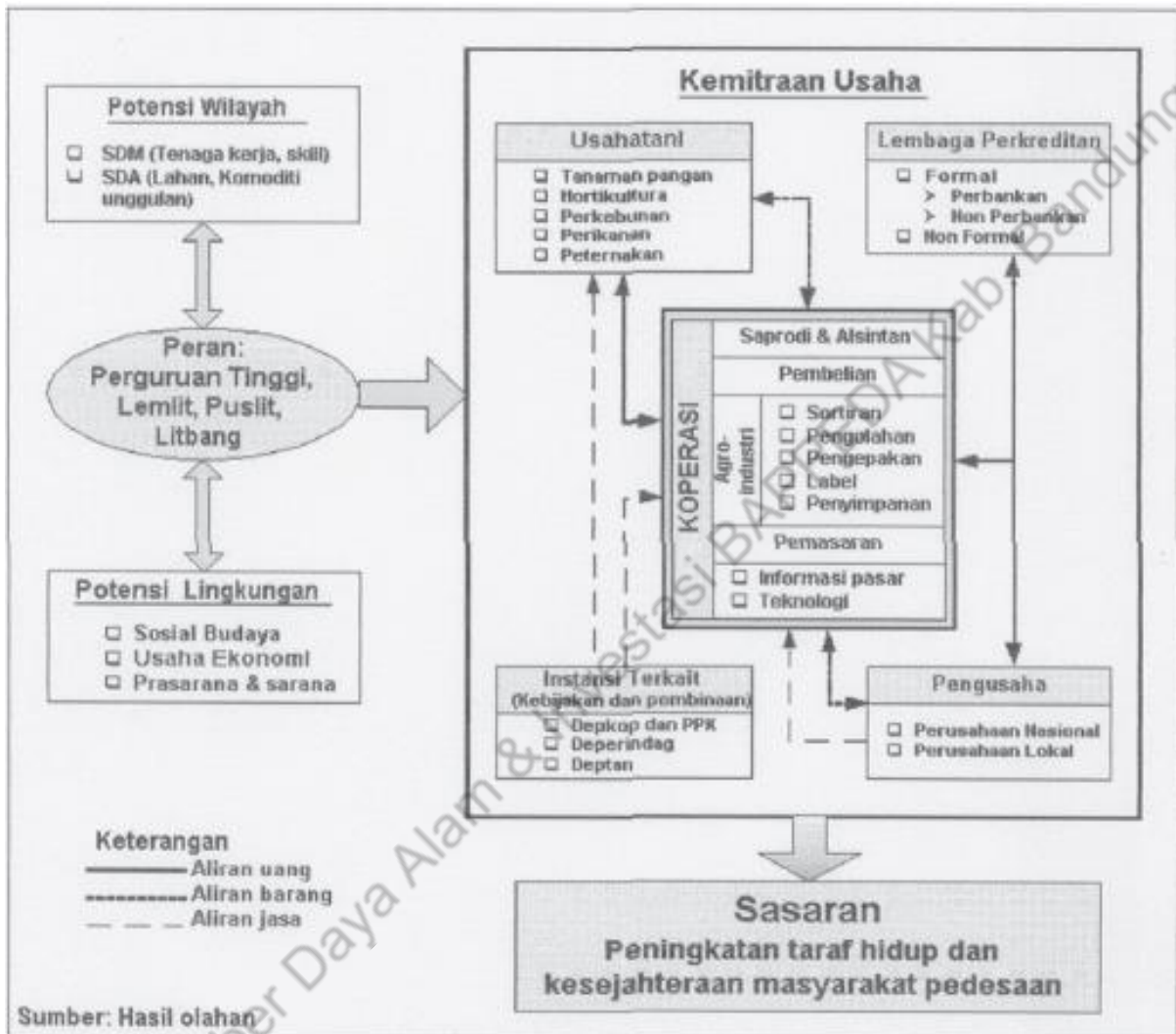
Sistem agribisnis yang merupakan integrasi semua aktivitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan usahatani dan agroindustri saling terkait satu sama lain. Agribisnis menurut Syahza (2003) sebagai suatu sistem meliputi:

- 1) Subsistem pengadaan sarana produksi
- 2) Subsistem produksi
- 3) Subsistem pengolahan hasil
- 4) Subsistem pemasaran
- 5) Subsistem kelembagaan

Terdapat beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi yang berbasis agribisnis, antara lain peran perguruan tinggi, pengusaha, lembaga perkreditan,

pengusaha tani (petani), instansi terkait, dan koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung ekonomi pedesaan ialah sebagai berikut:

Gambar 6.3 Rangkaian kerja faktor pendukung agribisnis



Sumber: Syahza, 2003

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa agar semua subsistem agribisnis itu dapat berjalan sesuai dengan tuntutan agribisnis, perlu dirancang suatu model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis agribisnis dengan melibatkan beberapa lembaga pendukung dalam bentuk kelompok mitra usaha agribisnis, yaitu lembaga ekonomi pedesaan (koperasi), pengusaha tani (petani), lembaga perkreditan, pengusaha, dan instansi pemerintah.

2. Tantangan Pengembangan Sektor Perdagangan

Tantangan pada pengembangan sektor perdagangan di Kabupaten Bandung, antara lain sebagai berikut:

- Meskipun nilai PDRB sektor G mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Pertumbuhan sektor G memiliki nilai terendah pada tahun 2020 (-3,78%).

- Sebaran pasar tradisional yang dikelola pemda masih terbatas, terutama di bagian Selatan;
- Perlu peningkatan kerjasama antara Pemkab Bandung dengan pengelola pasar swasta;
- Pasar tradisional sebagai tempat pelaku usaha perdagangan, kurang tertata rapi, beberapa diantaranya masih terlihat menumpuknya sampah, seperti di Pasar Banjaran, Soreang, Baleendah, dan Sayati. Pengelolaan sampah yang belum optimal membuat pasar tradisional menjadi kumuh;
- Pemenuhan administrasi agar usaha masih banyak yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha di Kabupaten Bandung sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan intervensi untuk pengembangan kapasitas yang lebih terarah dan bantuan perluasan pemasaran dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

6.4 Peluang dan Tantangan Sektor Pariwisata

Sub-bab ini menjelaskan peluang pengembangan potensi pariwisata baik pada tingkat daya tarik wisata, pengelolaan, dan pemasaran, serta tantangan yang ditemukan pada pelaksanaannya.

1. Peluang Pengembangan Sektor Pariwisata

Berdasarkan potensi wisata Kabupaten Bandung yang berada di wilayah selatan, sekaligus memiliki potensi sektor pertanian, konsep agrowisata merupakan peluang untuk dikembangkan. Secara umum konsep agrowisata mengandung pengertian suatu kegiatan perjalanan yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian.

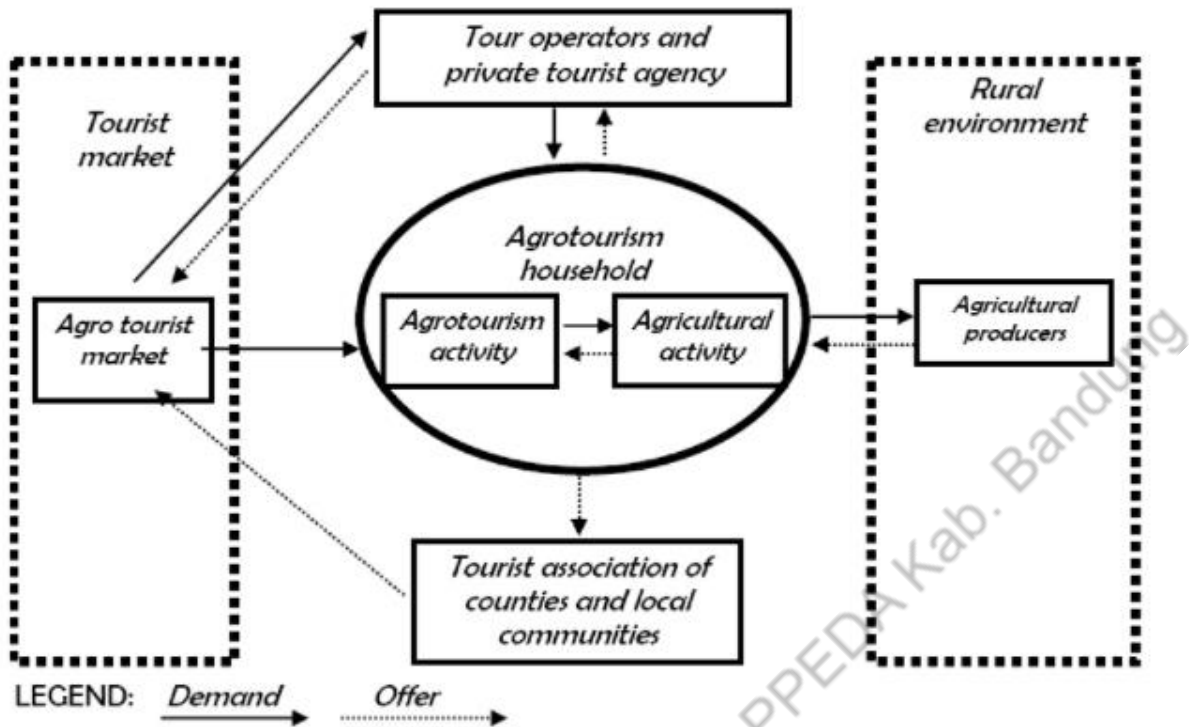
Pengertian tersebut mengacu pada unsur rekreatif yang memang sudah menjadi ciri kegiatan wisata, unsur pendidikan dalam kemasan paket wisatanya, serta unsur sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dan perdesaaan. Dari segi substansinya, kegiatan agrowisata lebih menitikberatkan pada upaya menampilkan kegiatan pertanian dan suasana perdesaan sebagai daya tarik utama wisatanya tanpa mengabaikan segi kenyamanan.

Pada dasarnya agrowisata merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan sumberdaya alam suatu daerah perkebunan, serta penghasil sayuran tertentu dan wilayah perdesaan berpotensi besar menjadi objek agrowisata. Berdasarkan kajian Sumarwoto (2019) potensi yang terkandung tersebut harus dilihat dari segi lingkungan alam, letak geografis, jenis produk, atau komoditas pertanian yang dihasilkan, serta saran dan prasarananya.

Pada gambar 6.4, di halaman selanjutnya, merupakan permintaan dan penawaran dalam rumah tangga agrowisata. Secara singkat mungkin dapat disebutkan bahwa agrowisata adalah suatu kegiatan yang menempatkan sektor primer (pertanian) di kawasan sektor tersier (pariwisata), agar perkembangan sektor primer itu dapat lebih dipercepat, dan petani mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata yang memanfaatkan sektor pertanian tersebut.

Berdasarkan Goodwin (2000) Agrowisata dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor primer atau sektor primer (pertanian) tidak semakin terpinggirkan dengan perkembangan kegiatan di sektor pariwisata. Kegiatan agrowisata dapat disebutkan sebagai kegiatan yang memihak pada rakyat miskin.

Gambar 6.4 Permintaan dan penawaran dalam rumah tangga agrowisata




Sumber: Bršćić, 2003

2. Tantangan Pengembangan Sektor Pariwisata

Berikut beberapa tantangan yang ditemukan pada pelaksanaannya terkait pengembangan daya tarik wisata, atraksi wisata, akses terhadap daya tarik wisata, kelengkapan fasilitas wisata.

- Sektor ini terhambat karena pandemi, protokol kesehatan dan kebijakan PSBB yang secara langsung mengurangi jumlah kunjungan wisata
- Banyaknya objek wisata unggulan di Kabupaten Bandung yang dimiliki/dikelola bukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sehingga serapan Penghasilan Asli Daerah (PAD) sektor ini rendah.
- Beberapa infrastruktur penunjang pariwisata seperti transportasi ke tempat wisata, kualitas jalan, dan penerangan belum sepenuhnya terfasilitasi untuk objek wisata di Kabupaten Bandung.
- Tingkat okupansi hotel/penginapan, terutama di lokasi yang berdekatan dengan destinasi wisata, masih belum optimal. Ini dikarenakan wisatawan cenderung memilih menginap di Kota Bandung.
- Belum banyaknya skema kerjasama wisata, terutama pada wilayah Cekungan Bandung sehingga fasilitas wisata di masing-masing objek wisata terfragmentasi dan terkesan tidak lengkap.



**7. Rumusan SWOT
Pengembangan Sektor
Ekonomi Unggulan**

DA Kab. Bandung



Rumusan SWOT pengembangan sektor ekonomi unggulan diuraikan untuk setiap sektor; pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata dengan hasil sebagai berikut:

7.1 SWOT Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Strengths

- 1) **Kabupaten Bandung termasuk ke dalam WP KK Cekungan Bandung.** Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP KK Cekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan. Fokus pengembangan Kabupaten Bandung dalam kerangka WP KK Cekungan Bandung yaitu diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, agroindustri, wisata alam, tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan.
- 2) **Kabupaten Bandung memiliki kondisi hidrologi yang cukup melimpah,** baik itu sumber daya air yang berupa air bawah tanah maupun air permukaan. Pemanfaatan sumber air permukaan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan perikanan. Adapun pemanfaatan air tanah (kedalaman 60-200 m) dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
- 3) Sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung didominasi oleh Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi dengan cakupan seluas 36.135,45 Ha atau sebesar 20,73% dari total luas wilayah Kabupaten Bandung. Adapun luasan terendah yaitu hutan, jalur hijau, dan taman kota seluas 0.66 Ha atau 0,0004%

dari luas Kabupaten Bandung. Meninjau persentase luas penggunaan lahan ini tampak bahwa **ketersediaan di Kabupaten Bandung potensial dalam mendukung fungsi pertanian.** Selain itu, penggunaan lahan ini berpotensi sebagai kawasan resapan air.

Weaknesses

- 1) **Produktivitas budidaya pertanian masih belum optimal** menjadi masalah pertama yang dihadapi sektor ini. Hal ini terjadi karena belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian dan masih tingginya biaya produksi budidaya pertanian; rendahnya kapasitas budidaya pertanian; kurangnya aksesibilitas ke lokasi budidaya pertanian; belum optimalnya pemanfaatan sumber air untuk pertanian; kualitas produk panen dan pasca panen masih rendah; berkurangnya luas lahan pertanian; dan tingginya ancaman hama dan penyakit.
- 2) **Budidaya pertanian yang belum ramah lingkungan** menjadi masalah kedua. Masalah ini muncul dilihat dari masih tingginya ketergantungan petani akan pupuk dan obat-obatan kimia; kurangnya pemahaman petani terkait dampak penggunaan pupuk terkait dampak penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia jangka panjang; ketersediaan pupuk organik masih rendah; nilai ekonomi pengguna pupuk kimia lebih menguntungkan. Selain itu, pengelolaan limbah peternakan masih belum optimal karena kurangnya pemahaman petani terkait pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, keterbatasan infrastruktur dan sarana pengelolaan limbah, dan belum adanya jaminan pemanfaatan hasil pengelolaan limbah ternak pada sub sektor lainnya.
- 3) Masalah ke tiga adalah **masih kurang optimalnya kualitas dan kuantitas SDM.** Masih kurangnya jumlah petani karena pendapatan non pertanian lebih menarik minat dan regenerasi petani

yang rendah. Sementara itu, masih kurangnya pemahaman petani terkait penggunaan teknologi pertanian terjadi karena kelas kelompok tani pemula masih mendominasi dan terjadi dinamika kelompok tani yang belum berorientasi bisnis.

Opportunities

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi didorong oleh pertumbuhan beberapa sektor. Pertanian tumbuh rata-rata 3,7% secara nasional per tahun, di antaranya melalui perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas. Sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang mandiri menjadi salah satu sasaran pembangunan Jawa Barat. Selain itu, pemerataan pembangunan akan mendorong penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata, dan industri.

Threats

- 1) Beberapa hal yang menjadi tantangan adalah masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, juga rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan. Pada sektor perikanan pemasaran masih bersifat individu, belum adanya integrasi hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat

penguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut.

- 2) Pada sektor kehutanan masih terdapat tantangan yang ditandai oleh degradasi lahan yang masih tinggi di daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan.

7.2 SWOT Sektor Industri Pengolahan

Strengths

- 1) **Industri kecil, baik industri non formal maupun formal, mengalami peningkatan.** Industri kecil formal dan non formal di tahun 2018 berjumlah 9.233 unit. Terdapat juga 346 unit industri menengah dan 140 unit industri besar. Angka tersebut terus meningkat di tahun 2020 dengan jumlah industri kecil formal dan non formal di Kabupaten Bandung berjumlah 12.184 unit, jumlah industri menengah mencapai 902 unit, dan terdapat peningkatan jumlah industri besar menjadi 143 unit.
- 2) **Sektor industri memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung,** terutama industri pengolahan. Kemudian jika dilihat kontribusi masing-masing sektor, sektor PDRB dengan rata-rata kontribusi paling besar dari tahun 2010-2020 ialah sektor industri pengolahan (50,97%). jika dilihat dari laju pertumbuhan setiap sektor, sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan peningkatan nominal paling tinggi selama tahun 2011-2020, yaitu sebanyak 16,6 triliun rupiah. Berdasarkan data industri tahun 2018 tersebut, secara umum dapat

disimpulkan bahwa industri yang ada di Kabupaten Bandung didominasi oleh jenis industri tekstil, serta pakaian dan sepatu. Selain itu, industri makanan dan minuman juga berkontribusi cukup tinggi dalam nilai produksi industri Kabupaten Bandung.

- 3) **Sektor ekonomi dengan nilai keunggulan kompetitif paling tinggi adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.** Hasil ini tidak lepas dari potensi industri dan perdagangan Kabupaten Bandung yang tinggi berkaitan dengan posisi Kabupaten Bandung dalam konstelasi Bandung Raya.

Weaknesses

- 1) **Masih rendahnya tingkat daya saing industri besar dan industri menengah (IKM)** terjadi karena beberapa hal yaitu masih lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri menjadi rendah; bahan baku, barang modal dan bahan penolong masih tergantung pada produk impor; masih rendahnya penerapan standar industri; belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang rencana pembangunan industri daerah; belum optimalnya pengelolaan manajemen usaha dan akses permodalan; belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki para IKM; belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku IKM; belum optimalnya kualitas SDM pelaku IKM; Belum optimal pengelolaan modal atau pembiayaan/ manajemen usaha; belum optimalnya legalitas usaha/legalitas produk; belum optimalnya penggunaan media promosi/ media sosial; dan belum terbentuknya asosiasi industri per komoditi IKM.
- 2) Selain itu, masalah kedua adalah **masih kurangnya IKM yang berpotensi Ekspor** karena rendahnya peluang usaha bagi IKM. Hal ini terlihat dari belum tersedianya informasi peluang

usaha bagi IKM. Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap bisnis impor juga jadi penyebab kurangnya potensi ekspor. Beberapa akar masalahnya adalah kurangnya informasi pasar, kurangnya pemahaman terhadap regulasi perdagangan luar negeri, dan kurangnya modal.

Opportunities

- 1) **Kawasan Kota Soreang Terpadu Berkelanjutan (KSTB)** kemungkinan akan berkembang dan semakin pesat terkait kedudukan strategisnya di lingkup regional Provinsi Jawa Barat dan nasional. Sebagaimana umumnya pusat-pusat pemerintahan wilayah administratif lain di Indonesia, kawasan KSTB juga menjelma menjadi pusat komersial dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, terlebih lagi dengan adanya potensi dalam sektor industri dan perdagangan.
- 2) **Membaiknya perekonomian nasional dan regional** merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Permintaan *output* diharapkan dapat terjadi setelah keadaan ekonomi membaik. Arus bahan baku utama impor juga diharapkan tidak mengalami kendala agar produksi dapat berjalan dan ditingkatkan. Pulau Jawa dan Bali tetap menjadi wilayah yang memiliki porsi (*share*) terbesar dalam perekonomian didorong oleh pergeseran struktur ekonomi ke arah sektor jasa dengan tetap mempertahankan pertumbuhan di sektor industri pengolahan.
- 3) **Adanya insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi** (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital), selain dari administrasi perpajakan dilakukan berbagai pembaruan sistem sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan konsumen.

- 4) **Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital membuka peluang peningkatan produktivitas dan efisiensi** dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang, di antaranya inklusi keuangan melalui *fin-tech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*.

Threats

- 1) Pada tahun 2020, **kinerja sektor industri dipengaruhi oleh pandemi COVID-19** dan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,27%. Hal ini terjadi karena melemahnya permintaan *output* dari dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, industri yang tergantung terhadap impor bahan baku juga mengalami kendala karena ketersediaannya berkurang. Pembatasan sosial sangat memukul seluruh pelaku usaha di Kabupaten Bandung.
- 2) **Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0.**, di sisi lain perkembangan industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. Perusahaan-perusahaan yang memiliki daya serap teknologi yang rendah tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah dapat menerapkan teknologi.

7.3 SWOT Sektor Perdagangan

Strengths

Terdapat berbagai jenis lapangan usaha yang menjadi mata pencaharian bagi penduduk Kabupaten Bandung. Lapangan usaha “Perdagangan besar eceran, rumah makan,

dan hotel” menjadi lapangan usaha dengan **jumlah pekerja tertinggi** yaitu 470.717 orang, disusul sektor industri sebanyak 464.339 orang dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 205.749 orang.

- 1) **Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi tertinggi** terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Selama kurun lima tahun terakhir, sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor paling besar ketiga setelah sektor industri dan pertanian. Perkembangan sektor perdagangan Kabupaten Bandung tahun 2016-2020 memperlihatkan jumlah nilai ekspor barang dan jasa yang semakin tinggi.
- 2) **Kemudahan perizinan membentuk daya saing investasi di Kabupaten Bandung.** Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyediakan prosedur perizinan yang terintegrasi dalam satu pintu pelayanan, sehingga memudahkan calon investor dalam mengurus proses perizinan. Lingkup perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin usaha perdagangan, izin usaha industri dan izin penyelenggaraan reklame. Melalui kemudahan proses perizinan diharapkan akan menjadi insentif dan stimulus bagi calon investor untuk menjalankan kegiatan di Kabupaten Bandung.

Weaknesses

- 1) **Belum efektif dan efisien jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis** terlihat dari belum optimalnya pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang timbul dari beberapa akar masalah. Akar masalah pertama adalah masih banyak pedagang ditingkat eceran yang

menjual barang kebutuhan pokok dan barang strategis di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kedua, belum tersedianya data tentang produksi kebutuhan dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan. Mekanisme pemantauan, pengawasan harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang strategis juga belum optimal. Terakhir, belum adanya data tentang perdagangan antar wilayah.

- 2) **Pengawasan pelaku usaha dan pergudangan yang belum optimal** muncul karena masih adanya pelaku usaha toko modern dan pergudangan yang belum berizin, dilihat dari kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi. Di samping itu anggaran penunjang untuk promosi produk masih kurang. Kurangnya anggaran menyebabkan pengembangan kerja sama dan kemitraan belum dapat ditingkatkan, menimbulkan kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi dan pengenalan produk ke masyarakat luas dan terakhir menyebabkan kurangnya pemasaran produk dalam negeri.
- 3) **Belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan** ditunjukkan dengan masih adanya pelaku usaha toko modern dan pergudangan yang belum berizin sehingga pengawasan menjadi lemah seperti kurang pengawasan terhadap gudang; gudang tidak terdata dan belum memiliki izin; dan kurang pengawasan terhadap toko modern. Dalam waralaba juga banyak pelaku usaha yang belum memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba), hal ini diduga karena belum maksimalnya sosialisasi terkait STPW. Terakhir, pelayanan kemetrolgian legal masih belum optimal, dilihat dari kurangnya SDM penera yang dimiliki; masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang

kegiatan kemetrolgian legal; belum optimalnya pelayanan metrologi legal atas permintaan wajib tera ulang; belum terlaksananya pelayanan sidang tera/tera ulang di pasar pemda/pasar desa secara menyeluruh; pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya barang dalam keadaan terbungkus pasca tera/tera ulang belum optimal; dan kurangnya sosialisasi/ penyuluhan kemetrolgian kepada masyarakat.

- 4) **Daya saing pasar rakyat masih rendah** dikarenakan sarana dan prasarana pasar rakyat belum memenuhi standar pasar sehat, pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat masih kurang. Pengelolaan pasar rakyat juga belum optimal, dilihat dari masih rendahnya kompetensi pengelola pasar rakyat. Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang menjadi salah satu penyebab masih rendahnya jiwa kewirausahaan pedagang pasar rakyat, yang akhirnya berpengaruh terhadap daya saing pasar rakyat. Selain itu, masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar dan kurang tertatanya PKL di sekitar pasar rakyat menjadi penyebab daya saing yang rendah.

Opportunities

- 1) **Sebelum pandemi, perekonomian domestik terus tumbuh rata-rata 5,0% per tahun** sepanjang 2015-2018, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang di dunia sebesar 4,5% per tahun. Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai kebijakan struktural, antara lain melalui kebijakan perbaikan iklim investasi, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta penguatan daya beli.
- 2) **Kinerja perdagangan internasional yang membaik** akan mendorong penguatan stabilitas eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit

transaksi berjalan menjadi 1,6% PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD 168,7 miliar pada 2024. Secara keseluruhan, ekspor barang dan jasa tumbuh rata-rata 4,8% per tahun. Peningkatan ekspor barang 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor.

- 3) Tantangan lain yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan **pengembangan SDM dan persaingan usaha**. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran non-tunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan

Tantangan

- 1) **Terjadinya pandemi COVID-19** yang terjadi pada awal bulan Maret 2020 berpengaruh terhadap tataran nasional maupun internasional. Pandemi ini juga mempengaruhi pembangunan dan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi dunia terganggu, (*Foreign Direct Investment/FDI*) mengalami penurunan 30% - 40%, perdagangan dunia turun 13 - 32%. Kondisi ini juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun sangat tajam serta tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat
- 2) **Kontribusi perdagangan terhadap PDRB Jawa Barat yang menurun** menjadi tantangan di sektor ini. Hal ini

disebabkan adanya dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

- 3) **Risiko ketidakpastian** masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan melambat. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya adalah baru bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagangan, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik Timur Tengah.
- 4) **Tidak berkembangnya industri pengolahan** berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB juga terus menurun dari 41,0% pada 2000 menjadi 21,0% pada 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3,0% PDB.

7.4 SWOT Sektor Pariwisata

Strengths

- 1) **Potensi wilayah Kabupaten Bandung tidak hanya strategis di level Kabupaten Bandung, tetapi di level nasional dan Provinsi Jawa Barat**. Dalam level nasional, Kabupaten Bandung merupakan kawasan potensial dari sisi kepentingan ekonomi yang oleh pemerintah pusat telah ditetapkan

sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung. Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenal lagi Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten. Hanya ada Kawasan Strategis Nasional. KSN Cekungan Bandung dipandang penting dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari KSN cekungan Bandung, pengembangan Kabupaten Bandung dilakukan searah dengan arahan nasional untuk pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata dan perkebunan.

- 2) **Kabupaten Bandung memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata baik desintasi wisata alam dan budaya.** Kabupaten Bandung banyak memiliki area dengan panorama alam yang menjadi daya tarik wisata, terutama di area yang berlokasi di selatan dan utara Kabupaten. Di samping kawasan pariwisata alam, Kabupaten Bandung juga kaya akan kawasan wisata budaya. Kawasan pariwisata Kabupaten Bandung tidak hanya menjadi tujuan utama kunjungan domestik, tetapi juga menjadi tujuan wisata mancanegara.
- 3) **Kabupaten Bandung didominasi wisata alam dan agro.** Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung antara lain Situ Cileunca, Situ Patengan, Kolam Air Panas Alami Walini, Kolam Air Panas Alami Cimanggu, Kolam Air Panas Alami Cibolang, Perkemahan Rancaup, Tebing Keraton, Curug Cinulang. Banyak objek wisata di Kabupaten Bandung membangkitkan perekonomian Kabupaten Bandung.

Weaknesses

Terdapat beberapa masalah pokok yang jadi kelemahan di sektor ini, yaitu masih belum maksimalnya pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Bandung serta kurangnya aksesibilitas dan amenitas dalam mendukung kegiatan pariwisata;

- 1) **Masih belum maksimalnya pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Bandung** terjadi karena belum banyaknya produk oleh-oleh yang menjadi ciri khas. Kreativitas warga lokal juga masih kurang dalam mengembangkan produk potensi daerah yang menjadi ciri khas dan menggambarkan Kabupaten Bandung. Pemasaran pariwisata dan budaya secara terpadu juga belum optimal disebabkan karena belum adanya konten pemasaran yang menyajikan daya tarik pariwisata dan budaya secara terpadu. Terakhir, pengembangan daya tarik wisata baru yang minim karena sangat terbatasnya lahan untuk pengembangan daya tarik wisata baru di Kabupaten Bandung, disebabkan mahalnya investasi di sektor pariwisata.
- 2) Masalah lainnya adalah **masih kurangnya aksesibilitas dan amenitas** dalam mendukung kegiatan pariwisata. Sarana dan prasarana pendukung di sekitar objek wisata belum bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan karena belum optimalnya integrasi daya tarik wisata dan sarana pendukung pariwisata. Tarif penginapan dan hotel juga mahal serta kurangnya pusat kuliner yang mumpuni disebabkan kurangnya pengunjung ke hotel yang ada di Kabupaten Bandung. SDM lokal dengan keahlian di bidang pariwisata juga masih kurang, tanda belum optimalnya dukungan pendidikan di bidang pariwisata. Masih terjadinya kemacetan jalan menuju objek wisata khususnya di hari libur karena aksesibilitas menuju objek wisata Kabupaten Bandung masih belum sesuai harapan (jalan kondisi baik dan kapasitas jalan yang belum bisa memenuhi kebutuhan wisatawan).

Opportunities

- 1) **Peluang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan tetap besar.** Peluang tersebut dikontribusikan sektor pariwisata serta

ekonomi kreatif dan digital. Kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa meningkat dari USD 11,2 miliar di tahun 2014 menjadi USD 19,3 miliar di tahun 2018. Kenaikan devisa ini dihasilkan dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmati wisata alam dan budaya di Indonesia dari 9,4 juta orang di tahun 2014 menjadi 15,8 juta orang pada tahun 2018 di Indonesia. Secara total, kontribusi sektor pariwisata kepada perekonomian nasional diperkirakan meningkat dari 4,2% di tahun 2015 menjadi 4,8% di tahun 2018.

- 2) **Pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif** yang mencapai 5,06% di tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor ekonomi kreatif juga meningkat dari 15,5 juta orang di tahun 2014 menjadi 17,7 juta orang di tahun 2017. Kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi dan budaya diperkirakan dapat mendorong geliat sektor pariwisata nasional
- 3) **Percepatan pembangunan** infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan menjadi kunci penyebaran investasi. Aspek-aspek tersebut juga menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan di pulau Jawa. Pemerintah nasional dalam beberapa tahun ke depan sudah memfokuskan peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Pengembangannya akan difasilitasi untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya.
- 4) **Pengembangan beberapa jenis pariwisata nasional** saat ini yang mencakup wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); wisata budaya (*heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang

difokuskan pada *Cultural Heritage Regeneration*, dan wisata desa); wisata buatan (*meeting-incentive-convention-exhibition/MICE*, *yacht and cruise*, dan wisata olahraga) dapat membuka kesempatan bagi wisatawan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Threats

- 1) **Dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata karena penutupan destinasi wisata** berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada bulan Mei 2020: penutupan 411 destinasi wisata dengan jumlah tenaga kerja terdampak 5.179 orang; penutupan 1.076 hotel dengan jumlah tenaga kerja terdampak 12.143 orang; usaha ekonomi kreatif yang berhenti berproduksi sebanyak 626 unit, dengan jumlah tenaga kerja terdampak 14.991 orang; usaha biro perjalanan yang berhenti aktivitasnya sebanyak 251 unit dengan jumlah tenaga kerja terdampak 1.107; jumlah tenaga seni dan budaya yang terdampak 15.034 orang; Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Jawa Barat Maret 2020 mencapai 28,73% turun 17,74 poin dibandingkan TPK Februari 2020 yang mencapai 46k,47%.
- 2) **Upaya peningkatan investasi dan ekspor, termasuk pariwisata nasional belum optimal.** Pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa kendala: belum terpadunya kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan di level nasional (Pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat) dalam penyelenggaraan diplomasi ekonomi; belum adanya mekanisme koordinasi penyelenggaraan investasi; belum harmonisasinya regulasi dalam negeri dan belum optimalnya penetrasi pasar pariwisata Indonesia.

Tabel 7.1 SWOT sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bandung

| | <i>Strenghts</i> | <i>Weaknesses</i> |
|-------------|--|--|
| Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Termasuk ke dalam WP KK Cekungan Bandung; - Memiliki kondisi hidrologi yang cukup melimpah; - Ketersediaan lahan yang potensial dalam mendukung fungsi pertanian; | <ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas budidaya pertanian masih belum optimal; - Budidaya pertanian yang belum ramah lingkungan; - SDM pertanian yang masih kurang optimal kualitas dan kuantitasnya; |
| Industri | <ul style="list-style-type: none"> - Industri kecil, baik formal maupun non formal, mengalami peningkatan; - Sektor industri memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB; - Sektor industri merupakan sektor dengan nilai keunggulan kompetitif paling tinggi; | <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya tingkat daya saing industri besar dan menengah; - Masih kurangnya IKM yang berpotensi ekspor; |
| Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki jumlah pekerja tinggi, paling tinggi dari sektor unggulan; - Kontribusi PDRB yang tinggi; - Perijinan yang relatif mudah; | <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis yang belum efektif dan efisien; - Pengawasan pelaku usaha dan pergudangan yang belum optimal; - Daya saing pasar rakyat yang masih rendah; |
| Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi strategis - Daya tarik wisata alam dan budidaya; - Potensi besar pengembangan wisata alam dan agro; | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya aksesibilitas dan amenities; - Pengembangan produk masih kurang; |
| | <i>Opportunities</i> | <i>Threats</i> |
| Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian regional dan nasional yang relatif tinggi; - Dukungan kebijakan pengembangan pertanian dari Pemprov Jabar; | <ul style="list-style-type: none"> - Degradasi lahan di DAS; - Aktivitas ekonomi berlebihan di daerah hulu DAS; |
| Industri | <ul style="list-style-type: none"> - Minat regional dan nasional terhadap Kawasan Kota Soreang Terpadu Berkelanjutan (KTSB); - Insentif fiskal dari nasional terhadap pelaku industri; - Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital membuka peluang peningkatan produktivitas dan efisiensi; | <ul style="list-style-type: none"> - Industri global yang terdampak oleh pandemi; - Konteks keamanan dan persaingan global dalam revolusi industri 4.0 |
| Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan dan tren positif di tingkat regional; - Dukungan pengembangan SDM dan persaingan usaha di tingkat nasional; | <ul style="list-style-type: none"> - Penurunan FDI akibat pandemi; - Tren penurunan di tingkat regional; - Risiko ketidakpastian; |
| Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan regional dan nasional terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan digital; - Pengembangan potensi wisata tingkat nasional | <ul style="list-style-type: none"> - Penutupan akses nasional dan regional akibat pandemi; - Kebijakan pembatasan internasional, memengaruhi ekspor; |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

8. Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung



8.1 Konsep Penyusunan Masterplan Perekonomian

Penyusunan masterplan perekonomian merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengoptimalkan pengembangan potensi perekonomian daerah dalam mewujudkan peningkatan daya saing wilayah Kabupaten Bandung. Masterplan perekonomian ini difokuskan pada 4 (empat) sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bandung yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor pariwisata.

Konsep pengembangan pada masterplan ini adalah mengoptimalkan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang telah terbentuk di Kabupaten Bandung, serta mendorong kerjasama perekonomian desa dan kota melalui simpul-simpul inovasi. Pusat-pusat kegiatan ekonomi diidentifikasi melalui konsep *auto-correlation* dalam bentuk kluster atau *hotspots* perekonomian yang terbentuk di Kabupaten Bandung. Simpul inovasi merupakan sarana untuk mengorkestrasikan sumber daya ekonomi, serta sebagai elemen penting pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah sebagai wadah penciptaan inovasi yang dapat mengintegrasikan aktivitas ekonomi di pedesaan dan perkotaan.

Masterplan perekonomian direncanakan melalui 3 (tiga) tahapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tahap pertama adalah tahap pre-adopsi, berlangsung pada tahun pertama, yang dimaksudkan untuk persiapan dan menjalin kerjasama. Selain itu, tahap ini juga memberikan penekanan pada penyesuaian terhadap kondisi pandemi. Tahap kedua adalah tahap adopsi, berlangsung selama 3 (tiga) tahun, yang fokus pada mewujudkan rencana pengembangan sektor ekonomi serta perwujudan ruang dan pergerakan. Tahap ketiga adalah tahap pasca-adopsi, berlangsung pada tahun terakhir, yang mana pada tahap ini diharapkan telah dapat dirasakan manfaat dari masterplan, serta

melakukan evaluasi dan perencanaan untuk masa depan. Meski demikian, evaluasi pada dasarnya dilakukan setiap tahun, sehingga kebijakan bisa merespons terhadap perubahan yang terjadi dengan sangat cepat.

8.2 Visi Masterplan Perekonomian

Visi masterplan perekonomian Kabupaten Bandung dikembangkan dari visi misi Kabupaten Bandung dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan pengembangan perekonomian di masa depan. Visi Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung adalah:

“Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera dengan Pengembangan Perekonomian yang Inovatif dan Berdayasaing”.

Kabupaten Bandung yang Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) merupakan visi Kabupaten Bandung 2021-2026, sehingga kata kunci pengembangan perekonomian Kabupaten Bandung dalam masterplan ini adalah pengembangan ekonomi yang inovatif dan berdayasaing.

Ekonomi yang inovatif dikembangkan melalui simpul-simpul inovasi, seperti simpul pangan. Simpul inovasi (*innovation hub*) merupakan sarana untuk mengorkestrasikan sumber daya ekonomi, serta sebagai elemen penting pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah karena sebagai wadah penciptaan inovasi yang dapat mengintegrasikan aktivitas ekonomi di pedesaan dan perkotaan, selain elemen simpul pangan.

Ekonomi yang inovatif juga menitikberatkan pada pengembangan software dan brain-ware bisnis pelaku usaha mikro dan kecil serta lemahnya komunikasi dan hubungan kerja/kerja sama bisnis antar Lembaga pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi/lembaga penelitian, Lembaga keuangan, dan komunitas ekonomi

serta manajemen satu data pembangunan ekonomi yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku ekonomi.

Dari sisi ekonomi wilayah, pengembangan simpul inovasi di Kabupaten Bandung merupakan pusat layanan inovasi kluster ekonomi dalam memperluas pelaku usaha dengan peluang dalam peningkatan kualitas dan produktivitas serta mendorong orientasi kewirausahaan pelaku usaha yang dikelola oleh komunitas pelaku ekonomi bersama-sama pemerintah, perguruan tinggi/lembaga penelitian, sektor usaha dan lembaga lainnya yang terlibat dan penunjang.

Ekonomi yang berdayasaing berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi lokal. Dalam mempersiapkan perekonomian daerah yang berdaya saing, maka beberapa faktor perlu didorong dan ditingkatkan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah peningkatan daya saing sektor perdagangan, industri besar dan industri kecil menengah, peningkatan daya saing sektor pertanian serta pariwisata. Selain itu peningkatan investasi juga merupakan hal utama dalam mendukung perekonomian daerah yang berdaya saing.

Target capaian yang diusung pada masterplan perekonomian ini adalah peningkatan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. Diharapkan pada akhir tahun rencana, Kabupaten Bandung mengalami peningkatan nilai PDRB per kapita menjadi di atas nilai rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai target tersebut, jika melihat tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung saat ini, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung ditargetkan mencapai rata-rata 10-12% per tahun selama masa pelaksanaan masterplan.

Terdapat 4 (empat) indikator utama dalam mewujudkan target capaian tersebut; Pertama, peningkatan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan target pertumbuhan mencapai rata-rata 13-17% per tahun; kedua, peningkatan PDRB sektor industri pengolahan dengan target pertumbuhan mencapai rata-rata 10-14% per tahun; ketiga, peningkatan PDRB sektor perdagangan dengan target pertumbuhan mencapai 11-15% per tahun; keempat, peningkatan kunjungan wisatawan dengan target pertumbuhan mencapai 9-13% per tahun.

Gambar 8.1 Konsep masterplan perekonomian Kabupaten Bandung 2021-2026



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Strategi utama pelaksanaan masterplan ini berkaitan dengan pengembangan 4 (empat) sektor ekonomi unggulan. Masing-masing strategi utama/sektor unggulan memiliki program utama yang diselenggarakan selama pelaksanaan masterplan. Strategi utama tersebut ditunjang dengan strategi dasar yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, inovasi dan kreativitas, informasi dan teknologi, infrastruktur, regulasi, kelembagaan, pembiayaan dan investasi, serta koordinasi dan kerjasama.

8.3 Milestones

Masterplan ini diuraikan ke dalam 3 (tiga) tahapan utama yaitu; pertama, tahap pre-adopsi sebagai tahapan persiapan perwujudan masterplan sekaligus pemulihan kondisi pasca pandemi atau penyesuaian terhadap kondisi *new normal*, tahap ini berlangsung selama dua tahun hingga tahun 2022; kedua, tahap adopsi yang merupakan tahap perwujudan strategi dan program utama dalam masterplan, tahap ini berlangsung selama tiga tahun; ketiga, tahap pasca adopsi, yaitu pada tahun terakhir rencana yang mana difokuskan sebagai evaluasi dan perencanaan kembali untuk pengembangan di masa depan.

Tahapan perencanaan masterplan secara umum diawali dengan pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian ini merupakan *core*/inti pengembangan yang berkaitan dengan sektor unggulan lainnya. Tahap pertama dimulai dengan perlindungan lahan pertanian produktif terutama di kawasan-kawasan yang menjadi kluster unggulan pertanian, peningkatan produktivitas produk unggulan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta peningkatan kapasitas petani. Dengan diawali fokus pada pengembangan sektor pertanian, diharapkan telah tercipta upaya sistematis dalam perlindungan lahan pertanian produktif, telah tercipta integrasi pada tingkat lokal; perdesaan dan perkotaan, serta telah

diinisiasi penguatan hubungan perkotaan dan perdesaan.

Pada tahun kedua, fokus pengembangan masih pada sektor pertanian, hanya saja telah diinisiasi kolaborasi antara sektor pertanian dan sektor pariwisata, yang mana pada praktiknya telah terdapat bentuk integrasi seperti melalui agrowisata di Kawasan Bandung Selatan. Langkah ini diambil karena sektor pariwisata merupakan sektor yang paling efektif dalam memperkenalkan Kabupaten Bandung secara luas. Pada akhir tahun kedua juga mulai diinisiasi hubungan antara sektor pertanian dengan industri pengolahan. Diharapkan pada tahun kedua ini telah tercipta hubungan sektor pertanian dengan industri (pengolahan produk pertanian), telah tercipta hubungan sektor pertanian dengan pariwisata (agrowisata), telah tercipta simpul pangan dan simpul inovasi serta pusat penelitian dan teknologi.

Pada tahun ketiga, fokus pengembangan terdapat pada sektor industri pengolahan dan kaitannya dengan sektor perdagangan dan sektor pariwisata. Pada tahap ini sektor pertanian telah mengalami peningkatan produktivitas dan mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Produk-produk tersebut telah diolah dan dipasarkan di daerah tujuan wisata. Di sisi lain, sektor pertanian juga telah mampu memasok bahan baku untuk industri. Pada tahap ini juga mulai diinisiasi keterkaitan antara ketiga sektor tersebut dengan sektor perdagangan pada skala yang lebih luas. Dengan demikian, pada tahap ini telah tercipta hubungan sektor industri dengan perdagangan (produk industri menuju pasar), telah tercipta hubungan sektor industri dengan perdagangan (produk industri menuju pasar), telah tercipta keterkaitan simpul perkotaan dan perdesaan.

Pada tahun keempat, telah tercipta integrasi antara keempat sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung. Pengembangan difokuskan pada sektor perdagangan terutama dalam membuka akses terhadap pasar yang lebih luas. Produk pertanian telah diolah oleh industri lokal dan

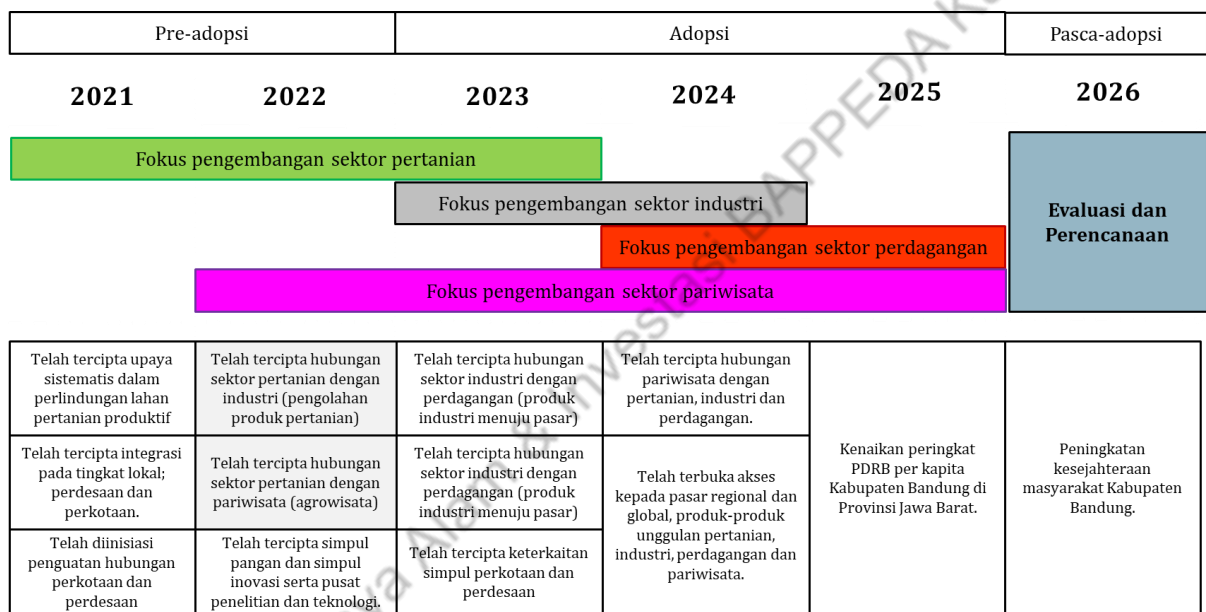
dipasarkan bukan hanya di daerah tujuan wisata, tetapi juga mulai menjadi produk unggulan ekspor.

Pada tahun kelima, fokus pengembangan ada pada sektor perdagangan dan pariwisata. Diharapkan Kabupaten Bandung telah menjadi salah satu tujuan wisata utama di Jawa Barat dan Nasional. Produk hasil industri Kabupaten Bandung, terutama yang berbahan dasar produk pertanian, telah dikenal luas. Kabupaten Bandung telah mengalami peningkatan laju pertumbuhan

ekonomi dan dalam tren positif menuju peningkatan peringkat PDRB per kapita di Jawa Barat. Pada tahap ini juga mulai diinisiasi evaluasi dan perencanaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan masterplan.

Pada tahap akhir, atau tahap pasca adopsi; Diharapkan telah terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Pada tahap ini juga dilakukan perencanaan kembali, dengan hasil evaluasi dari pelaksanaan selama 5 tahun pelaksanaan.

Gambar 8.2 Milestones masterplan perekonomian Kabupaten Bandung



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

8.4 Konsep Ruang dan Pergerakan

Masterplan ini juga memberi penekanan pada konteks ruang dan pergerakan. Konsep dirumuskan berdasarkan hasil analisis mengenai potensi sektor ekonomi unggulan. Terdapat 3 unsur dalam konsep ini yaitu ekosistem, simpul dan pergerakan.

Pertama, terdapat dua ekosistem dalam masterplan ini yaitu ekosistem pedesaan dan ekosistem perkotaan, dengan lokasi:

1) Ekosistem pedesaan

Ekosistem pedesaan ini merupakan wilayah dengan sektor ekonomi

unggulan utamanya pertanian dan pariwisata, serta industri dan perdagangan pada skala lokal. Terdapat satu wilayah ekosistem pedesaan utama dan dua wilayah ekosistem pedesaan penunjang.

Ekosistem pedesaan utama terletak di Bandung bagian Selatan, dengan wilayah yang tersebar di sekitar lokasi klaster pertanian dan pariwisata. Kawasan ini merupakan wilayah utama penghasil produk unggulan pertanian seperti hortikultura, perkebunan, buah-buahan dan peternakan, serta daya tarik wisata utama di Kabupaten Bandung.

Ekosistem pedesaan penunjang, meliputi dua lokasi yaitu di Kabupaten Bandung bagian Timur serta di Kabupaten Bandung bagian Utara. Kedua lokasi tersebut merupakan daerah penghasil produk pertanian unggulan pangan seperti padi dan jagung, biofarmaka, produk perikanan, serta hortikultura.

2) Ekosistem perkotaan

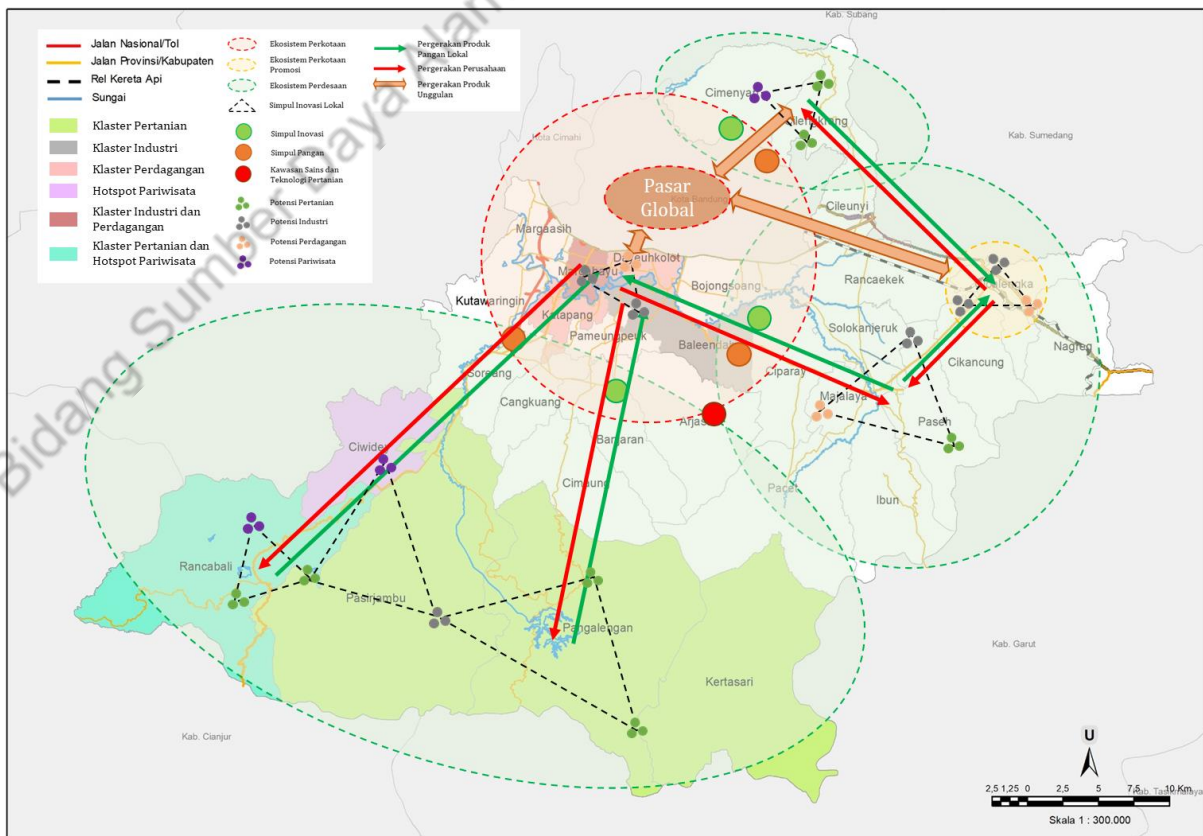
Ekosistem perkotaan ini merupakan wilayah dengan karakteristik ekonomi perkotaan berupa industri dan perdagangan, serta memiliki akses terhadap pasar yang lebih luas. Terdapat masing-masing satu lokasi ekosistem perkotaan utama, dan satu lokasi ekosistem perkotaan promosi.

Ekosistem perkotaan utama terletak di Kabupaten Bandung bagian Tengah yang berbatasan dengan Kota Bandung. Wilayah ini juga merupakan lokasi klaster industri dan perdagangan di Kabupaten Bandung. Industri unggulan

Kabupaten Bandung juga terletak di lokasi ini seperti industri pakaian jadi, peralatan dari karet dan plastik, industri kimia, industri kertas dan industri peralatan listrik. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat 5 (lima) pasar yang dikelola Pemda dengan lokasi yang berdekatan.

Ekosistem perkotaan promosi, merupakan ekosistem perkotaan yang didorong pengembangannya untuk membagi beban ekosistem perkotaan utama serta sebagai simpul ekonomi untuk pengembangan dua ekosistem pedesaan penunjang. Ekosistem perkotaan promosi terletak di Bandung bagian Timur. Di lokasi ini juga terdapat potensi industri pakaian dan tekstil, industri bahan kimia, karet, dan kertas serta terdapat pasar yang dikelola Pemda. Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena telah memiliki dukungan infrastruktur jalan dan rel kereta api yang baik, serta akses yang strategis.

Gambar 8.3 Konsep ruang dan pergerakan masterplan perekonomian Kabupaten Bandung



Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Kedua, simpul yang pada konsep ini merupakan titik yang menghubungkan potensi dan kegiatan perekonomian, serta pasar. Terdapat empat jenis simpul yaitu simpul lokal, simpul pangan, simpul inovasi, dan kawasan sains dan teknologi pertanian Arjasari.

1) Simpul lokal

Simpul lokal ini merupakan bentuk kerjasama potensi ekonomi antar sektor unggulan. Di ekosistem pedesaan, simpul lokal merupakan kerjasama antara potensi sektor pertanian dan pariwisata dalam bentuk, contohnya dalam bentuk agrowisata, atau pertanian dan industri makanan yang menghasikan makanan-makanan tradisional yang siap dipasarkan. Sedangkan di kawasan perkotaan, simpul lokal berupa kerjasama antara industri dengan perdagangan, yang mana produk-produk industri dipasarkan pada tingkat lokal.

2) Simpul inovasi

Simpul inovasi merupakan pusat kerjasama dan pengembangan produk, serta pusat koleksi dan distribusi. Letaknya berada di antara ekosistem pedesaan dan perkotaan, dan bersamaan atau berdekatan dengan simpul pangan. Terdapat setidaknya tiga simpul inovasi yang menghubungkan ekosistem pedesaan dan perkotaan.

3) Simpul pangan

Simpul pangan memiliki letak yang sama atau berdekatan dengan simpul inovasi, menekankan pada fungsinya sebagai pusat pusat koleksi dan distribusi. Yang menghubungkan ekosistem pedesaan dan perkotaan.

4) Kawasan sains dan teknologi pertanian Arjasari

Kawasan ini merupakan pusat inkubasi, penelitian, pengembangan teknologi, khususnya pertanian, industri hulu dan hilir yang berkaitan dengan pertanian, perdagangan digital, serta penguatan investasi pariwisata, yang berlokasi di Kecamatan Arjasari.

Ketiga, pergerakan yang mana pada konsep ini meliputi tiga jenis pergerakan yaitu pergerakan produk pangan lokal, pergerakan perusahaan, dan pergerakan produk unggulan.

1) Pergerakan produk pangan lokal:

Pergerakan produk pangan lokal ini merupakan pergerakan produk unggulan pertanian dari simpul lokal di ekosistem pedesaan ke kawasan perkotaan. Terdapat setidaknya tiga pergerakan yaitu dari Selatan ke Tengah, dari Timur dan dan Utara ke Tengah; serta dari Timur dan Utara ke Perkotaan di Timur. Pergerakan ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur, utamanya kualitas jalan. Dengan demikian, perlu diperhatikan dukungan infrastruktur untuk rute-rute yang menjadi pergerakan pangan lokal.

2) Pergerakan perusahaan

Pergerakan perusahaan merupakan kebalikan dari pergerakan produk pangan lokal, yang mana pergerakan perusahaan khususnya perusahaan menengah dan besar yaitu dari ekosistem ekonomi perkotaan ke ekosistem ekonomi pedesaan. Pergerakan perusahaan ini juga memerlukan dukungan pengembangan infrastruktur. Dari pergerakan perusahaan ini diharapkan juga terdapat *sharing knowledge* terhadap masyarakat dan pelaku usaha lokal.

3) Pergerakan produk unggulan

Pergerakan produk unggulan ini, idealnya merupakan pergerakan produk hasil olahan dari industri di Kabupaten Bandung, jika memungkinkan dengan menggunakan bahan baku yang bersumber dari Kabupaten Bandung. Asumsi pasar regional dan nasional, serta pasar global, diasumsikan melalui Kota Bandung. Meski demikian, beberapa UMKM dan industri di Kabupaten Bandung sudah secara mandiri menginisiasi akses terhadap pasar global.

8.5 Strategi dan Program Utama

Pertanian

Fokus pembangunan di sektor pertanian harus terfokus pada upaya pertanian *on farm* dan *off farm*. Pertanian *off farm* merupakan proses yang berhubungan langsung dengan budidaya pertanian, seperti menyemai bibit, mengawinkan hewan ternak, memupuk, memberi pakan ternak, mengendalikan hama dan penyakit, panen, dan lainnya. Sementara *off farm* yaitu proses komersialisasi hasil-hasil budidaya pertanian, seperti pedagang, pengepul dan lain-lain. Tidak optimalnya upaya pertanian *on farm* dan *off farm* memberikan konsekuensi rendahnya pendapatan para petani dan berdampak pada tingkat kesejahteraan, pada akhirnya akan mengurangi jumlah petani.

Rendahnya jumlah petani dapat didorong oleh peningkatan kesejahteraan melalui penguatan tiga program strategis, penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan ekspor, dan komando strategi pembangunan pertanian. Ketiga program tersebut saling terkait untuk peningkatan kesejahteraan petani. KUR merupakan program strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja dari sektor pertanian dari hulu ke hilir melalui akses yang mudah. Melalui program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat potensi pertanian di daerah Kabupaten Bandung. Tingkat suku bunga yang murah juga dapat menjadi stimulus akselerasi sektor pertanian.

Pemanfaatan teknologi, inovasi, jejaring dan kerja sama yang kuat sangat dibutuhkan untuk membuka akses informasi terkait potensi komoditas ekspor di Kabupaten Bandung dan memiliki tujuan ekspor yang bisa diakses melalui peta potensi ekspor dan IMACE (*Indonesia Maps of Agriculture Commodities Export*). Selain itu, kemitraan dapat dibangun, salah satunya dengan FTA (*Free Trade Agreement*) Center dari Kementerian Perdagangan. FTA Center dapat membantu terkait layanan peningkatan kapasitas ekspor melalui berbagai kegiatan

seperti *webinar*, *workshop*, dan *coaching clinic*.

Sektor pertanian juga harus diperkuat dengan pembentukan kelembagaan komando strategi pembangunan pertanian. Komando ini dapat digunakan untuk memperkuat penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan. Artificial intelligence seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pengendali AWR (*Agriculture War Room*). Kendali ini untuk pengatur lalu lintas data pertanian yang bisa berubah-ubah setiap hari. Kelengkapan data pertanian, bahkan secara *real time* dapat menjadi hal yang dibutuhkan untuk menarik investasi di sektor ini. Investasi yang masuk di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nilai pertanian dan kesejahteraan, khususnya bagi petani.

Selain itu, strategi pengembangan pertanian, yang tercantum di dalam RPJMD adalah pengembangan logistik pangan. Pengembangan logistik pangan dititikberatkan pada peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat Kabupaten Bandung, juga pada peningkatan kesejahteraan petani. Titik fokus pada pengembangan logistik pangan adalah menata dan memperkuat rantai pasok pangan dalam pendekatan deglobalisasi pangan, yakni penguatan produksi pangan lokal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan swasembada pangan sebagai akibat dampak terganggunya jalur distribusi pangan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Pembatasan perdagangan ekspor-impor di wilayah Indonesia yang mengakibatkan daerah perlu memperkuat ketahanan pangan sendiri melalui pengembangan logistik pangan. Selain itu, menghadapi tantangan adanya paparan virus COVID-19, pemerintah juga perlu mulai mensosialisasikan pergeseran preferensi pangan masyarakat terhadap *healthy food* untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengelola ketahanan pangan rumah tangga, menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan produk pangan, menata distribusi pangan,

mensosialisasikan program B2SA dan mengendalikan stabilitas harga pangan.

Melalui kebijakan pengembangan logistik pangan, diharapkan dapat menciptakan kepastian harga pasar, informasi pasokan yang tersedia, transparansi biaya transaksi, dan konsumsi pangan sehat bernutrisi. Sebagai tahap awal pengembangan sistem logistik pangan Kabupaten Bandung, pemerintah menyusun arah kebijakan prioritas program/kegiatan untuk Tahun 2022, antara lain:

- a) Penguatan sub-sistem produksi pangan melalui penguatan teknologi produksi dan pendampingan desiminasi teknologi dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
- b) Penguatan kelembagaan simpul pangan tingkat kabupaten.
- c) Penguatan kelembagaan simpul pangan pada lingkungan masyarakat terendah.
- d) Pengembangan kolaborasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi, BULOG, perusahaan layanan pengiriman.
- e) Penguatan database pangan real-time dan faktual.

Industri Pengolahan

Provinsi Jawa Barat memegang peranan yang penting dalam perekonomian nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat memberikan kontribusi tertinggi ketiga sebesar 14,88% setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Porsi terbesar pada PDRB Jawa Barat hampir setengahnya disumbangkan oleh kategori industri pengolahan. Begitu pula Kabupaten Bandung yang ditopang setengahnya oleh sektor ini.

Kurangnya optimalnya industri ini memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama bagi sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja utama dan sektor manufaktur yang merupakan motor utama bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. Keunggulan sektor ini di Kabupaten Bandung terutama terlihat di

industri pangan serta industri dalam industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka (kayu).

Dalam pengembangan industri pangan dapat didorong melalui beberapa upaya. Pertama ketersediaan dan penyaluran bahan baku industri pangan melalui dinas terkait, hal ini untuk mengoptimalkan keberlanjutan produksi. Kedua, SDM yang kompeten diperlukan untuk menunjang industri pangan melalui diklat dan pendampingan serta berkoordinasi dengan lembaga pendidikan terkait. Ketiga dari sisi kemitraan juga harus diperkuat melalui lembaga litbang dan perguruan tinggi sehingga implementasi inovasi dan teknologi industri pangan dapat ditingkatkan, dengan tujuan adanya alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar. Keempat efisiensi melalui proses pengolahan dan penjaminan mutu juga pengembangan sistem logistik. Kelima adalah promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar Kabupaten Bandung, dengan harapan jangkauan pasar semakin lebar dan peningkatan *output* industri dalam jangka panjang. Keenam dan terakhir adalah memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah.

Kabupaten Bandung di tingkat provinsi juga unggul dalam industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka (kayu). Pengembangan industri ini dapat dilakukan dengan beberapa program. Pertama pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK). Kedua, mendukung ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan hilir. Ketiga, meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain serta memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan *furniture*. Keempat, memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor dan terakhir adalah mendukung promosi dan perluasan pasar guna

mendorong tumbuhnya industri ini di Kabupaten Bandung.

Sedangkan hasil tinjauan RPJMD menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bandung sebesar 53%. Peranan pemerintah Kabupaten Bandung dalam intervensi sektor industri pengolahan difokuskan pada industri kecil, terutama pada UMKM yang disinergiskan oleh koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat. Dalam skenario ini, peranan pemerintah adalah menjaga kontinuitas produksi dan mengembangkan diferensiasi produk, membangun rintisan end-to-end system dalam pemasaran produk UMKM berbasis digital, serta mengembangkan pusat inovasi dan inkubasi bisnis menjadi kerangka prioritas ketahanan ekonomi lokal.

Skenario penguatan UMKM dan koperasi terdiri atas struktur prioritas kebijakan yang saling berkesinambungan. Keempat prioritas kebijakan ini menjadi penunjang dalam pembentukan klaster-klaster industri. Prioritas kebijakan penguatan UMKM dan koperasi terdiri atas:

- ii. Kontinuitas produksi dan diferensiasi produk UMKM, yang diwujudkan dengan:
 - i. Pendampingan dan konsultasi pelaku UMKM;
 - ii. Fasilitasi penguatan kontinuitas ketersediaan sarana produksi;
 - iii. Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder meliputi: perguruan Tinggi, perbankan atau institusi lainnya sebagai upaya pendampingan diferensiasi produk dan teknologi produksi;
 - iv. Pengembangan standar dan protokol kesehatan dalam produksi produk; dan,
 - v. Fasilitasi sertifikasi produk.
- iii. Pembangunan sistem *end-to-end business*, yang diwujudkan dengan:

- i. Pengembangan digitalisasi pemasaran produk UMKM (e-Commerce);
- ii. Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan KADIN, perbankan atau institusi lainnya sebagai upaya pendampingan pemasaran;
- iii. Penguatan branding produk UMKM;
- iv. Pengembangan koperasi produksi digital;
- iv. Penguatan Pemodalannya UMKM, yang diwujudkan dengan:
 - i. Fasilitasi pengembangan Kerjasama perkreditan (business matching) dengan perbankan;
 - ii. Penguatan lembaga BPR sebagai lembaga penyalur kredit usaha kecil;
 - iii. Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan KADIN atau Lembaga pemodalannya lainnya.
- v. Pengembangan pusat inovasi dan inkubasi bisnis, yang diwujudkan dengan:
 - i. Pendampingan dan konsultasi pelaku UMKM (inkubasi bisnis);
 - ii. Pemetaan pengembangan business matching;
 - iii. Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau institusi lainnya sebagai transfer teknologi produksi dan diferensiasi produk, pemasaran, dan branding;
 - iv. Penguatan database UMKM; dan
 - v. Penelitian dan pengembangan produk berorientasi ekspor dan substitusi impor.

Perdagangan

Sektor perdagangan masih menghadapi permasalahan pokok yaitu belum efektif dan efisien distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis; belum efektif dan efisien pelaksanaan pengembangan distribusi dan pemasaran produk dalam negeri; belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan; dan belum

optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan.

Masalah pertama berujung pada penjualan di atas harga eceran tertinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya *Parton-Client* (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *market power* oleh pelaku usaha tertentu.

Adanya inovasi pemasaran juga menjadi suatu kebutuhan, apalagi masa pandemi yang dihadapi oleh pelaku perdagangan membuat ruang gerak untuk berusaha cukup terbatas. Penurunan omset yang terjadi harus direspon dengan optimalisasi penggunaan media sosial sebagai platform pemasaran produk. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui dinas terkait dapat membantu pendampingan dalam *branding* usaha yang akan dipasarkan di berbagai media sosial. Selain itu bagi masyarakat yang masih awam dapat dibimbing untuk pembuatan *platform* Instagram dan Facebook yang merupakan dua media sosial besar yang paling banyak digunakan oleh masyarakat secara umum di berbagai usia. Dengan penggunaan media sosial diharapkan jangkauan pasar lebih luas.

Dalam memaksimalkan fungsi pengawasan pelaku usaha dan pergudangan di Kabupaten Bandung, dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai satu-satunya otoritas persaingan usaha di Indonesia yang bertugas melaksanakan advokasi kebijakan persaingan usaha. Contohnya, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang membuat nota kesepakatan antara KPPU dan Pemprov Sulsel tentang

sinergitas dalam bidang persaingan usaha dan pengawasan kemitraan. Nota kesepakatan tersebut bisa menjadi payung untuk ditindaklanjuti di daerah. Khusus di Luwu Utara, melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM), sudah ada kemitraan dengan retail modern antara lain Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret sejak 2018 untuk memasarkan produk UMKM. Sebab UMKM harus senantiasa dihidupkan sebagai basis usaha masyarakat.

Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata berbasis desa menjadi sangat relevan karena berbagai keunggulan yang dimilikinya. Namun, selain memiliki beberapa faktor pendukung, terdapat hambatan, salah satunya adalah belum siapnya desa untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Desain program Pariwisata Berkelanjutan Mandiri Bersama Mandiri dapat menjadi alternatif pengembangan pariwisata berbasis desa. Program ini bertujuan untuk merangsang pembangunan ekonomi desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha pariwisata dan meningkatkan pendapatan melalui pengenalan kegiatan kreatif dan produktif di sektor pariwisata.

Pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang mengundang semua pihak-terutama anggota masyarakat untuk mengelola sumber daya dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung penting lainnya. Program ini sejalan dengan sektor pariwisata dengan usaha jasa yang beragam, tersedia di desa-desa terpencil, juga tersebar yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program ini hadir juga karena salah satu masalah yang dihadapi sektor pariwisata Kabupaten Bandung adalah sebagian besar masyarakat dan wirausahawan desa tidak memiliki kapasitas untuk mengelola dan memahami potensi wisata mereka.

Program ini dapat dilaksanakan dari tahap pemilihan desa wisata yang akan dikembangkan, melibatkan kerja sama tim konsultan independen berdasarkan kriteria kuantitas dan kualitas daya tarik pariwisata, baik alam dan budaya dan mendukung kondisi sosial serta organisasi. Dalam program ini memungkinkan hasil pembagian keuntungan yang adil melalui kerja sama kolektif dalam sektor pariwisata. Dalam memenuhi peran mereka, kelompok kerja akan menerima arahan dari kelompok yang mengatur dan didukung oleh fasilitator dan konsultan.

Kemitraan merupakan pola pengembangan yang umum bagi pemerintah Kabupaten Bandung dalam memajukan sektor pariwisata, sudah banyak dilakukan di beberapa objek wisata. Akan tetapi, desain kemitraan perlu inovasi agar terjadi penguatan sistem pengembangan sektor ini. Hal yang dapat direplikasi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) dengan swasta dalam *Public Private People Partnership* (PPPP) di program desa wisata *homestay*.

Pengembangan desa *homestay* dinilai sebagai terobosan yang akan menjadi andalan ke depan, baik untuk masyarakat kelas menengah atas maupun bawah dan warga sekitar. Dewasa ini *homestay* memang mulai mengalami perubahan sangat positif. Mulai dari kualitas pelayanan, bangunan, lokasi, dan fasilitas dengan konsep pariwisata yang bergeser menjadi *quality* dan *sustainable tourism*. Kemparekraf bekerja sama dengan Sarana Multi Finance (SMF) untuk membuka akses pembiayaan khusus bagi *homestay* dengan kriteria dan persyaratan yang cukup ringan.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 menjadi komponen yang juga harus diintervensi dalam rangka pemulihan ekonomi. Kabupaten Bandung memiliki banyak objek wisata, khususnya wisata alam, perlu menerapkan kebijakan

baru berkaitan dengan menghidupkan kembali sektor pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyusun dan menerapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata demi mendorong perubahan layanan kepariwisataan. Layanan ini termasuk di dalamnya adalah perhotelan, restoran, dan jasa-jasa lainnya. Kebijakan lainnya adalah membangun kembali kepercayaan bersama antara pemerintah dan sektor swasta, memperkuat kolaborasi antar stakeholder, dan menata kawasan pariwisata berbasis cleanliness, health, dan safety.

Untuk mampu menguatkan kembali investasi di bidang pariwisata Kabupaten Bandung, ditetapkan 3 (tiga) tahapan prioritas kebijakan yang mampu menunjang penguatan investasi pariwisata. Ketiga prioritas kebijakan tersebut yaitu:

- a) Pengembangan branding wisata
 - i. Penyusunan dan penerapan protokol CHS (cleanliness, health, safety) wisata untuk hotel, restoran, gerai produk wisata, dan kawasan wisata;
 - ii. Pengembangan branding destinasi wisata;
 - iii. Promosi wisata; dan
 - iv. Penguatan kerjasama dan keterlibatan komunitas wisata, masyarakat, dan institusi lainnya dalam branding wisata.
- b) Penataan Kawasan wisata
 - i. Penguatan keterlibatan dan kerjasama dengan komunitas wisata, masyarakat, dan institusi (PTPN, Perhutani) atau pihak swasta lainnya dalam penataan kawasan wisata;
 - ii. Penataan lingkungan wisata.
 - iii. Penataan gerai produk wisata.
 - iv. Aktivasi pusat informasi pariwisata.
 - v. Penyusunan masterplan kawasan wisata.
- c) Penguatan investasi pariwisata
 - i. Penyusunan profil dan proposal investasi kawasan unggulan Kabupaten Bandung.
 - ii. Business matching pelaku dan stakeholder wisata.

Tabel 8.1 Strategi dan program utama

| No. | Capaian Utama | Target Indikator | Pre-Adopsi | | Adopsi | | | Pasca Adopsi | Pemangku Kepentingan |
|-----|---|---|------------|------|--------|------|------|--------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Peningkatan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | | | | | | | | |
| | a. Perlindungan lahan pertanian produktif; | Penguatan KP2B, pengembangan simpul pangan, penguat-an KST Arjasari; | | | | | | | Distan, Dispakan, DLH, DPUTR, Dishub Bappeda |
| | b. Pengembangan logistik pangan/simpul pangan; | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan kawasan pertanian terpadu di Bandung Selatan; | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan pusat penelitian dan teknologi pertanian. | | | | | | | | |
| 2. | Peningkatan PDRB sektor industri pengolahan | | | | | | | | |
| | a. Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu; | Penguatan SPAL, peningkatan jumlah UKM dan koperasi, peningkatan, p | | | | | | | Disperin, Diskopukm, DPUTR, Dishub, Bappeda |
| | b. Penguatan UMKM dan koperasi; | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan kawasan industri terintegrasi di Bandung Tengah; | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan industri hulu dan peningkatan kualitas industri hilir berbasis pertanian; | | | | | | | | |
| 3. | Peningkatan PDRB sektor perdagangan | | | | | | | | |
| | a. Peningkatan tata kelola pasar; | Penambahan pasar Pemda, simpul perdagangan, e-commerce. | | | | | | | Disperin, Diskopukm, DPUTR, Dishub, Dikominfo, Bappeda |
| | b. Pembangunan simpul perdagangan/distribusi pangan; | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan kawasan perdagangan terpadu di Bandung Tengah; | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan e-commerce; | | | | | | | | |
| 4. | Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung | | | | | | | | |
| | a. Peningkatan aksesibilitas wisata; | Akses ke daya tarik wisata, jumlah daya tarik wisata, kerjasama cekungan Bandung. | | | | | | | Disparbud, DPMD, Distan, DPMPSTP, Kesbangpol, DPUTR, Dishub, Bappeda |
| | b. Penguatan investasi pariwisata; | | | | | | | | |
| | c. Pengembangan kawasan wisata unggulan Bandung Selatan; | | | | | | | | |
| | d. Pengembangan kerjasama wisata Cekungan Bandung. | | | | | | | | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Bandung, 2021

Bidang Sumber Daya Alam & Investasi BAPPEDA Kab. Bandung



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

Bappeda Kabupaten Bandung